



Pemerintah  
Kota Probolinggo

# Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

**KOTA PROBOLINGGO**

Tahun 2019-2024



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
  - c. bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Daerah adalah Kota Probolinggo.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan dokumen perencanaan daerah tetangga.

#### Pasal 3

RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
- i. BAB IX : PENUTUP;

#### Pasal 4

Penjabaran RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

RPJMD Tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025.

#### Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024.

#### Pasal 7

PD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra PD.

#### Pasal 8

PD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDALITBANG dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### MASA BERLAKU

#### Pasal 10

RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan Walikota terpilih periode 2019-2024.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Juli 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

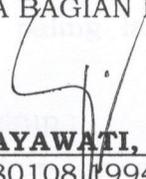
Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 172-6/2019

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108199403 2 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dasar Pemikiran :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik".

2. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip :

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Probolinggo, juga memperhatikan keselarasan dengan dokumen RTRW, integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 42

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	I-1
1.2 DASAR HUKUM .....	I-5
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	I-10
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN .....	I-12
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI .....	II-1
2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah .....	II-1
2.1.2. Topografi.....	II-3
2.1.3. Hidrologi .....	II-4
2.1.4. Klimatologi .....	II-4
2.1.5. Penggunaan Lahan.....	II-5
2.1.6. Kawasan Rawan Bencana .....	II-7
2.1.7. Demografi.....	II-9
2.1.8. Potensi Penggunaan Wilayah .....	II-11
2.2. CAPAIAN KINERJA .....	II-12
2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	II-12
2.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) .....	II-14
2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	II-17
2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-17
2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-26
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM .....	II-32
2.4.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar...II-32	

2.4.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Non Dasar .....	II-93
2.4.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II-173
2.4.4. Fokus Urusan Pemerintahan Penunjang Pemerintahan .....	II-183
2.5. ASPEK DAYA SAING.....	II-188
2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-188
2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-190
2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-196
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU .....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-1
3.1.2 Neraca Daerah .....	III-11
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU .....	III-30
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-30
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	III-50
3.3 KERANGKA PENDANAAN .....	III-53
3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .....	III-53
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan .....	III-63
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN .....	IV-1
4.2 ISU STRATEGIS.....	IV-8
4.2.1 Isu Internasional .....	IV-8
4.2.2 Isu Nasional.....	IV-37
4.2.3 Isu Regional Provinsi Jawa Timur .....	IV-43
4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan.....	IV-46
4.2.5 Perumusan Isu Strategis Kota Probolinggo .....	IV-66

<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1	VISI .....	V-1
5.2	MISI.....	V-5
	MISI I PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING BERBASIS SEKTOR POTENSIAL .....	V-9
	MISI II SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS .....	V-9
	MISI III INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN .....	V-10
	MISI IV TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK .....	V-11
5.3	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-12
5.3.1	Tujuan dan Sasaran Misi I .....	V-13
5.3.2	Tujuan dan Sasaran Misi II.....	V-14
5.3.3	Tujuan dan Sasaran Misi III.....	V-15
5.3.4	Tujuan dan Sasaran Misi IV.....	V-16
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI-2
6.2	ARAH KEBIJAKAN .....	VI-22
6.3	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI-33
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1</b>	
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>VIII-1</b>

<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>IX-1</b>
9.1 PEDOMAN TRANSISI.....	IX-1
9.2 KAIDAH PELAKSANAAN .....	IX-2
9.3 PENUTUP .....	IX-4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Periode Tahun 2019-2024 yakni **Habib Hadi Zainal Abidin dan M Soufis Subri** yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada Rabu 30 Januari 2019 harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya

merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDG`s, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kota Probolinggo juga harus diakomodir dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Mengacu terhadap tahun perencanaan, RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan tahapan ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025. Artinya dokumen RPJMD Kota Probolinggo pada

periode ini merupakan tahapan terakhir dari capaian RPJPD Kota Probolinggo, sehingga pada periode ini Pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPJMD Tahun 2019-2024. Namun juga memiliki misi memastikan seluruh tujuan RPJPD dioptimalkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditegaskan melalui Permen Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan RPJMD Kota Probolinggo harus menggunakan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan pertama yakni "**Pendekatan Teknokratik**" yang dimaksud adalah dimana dalam penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 direpresentasikan melalui telah tersusunya Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Probolinggo yang disusun lebih dengan pendekatan akademis dan ilmiah, sebagai upaya dalam melihat objektivitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kota Probolinggo.

Pendekatan kedua yakni "**Pendekatan Partisipatif**" yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD, segala proses dan tahapannya dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* atau pemangku kepentingan terkait di lingkungan Kota Probolinggo. Praktisnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dapat direpresentasikan melalui *stakeholder* yang terlibat yang meliputi Pemerintah Daerah Kota

Probolinggo sendiri, Akademisi, masyarakat Kota Probolinggo, Komunitas, maupun masyarakat ekonomi atau *private sector* di Kota Probolinggo.

Pendekatan ketiga yakni "**Pendekatan Politis**" yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan proses penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kaitanya dengan tahapan ini, secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah diterjemahkan dalam Dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 melalui Tujuan dan Sasaran yang direpresentasikan juga dengan indikatornya. Penerjemahan Visi dan Misi Wali Kota Probolinggo melalui tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan agar, berhasil atau tidaknya pemerintah dapat terukur melalui IKU atau indikator tujuan. Selain itu tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo yang diterjemahkan melalui visi dan misi Wali Kota terpilih juga menjadi pedoman perangkat daerah dalam menentukan program pembangunan.

Terakhir pendekatan keempat yakni "**Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up**", yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, dan Daerah Kabupaten/Kota. Praktisnya penetapan RPJMD Kota Probolinggo nanti akan melalui tahapan-tahapan yang meliputi Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Selanjutnya dengan disusunnya dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 ini, nantinya akan menjadi dokumen rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai acuan perangkat daerah

dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
24. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5973 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5974 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D) ;
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2) ;
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

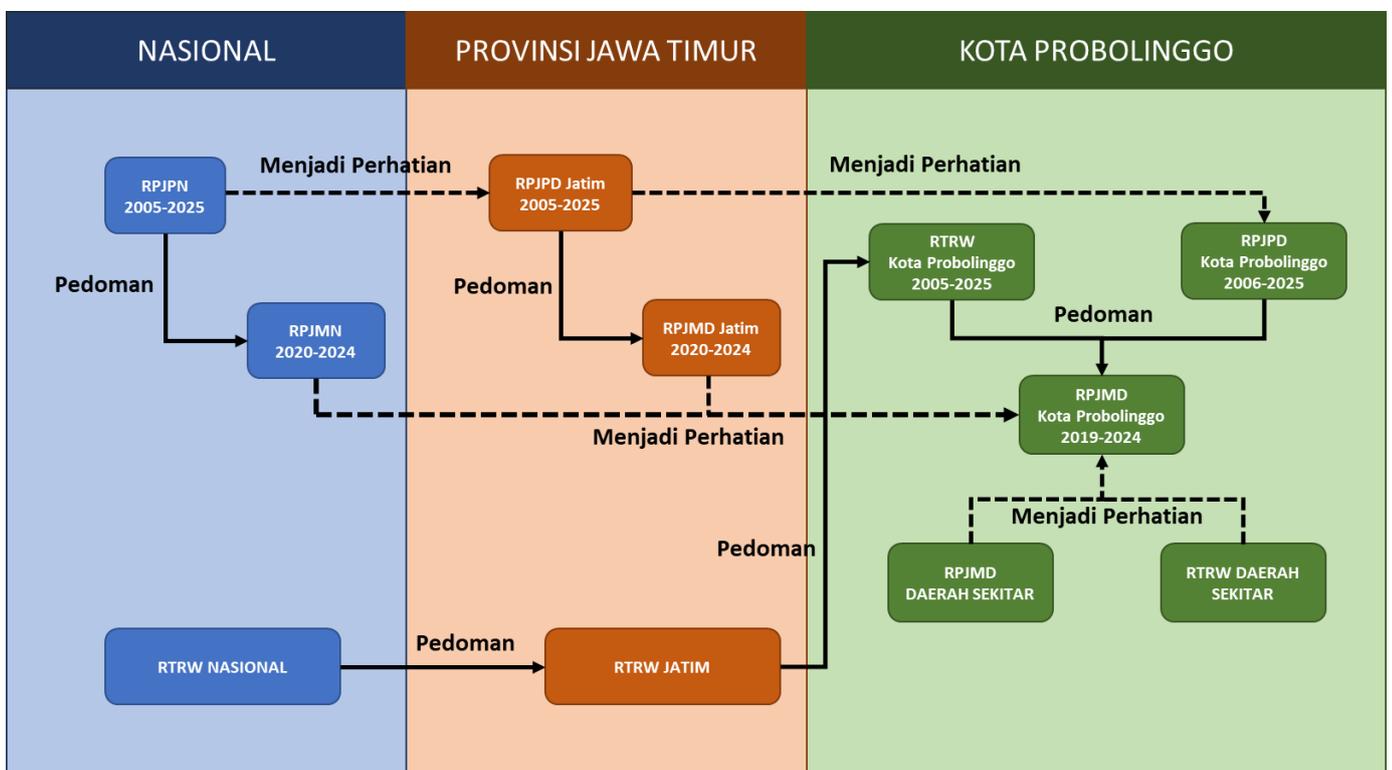
### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Secara tersurat dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebelum disusunnya RPJMD baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota disusun dulu Rancangan Teknokratis RPJMD yang berujung terhadap munculnya isu strategis sebagai pedoman pembangunan daerah.

Tahapan selanjutnya adalah disaat platform politik dari Wali Kota terpilih telah muncul, maka rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan menjadi Dokumen RPJMD. Merujuk terhadap sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kota Probolinggo. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui



gambar berikut.

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Probolinggo memperhatikan dan selaras dengan Rancangan RPJMN Tahun 2019-2024, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari

pembangunan nasional. Pedoman terhadap RPJMD Kota Probolinggo bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2020-2024. Pada prinsipnya, melalui Bappenas arah pembangunan nasional tahun 2020-2024 dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2005-2025 periode ke IV.

2. RPJMD Kota Probolinggo 2019-2024 disusun dengan memperhatikan dan selaras terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023. Acuan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten diruanglingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
3. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 Tahap IV. Dengan demikian dalam penyusunannya, juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 Tahap IV.
4. Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kota Probolinggo, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2019-2024.

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan

Kota Probolinggo tahun 2019-2024. RPJMD Kota Probolinggo juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2005-2025.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2019-2024
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS dan RAPBD Kota Probolinggo Tahun 2019-2021
5. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo tahun 2019-2024

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH**

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- 6.1. Strategi Pembangunan Daerah
- 6.2. Arah Kebijakan
- 6.3. Program Pembangunan Daerah

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB IX PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

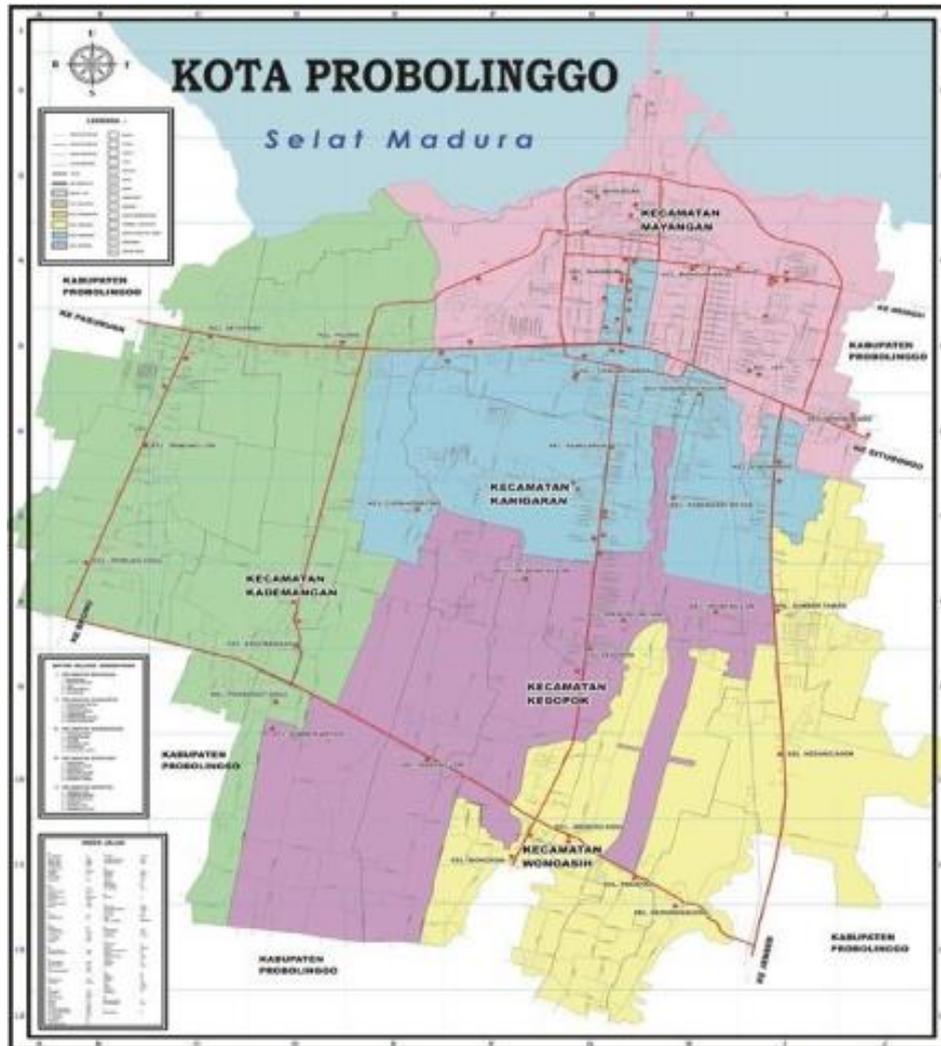
#### **2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI**

##### **2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah**

Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah di wilayah bagian utara Provinsi Jawa Timur. Letak Kota Probolinggo berada pada 7° 43' 41" sampai dengan 7° 49' 04" Lintang Selatan dan 113° 10' sampai dengan 113° 15' Bujur Timur dengan luas wilayah 56.667 Km<sup>2</sup>. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi:

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo



**Gambar 2. 1 : Peta Kota Probolinggo**

Luas wilayah Kota Probolinggo adalah 56,667 km<sup>2</sup>. Dan secara administrasi Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Adapun pembagian luas wilayah, jumlah Kelurahan, Jumlah RT dan RW dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi Tahun 2017**

<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS WILAYAH (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>JUMLAH KELURAHAN</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
1. Kademangan	12,754	6	33	175
2. Kedopok	13,624	6	35	143
3. Wonoasih	10,981	6	39	189
4. Mayangan	8,655	5	42	258
5. Kanigaran	10,653	6	51	260
<b>Jumlah</b>	<b>56,667</b>	<b>29</b>	<b>200</b>	<b>1,025</b>

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka, 2018

### 2.1.2. Topografi

Kondisi topografi Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 ≤ 50 mdpl. Topografi di Kota Probolinggo dikelompokkan berada pada ketinggian 0 – 25 mdpl; ketinggian 25 – 50 mdpl; ketinggian > 50 mdpl. Semakin ke selatan wilayah Kota Probolinggo memiliki ketinggian diatas permukaan laut yang semakin besar. Namun seluruh wilayah Kota Probolinggo didominasi ketinggian 0 – 25 seluas 3.156,55 mdpl. Sedangkan berdasarkan kelerengan wilayah Kota Probolinggo memiliki permukaan tanah relatif datar dengan kelerengan antara 0 – 8%. Berikut adalah tabel luas topografi Kota Probolinggo:

**Tabel 2. 2 : Luas Topografi Kota Probolinggo**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Topografi</b>			<b>Total (Ha)</b>
		<b>0 – 25 mdpl</b>	<b>25 – 50 mdpl</b>	<b>&gt;50 mdpl</b>	
1	Kademangan	824,91	420,81	29,68	1.275,40
2	Wonoasih	164,51	933,59	0,00	1.098,10
3	Mayangan	865,50	0,00	0,00	865,50
4	Kanigaran	1.065,30	0,00	0,00	1.065,30
5	Kedopok	236,34	1.069,50	56,56	1.362,40
	<b>Jumlah</b>	<b>3.156,55</b>	<b>2.423,91</b>	<b>86,24</b>	<b>5.666,70</b>

Sumber: Peta Bakosurtanal

### 2.1.3. Hidrologi

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kota Probolinggo adalah Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah, dan Pancur. Rata-rata panjang aliran sungai mencapai 3,87 km. Sungai dengan aliran terpanjang di Kota Probolinggo adalah Sungai Legundi dengan panjang aliran mencapai 7,42 km sedangkan sungai dengan aliran terpendek di Kota Probolinggo adalah Sungai Kasbah dengan panjang aliran mencapai 2,04 km. Sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengan wilayah. Air sungai di Kota Probolinggo dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan perikanan, hal ini dimungkinkan karena sungai tersebut belum tercemar oleh industri-industri besar yang memang tidak terdapat di Kota Probolinggo. Berikut ini adalah tabel sungai yang ada di Kota Probolinggo:

**Tabel 2. 3 : Rata-rata Panjang Aliran Sungai Kota Probolinggo**

No.	Nama Sungai	Panjang Aliran Sungai (Km)
1.	Sungai Kedunggaleng	5,75
2.	Sungai Umbul	5,14
3.	Sungai Banger	2,87
4.	Sungai Legundi	7,42
5.	Sungai Kasbah	2,04
6.	Sungai Pancur	4,24

*Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka, 2018*

### 2.1.4. Klimatologi

Pada Umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan tertinggi di bulan Januari sebesar 411 mm sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari selama 13 hari hujan. Curah hujan terendah pada bulan Agustus, dengan temperatur terendah mencapai 26°C dan tertinggi mencapai 32°C.

**Tabel 2. 4: Data Klimatologi Kota Probolinggo**

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Stasiun Hujan	unit	4	4	4	4
Jumlah Bulan Hujan	bulan	10	10	8	12
Jumlah Bulan Tanpa Hujan	bulan	2	2	4	0
Rata-rata Curah Hujan	mm	1 867,00	784,50	1 231,00	2 044,25
Rata-rata Hari Hujan	hari	96,50	53,25	56,50	91,00
Rata-rata Curah Hujan per hari setahun	mm/hari	5,12	2,15	3,37	5,59
Rata-rata Curah Hujan per hari Hujan	mm/hari	19,35	14,73	21,78	22,46

Sumber: BPS Kota Probolinggo

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim penghujan berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan musim kemarau berada pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya. Kota Probolinggo juga dipengaruhi terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan “Angin Gending”.

#### **2.1.5. Penggunaan Lahan**

Pola penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan wilayah pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan wilayah di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut. Penggunaan lahan di Kota Probolinggo

terdiri dari lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian meliputi lahan sawah sebesar 1.822 Ha atau 32,3% dari luas wilayah Kota Probolinggo dan bukan lahan sawah sebesar 928,33 Ha atau 16,4% dari seluruh wilayah Kota Probolinggo. Sedangkan bukan lahan pertanian adalah 2.906,37 Ha atau 51,3%. Berikut ini adalah tabel penggunaan lahan Kota Probolinggo di setiap kecamatan pada tahun 2017:

**Tabel 2. 5: Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas Pembagian Lahan (Ha)
1.	<b>Kademangan</b>	<b>1.275,36</b>
	- Lahan Sawah (Pertanian)	567,00
	- Bukan Lahan Sawah (Pertanian)	129,84
	- Lahan Bukan Pertanian	578,52
2.	<b>Kedopok</b>	<b>1362,40</b>
	3. Lahan Sawah (Pertanian)	417,00
	4. Bukan Lahan Sawah (Pertanian)	433,53
	5. Lahan Bukan Pertanian	511,87
3.	<b>Wonoasih</b>	<b>1.098,09</b>
	6. Lahan Sawah (Pertanian)	428,00
	7. Bukan Lahan Sawah (Pertanian)	234,60
	8. Lahan Bukan Pertanian	435,49
4.	<b>Mayangan</b>	<b>865,54</b>
	9. Lahan Sawah (Pertanian)	128,00
	10. Bukan Lahan Sawah (Pertanian)	73,60
	11. Bukan Lahan Pertanian	663,94
5.	<b>Kanigaran</b>	<b>1.065,31</b>
	12. Lahan Sawah (Pertanian)	292,00
	13. Bukan Lahan Sawah (Pertanian)	56,76
	14. Bukan Lahan Pertanian	716,55

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2017



**Gambar 2. 2: Penggunaan Lahan Kota Probolinggo**

### **2.1.6. Kawasan Rawan Bencana**

Kota Probolinggo terdapat beberapa daerah yang rawan bencana. Bencana-bencana yang sering terjadi di Kota Probolinggo diantaranya yaitu kebakaran, angin gending, abrasi pantai, banjir, dan banjir lahar dingin. Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang rawan terkena bencana di Kota Probolinggo:

- a. Rawan kebakaran meliputi: Kelurahan Mayangan, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Jati, Kelurahan Kebonsari Lor, Kelurahan Tisnowegaran, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Pilang, dan Kelurahan Curahgrinting.
- b. Rawan angin gending meliputi: Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Sumbertaman, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Kedopok, Kelurahan Kareng Lor, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kademangan, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Pohsangit Kidul.



### 2.1.7. Demografi

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 6: Komposisi Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	224.235	225.754	226.276	232.285	235.440
2.	Rata-rata kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> )	3.957	3.984	3.993	4.099	4.155
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,4	0,67	0,23	2,65	1,35
4.	Penduduk Menurut:					
	a. Jenis Kelamin					
	- Laki-laki	112.080	112.889	112.275	115.424	116.887
	- Wanita	112.155	112.865	114.001	116.861	118.553
	b. Sex ratio	99,93	100,02	98,49	98,77	98,59

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo

Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 235.440 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun bervariasi antara 2,65% hingga 1,53%, Sex ratio mencapai angka rata-rata dibawah 100%, pada akhir tahun 2017 sebesar 98,59 persen artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Ratio jenis kelamin kurang dari seratus ini menandakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki.

Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Probolinggo.

Gambaran mengenai komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail tersaji pada grafik berikut:

**Tabel 2. 7: Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2014 – 2017**

No	Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017
1	Tidak / Belum Sekolah	47.587	47.714	47.988	49.265
2	Belum Tamat SD	18.745	20.331	19.586	20.436
3	Tamat SD	56.950	56.531	56.946	56.286
4	Tamat SLTP	30.331	29.871	31.189	31.625
5	Tamat SLTA	55.231	54.894	58.453	59.284
6	Diploma I / II	1.503	1391	1.356	1.299
7	Diploma III	2.381	2.446	2.596	2.649
8	Sarjana (S1)	12.124	12.154	13.122	13.513
9	Sarjana (S2)	887	927	1.030	1.061
10	Sarjana (S3)	15	17	19	22
	<b>Jumlah</b>	<b>225.754</b>	<b>226.276</b>	<b>232.285</b>	<b>235.440</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, Juni 2018

Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan selama kurun waktu Tahun 2014 - 2017 mengalami peningkatan untuk lulusan SLTP, SLTA, Diploma III, Sarjana sampai dengan tingkat doktor, hal ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia (pendidikan) penduduk Kota Probolinggo semakin

meningkat dan berkualitas. Dan Kota Probolinggo memiliki daya tarik tersendiri guna peningkatan layanan jasa pendidikan formal maupun informal.

#### **2.1.8. Potensi Penggunaan Wilayah**

Kota Probolinggo merupakan pusat SWP Probolinggo-Lumajang, yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Ditinjau dari konstelasi regional, berdasarkan potensi perkembangan perkotaan di Jawa Timur, Kota Probolinggo termasuk Perkotaan Menengah. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan Kota Probolinggo diarahkan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, antara lain sebagai berikut:

- a. Pusat Kota berpusat di Kanigaran meliputi : Kelurahan Tisnonegaran, Kelurahan Curah Grinting, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Sukoharjo; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, jalur hijau dan kawasan hankam;
- b. Sub Pusat Kota A berpusat di Mayangan meliputi : Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Jati, Kelurahan Wiroborang; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, fasilitas umum, industri, pergudangan, parkir truk, kawasan lindung mangrove, pengembangan pelabuhan, permukimanelayan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), jalur hijau, pariwisata dan sarana olahraga;
- c. Sub Pusat Kota B berpusat di Kademangan meliputi : Kelurahan Kademangan, Kelurahan Pilang, Kelurahan

Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Pohsangit Kidul; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, pertanian, industri pergudangan, perumahan, fasilitas umum, jalur hijau dan terminal regional;

- d. Sub Pusat Kota C berpusat di Kedopok meliputi : Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Kareng Lor, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Kedopok; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, agro industri, industri kecil, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, perumahan, jalur hijau;
- e. Sub Pusat Kota D berpusat di Wonoasih meliputi : Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Sumber Taman; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, perumahan, fasilitas pendidikan, jalur hijau, pertanian dan sarana olahraga.

## **2.2. CAPAIAN KINERJA**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

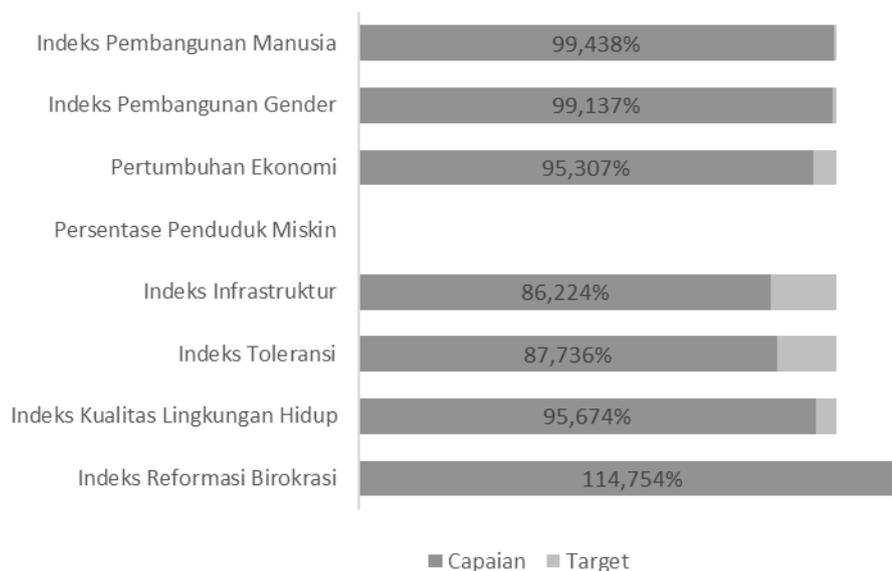
Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 terdapat Indikator-Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan penyelenggaraan sub urusan. Indikator kinerja dimaksud dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan di Kota Probolinggo, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun realisasi capaian pelaksanaan IKU RPJMD dimaksud sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 8: Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2015-2017**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Capaian			
			2018	2019	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72.5	73	71,01	71,5	72,09	72,53
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96.76	96.765	96,65	96,11	96,07	95,56
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.13	6.18	5,86	5,88	5,88	5,89
4	Persentase Penduduk Miskin	%	22,8	n/a	8,17	7,97	7,84	7,20
5	Indeks Infrastruktur	Indeks	76.7	80.36	72,08	74,01	75,6	69,29
6	Indeks Toleransi	Indeks	4.8	5.3	2,32		4,65	4,65
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59.18	62.78	53,18	57,04	58,80	59,49
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58	61	N/A	N/A	62,66	70

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dan LKPJ AMJ Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

Tabel 2.8 menunjukkan capaian IKU Kota Probolinggo Tahun 2018 sudah mendekati target tahun 2019, kondisi ini memungkinkan untuk tercapai di tahun 2019. Namun ada 1 indikator yang sudah mampu melebihi target 2019, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Gap expectation capaian Tahun 2018 terhadap target tahun 2019 dapat dilihat di grafik berikut:



**Gambar 2. 4: Gap Expectation Capaian IKU Tahun 2018 terhadap Target Tahun 2019**

### 2.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 terdapat Indikator-Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terkait dengan penyelenggaraan sub urusan. Indikator kinerja dimaksud dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan di Kota Probolinggo, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun realisasi capaian pelaksanaan IKD RPJMD dimaksud sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 9: Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2015-2017**

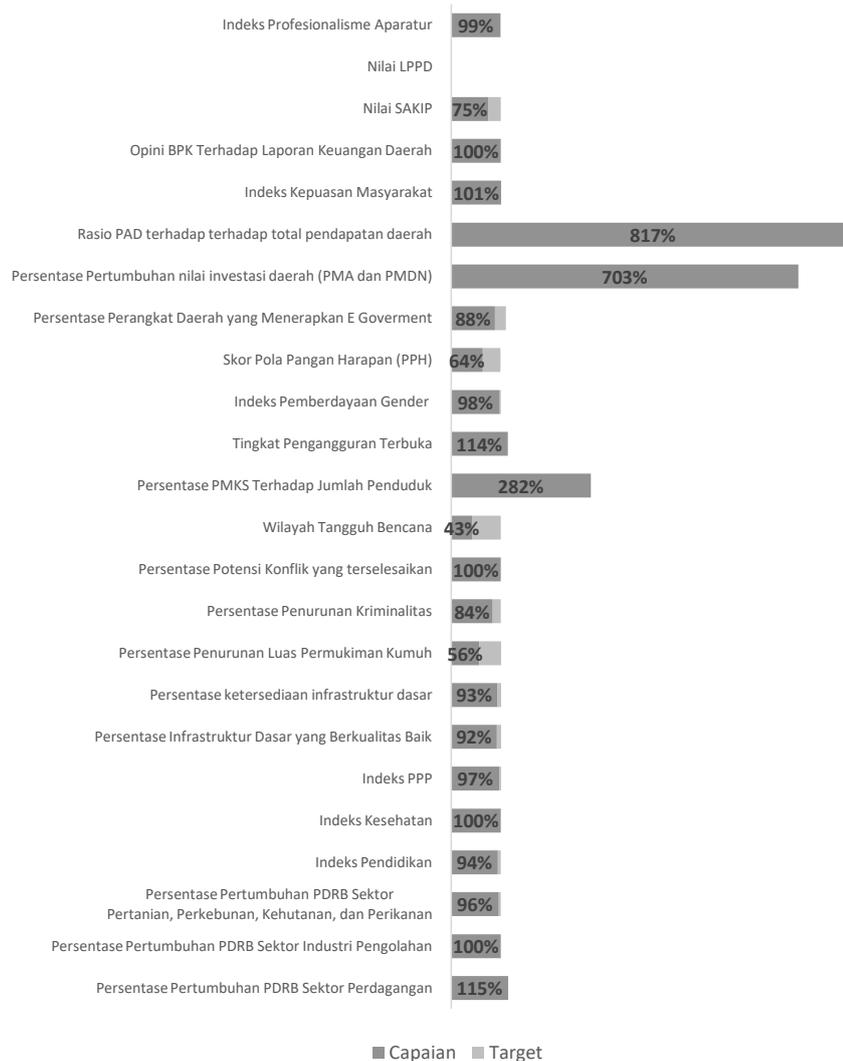
No,	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Capaian			
			2018	2019	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	8,50	8,75	12,49	12,96	10,06	10,06
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	7,50	7,75	11,01	7,47	7,74	7,74
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	%	7,00	7,25	9,35	7,89	6,96	n/a
4	Indeks Pendidikan	Indeks	0,69	0,70	0,65	0,66	0,66	0,67
5	Indeks Kesehatan	Indeks	0,77	0,77	0,76	0,77	0,77	0,77
6	Indeks PPP	Indeks	0,75	0,76	0,72	0,72	0,74	
7	Persentase Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Baik	%	94,17	96,00	79,21	81,66	88,71	69,21
8	Persentase ketersediaan infrastruktur dasar	%	72,21	76,24	67,92	69,41	71,27	69,36
9	Persentase Penurunan Luas Permukiman Kumuh	%	20,00	25,00	N/A	10,72	14,09	n/a
10	Persentase Penurunan Kriminalitas	Persen	22,50	25,00	0,07	0,14	21,02	n/a

No,	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		Capaian			
			2018	2019	2015	2016	2017	2018
11	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a
12	Wilayah Tangguh Bencana	Jumlah	9,00	14,00	4,00	5,00	6,00	n/a
13	Persentase PMKS Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,58	0,34	2,62	1,60	0,96	n/a
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,20	3,00	4,01	3,75	3,42	3,64
15	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67,71	68,15	66,28	66,71	66,69	66,53
16	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,00	90,00	89,40	89,67	57,19	90,15
17	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E Government	%	40,00	42,50	32,50	35,00	37,50	n/a
18	Persentase Pertumbuhan nilai investasi daerah (PMA dan PMDN)	%	8,00	8,00	39,59	11,23	56,20	n/a
19	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	Skor	1,37	2,33	N/A	N/A	19,03	n/a
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80,00	80,50	80,00	79,30	81,25	81,5
21	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Skor	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
22	Nilai SAKIP	Rasio	75,00	80,00	44,05	51,11	60,14	85
23	Nilai LPPD	Skor	3,40	3,50	3,209	3,244	N/A	3,25
24	Indeks Profesionalisme Aparatur	%	88,00	88,00	N/A	N/A	87,04	62

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dan LKPJ AMJ Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

Tabel 2.9 menunjukkan capaian IKD Kota Probolinggo Tahun 2017 sudah mendekati target tahun 2019, kondisi ini memungkinkan untuk tercapai di tahun 2019, meskipun terdapat beberapa Indikator yang masih jauh dari target 2019. Namun ada 10 indikator

yang sudah mampu memenuhi target 2019. Jika dibandingkan dengan 14 indikator lain yang belum memenuhi target, maka untuk mencapai target 2019 optimis dapat tercapai di akhir periode RPJMD. Gap expectation capaian Tahun 2017 terhadap target tahun 2019 dapat dilihat di grafik berikut:



**Gambar 2. 5: Gap Expectation Capaian Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2019**

## **2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **2.3.1.1. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

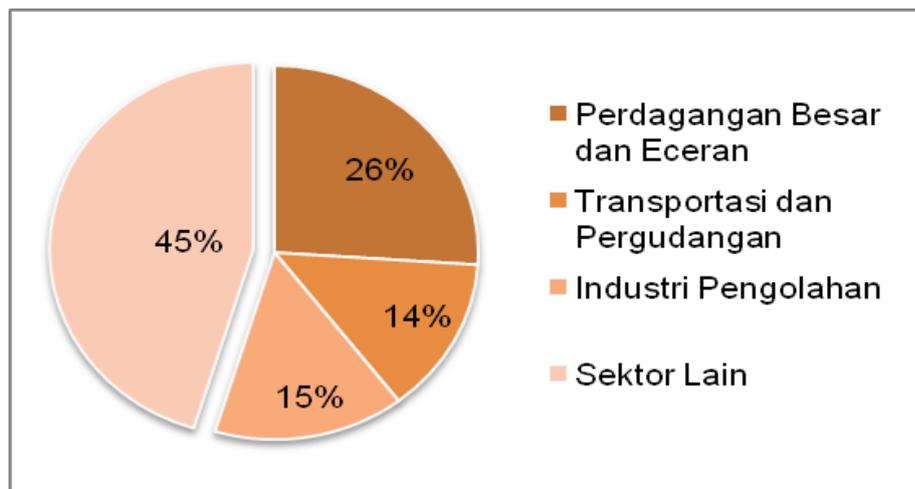
**Tabel 2. 10: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar harga Konstan Kota Probolinggo Tahun 2015-2018 (dalam juta)**

<b>Lapangan Usaha Industry</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	425 323,60	443 796,13	455 966,89	451 980,72
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1 105 873,91	1 141 326,76	1 202 832,18	1 274 089,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	8 054,95	8 347,73	8 652,40	8 941,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	15 788,81	16 513,99	17 591,70	18 351,06
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	400 900,29	426 797,11	461 008,62	494 665,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1 602 241,06	1 710 435,04	1 825 584,75	1 945 884,93
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	899 346,65	959 822,56	1 027 953,74	1 103 005,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	215 552,58	234 347,11	254 924,10	274 999,43
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	388 243,05	417 865,01	448 355,98	479 632,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	399 467,06	427 174,08	441 967,37	464 765,57
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	204 321,54	216 887,61	227 658,89	242 186,41
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	42 472,37	44 698,42	47 401,25	50 858,57
N					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	322 738,02	338 439,70	349 937,79	364 732,84
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	310 861,08	329 264,05	344 394,18	363 396,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and</i>	58 439,20	62 102,95	65 551,23	70 619,99

Lapangan Usaha Industry		2015	2016	2017	2018
	Social Work Activities				
R	Jasa lainnya/Other Services Activities	229 130,58	240 472,54	250 834,47	263 705,90
S					
T					
U					
<b>Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product</b>		<b>6 628 754,75</b>	<b>7 018 290,81</b>	<b>7 430 615,53</b>	<b>7 871 816,68</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada diatas, sektor terbesar pembentuk PDRB Kota Probolinggo adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Repasasi Mobil dan Sepeda Motor dengan angka mencapai Rp. 1.945.884.930.000,- pada tahun 2018, disusul oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 1.274.089.370.000,- pada Tahun 2018 serta Transportasi dan Pergudangan dengan angka 1.103.005.740.000,- pada tahun 2018. 3 besar pembentuk struktur perekonomian Kota Probolinggo dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

**Gambar 2. 6: 3 Besar Pembentuk Struktur Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2017**

**Tabel 2. 11: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar harga Berlaku Kota Probolinggo Tahun 2015-2018 (dalam juta)**

<b>Lapangan Usaha Industry</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	550 781.76	594 248.64	635 562,60	659 674,65
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0	0	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1 269 479.81	1 364 366.09	1469 934,15	1 596 901,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	9 067.97	9 832.57	11 487,78	12 329,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	18 036.52	19 434.30	21 026,58	22 120,17
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	481 159.47	541 539.10	592 638,97	640 544,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1 995 689.40	2 254 297.61	2481 111,50	2 745 397,52
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1 081 576.15	1 169 753.16	1305 844,34	1 427 318,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	295 490.38	338 892.01	376 706,18	410 797,92
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	398 538.40	440 916.01	481 050,31	514 809,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	539 094.26	601 370.33	646 377,68	699 834,69
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	243 997.00	267 702.22	286 057,16	317 946,08
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	51 150.28	55 682.94	60 888,43	67 991,69
N					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	402 911.29	440 047.84	469 281,75	520 170,44
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	392 399.19	420 325.83	448 183,84	479 226,07

Lapangan Usaha Industry		2015	2016	2017	2018
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	71 079.48	77 154.06	84 092,92	90 727,65
R	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	271 652.59	292 546.19	309 790,86	336 650,37
S					
T					
U					
<b>Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product</b>		<b>8 072 103.96</b>	<b>8 888 108.89</b>	<b>9 680 035,06</b>	<b>10 542 442,18</b>

Sumber: Badan Statistik Kota Probolinggo

Berbanding lurus dengan PDRB atas dasar harga konstan, 3 besar penyumbang PDRB Kota Probolinggo masih di dominasi oleh sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar Rp. 2.745.397.520.000,- di tahun 2018. Sektor kedua adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar Rp. 1.596.901.830.000,- pada tahun 2018, serta Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 1.427.318.950.000,- ditahun 2018.

### 2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat

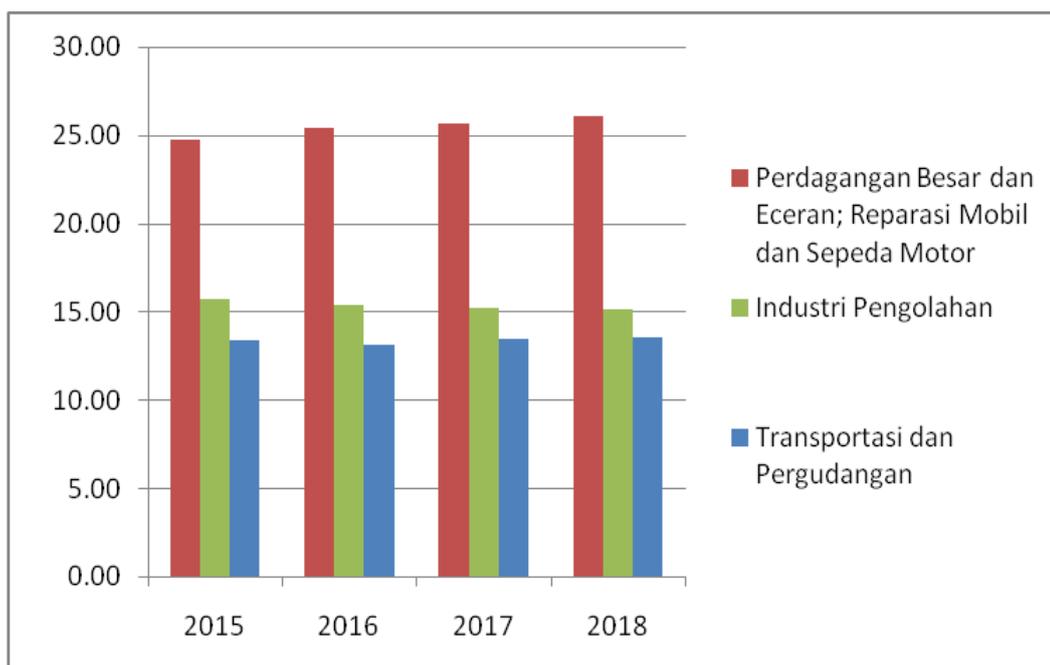
mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 2. 12: Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Probolinggo Tahun 2011-2018**

Lapangan Usaha Industry		2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	3,52	4,34	2,74	- 0,87
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>				
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,51	3,21	5,39	5,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,20	3,63	3,65	3,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	2,45	4,59	6,53	4,32
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	3,83	6,46	8,02	7,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,46	6,75	6,73	6,59
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,79	6,72	7,10	7,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	9,08	8,72	8,78	7,88
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,26	7,63	7,30	6,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,10	6,94	3,46	5,16
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,92	6,15	4,97	6,38

Lapangan Usaha Industry		2015	2016	2017	2018
M	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,12	5,24	6,05	7,29
N					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,55	4,87	3,40	4,23
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,48	5,92	4,60	5,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,76	6,27	5,55	7,73
R	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,85	4,95	4,31	5,13
S					
T					
U					
<b>Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product</b>		<b>5,86</b>	<b>5,88</b>	<b>5,88</b>	<b>5,94</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

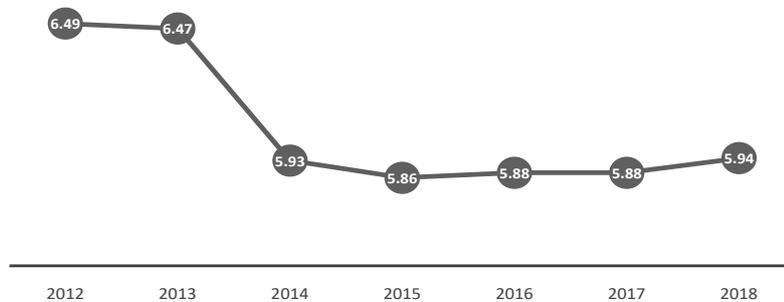


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

**Gambar 2. 7: 3 Besar Pertumbuhan PDRB Sektor Dominan Kota Probolinggo Tahun 2015-2018**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan

produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2017 sebesar 5,88 persen, terhitung konstan dibanding tahun 2016 yang dengan capaian 5,88 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Tahun 2017 dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,06 persen, Disusul Industri Pengolahan sebesar 7,63 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,96 persen.



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo**

**Gambar 2. 8: Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo 2012-2017**

### **2.3.1.3. Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna

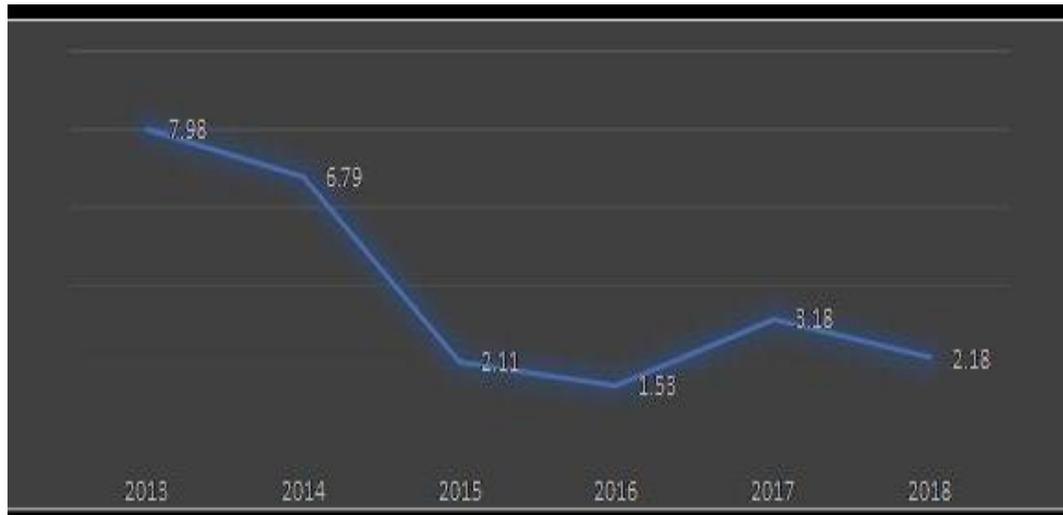
dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun).

Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional.

**Tabel 2. 13: Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2013-2017**

Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	1,02	0,95	-0,17	0,42	1,13
Pebruari	0,86	0,02	-0,42	-0,08	-0,06
Maret	0,92	0,16	0,02	-0,08	-0,29
April	-0,82	-0,14	0,36	-0,16	0,44
Mei	-0,07	0,12	0,44	0,15	0,68
Juni	0,93	0,47	0,46	0,35	0,54
Juli	3,13	0,99	0,7	0,63	-0,07
Agustus	1,41	0,07	0,02	-0,2	-0,19
September	-0,5	0,04	0,23	-0,14	0,11
Oktober	-0,15	0,46	0,02	-0,21	-0,17
Nopember	0,12	1,31	0,05	0,47	0,27
Desember	0,9	2,15	0,41	0,38	0,69
<b>Kumulatif</b>	<b>7,98</b>	<b>6,79</b>	<b>2,11</b>	<b>1,53</b>	<b>3,18</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

**Gambar 2. 9: Tingkat Inflasi Tahunan Kota Probolinggo Tahun 2013-2017**

Mulai tahun 1999 penghitungan inflasi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana inflasi 1 tahun merupakan penjumlahan inflasi 12 bulan, tetapi dihitung point demi point. Dalam penghitungan Inflasi tahun 2012, digunakan tahun dasar 2002. Pada tahun 2012 inflasi sebesar 4,63% terbagi dalam 7 kelompok. Inflasi terbesar pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 6,83% diikuti kelompok makanan yaitu sebesar 5,95% dan pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,16%.

## **2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **2.3.2.1. Kemiskinan**

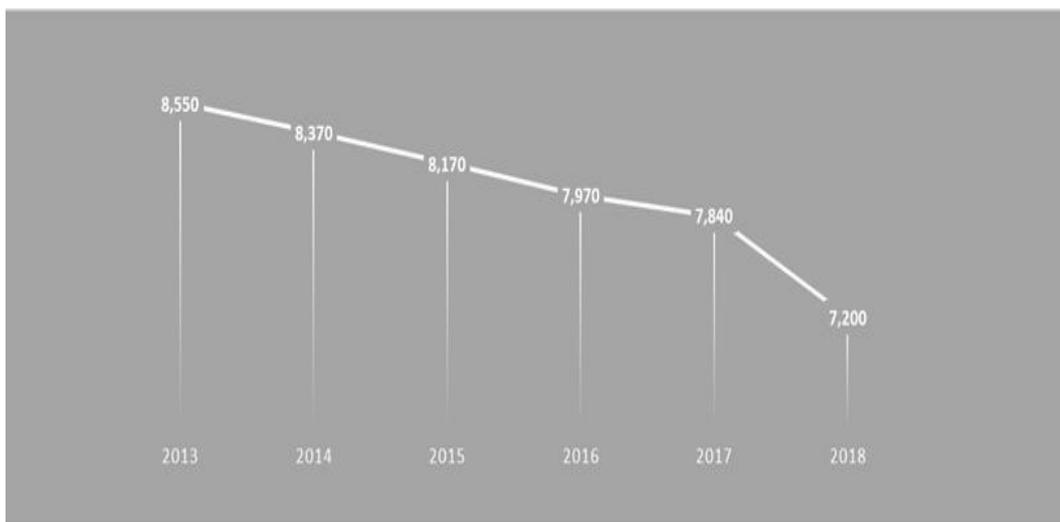
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan

evaluative. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Indeks kemiskinan merupakan sebuah indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan manusia) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Indeks ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah. Berikut data kemiskinan di Kota Probolinggo;

**Tabel 2. 14: Tingkat Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	19.396	18.350	18.015	16.900
<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	8,17	7,97	7,84	7.20
<b>Indeks Keparahan kemiskinan P2</b>	0,37	0,20	0,18	0.17
<b>Indeks kedalaman Kemiskinan P1</b>	1,36	0,98	0,92	0.89
<b>Garis Kemiskinan (Rp/Perkapita/Bulan)</b>	403.037	418.480	427.392	479 267

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa timur

### **Gambar 2. 10: Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo**

Jika disajikan dalam bentuk grafik, maka terlihat bahwa tingkat kemiskinan kota Probolinggo memiliki kecenderungan yang positif, yaitu selalu menurun setiap tahunnya. Indikator utama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 sebesar 18.660 menjadi 18.230 pada tahun 2017. Tren penurunan secara otomatis diikuti persentase penduduk miskin, dimana pada tahun 2015 sebesar 8,37 menurun menjadi 7,84 pada tahun 2017. Data terakhir 2018, persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi 7,20.

#### **2.3.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

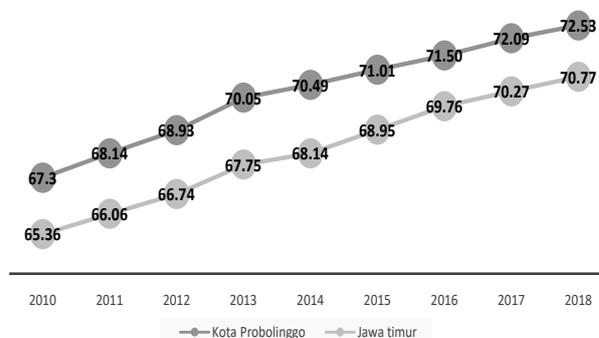
Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya beli. Dari tahun 2010 hingga 2016 IPM Probolinggo selalu mengalami kenaikan, meskipun masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks

Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. Indikator IPM saat ini terdiri dari 3 variabel pembentuk yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks PPP. Di Kota Probolinggo sendiri menggunakan 4 indikator untuk mengukur IPM, antara lain Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah, dan Daya Beli (PPP).

**Tabel 2. 15: Indikator Pembentuk IPM**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Usia Harapan Hidup</b>	69,52	69,72	69,79	69,86	70,00
<b>Harapan Lama Sekolah</b>	13,29	13,32	13,54	13,55	13,56
<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>	8,44	8,46	8,47	8,48	8,49
<b>Daya Beli (000 Rupiah)</b>	10.182	10.558	10.792	11.390	11,796

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

### **Gambar 2. 11: Perkembangan IPM Kota Probolinggo**

Sejak IPM kabupaten/kota dihitung pertama kalinya oleh BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 1990, Upaya pembangunan

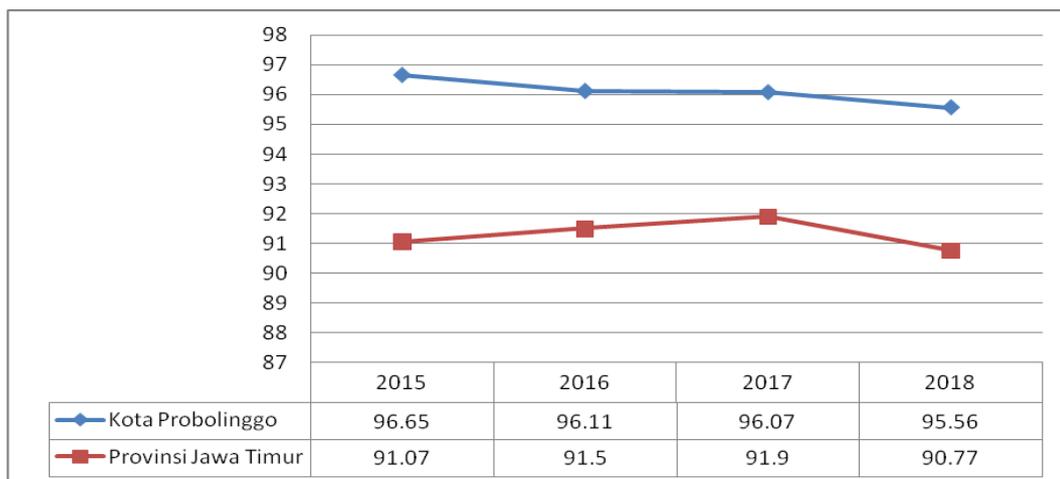
sumber daya manusia (SDM) di Kota Probolinggo memiliki tren peningkatan yang cukup baik. Sejak tahun 2010 IPM Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Menggunakan perhitungan metode baru, IPM Kota Probolinggo tahun 2014 mencapai 70,49 dibanding tahun 2010 yang 67,3. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup (AHH), Selanjutnya dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sementara dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

#### **2.3.2.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dasarnya, memiliki indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Purchasing Power Parity (PPP). Selain variabel yang sama indikator pembentuk variabelnya pun juga sama yakni Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita. Perbedaan yang mendasar antara IPG dan IPM adalah terletak pada tujuan data dan penghitungannya. Berbeda dengan IPM yang melihat pembangunan manusia secara keseluruhan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi disuatu daerah, IPG bertujuan untuk melihat tingkat pembangunan gender (perempuan) dari tiga aspek yang sama dengan IPM. Sedangkan penghitungan IPM dan IPG sejatinya masih menggunakan metode yang sama, namun IPG memisahkan antara penghitungan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, dan kemudian dicari rasio diantara keduanya. Nilai IPG yang mendekati

100 menunjukkan pembangunan gender antara laki-laki dan perempuan seimbang, dan begitu pula sebaliknya jika menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Pembangunan responsif gender belum sepenuhnya terealisasi di seluruh wilayah. Terlebih lagi jika melihat lebih dalam ke wilayah yang lebih kecil. Disparitas pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada level kabupaten/kota terlihat lebih jelas. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM perempuan pada kategori tinggi dan sangat tinggi terlihat sangat sedikit. Di tahun 2015, meskipun IPM perempuan tidak ada yang mengalami penurunan, kesenjangan dengan IPM laki-laki masih terlihat sangat signifikan. Kabupaten/kota dengan capaian IPM laki-laki berada di atas 70 sudah mencapai 292 kabupaten/kota. Sementara itu, kabupaten/kota dengan capaian IPM perempuan pada kategori yang sama, baru mencapai 106 kabupaten/kota. Bahkan kabupaten/kota dengan kategori pencapaian IPM laki-laki sangat tinggi (lebih dari 80) jumlahnya mencapai 5 kali lipat dari jumlah kabupaten/ kota dengan kategori pencapaian IPM perempuan dalam kategori yang sama.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

**Gambar 2. 12: perkembangan IPG Kota Probolinggo dan Jawa Timur**

Indeks pembangunan gender Kota Probolinggo mengalami penurunan 3 tahun terakhir. Terhitung sejak 2015 menuju 2017 mengalami penurunan, namun angka IPG masih diatas rata-rata Jawa Timur. Tahun 2015 yang mencapai 96,65 menurun 96,11 ditahun 2016 dan semakin menurun di tahun 2017 sebesar 96,07. Berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki kecenderungan stabil, di 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

**2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM**

**2.4.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

**2.4.1.1. Pendidikan**

➤ **Kinerja Daerah**

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Dalam lima tahun terakhir kinerja layanan pendidikan telah mengalami beberapa peningkatan. Adapun capaian kinerja pembangunan pendidikan antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. 16: Realisasi Kinerja Daerah Bidang Pendidikan**

No	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Pendidikan Dasar :</b>							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	110,13	109,93	110,78	111,14	109,05	103,12
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	102,80	101,08	101,02	101,90	99,87	94,87

<b>3</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	116,63	118,32	120,45	124,11	122,57	114,15
<b>4</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	94,51	81,52	95,56	97,58	95,44	93,47
<b>5</b>	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	1:163	1:164	1:165	1:181	1 : 210,12	1:228,7
<b>6</b>	Rasio Guru/Murid	1:15	1:16	1:15	1:13	1:14,15	1:14,36
<b>Pendidikan Menengah:</b>							
<b>1</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	126,19	126,9	127,91	123,63	125,58	115,87
<b>2</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	89,83	98,45	95,96	95,54	98,25	90,89
<b>3</b>	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	1:195*	1:256*	1:258*	1:319*	1 : 257,20	1:277,32
<b>4</b>	Rasio Guru/Murid	1:10	1:10	1:11	1:10	1:10,87	1:10,87
<b>Fasilitas Pendidikan :</b>							
<b>1</b>	Gedung SD/MI dalam kondisi baik	139	139	139	116	137	131
<b>2</b>	Gedung SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	80	80	80	72	72*	-
<b>Angka Putus Sekolah :</b>							
<b>1</b>	APS SD/MI (%)	0,07	0,05	0,08	0,07	0,02	0,02
<b>2</b>	APS SMP/MTs (%)	0,16	0,23	0,18	0,04	0,09	0,12
<b>3</b>	APS SMA/SMK/MA (%)	1,6	1,4	0,85	0,66	0,89	0,97
<b>Angka Kelulusan :</b>							
<b>1</b>	AL SD/MI (%)	99,57	100	100	100	100	100
<b>2</b>	AL SMP/MTs (%)	99,93	100	100	100	100	100
<b>3</b>	AL SMA/SMK/MA (%)	99,18	100	100	100	100	100
<b>Angka Melanjutkan :</b>							
<b>1</b>	AM SD/MI ke SMP/MTs (%)	105,67	121,02	117,38	111,51	117	114,10

<b>2</b>	AM SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA (%)	143,68	139,74	135,74	101,17	123,60	123,18
----------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Probolinggo

Berdasarkan tabel di atas, indikator Pendidikan dasar dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs rata-rata pada tahun 2012 sampai dengan 2017 angka capainnya lebih dari 100%. Tidak hanya pada pendidikan dasar, pada pendidikan menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA juga meningkat hingga mencapai 125,58 % pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 menurun hingga 115,87. Sedangkan pada fasilitas pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2012 sampai dengan 2014 tetap stabil tetapi pada tahun 2015 hingga 2017 cenderung fluktuatif. Dari data layanan pendidikan angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs sampai dengan tahun 2017 tidak mencapai 1% dan semakin menurun dari tahun ke tahun hal inipun juga berlaku pada angka putus sekolah SMA sampai tahun 2017 mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,97. Angka Kelulusan Kota Probolinggo konsisten sampai tahun terakhir 100% lulus pada tingkatan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Rata-rata siswa SD/MI melanjutkan pada jenjang selanjutnya hal ini juga berlaku pada tingkatan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Dapat disimpulkan bahwa layanan pendidikan di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan yang cukup baik.

Pembangunan di bidang pendidikan Kota Probolinggo juga dipengaruhi oleh jumlah pengangguran yang besar. Berikut adalah data terkait jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan di Kota Probolinggo:

**Tabel 2. 17 : Daftar Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun 2017**

Kualifikasi	Awal Tahun	Terdaftar	Ditempatkan
-------------	------------	-----------	-------------

<b>Kualifikasi</b>	<b>Awal Tahun</b>	<b>Terdaftar</b>	<b>Ditempatkan</b>
Tidak Tamat SD	28	0	-
SD	200	56	40
SLTP/SMP/ sederajat	683	118	40
SLTA/SMA/ sederajat	7.884	1.167	709
Akademi/Universitas	4.186	270	56

Sumber: Kota Probolinggo dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa para pencari kerja Kota Probolinggo tahun 2017 yang terbesar adalah pada lulusan SLTA/SMA/ sederajat. Diawal tahun saja jumlah pencari kerja lulusan SLTA/SMA/ sederajat sejumlah 7.884, sementara yang sudah terdaftar yaitu sebesar 1.167, dan yang sudah berhasil ditempatkan sebesar 709. Jumlah pencari kerja diatas ikut menyumbang pengangguran terbesar di Kota Probolinggo. Untuk itu diperlukan solusi pembangunan perguruan tinggi vokasi di Kota Probolinggo. Pembangunan perguruan tinggi vokasi dimaksudkan agar para lulusan SMK dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan bidangnya sehingga memperluas peluang kerja dari perusahaan yang bisa dimasuki oleh lulusan SMK.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Dasar Bidang Pendidikan terdapat 14 indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Pendidikan ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan 1 yaitu Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun serta Tujuan 4 yaitu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif. Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Pendidikan terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 18: Capaian Indikator SDGs Bidang Pendidikan**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	99,87%	94,87%	Meningkat menjadi 94,78%	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	95,44%	93,47%	Meningkat menjadi 94,78%	
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	94,40%	96,14%	Meningkat	
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	93,62%	93,43%	Meningkat menjadi 84,2%	
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	76,19%	77,27%	Meningkat menjadi 81%	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	109,05%	103,12%	Meningkat menjadi 114,09%	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	122,57%	114,15%	Meningkat menjadi 106,94%	
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	9,71	9,84	Meningkat menjadi 8,8 tahun	
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	94,28%	97,36%	Meningkat menjadi 77,2%	
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	99,87 (APM SD/MI/ Paket A); 95,44 (APM SMP/MTs/ Paket B); 98,25 (APM SMA/SMK/ MA/ Paket C)	94,87 (APM SD/MI/ Paket A); 93,47 (APM SMP/MTs/ Paket B); 90,89 (APM SMA/SMK/ MA/ Paket C)	Meningkat	
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	95,04%	95,44%	Meningkat menjadi 96,1%	
Persentase angka melek aksara penduduk umur	95,04%	95,44%	Meningkat	

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
15-24 tahun dan umur 15-59 tahun				
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	(a) 170 (b) 62 (c) 170	(a) 170 (b) 62 (c) 170	Meningkat	
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	1,822	3,939	Meningkat	

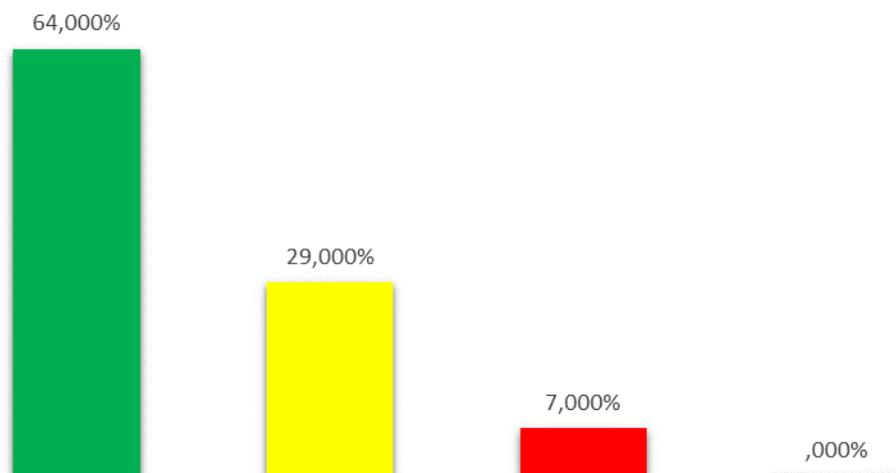
Sumber: KLHS Kota Probolinggo Tahun 2018

**Keterangan:**

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indikator-indikator berikut: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat, Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, Persentase SD/MI berakreditasi minimal B, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat, Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun, Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik merupakan indikator yang

sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Sementara untuk indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi, Persentase angka melek aksara penduduk umur  $\geq 15$  tahun merupakan indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional. Sedangkan untuk indikator Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) datanya masih belum tersedia.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

**Gambar 2. 13: Capaian Indikator SDGs Bidang Pendidikan**

➤ **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Pendidikan terdapat 27 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 19: Capaian Standar Pelayanan Minimum bidang Pendidikan**

No	Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
I	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/ Kota						
	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	85%	100%	100%	82,13%	79,48%	75,36%
	3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	45%	100%	100%	31,05%	33,66%	33,66%
	4. Di setiap SD/MI dan	90%	100%	100%	82,32%	98,08%	98,08%

No	Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru						
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	75%	100%	100%	97,18%	94,74%	91,29%
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100%	100%	100%	81,92%	83,01%	91,50%
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%	95,83%	96,17%	96,31%
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh	65%	100%	100%	79,31%	83,01%	84,10%

No	Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%						
	9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	60%	100%	100%	62,31%	66,78%	60,13%
	10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	95%	100%	100%	92,43%	92,80%	91,88%
	11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	80%	100%	100%	77,57%	74,51%	72,66%
	12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif						
	14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	85%	100%	100%	87,1%	93,28%	97,31%
<b>II</b>	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan						
	15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	45%	100%	100%	51,82%	74,12%	81,09%
	16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	45%	100%	100%	24,73%	30,28%	46,19%
	17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model	45%	100%	100%	61,04%	68,86%	79,48%

No	Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	tubuh manusia, bola dunia ( <i>globe</i> ), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA						
18.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	45%	100%	100%	59,35%	59,90%	64,05%
19.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100%	100%	100%	81,54%	84,55%	92,81%
20.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100%	100%	100%	98,5%	96,13%	96,13%
21.	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan	100%	100%	100%	97,58%	99,07%	99,07%

No	Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku						
22.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	100%	100%	94,28%	94,44%	95,37%
23.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	100%	100%	95,21%	96,30%	97,22%
24.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	100%	100%	91,91%	93,83%	98,15%
25.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%	100%	100%	98,15%	98,15%	99,04%
26.	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua	100%	100%	100%	100%	99,07%	100%

No	Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester						
27.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100%	100%	100%	79,25%	87,69%	96,30%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Probolinggo Tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM berupa Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil telah mampu memenuhi target tahun 2016-2018. Capaian SPM untuk indikator tersebut pada tahun 2016-2018 adalah sebesar 100% dan telah mampu memenuhi target tahun 2016-2018 yakni 100%. Indikator lainnya yang telah mampu memenuhi target tahun 2016-2018 yaitu Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2016-2018 adalah sebesar 100% dan telah memenuhi target tahun 2016-2018 yakni 100%. Selain kedua indikator tersebut, terdapat satu indikator lagi yang telah mampu memenuhi target tahun 2016-2018 yaitu Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam

mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2016-2018 yaitu sebesar 100% dan telah mampu memenuhi target tahun 2016-2018 yakni 100%.

Berbeda dengan capaian indikator SPM diatas, indikator-indikator SPM lainnya justru membutuhkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya masih belum mampu memenuhi target tahun 2016-2018. Sebagai contoh yaitu indikator Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2016-2018 adalah sebesar 31,05% - 33,66% serta masih belum mampu memenuhi target tahun 2016-2018 yakni 45% - 100%. Indikator yang perlu mendapat perhatian lebih lainnya yaitu Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2016-2018 adalah sebesar 24,73% - 46,19% serta belum mampu memenuhi target tahun 2016-2018 yakni 45% - 100%. Indikator-indikator SPM Bidang Pendidikan lainnya juga memiliki capaian seperti halnya kedua indikator diatas. Kurangnya lahan pada satuan lembaga sekolah, tidak meratanya kualitas pendidikan di Kota Probolinggo serta anggaran BOS yang masih belum diprioritaskan untuk pemenuhan SPM menjadi faktor belum terpenuhinya capaian SPM seperti yang diharapkan. Sehingga diperlukan beberapa solusi seperti pengadaan dana untuk bantuan hibah pembangunan lab, perlunya pemerataan

kualitas pendidikan dan sosialisasi kepada satuan lembaga sekolah terkait Dana BOS agar diprioritaskan untuk pemenuhan SPM.

#### **2.4.1.2. Kesehatan**

##### **➤ Kinerja Daerah**

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan kesehatan di Kota Probolinggo dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Moh. Saleh. Secara umum pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit. Di Kota Probolinggo terdapat 6 Puskesmas pada 5 kecamatan yang memiliki spesialisasi pelayanan secara khusus. Pelayanan Puskesmas ini masih didukung oleh beberapa Puskesmas Pembantu untuk mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah serta beberapa Rumah Sakit Swasta. Rumah sakit umum yang berada di tengah kota juga perlu mendapat perhatian mengingat bahwa secara pengembangan sudah sangat kecil kemungkinan untuk diperluas. Pada sisi lain rumah sakit tersebut harus menjadi jujugan pelayanan masyarakat dari Kabupaten Probolinggo.

Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2. 20: Data Kinerja Indikator Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2013 – 2016**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	Angka Harapan Hidup	69.5	69.52	69.72	69.79	69.79
<b>2</b>	Jumlah kematian Bayi	72	94	86	98	88
<b>3</b>	Angka kematian bayi	19.14	24.58	23.37	26.64	23.51
<b>4</b>	jumlah kematian ibu	8	8	3	6	4
<b>5</b>	angka kematian ibu	-	-	81.54	163	106.89

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Probolinggo*

Data indikator kesehatan Kota Probolinggo terdapat lima indikator. Pertama Angka harapan hidup, indikator ini pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan yang konsisten tahun 2012 mencapai angka 69.46 hingga tahun 2016 mencapai angka 69.79 , seperti digambarkan pada grafik dibawah ini:



**Gambar 2. 14: Angka Harapan Hidup**

Meningkatnya angka harapan ini didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor kesehatan. Apabila angka harapan hidup kota Probolinggo setiap tahunnya mengalami kenaikan dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat Probolinggo sudah terbilang mulai mengalami perbaikan.

Kedua indikator jumlah kematian bayi pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan yang cenderung tidak stabil, tahun 2012 jumlah bayi yang meninggal sebesar 41, tahun 2013 meningkat menjadi 72, tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 94, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 86 dan tahun 2016 kembali mengalami peningkatan lagi sebesar 98, angka ini terbilang cukup besar apabila dibandingkan dengan empat tahun lalu. Ketiga, indikator

angka kematian bayi sejalan dengan jumlah kematian bayi persentase angka kematian bayi pun mengalami ketidak stabilan pada tahun 2012 sebesar 10.95%, tahun 2013 sebesar 19.14%, tahun 2014 sebesar 24.58%, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 23.37% dan tahun 2016 mengalami peningkatan kembali sebesar 26.64%. Keempat, indikator jumlah kematian ibu pada tahun 2012 sebesar 4 kasus, tahun 2013 sebesar 8 kasus, tahun 2014 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dan tetap sebesar 8 kasus tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 3 kasus angka ini terbilang kecil dalam empat tahun terakhir dan tahun 2016 kembali mengalami peningkatan kembali sebesar 6 kasus. Kelima, indikator angka kematian ibu tahun 2015 sebesar 81,54% dan tahun 2016 sebesar 163%. Pada tahun terakhir angka ini sudah mencapai lebih dari 100% yang artinya target dengan realisasi tidak seimbang, realisasi melebihi target.

**Tabel 2. 21: Data Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)**

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	81,54 / 100.000 KH	163,13 / 100.000 KH	106,89 / 100.000 KH	107,78 / 100.000 KH
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	23,3 / 1.000 KH	26,6 / 1.000 KH	23,51 / 1.000 KH	11,85 / 1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Probolinggo

Data kesehatan menunjukkan bahwa AKI meningkat dari tahun 2015 sebesar 81,54 menjadi 107,78 pada tahun 2018. Sedangkan AKB menurun dari tahun 2015 sebesar 23,3 menjadi 11,85 pada tahun 2018 meskipun pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 26,6. Dengan kondisi ini, pelayanan terhadap ibu hamil penting untuk ditingkatkan untuk mengurangi resiko kematian ibu.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Kesehatan di Kota Probolinggo terdapat 44 indikator yang dapat dihitung. Dari 44 indikator tersebut yang sudah melebihi target sebanyak 20 indikator, indikator yang tidak memenuhi target sebanyak 9 indikator, Indikator yang belum dilaksanakan dan belum memenuhi target sebanyak 3 indikator, dan indikator yang masih belum memiliki data sebanyak 12 indikator. Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Kesehatan terdapat pada tabel 2.22.

Berdasarkan data diketahui bahwa sebagian besar dari indikator TPB bidang kesehatan Kota Probolinggo mengalami perkembangan yang positif. Hal tersebut terlihat dari 44 indikator, terdapat 20 indikator yang mengalami kenaikan positif, sedangkan 9 indikator masih belum memenuhi target, Indikator yang belum dilaksanakan dan belum memenuhi target sebanyak 3 indikator sehingga capain dari tahun 2016-2017 masih 0%, dan indikator yang masih belum memiliki data sebanyak 12 indikator sehingga capain dari tahun 2016-2017 masih 0%. Pada tabel diatas yang mengalami kenaikan adalah indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Prevalensi anemia pada ibu hamil, Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, Angka Kematian Ibu (AKI), Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, Persentase perempuan pernah kawin

umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi, Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk, Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), Prevalensi obesitas pada penduduk umur  $\geq 18$  tahun, Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk, Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan, Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) termasuk dalam indikator yang telah mencapai target realisasi nasional. Selain itu indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, Prevalensi HIV pada populasi dewasa, Prevalensi tekanan darah tinggi, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR), Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR), dan Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah indikator dengan capaian yang belum mencapai target tahun 2019. Indikator Kejadian Malaria per 1000 orang, Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, dan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang

menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa adalah indikator dengan capaian tahun 2016 dan 2017 0% hal ini dapat diartikan bahwa indikator ini belum dilaksanakan dalam dua tahun terakhir dan belum mencapai target. Sisanya adalah indikator yang masih belum memiliki data dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yakni Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B, Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta, Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I), Persentase merokok pada penduduk umur  $\leq 18$  tahun, Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri, Prevalensi penyalahgunaan narkoba, Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur  $\geq 15$  tahun dalam satu tahun terakhir, Unmet need pelayanan kesehatan, Proporsi kematian akibat keracunan, dan Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun indikator-indikator ini adalah indikator yang masih belum memiliki data. Secara keseluruhan urusan kesehatan Kota Probolinggo telah mencapai angka yang baik dengan perolehan hampir setengah indikator SDGs yang ditetapkan telah mencapai target dengan baik, akan tetapi beberapa indikator perlu diperbaiki lagi agar pada tahun 2019 dapat memenuhi target.

**Tabel 2. 22 Capaian Indikator SDGs Urusan Kesehatan Kota Probolinggo**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	30,06%	35,3%	Meningkat menjadi 95%	
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	94,40% (3.707)	96,14% (3.760)	Meningkat menjadi 70%	
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	97,78%	118,41%	Meningkat menjadi 63%.	
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	7,5%	7,79%	Menurun menjadi 17%	
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	n/a	n/a	Menurun menjadi 8,5 %	
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	11,86%	12,09%	Menurun	
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	n/a	n/a	Menurun menjadi 28%	
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	4,65%	4,80	Menurun	
Prevalensi anemia pada ibu hamil.	4,30% (177)	4,00% (166)	Menurun menjadi 28%	
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	65,10%	68,10%	Meningkat menjadi 50%	
Angka Kematian Ibu (AKI).	163,13% (6)	106,89% (4)	Menurun menjadi 306	
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	94,40%	96,14%	Meningkat menjadi 95%	
hPersentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	94,40%	96,14%	Meningkat menjadi 85%	
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	28,2% (104)	24% (90)	Menurun	
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	23,9% (88)	21,9% (82)	Menurun	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	26,6% (98)	23,5% (88)	Menurun menjadi 24	

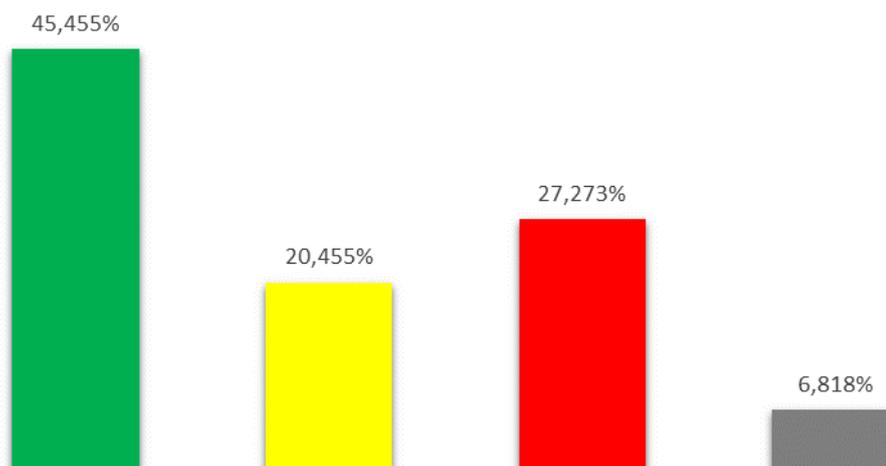
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	97,42%	125,66%	Meningkat menjadi 95%	
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	3,5%	1,9%	Menurun menjadi <0,5%	
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	184	187	Menurun menjadi 245	
Kejadian Malaria per 1000 orang.	0	0	Menurun	
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	0	0	Meningkat menjadi 300	
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	n/a	n/a	Meningkat	
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	21	17	menurun	
Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	n/a	n/a	Meningkat menjadi 34 provinsi	
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	n/a	n/a	Meningkat menjadi 35.	
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	n/a	n/a	Menurun menjadi 5,4%	
Prevalensi tekanan darah tinggi.	7,12	1.688 (96,11%)	Menurun menjadi 24,3%	
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	5,943	798 (13%)	Menurun	
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	n/a	n/a	Menurun	
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	6 Puskesmas	6 Puskesmas	Meningkat menjadi 280	
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	n/a	n/a	Menurun menjadi angka 0,02%	
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	n/a	n/a	Menurun	
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	94,40	96,14	Menurun menjadi 38	
Unmet need pelayanan kesehatan.	n/a	n/a	Menurun menjadi 9,91%	

Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	75,50%	76,59%	Meningkat	
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	80,953	81,102	Meningkat menjadi minimal 95%	
Proporsi kematian akibat keracunan.	n/a	n/a	Menurun	
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	n/a	n/a	Menurun	
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	85%	85,5%	Meningkat	
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1:2.072	1:1.195	Meningkat	
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	94,40%	96,14%	Menurun menjadi 38 tahun	
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	86,90%	80,10%	Meningkat	
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	26	29	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	4	5	Meningkat	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

**Gambar 2. 15 Capaian Indikator SDGs Bidang Kesehatan**

➤ **Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

**Tabel 2. 23: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan Tahun 2014-2016**

NO	INDIKATOR	TUJUAN TAHUN 2014 (%)	CAPAIAN TAHUN 2014 (%)	TUJUAN TAHUN 2015 (%)	CAPAIAN TAHUN 2015 (%)	TUJUAN TAHUN 2016 (%)	CAPAIAN TAHUN 2016 (%)
1.	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	94	94.01	95	91.04	95	92.37
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	97.43	80	90.8	80	81.04
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	93.8	95	92.95	90	94.4
4.	Cakupan pelayanan Nifas	94	93.17	95	93.53	90	93.58
5.	Cakupan neonatus	80	78.25	80	69.2	80	52.23

NO	INDIKATOR	TUJUAN TAHUN 2014 (%)	CAPAIAN TAHUN 2014 (%)	TUJUAN TAHUN 2015 (%)	CAPAIAN TAHUN 2015 (%)	TUJUAN TAHUN 2016 (%)	CAPAIAN TAHUN 2016 (%)
	dengan komplikasi ditangani						
6.	Cakupan kunjungan Bayi	90	94.98	90	94.09	90	92.97
7.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	≥ 95	82.76	95	82.76	100	72.41
8.	Cakupan Pelayanan anak Balita	87	79.04	90	77.88	90	78.02
9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan Keluarga miskin	100	100	100	100	100	100
10.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
11.	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	99.24	100	99.74	100	97.68
12.	Cakupan peserta KB aktif	≥70	71.45	70	68.26	70	73.02
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :						
a.	Penemuan penderita AFP	≥2	0	≥2	1.74	100	1.74
b.	Penemuan dan penanganan penderita pneumonia Balita	100	10.57	100	8.48	100	8.41

NO	INDIKATOR	TUJUAN TAHUN 2014 (%)	CAPAIAN TAHUN 2014 (%)	TUJUAN TAHUN 2015 (%)	CAPAIAN TAHUN 2015 (%)	TUJUAN TAHUN 2016 (%)	CAPAIAN TAHUN 2016 (%)
	c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	85	37.45	90	61.22	100	68.83
	d. Penemuan dan penanganan DBD	100	100	100	100	100	100
	e. Penanganan penderita diare	100	142.17	100	114.57	100	115.4
14.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	46.59	100	27.83	100	39.23
15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	13.49	100	17.3	100	26.78
16.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS) di kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
17.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100
18.	Cakupan desa siaga aktif	70	100	80	100	80	100

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo tahun 2017

Pada data indikator SPM bidang kesehatan diatas dapat dilihat pada bidang ini indikator SPM di jabarkan menjadi 18

indikator utama dan 5 indikator pendukung. Dari 22 data diatas terdapat empat indikator yang telah berhasil melampaui target dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yakni, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan kunjungan Bayi, Penanganan penderita diare, dan Cakupan desa siaga aktif dengan realisasi yang melampaui target dengan cukup baik. Selain itu terdapat lima indikator yang realisasinya berhasil mencapai target yakni, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan Keluarga miskin, Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan, Penemuan dan penanganan DBD, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS) di kabupaten/kota, Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dengan target 100% dan realisasi 100% dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Berikutnya terdapat Sembilan indikator dengan realisasi yang masih belum mencapai target yakni Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani, Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI), Cakupan Pelayanan anak Balita, Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, Penemuan penderita AFP, Penemuan dan penanganan penderita pneumonia Balita, Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Sedangkan indikator Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 target tahun 2014 sebesar 94 dengan realisasi 94,01 melampaui target yang ditetapkan, tahun 2015 target dinaikkan menjadi 95 dan realisasi yang dicapai menurun menjadi 91,04, tahun 2016 target tetap 95 dan realisasi kembali meningkat sebesar 92,37 meski belum dapat mencapai target oleh karena itu perlunya peningkatan pada capaian

indikator tersebut. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2014 target mencapai 95 dan realisasinya sebesar 93,8 tidak dapat mencapai target, tahun 2015 target tetap sebesar 95 dengan realisasi 92,95 angka ini tidak dapat mencapai target dan juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, tahun 2016 target diturunkan menjadi 90 dengan capaian 94,4 angka ini apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya cenderung mengalami peningkatan dan dapat melampaui target meski target yang ditetapkan harus mengalami penurunan agar realisasi tahun selanjutnya dapat mencapai target. Cakupan pelayanan Nifas tahun 2014 ditetapkan target sebesar 94 dengan perolehan realisasi sebesar 93,17 angka ini tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, tahun 2015 target ditingkatkan sebesar 95 dan realisasinya meningkat sebesar 93,53 akan tetapi angka ini masih tidak dapat mencapai target, tahun 2016 target diturunkan menjadi 90 dan realisasi mengalami peningkatan 0,05 dari tahun sebelumnya menjadi 93,58 karena target telah diturunkan maka angka realisasi ini dinyatakan telah melampaui targetnya yang sebesar 90. Cakupan peserta KB aktif tahun 2014 ditetapkan target sebesar  $\geq 70$  dengan perolehan realisasi sebesar 71,45 telah melampaui target tahun 2015 target tetap sebesar 70 akan tetapi realisasinya mengalami penurunan sebesar 68,26 angka ini tidak dapat mencapai target sehingga perlu adanya peningkatan kembali, tahun 2016 target tidak diturunkan sedangkan realisasi mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 73,02 melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu indikator SPM Bidang Kesehatan tahun 2017 dan 2018 telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

**Tabel 2. 24: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan Tahun 2017 dan 2018**

NO	INDIKATOR	TARGET 2017 (%)	REALISASI 2017 (%)	TARGET 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	92,87	100	95,54
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	96,14	100	95,77
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99,70	100	99,19
4	Pelayanan kesehatan balita	100	78,04	100	86,8
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	99,47	100	99,01
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	69,12	100	42,56
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	88,72	100	82,65
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	31,28	100	26,69
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	89,03	100	56,31
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	75,48
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	130,57
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	49,89	100	67,79

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo tahun 2017 dan 2018

Pada tabel diatas dari 18 indikator utama dan 5 indikator pendukung diperinci menjadi 12 indikator di tahun 2017. Dari ke 12 indikator diatas hanya dua indikator yang telah mencapai target yakni Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dan Pelayanan kesehatan orang dengan TB selain kedua indikator ini sepuluh indikator lainnya masih belum dapat mencapai target yang ditentukan yakni Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan target 100% dan realisasinya sebesar 92,87%. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan target 100% dan realisasinya sebesar 96,14%. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan target 100% dan realiasainya sebesar 99,70%. Pelayanan kesehatan pada usia

pendidikan dasar dengan target 100% dan realisasinya sebesar 99,47. Selain keempat indikator ini beberapa indikator lainnya angka realisasinya dibawah 90% yang berarti perlu usaha lebih keras lagi untuk meningkatkan menjadi 100% agar mencapai target. Realisasi indikator yang dibawah 90% yakni Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sebesar 89,03%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 88,72%, Pelayanan kesehatan balita sebesar 78,04%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 69,12. Adapun indikator dengan realisasi dibawah 50% yakni Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV realisasinya sebesar 49,89%, dan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 31,28% kemungkinan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya masih jauh oleh karena itu diperlukannya dua solusi yakni dengan menurunkan target pada tahun selanjutnya atau meningkatkan lagi kinerjanya hingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

Tahun 2018 hanya terdapat satu indikator yang melampaui target yakni pelayanan kesehatan orang dengan TB. Sedangkan 11 indikator belum mencapai target dengan persentase indikator yang mencapai realisasi lebih dari 50% terdapat Sembilan indikator yakni, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Realisasi indikator yang belum mencapai angka 50% yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

### 2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### ➤ Kinerja Daerah

Infrastruktur merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh sebuah wilayah yang sedang berkembang ke arah perkotaan. Permasalahan yang tampak pada tahun belakangan ini antara lain adalah Pembangunan turap di Jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%). Perhatian pada infrastruktur irigasi juga perlu mendapatkan porsi yang cukup karena angka capaiannya yang masih tergolong rendah. Adapun Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 25: Kinerja Layanan Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Tahun 2012-2017**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	71,14	74,28	79,5	66,07	80	82
2	Persentase Jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi (%)	80	85	85	85	85*	-
3	Panjang jalan dilalui roda 4 (km)	200,171	200,171	210	199,109	199,2	199,2
4	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	134,08	148,68	151	135,697	199,2	163,34
5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (min 1,5 m)	14,36	120	120	120	110,781	110,781
6	Drainase dalam kondisi baik / aliran air tidak tersumbat (km)	107,5	107,7	110,26	110,65	110,65*	-

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Pembangunan turap di Jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	62	62	62,65	62,65	62,65*	-
8	Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)	1.833	1.833	1.438	1.438	1.438*	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo

\*: angka sementara

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan pencapaian Kota Probolinggo dalam layanan pekerjaan umum cukup baik akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan seperti pembangunan turap di jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor persentasenya masih rendah sebesar 62,65 sampai pada tahun 2016 dibandingkan dengan pencapaian indikator yang lain. Sedangkan proporsi panjang jaringan jalan yang dalam kondisi baik pada tiga tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan setelah pada tahun sebelumnya 2014-2015 mengalami penurunan.

Tantangan utama penataan ruang di Kota Probolinggo adalah penyediaan ruang terbuka hijau. Hingga tahun 2015 capaian rasio ruang terbuka hijau baru mencapai 14,50%. Selain itu adalah konsistensi terhadap pemberlakuan peraturan tentang tata ruang. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan meski masih perlu kerja keras untuk mencapai target. Kondisi capaian kinerja pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota Probolinggo dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2. 26: Data Kinerja Penataan Ruang Kota Probolinggo Tahun 2012-2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio ruang terbuka hijau kota per satuan luas wilayah (%)	15,02	14	14,5	14,5	14,5*
2	Jumlah bangunan yang memiliki IMB	15,01%	15,69%	16,39%	16,82%	16,82%*

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo

Berdasarkan tabel di atas kinerja penataan ruang Kota Probolinggo masih terbilang cukup rendah, capaian kinerja pertahun kurang dari 50%, hal ini juga disebabkan rasio ruang terbuka hijau mengalami penurunan persentase bukan kenaikan padahal idealnya ruang terbuka hijau dalam kota harus seimbang guna pemasokan oksigen sedangkan Kota Probolinggo hingga tahun 2016 rasio ruang terbuka hijau masih sebesar 14,5. Sedangkan jumlah bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan masih 16%, hal membuktikan bahwa sekitar 84% bangunan di Kota Probolinggo tidak memiliki ijin mendirikan bangunan.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 13 indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan 1 yaitu Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, Tujuan 6 yaitu Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan Untuk Semua, serta Tujuan 11 yaitu Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.

Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 27: Capaian Indikator SDGs Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	49,64%	57,94%	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	78,70%	85,81%	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	49,64%	57,94%	Meningkat menjadi 100%	
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	49,64%	57,94%	Meningkat menjadi 100%	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	78,70%	85,81%	Meningkat menjadi 100%	
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	3,6%	4,35%	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota	
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	n/a	n/a	Meningkat	
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang	100%	100%	Ada	

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Wilayah (RTRW)				
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	n/a	n/a	8 WS	
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	100%	100%	10 WS (skala nasional)	
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	3	3	Ada	
Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP	1	1	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	n/a	n/a	Ada	

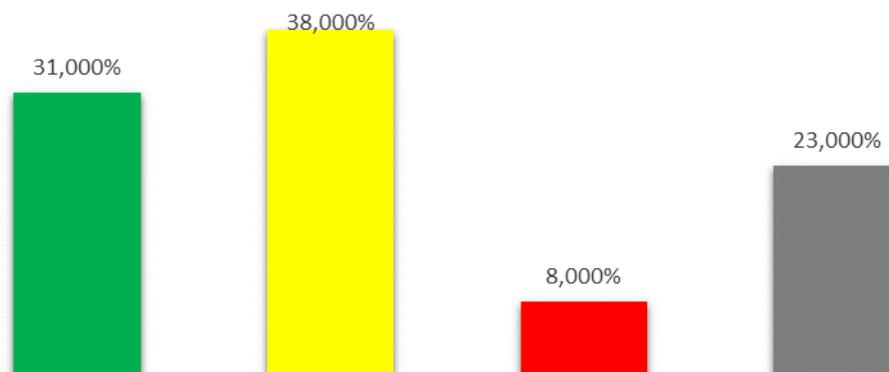
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indikator-indikator berikut: Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau, Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air, Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Selanjutnya untuk indikator-indikator

berikut: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak merupakan indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional. Untuk indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat datanya masih belum tersedia. Sedangkan untuk indikator Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal, Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk, dan Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur masih belum dilaksanakan dan juga belum mencapai target nasional.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

**Gambar 2. 16: Capaian Indikator SDGs Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

➤ **Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Pekerjaan Umum terdapat 16 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 28: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	100%	-	-	75%	-
2.	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	55%	70%	-	55%	60%	-
3.	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang	100%	60%	-	100%	81,27%	-
4.	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	100%	100%	-	100%	81,27%	-
5.	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	81,7%	81,7%	-	60%	91,5%
6.	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	60%	60%	-	8%	8,9%
7.	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	-	48%	-	-	43,18%	-
8.	Persentase pengangkutan sampah	-	37%	-	-	32,35%	-
9.	Persentase pengoperasian TPA	-	-	-	-	-	-
10.	Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	-	50%	-	-	81%	-
11.	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	-	60%	-	-	51%	-

No	Indikator Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
12.	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	60%	-	-	0%	-
13.	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/ Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	100%	-	-	97,5%	-
14.	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	-	100%	-	-	80%	-
15.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	60%	-	100%	51%	-
16.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	8%	5,5%	-	8%	7,35%	-

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Probolinggo Tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM berupa Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang telah mampu memenuhi target tahun 2016-2018. Capaian SPM untuk indikator tersebut pada tahun 2016-2018 adalah sebesar 81,27%-100% dan telah mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 60%-100%. Indikator SPM lainnya yang telah mampu memenuhi target tahun 2017 adalah Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun. Capaian SPM untuk indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 81% dan telah memenuhi target

tahun 2017 yakni 50%. Selain kedua indikator tersebut, terdapat satu indikator lagi yang telah mampu memenuhi target tahun 2017 yaitu Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 8% dan 7,35% dengan target pada tahun 2016 dan 2017 yakni 8% dan 5,5%.

Berbeda dengan capaian indikator SPM diatas, indikator-indikator SPM lainnya justru membutuhkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya masih belum mampu memenuhi target tahun 2017. Sebagai contoh yaitu indikator Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari masih belum mampu memenuhi target tahun 2017. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 75% dan belum mampu memenuhi target pada tahun 2017 yakni sebesar 100%. Indikator yang perlu mendapat perhatian lebih lainnya yaitu Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang masih belum mampu memenuhi target tahun 2017. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 0% dan masih belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 60%. Indikator-indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum lainnya juga memiliki capaian seperti halnya kedua indikator diatas. Masih banyaknya masyarakat Kota Probolinggo yang belum memahami tentang pentingnya air minum yang layak dan pentingnya berperilaku sehat serta minimnya anggaran informasi tata ruang menjadi faktor yang menyebabkan belum tercapainya target SPM dibidang Pekerjaan umum. Sehingga diperlukan beberapa solusi diantaranya seperti sosialisasi yang berkesinambungan tentang Air Minum dan Air Limbah Domestik, peningkatan anggaran pada kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang serta perlu adanya

koordinasi dengan pihak berwenang (polisi) dan Dinas Perhubungan.

#### 2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman

##### ➤ Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat di Kota Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2. 29: Data Kinerja Peayanan Perumahan Rakyat Kota Probolinggo Tahun 2012 – 2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pelanggan rumah tangga berakses air ber bersih	17,086	17.63	17,806	19,394	18,252
2	Jumlah rumah tangga bersanitasi lingkungan (%)	59	70	72	72.5	72.5
3	Jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik	45,414	46,776	49,115	61,888	67,258
4	Perkembangan jumlah warga miskin yang memperoleh fasilitas perumahan	350	379	390	396	396

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada tabel diatas dapat dilihat indikator perumahan rakyat dibagi menjadi empat indikator yakni, jumlah pelanggan rumah tangga berakses air bersih, jumlah rumah tangga bersanitasi lingkungan, jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik, dan perkembangan jumlah warga miskin yang memperoleh fasilitas perumahan. Pada indikator pertama yaitu jumlah pelanggan rumah tangga berakses air bersih tahun 2012 sebesar 17.086 masyarakat yang berlangganan, tahun 2013 sebesar 17.630 angka ini cenderung meningkat dibandingkan angka tahun sebelumnya, tahun 2014 meningkat sebesar 17.806 sedangkan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 19.394 dan 2016 mengalami penurunan sebesar 18.252. Jumlah rumah tangga bersanitasi

lingkungan dalam % tahun 2012 sebesar 59%, tahun 2013 sebesar 70% tahun 2014 sebesar 72% tahun 2015 sebesar 72,5% dan tahun 2016 sebesar 72,5% pada empat tahun terakhir angka ini cenderung mengalami peningkatan dan dua tahun terakhir di tahun 2015 dan 2016 mengalami stagnan. Jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2012 sebesar 45.414, tahun 2013 sebesar 46.776 tahun 2014 sebesar 49.115 tahun 2015 sebesar 61.888 dan tahun 2016 sebesar 67.258 pada lima tahun terakhir pengguna listrik konsisten meningkat dari 45.000 pelanggan menjadi 67.000 pelanggan pada tahun 2016. Indikator perkembangan jumlah warga miskin yang memperoleh fasilitas perumahan pada tahun 2012 sebesar 350 warga tahun 2013 sebesar 379 warga, tahun 2014 sebesar 390 warga dan tahun 2015 serta 2016 sebesar 396 warga, angka ini cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya yang berarti kota Probolinggo mulai memperhatikan warganya yang miskin dan memberikan fasilitas hunian untuk mereka.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kota Probolinggo terdapat 1 indikator yang belum memiliki data, terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 30: Capaian Indikator SDGs Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	n/a	n/a	Meningkat menjadi 18,6 juta	

Sumber : KLHS Kota Probolinggo Tahun 2018

**Keterangan:**

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa data SDGs Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo masih belum memiliki data capaian pada tahun 2016 dan 2017 sehingga tidak dapat diukur apakah untuk tahun 2019 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

➤ **Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

**Tabel 2. 31 Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan**

NO	SASARAN INDIKATOR SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	TARGET TAHUN 2014 (%)	REALISASI TAHUN 2014 (%)	TARGET TAHUN 2016 (%)	REALISASI TAHUN 2016 (%)	TARGET TAHUN 2017 (%)	REALISASI TAHUN 2017 (%)	TARGET TAHUN 2018 (%)	REALISASI TAHUN 2018 (%)
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	67.3	67.3	93.74	93.74	100	97.22	100	97,22
2.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	60.58	60.58	60.71	60.71	70	35	70	35
3.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	58.16	58.16	65.14	65.14	30	33	30	33

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo

Dari tabel diatas dapat dilihat data target dan capaian indikator SPM pada tahun 2014,2016,2017 dan 2018. Sasaran

indikator SPM bidang perumahan rakyat sendiri di bagi menjadi tiga indikator yakni, cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan target tahun 2014 sebesar 67,3 dan capaian tahun 2014 sebesar 67,3, capaian pada indikator ini tergolong baik karena realisasi berhasil memenuhi target. Tahun 2016 target sebesar 93,74 dengan realisasi yang mencapai target, tahun 2017 target sebesar 100 dengan realisasi 97,22 pada tahun ini realisasi tidak berhasil memenuhi target yang diinginkan oleh karena itu diperlukannya peningkatan kinerja agar pada tahun depan realisasi dapat memenuhi target sedangkan tahun 2018 baik target dan realisasi masih stuck pada angka di tahun 2017, dapat dikatakan pada tahun 2018 pelaksanaan indikator tersebut tidak mengalami peningkatan.

Indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau target pada tahun 2014 sebesar 60,58 dengan realisasi 60,58 yang mencapai target. Tahun 2016 dengan target 60,71 dan realisasi yang mencapai target. Tahun 2017 target 70 dengan realisasi 35, realisasi pada tahun ini cenderung menurun drastis karena hampir setengah realisasi yang dapat terwujud dari target yang ditetapkan, tidak hanya itu realisasinya pun turun dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 angka realisasi dan target tidak mengalami penurunan dan kenaikan pada indikator tersebut. Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target tahun 2014 sebesar 58,16 dan realisasinya 58,16. Tahun 2016 target sebesar 65,14 dengan realisasi yang mencapai target. Tahun 2017 target sebesar 30 dengan realisasi yang melampaui target sebesar 33, sedangkan tahun 2018 persentase realisasi dan target pada indikator ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Sama halnya dengan dua indikator lainnya tahun 2018 masih stuck

di angka 33 untuk indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

#### 2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

##### ➤ Kinerja Daerah

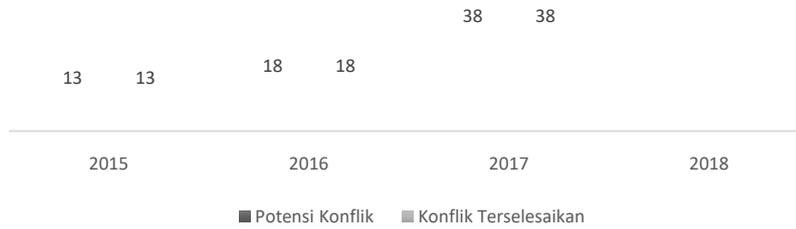
Data mengenai LSM, Ormas dan OKP merupakan data yang belum tertata untuk menggambarkan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Data tersebut penting untuk menggambarkan ketertiban dan pembinaannya. Adapun gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2. 32: Data Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kota Probolinggo Tahun 2012-2018**

NO	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (kali)	2	2	2	2	2	2	2
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan secara umum kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kegiatan. Sedangkan kegiatan pembinaan politik daerah juga setiap tahunnya mengalami angka kegiatan yang sama. Dari dua data diatas dapat disimpulkan bahwa urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun.



**Gambar 2. 17: Data Potensi Konflik (kejadian IPOLEKSOSBUD) Tahun 2015-2018**

Grafik 2.17 diatas menunjukkan bahwa potensi konflik di Kota Probolinggo masih tinggi, dimana dari tahun 2015 -2018 cenderung terus meningkat meskipun 100% dapat terselesaikan. Kejadian kondlik pada tahun 2015 sebanyak 13 kejadian meningkat menjadi 90 kejadian dalam kurun waktu 4 tahun menjadi 90 kejadian pada tahun 2018. Kenaikan signifikan terjadi tahun 2017 menuju 2019, dimana kejadian tahun 2017 sebanyak 38 meningkat tajam menjadi 90 kejadian.

**Tabel 2. 33: Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2017**

NO	Indikator	2016	2017
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	93,7%
2	Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	75,6%	75,6%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dari tahun 2016-2017 mengalami

penurunan. Sementara capaian dari indikator Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dari tahun 2016-2017 tetap.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat terdapat 14 indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan 1 yaitu Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, Tujuan 10 yaitu Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara, serta Tujuan 11 yaitu Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 34: Capaian Indikator SDGs Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat**

Indikator	Capaian					Target 2019	Keterangan
	2013	2014	2015	2016	2017		
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0	0	0	0	Menurun	
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	1	2	3	5	6	Meningkat menjadi 39 daerah	
Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Menurun menjadi 118,6	

Indikator	Capaian					Target 2019	Keterangan
	2013	2014	2015	2016	2017		
yang berisiko tinggi							
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Ada	
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	148	-	-	-	-	Menurun menjadi 30%	
Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk (Kelurahan Tangguh Bencana) Akumulasi tiap tahun	1	2	3	5	6	Meningkat	
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Tidak ada	Ada					
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Menurun	
Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Meningkat/ Ada	
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	

Indikator	Capaian					Target 2019	Keterangan
	2013	2014	2015	2016	2017		
daerah							
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	1	4	1	3	1	Menurun	
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Menurun	
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Meningkat	

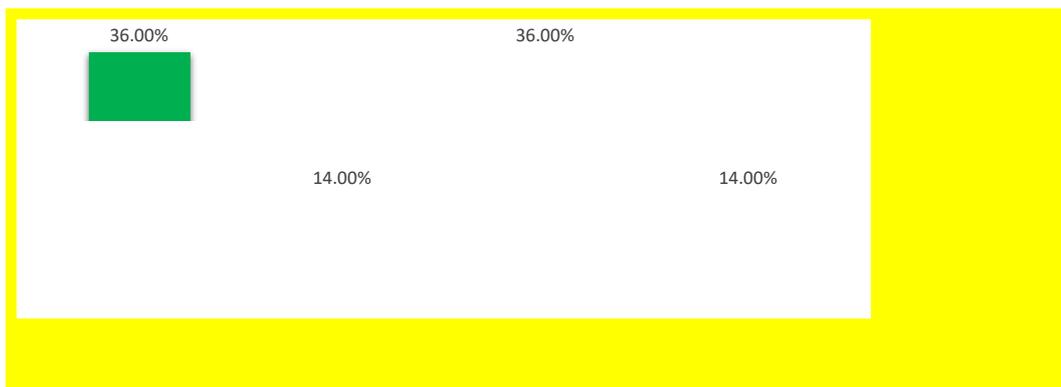
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indikator-indikator berikut: Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah, Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk (Kelurahan Tangguh Bencana) Akumulasi tiap tahun, Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah, Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah memenuhi target nasional. Selanjutnya untuk indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dan indikator Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, indikator tersebut sudah dilaksanakan tetapi belum mampu mencapai target nasional. Sedangkan indikator-indikator berikut: Indeks risiko

bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah, Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional, Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, dan Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya datanya belum tersedia. Terakhir, indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana dan indikator Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana merupakan indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

### **Gambar 2. 18 Capaian Indikator SDGs Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat**

#### ➤ **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Non Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat terdapat 7 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 35: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota	100%	100%	100%	90%	93,7%	100%
2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	75,6%	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari
3.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1.018	1.018	1.020	45,58%	1.034	1.034
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/ kota	64,17%	64,17%	64,17%	64,17	50%	66%
5.	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	75%	75%	75%	62,5%	52%	65%
6.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	56,25%	56,25%	56,25%	37,5%	25%	23%
7.	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	33%	33%	33%	33%	30%	33%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Probolinggo Tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM berupa Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota telah mampu memenuhi target tahun 2018. Capaian dari indikator tersebut pada

tahun 2018 adalah sebesar 100% dan telah mampu memenuhi target tahun 2018 yakni 100%. Indikator SPM lainnya yang telah mampu memenuhi target tahun 2018 yaitu Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 3 x patroli dalam sehari dan telah mampu memenuhi target tahun 2018 yakni 3 x patroli dalam sehari. Seperti halnya kedua indikator SPM diatas, indikator Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota juga telah mampu memenuhi target tahun 2018. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 1.034 dan telah mampu memenuhi target tahun 2018 yakni 1.020. Indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/ kota juga sudah mampu memenuhi target tahun 2018. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 66% dan sudah mampu memenuhi target tahun 2018 yakni 64,17%. Yang terakhir adalah indikator Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 33% dan masih belum mampu memenuhi target tahun 2018 yakni 33%.

Berbeda dengan capaian indikator SPM diatas, indikator-indikator SPM lainnya justru membutuhkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya masih belum mampu memenuhi target tahun 2018. Sebagai contoh yaitu indikator Tingkat waktu tanggap (*response time rate*). Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 65% dan belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 75%. Indikator lain yang belum mampu memenuhi target 2018 adalah, indikator Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi juga belum mampu memenuhi target tahun 2018. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2018

adalah sebesar 23% dan masih belum mampu memenuhi target tahun 2018 yakni 56,25%. Tingkat pemahaman petugas Satpol PP terhadap Perda masih beragam, ketersediaan mobil patroli dan mobil pemadam kebakaran yang kurang memadai serta kurangnya jumlah petugas bersertifikat menjadi faktor penyebab belum tercapainya target SPM dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sehingga diperlukan solusi seperti perlunya pelaksanaan sosialisasi tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pihak terkait, perlunya pelaksanaan sosialisasi Perda kepada anggota Satpol PP serta perlunya mengajukan penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas kendaraan pemadam kebakaran.

#### 2.4.1.6. Sosial

##### ➤ Kinerja Daerah

Gambaran umum kondisi daerah terkait pelaksanaan pembangunan sosial tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2. 36: Realisasi Kinerja Bidang Sosial Kota Probolinggo Tahun 2013 – 2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	7575	5944	74752	75337	68271	74187
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	6321	2327	18965	5425	1944	1253
3	persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri	16.94%	32.43%	40%	40%	40%	40%
4	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	302	345	336	2,172	2172	2172
5	Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	15	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Sosial Kota Probolinggo

Pada tabel diatas dapat dilihat Indikator sosial kota Probolinggo yakni, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan jumlah panti asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada indikator persentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri tahun 2013 sebesar 16.94%, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 32.43% angka ini cukup terbilang tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2013, tahun 2015 sebesar 39.93% dan tahun 2016 sebesar 39.94%. Dari data diatas indikator ini belum dapat mencapai angka realisasi melebihi 50% oleh karena itu perlunya peningkatan kinerja untuk beberapa tahun kedepan sehingga indikator ini dapat mencapai angka realisasi melebihi 50% meskipun realisasi yang didapat telah meningkat setiap tahunnya.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Sosial di Kota Probolinggo terdapat 6 Indikator yang dapat dihitung. Dari 6 indikator tersebut yang sudah terpenuhi sebanyak 2 indikator, 2 indikator lainnya telah terlaksanakan tetapi belum tercapai, dan 2 indikator lainnya belum dilaksanakan dan belum memenuhi target, terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 37 Capaian Indikator SDGs Urusan Sosial Kota Probolinggo**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,	7,97%	7,84%	Menurun menjadi 7-8%	

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	89,60%	24,86%	Meningkat menjadi 17,12%	
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	6616	6607	Menurun menjadi 2,8 juta (Tingkat penurunan sebesar 6,67%, di Kota Probolinggo = penurunan sebanyak 407 orang di 2019 atau menjadi 5.697 orang)	
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0%	0%	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,97%	7,84%	Menurun menjadi 7-8%	
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	20,14%	20,14%	Menurun	

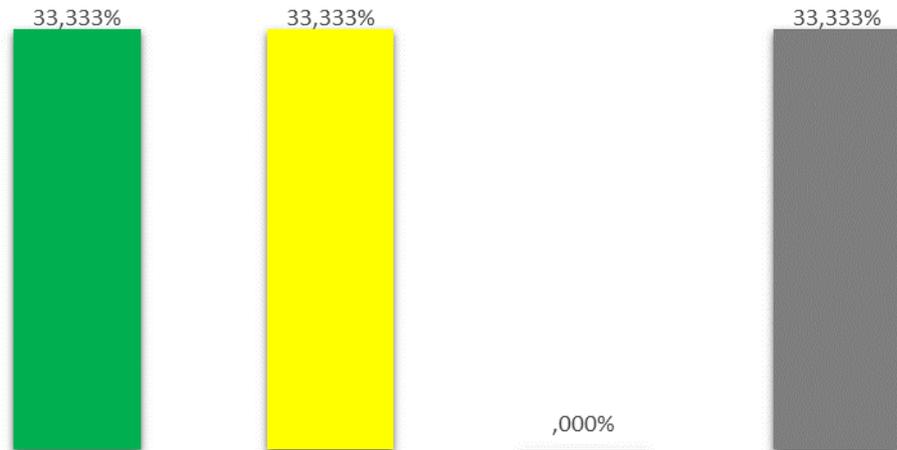
Sumber: KLHS Kota Probolinggo Tahun 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat sebagian besar capaian dari indikator TPB bidang Sosial Kota Probolinggo mengalami perkembangan yang masih dinilai kurang.

Hal ini ditunjukkan dengan 2 indikator yakni Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2016 sebesar 7,97% tahun 2017 7,84% dan Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur capaian 2016 sebesar 7,97% dan tahun 2017 sebesar 7,84%. Sedangkan indikator yang belum tercapai yakni Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas dengan capaian tahun 2016 sebesar 89,60% dan tahun 2017 sebesar 24,86% dengan target, meningkat menjadi 17,12%. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan dengan capaian tahun 2016 sebesar 6.616 tahun 2017 sebesar 6,607. Sedangkan Pendampingan psikososial korban bencana sosial dengan capaian tahun 2016 sebesar 0% tahun 2017 juga 0% dengan begini capaian tahun 2016-2017 masih dalam nilai yang stagnan hal ini juga berlaku pada indikator Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas dengan capaian tahun 2016 sebesar 20,14% dan tahun 2017 sebesar 20,14%.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

**Gambar 2. 19: Capaian Indikator SDGs Bidang Sosial**

➤ **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

**Tabel 2. 38: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial Tahun 2015-2017**

NO	SASARAN INDIKATOR SPM BIDANG SOSIAL	TARGET TAHUN 2015 (%)	REALISASI TAHUN 2015 (%)	TARGET TAHUN 2016 (%)	REALISASI TAHUN 2016 (%)	TARGET TAHUN 2017 (%)	REALISASI TAHUN 2017 (%)
1.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	19.853	80	11.11	80	9.46
2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80	57.6	80	100	80	100

NO	SASARAN INDIKATOR SPM BIDANG SOSIAL	TARGET TAHUN 2015 (%)	REALISASI TAHUN 2015 (%)	TARGET TAHUN 2016 (%)	REALISASI TAHUN 2016 (%)	TARGET TAHUN 2017 (%)	REALISASI TAHUN 2017 (%)
3.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80	17.5	80	100	80	85
4.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60	4.8	80	0	60	100
5.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	0	80	0	80	100
6.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	0	80	0	80	0
7.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	34	40	20.72	40	4.59

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo

Data SPM bidang sosial diatas menunjukkan bahwa terdapat tujuh indikator SPM bidang sosial di Kota Probolinggo. Indikator pertama Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target tahun 2015 sebesar 80 dan realisasinya 19,85 angka ini tergolong sangat kecil apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, membutuhkan usaha yang keras untuk meningkatkan kinerja daerah untuk mencapai target indikator tersebut. Tahun 2016 target tetap sebesar 80 dan realisasinya menurun sebesar 11,11. Tahun 2017 target tetap 80 dan realisasinya kembali mengalami penurunan sebesar 9,46, pada tiga tahun terakhir penurunan realisasi pada indikator ini membutuhkan perhatian yang lebih dari pihak Dinas Sosial. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dengan target tahun 2015 sebesar 80 dan realisasinya 57,6. Tahun 2016 target 80 dengan realisasi 100. Tahun 2017 target 80 dan realisasi 100, pada indikator ini realisasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah terkontrol dengan baik bahkan pada dua tahun terakhir realisasinya meningkat 50% bahkan melampaui target yang ditetapkan. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan terget tahun 2015 sebesar 80 dan realisasi 17,5. Tahun 2016 target sebesar 80 dengan realisasi 100. Tahun 2017 target 80 dengan realisasi 85, pada indikator ini tahun 2016 realisasinya berhasil meningkat 82,5% dari tahun 2015 akan tetapi pada tahun 2017 realisasinya kembali turun sebesar 85% meskipun demikian angka ini masih melampaui target yang ditetapkan. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,

serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan target tahun 2015 sebesar 40 dan realisasinya sebesar 34. Tahun 2016 target sebesar 40 dengan realisasi 20,72 dan tahun 2017 target tetap sebesar 40 dengan perolehan realisasi sebesar 4,59 angka realisasi di tahun ini dinilai lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 serta pada indikator ini realisasinya cenderung stabil mengalami penurunan. Selain itu terdapat indikator Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

**Tabel 2. 39 Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial Tahun 2018**

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL 2018 (%)	TARGET DAERAH 2018 (%)	VOLUME	REALISASI 2018 (%)
1.	Persentase (%) skala kab/kota Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	80	183 orang	85,07
2.	Persentase (%) skala kab/kota Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	80	30 Org	100

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL 2018 (%)	TARGET DAERAH 2018 (%)	VOLUME	REALISASI 2018 (%)
3.	Persentase (%) skala kab/kota Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	80	367 orang	98,06
4.	Persentase (%) skala Kab/Kota Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	60	60	0	0
5.	Persentase (%) skala Kab/Kota Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota. yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	80	100	50

Sumber: Data SPM Kota Probolinggo

Data SPM bidang sosial diatas menunjukkan bahwa terdapat lima indikator yang dapat dihitung pada tahun 2018, yakni Persentase (%) skala kab/kota Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target daerah 80 angka realisasi pada tahun 2018 sebesar 85,07 angka persentase ini cukup baik karena telah melampaui target yang ditetapkan daerah, Persentase (%) skala kab/kota Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar target pada indikator ini sebesar 80 dengan persentase realisasi sebesar 100 yang telah mencapai

target bahkan melampauinya, Persentase (%) skala kab/kota Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target daerah sebesar 80 dan angka realisasinya mencapai 98,06 angka tersebut sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan, Persentase (%) skala Kab/Kota Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target sebesar 60 sedangkan angka realisasinya masih 0 hal ini dapat berarti dinas terkait belum melaksanakan indikator tersebut sehingga tidak terdapat catatan realisasi tahun 2018 atau belum tersedianya data di dinas terkait, Persentase (%) skala Kab/Kota Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan target sebesar 80 dan angka realisasi sebesar 50 angka tersebut cenderung rendah dan masih perlunya untuk perbaikan secepatnya karena hal ini berhubungan dengan korban bencana yang membutuhkan bantuan sehingga diperlukannya kinerja yang maksimal oleh dinas terkait ataupun pihak pemerintah.

## **2.4.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Non Dasar**

### **2.4.2.1. Ketenagakerjaan**

#### **➤ Kinerja Daerah**

Urusan ketenagakerjaan merupakan urusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Oleh sebab itu urusan ketenagakerjaan merupakan salah indikator kinerja yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan urusan ketenagakerjaan menggambarkan

kualitas sumber daya manusia daerah tersebut yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kemudian mempengaruhi tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Indikator kinerja daerah dari urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka. Berikut merupakan grafik yang memaparkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga 2017.

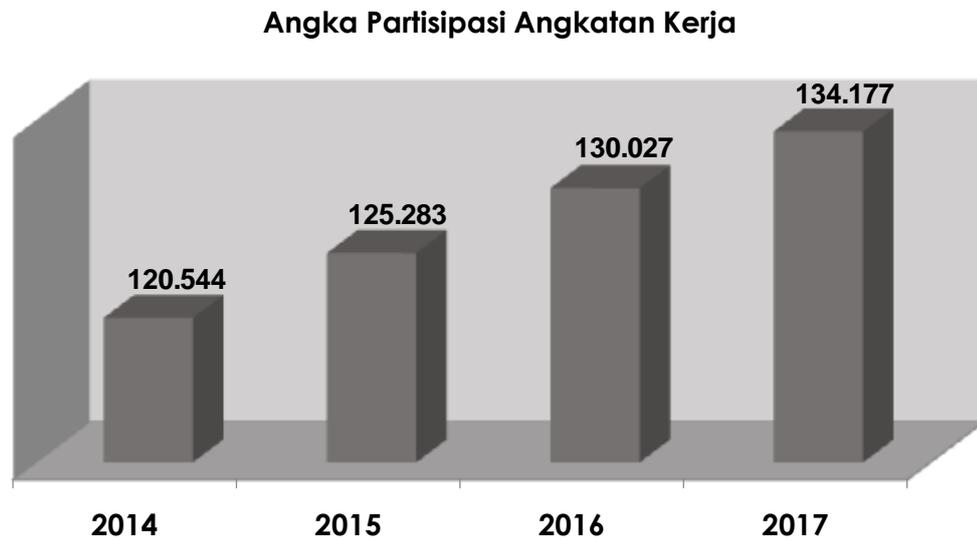


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

### **Gambar 2. 20: Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Probolinggo**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga 2016 cenderung stagnan diangka 4,01. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik diatas yang menunjukkan adanya penurunan TPT setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir. TPT Kota Probolinggo tahun 2018 sebesar 3,42%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengatasi kesenjangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja sudah dilaksanakan dengan cukup baik mengingat bahwa permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi permasalahan nasional saat ini. Adanya perkembangan positif dari TPT yang mengalami penurunan tersebut dapat memberikan dampak positif juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indikator laian dalam urusan ketenagakerjaan selain TPT adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Berikut merupakan grafik yang memaparkan angka partisipasi angkatan kerja di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

**Gambar 2. 21: Angka Partisipasi Angkatan Kerja**

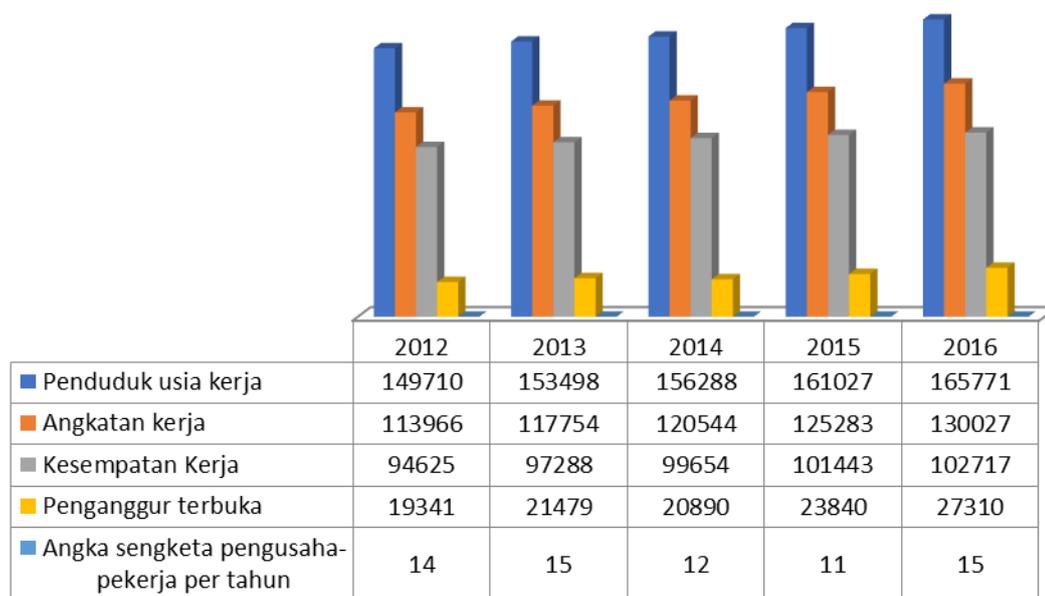
Angka partisipasi angkatan kerja di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan. Angkatan partisipasi angkatan kerja tahun 2017 sebesar 134.177. Berikut merupakan grafik yang menyajikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan pencari kerja yang ditempatkan dalam persentase di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo 2019

**Gambar 2. 22: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pencari Kerja yang Ditempatkan**

Perkembangan positif terjadi pada tingkat partisipasi angkatan kerja yang secara garis besar mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Probolinggo tahun 2017 sebesar 67,45. Sejalan dengan hal tersebut persentase pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami kenaikan selama 2014 hingga 2016. Namun tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,5% sehingga persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 73,4%. Indikator lainnya yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan yang disajikan dalam grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

### Gambar 2. 23: Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan

Beberapa indikator lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan diantaranya adalah jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja dan jumlah penganggur terbuka serta angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun. Jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia kerja mencapai 165.771, jumlah angkatan kerja sebanyak 130.027 dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia sebesar 102.717.

Secara garis besar jumlah pengangguran terbuka di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami kenaikan. Pengecualian terjadi pada tahun 2014 dimana sempat terjadi penurunan sebanyak 589. Tahun 2015 mengalami kenaikan kembali sehingga mencapai angka 23.840. Tahun 2016 jumlah penganggur terbuka mengalami kenaikan sebesar 3.470 sehingga mencapai

angka 27.310. Hal berbeda terjadi pada angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun mengalami fluktuasi selama tahun 2012 hingga 2016. Tahun 2014 dan 2015 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun angka sengketa pengusaha dengan pekerja tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebanyak 4 kasus sengketa sehingga mencapai angka 15 kasus.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja. Selisih jumlah diantara kedua data selama kurun waktu lima tahun tersebut cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 selisih antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja sebanyak 27.310. Hal tersebut menggambarkan kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang menjadi penyebab permasalahan tingkat pengangguran dan tingkat perekonomian suatu daerah. Hal yang juga menjadi bagian dari urusan ketenagakerjaan adalah terkait sengketa tenaga kerja. Berikut merupakan tabel yang memaparkan persentase urusan ketenagakerjaan terkait sengketa di Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.

**Tabel 2. 40: Persentase Urusan Ketenagakerjaan terkait Sengketa**

<b>Rincian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)</b>	5,3%	3,7%	4,17%	3,88%
<b>Keselamatan dan perlindungan (%)</b>	71,4%	76,1%	76,7%	dialihkan ke Provinsi
<b>Perselisihan buruh terhadap kebijakan daerah (%)</b>	100%	81,8%	88,8%	69,2%

Sumber : Dinas Tenaga kerja

Persentase angka sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut sejalan dengan persentase perselisihan buruh terhadap kebijakan daerah. Namun sengketa antara pengusaha dan pekerja tahun 2017 telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga capaiannya sebesar 3,88%. Hal yang sama juga terjadi pada perselisihan buruh terhadap kebijakan daerah tahun 2017 yang mengalami penurunan sehingga menjadi 69,2%. Penurunan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam urusan ketenagakerjaan telah dilakukan dengan baik. Capaian positif tersebut juga didukung dengan persentase keselamatan dan perlindungan selama 3 tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Probolinggo terkait perlindungan tenaga kerja juga dilakukan dengan baik.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari 3 indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian ketiga indikator:

**Tabel 2. 41: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Ketenagakerjaan**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	56,2%	66,7%	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal (Proporsi tahun 2019 = 51,86%)	

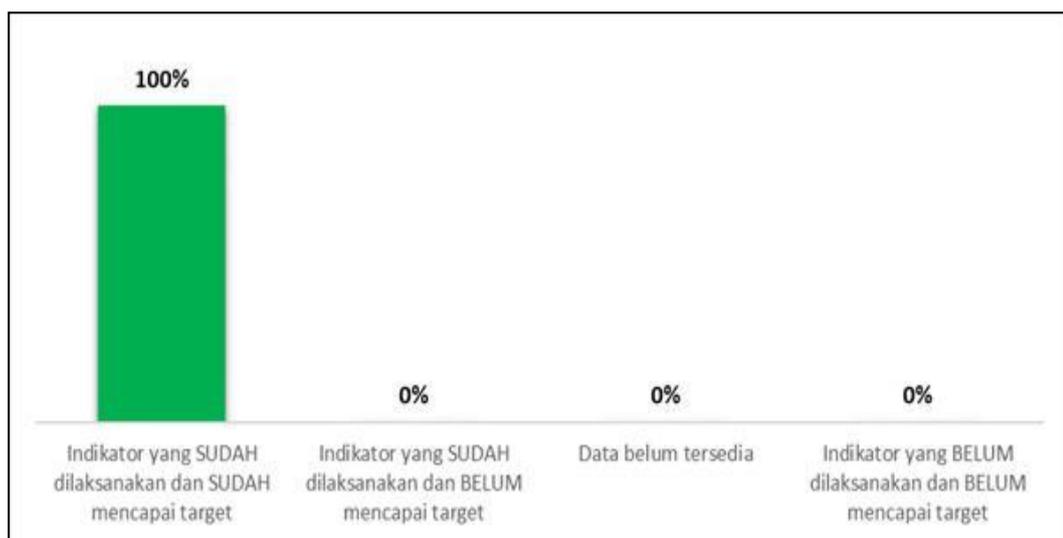
Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Upah rata-rata per jam pekerja	1603000	1735247.5	Meningkat	
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	-	-	Meningkat	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas terdapat tiga (3) indikator SDGs bidang Ketenagakerjaan Kota Probolinggo. Keseluruhan 3 indikator tersebut SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target. Indikator tersebut diantaranya adalah proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2017 sebesar 66,7%; upah rata-rata per jam pekerja tahun 2017 sebesar Rp 1.735.247.5 serta jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

**Gambar 2. 24: Capaian Indikator SDGs Bidang Ketenagakerjaan**

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan indikator pada Bidang Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase sebesar 100%.

➤ **Standar Pelayanan Minimum**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Ketenagakerjaan terdapat 7 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 42: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketenagakerjaan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2015		2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60 (150 orang)	42,7 (64 orang)	60 (1.069 orang)	71,8 (768 orang)	60 (1.531 orang)	76,3 (1.168 orang)
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60 (58 orang)	69 (40 orang)	60 (150 orang)	70 (105 orang)	60 (125 orang)	84 (105 orang)
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	1. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40 (2.388 orang)	101,2 (2.366 orang)	40 (2.086 orang)	85,8 (1.789 orang)	40 (28.076 orang)	73,97 (20.769 orang)
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50 (14 kasus)	64,3 (9 kasus)	50 (11 kasus)	54,5 (6 kasus)	50 (18 kasus)	88,9 (16 kasus)
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	1. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50 (22.360 orang)	53,8 (12.030 orang)	50 (25.371 orang)	48,7 (12.355 orang)	50 (30.240 orang)	56,2 (17.005 orang)
5	Pelayanan Pengawasan	1. Besaran pemeriksaan	45 (301 perusa)	41,5 (125 perusah)	45 (322 perusa)	46,6 (150 perusah)	45 (335 perusa)	44,8 (150 perusah)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2015		2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Ketenagakerjaan	perusahaan	haan)	aan)	haan)	aan)	haan)	aan)
		2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50 (202 peralatan)	49,5 (100 peralatan)	50 (404 peralatan)	24,5 (99 peralatan)	50 (406 peralatan)	44,3 (180 peralatan)

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Probolinggo tahun 2016 pada Bidang Ketenagakerjaan diatas menunjukkan bahwa indikator dari jenis pelayanan dasar Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan belum memenuhi target. Realisasi dari indikator Besaran pemeriksaan perusahaan tahun 2016 sebesar 44,8% (150 perusahaan) belum memenuhi target tahun 2016 yakni sebesar 45% (335 perusahaan). Target tahun 2016 dari indikator Besaran pengujian peralatan di perusahaan sebesar 50 (406 peralatan) hanya mampu dicapai oleh Kota Probolinggo sebesar 44,3% (180 peralatan).

Kondisi tersebut disebabkan masih terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan norma kerja dan masih belum ada pengawas spesialis *boiler*. Upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan diantaranya adalah pelaksanaan sistem *monitoring* dan evaluasi secara berkala; adanya ketegasan dalam penegakan sanksi (dapat dilakukan dengan pemberian nota apabila terdapat pelanggaran) serta pengajuan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait spesialis *boiler* kepada kantor pusat. Permasalahan ini perlu segera ditangani mengingat bahwa kualitas pelayanan pengawasan ketenagakerjaan berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan keamanan tenaga kerja serta lingkungan hidup.

## 2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### ➤ Kinerja Daerah

Kinerja yang bagus pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah pada Persentase jumlah pekerja dibawah umur. Adapun gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2. 43: Data Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2012-2017**

NO	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	2.410	2.335	2.342	2.285	2.235
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	49,84	49,9	49,9	49,9	50,11
3	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	12.654	10.511	9.661	10.891	14.251
4	Persentase jumlah pekerja dibawah umur	-	-	-	-	-

Sumber: BPPKB Kota Probolinggo, 2012 – 2016

Berdasarkan data di atas dapat dilihat kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Probolinggo dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup baik dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa emansipasi wanita di Kota Probolinggo cukup baik. Dengan adanya pekerja perempuan pada lembaga-lembaga pemerintah maka kesetaraan perempuan diakui dalam ruang lingkup lembaga pemerintah.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Non Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 11 indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan 5 yaitu Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 44: Capaian Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	0,15%	0,19%	Bertambah sebanyak 16 (84,21%)	
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	20%	20%	Menurun	
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	20%	20%	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,17%	0,17%	Menurun	
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	20%	20%	Meningkat menjadi 70%	
Proporsi perempuan umur 20-	n/a	n/a	Menurun	

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun				
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	< 21 th	< 21 th	Meningkat menjadi 21 tahun	
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	94,40%	96,14%	Menurun menjadi 38 tahun	
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	5	5	Meningkat	
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	19,23%	17,24%	Meningkat	
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	77,98%	77,14%	Meningkat	

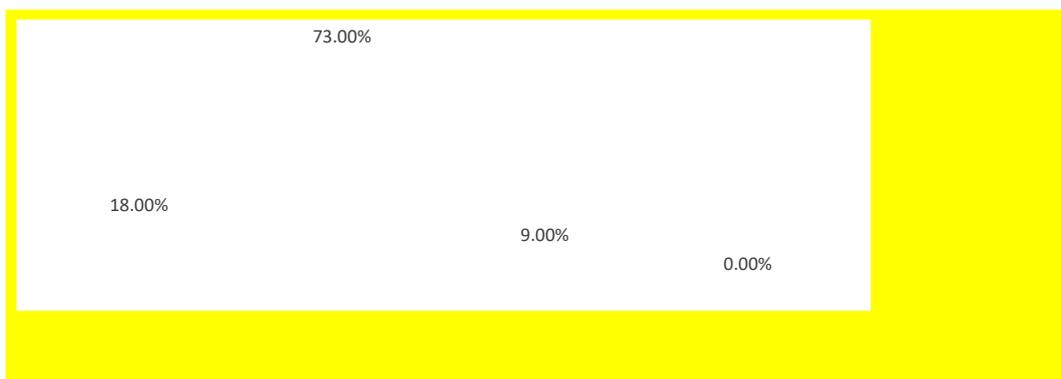
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data tabel diatas, indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dan indikator Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Sementara untuk indikator-indikator berikut ini Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan, Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau

emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir, Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir, Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR), Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah, Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, serta indikator Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Terakhir yaitu indikator Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun merupakan indikator yang datanya masih belum tersedia.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

**Gambar 2. 25 Capaian Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

➤ **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Non Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat terdapat 7 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 45: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimum	Target			Capaian		
		100%	100%	100%	90%	93,7%	100%
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota	100%	100%	100%	90%	93,7%	100%
2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	100%	75,6%	3 x patroli dalam sehari
3.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	17 personil Linmas tiap Kelurahan	1.018	1.018	0	45,58%	1.034
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/ kota	64,17%	64,17%	64,17%	64,17	64,17	50%
5.	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	75%	75%	75%	62,5%	62,5%	52%
6.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	56,25%	56,25%	56,25%	37,5%	37,5%	25%
7.	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	33%	33%	33%	33%	33%	30%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Probolinggo Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM berupa Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota telah mampu memenuhi target tahun 2017. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dan telah mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 100%. Indikator SPM lainnya yang telah mampu memenuhi target tahun 2017 yaitu Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 3 x patroli dalam sehari dan telah mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 3 x patroli dalam sehari. Seperti halnya kedua indikator SPM diatas, indikator Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota juga telah mampu memenuhi target tahun 2017. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 1.034 dan telah mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 1.018.

Berbeda dengan capaian indikator SPM diatas, indikator-indikator SPM lainnya justru membutuhkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan realisasi capaian dari indikator-indikator SPM lainnya masih belum mampu memenuhi target tahun 2017. Sebagai contoh yaitu indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/ kota yang masih belum mampu memenuhi target tahun 2017. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 50% dan belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 64,17%. Indikator lainnya yang perlu mendapat perhatian lebih adalah Tingkat waktu tanggap (*response time rate*). Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 52% dan belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 75%. Seperti halnya kedua indikator sebelumnya, indikator Persentase

aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi juga belum mampu memenuhi target tahun 2017. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 25% dan masih belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 56,25%. Yang terakhir adalah indikator Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK. Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 30% dan masih belum mampu memenuhi target tahun 2017 yakni 33%. Tingkat pemahaman petugas Satpol PP terhadap Perda masih beragam, ketersediaan mobil patroli dan mobil pemadam kebakaran yang kurang memadai serta kurangnya jumlah petugas bersertifikat menjadi faktor penyebab belum tercapainya target SPM dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sehingga diperlukan solusi seperti perlunya pelaksanaan sosialisasi tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pihak terkait, perlunya pelaksanaan sosialisasi Perda kepada anggota Satpol PP serta perlunya mengajukan penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas kendaraan pemadam kebakaran.

#### **2.4.2.3. Ketahanan Pangan**

##### **➤ Kinerja Daerah**

Urusan di bidang ketahanan pangan merupakan salah satu indikator penting dalam proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan urusan pangan berkaitan dengan ketersediaan tanaman pangan guna pemenuhan bahan makanan pokok masyarakat untuk keberlangsungan hidup. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia selain sandang dan papan. Urusan di bidang pangan mempengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Salah satu indikator yang berkaitan dengan urusan ketahanan pangan adalah skor pola

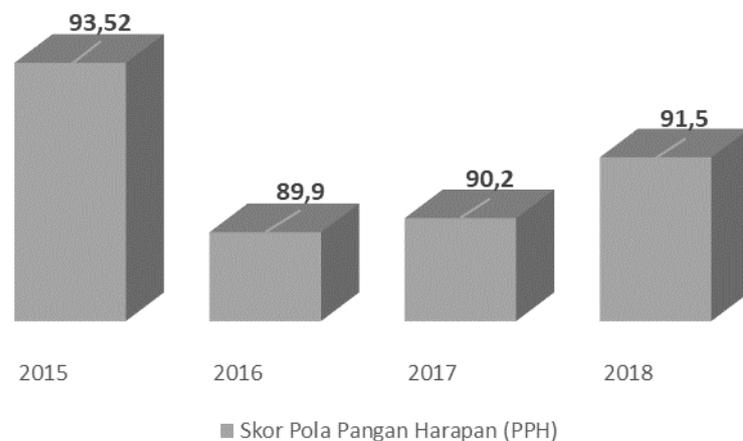
pangan (PPH). Berikut merupakan data tersebut Pola Pangan Harapan:

**Tabel 2. 46: Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

NO	Komoditi/ Bahan Pangan	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Padi-padian	25	18,7	25	25
2	Umbi -umbian	2,2	2,2	1,2	1,4
3	Pangan Hewani	18,8	21,5	18,4	19,1
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5	5
5	Buah/Biji Berminyak	0,0	-	0,4	0,5
6	Kacang -kacangan	10,0	10,0	9,1	9,2
7	Gula	2,5	2,5	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	30	30,0	28,6	28,8
9	Lain-lain	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>93,52</b>	<b>89,9</b>	<b>90,2</b>	<b>91,5</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

\*) Data Proyeksi Skor PPH Konsumsi Berdasarkan Susena BPS, Maret 2017

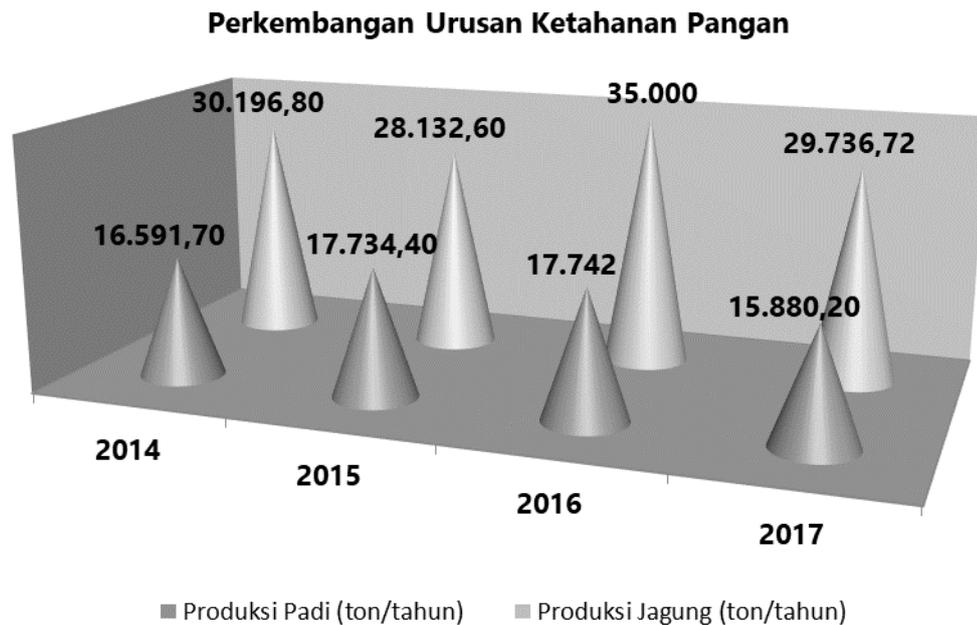


Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

**Gambar 2. 26: Skor Pola Pangan Kota Probolinggo**

Skor pola pangan (PPH) Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga 2017 secara garis besar mengalami fluktuasi. Skor PPH terbesar dicapai pada tahun 2016 yakni dengan skor 89,9. Capaian tahun 2016 tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah penurunan yang terjadi pada tahun 2018 sehingga skor PPH turun

menjadi 91,5. Urusan pangan juga dapat dilihat dari jumlah produksi pangan utama yakni beras dan jagung. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan urusan ketahanan pangan di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Gambar 2. 27: Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan**

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar produksi padi per tahun (dalam ton) di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan. Namun produksi padi tahun 2017 mengalami penurunan kurang lebih 2.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya sehingga hanya sebesar 15.880,20 ton/tahun. Produksi padi terbesar terjadi pada tahun 2016 yakni sebanyak 17.742 ton. Secara garis besar produksi jagung mengalami fluktuasi selama 4 tahun terakhir. Sejalan dengan

produksi padi, produksi jagung terbanyak selama 4 tahun terakhir juga terjadi pada tahun 2016 dengan capaian sebanyak 35.000 ton. Sedangkan produksi jagung tahun 2017 hanya sebesar 29.736,72 ton atau mengalami penurunan kurang lebih 6.000 ton. Hal yang perlu diperhatikan adalah penurunan produksi padi dan jagung di Kota Probolinggo yang terjadi pada tahun 2017. Penurunan produksi bahan pangan pokok tersebut berkaitan dengan ketersediaan lahan dan proses produksi.

**Tabel 2. 47: Komoditi Ketersediaan Pangan (Ton)**

No	Komoditi / Bahan Pangan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018*)
1	Padi/Beras	28,170	13.480	18.850	<b>18.948</b>
2	Jagung	1,561	31.645	26.472	<b>29.853</b>
3	Kedelai	1,183	-	9	<b>9</b>
4	Ubi Kayu	2,101	2	1.059	<b>1.059</b>
5	Ubi Jalar	333	2	750	<b>750</b>
6	Kacang Tanah	87	2	65	<b>65</b>
7	Kacang Hijau	50	11	61	<b>61</b>
8	Daging	330	3.315	2.154	<b>2.194</b>
9	Telur	1,348	133	2.364	<b>2.366</b>
10	Susu	379	455	372	<b>380</b>
11	<b>Ikan</b>	<b>14,580</b>	<b>24.158</b>	<b>13.168</b>	<b>18.032</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

Data diambil dari Neraca Bahan Makanan, Angka Sementara (ASEM)

**Tabel 2. 48: Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Th)**

No	Komoditi / Bahan Pangan	TAHUN			
		2015	2016*)	2017**)	2018 ***)
	Padi-padian :	129,83	95,7	97,4	111,9
1	Padi/Beras	123,01	93,4	93,0	
2	Jagung	6,82	2,3	4,4	
	Umbi-umbian :	10,62	14,2	12,4	18,9
3	Ubi Kayu	9,17	10,6	10,8	
4	Ubi Jalar	1,45	3,5	1,6	
	Kacang-kacangan :	5,77	14,9	14,1	13,8
	Kedelai	5,17	13,7	13,9	

5	Kacang Tanah	0,38	0,9	0,2	
6	Kacang Hijau	0,22	0,2	-	
	Pangan Hewani :	61,64	55,8	38,5	40,3
7	Daging	1,44	16,6	8,7	
8	Telur	5,89	11,9	7,2	
9	Susu	1,66	10,0	2,0	
10	Ikan	52,65	17,3	20,7	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019

\*) Data PPH Konsumsi Primer 2016

\*\*\*) Data Susenas BPS, Maret 2017

\*\*\*\*) Data Proyeksi rata-rata Konsumsi Pangan, base Susenas BPS, Maret 2017

### ➤ Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Pangan terdiri dari 3 indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian ketiga indikator:

**Tabel 2. 49: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Pangan**

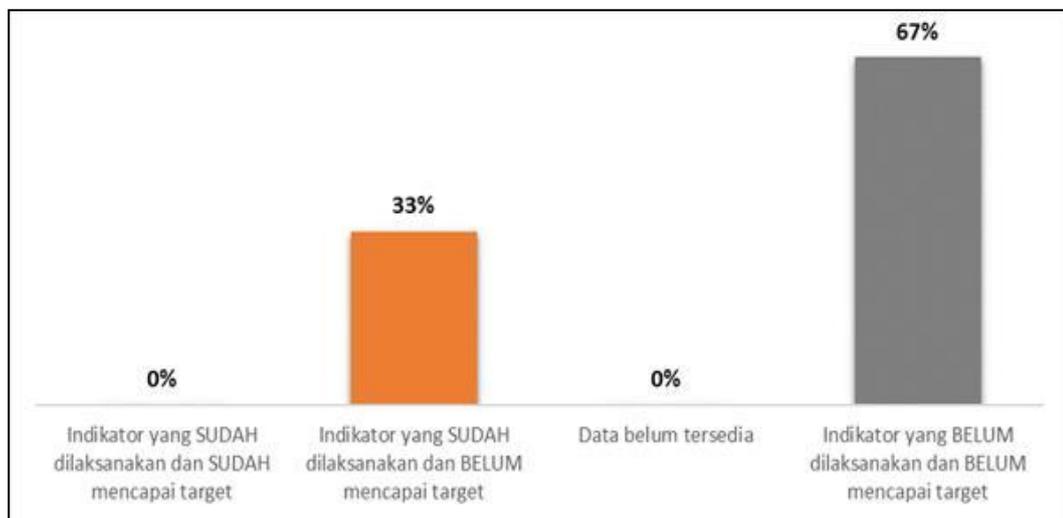
Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	na	na	Menurun	
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	na	na	Menurun	
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	89,67	57,19	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari ketiga indikator bidang Pangan Kota Probolinggo terdapat satu indikator yang SUDAH dilaksanakan namun capaian tahun 2017 BELUM mencapai target. Capaian indikator kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan tahun 2017 sebesar 57,19 namun belum mencapai target untuk meningkat menjadi 92,5. Kedua indikator lainnya BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional yakni prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

### **Gambar 2. 28: Capaian Indikator SDGs Bidang Pangan**

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sebesar 67% Indikator SDGs Bidang Pangan di Kota Probolinggo BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target. Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target sebanyak 33%. Indikator

yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target serta indikator dengan data yang belum tersedia sebesar 0%.

➤ **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Ketahanan Pangan terdapat 7 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 50: Capaian Standar Pelayanan minimum Bidang Ketahanan Pangan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2016	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Ketersediaan dan Cadangan Makanan	3. Ketersediaan Energi dan Protein Per-Kapita	87	129,84	90	222,74
		4. Penguatan Cadangan Pangan	55	34	60	84,37
2	Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	89	66,67	90	66,67
		2. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	87	100	90	100
3	Penganekaragaman dan Keamanan Makanan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86	84,1	90	89,67
		2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	75	68,09	80	44,12
4	Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	55	100	60	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Probolinggo tahun 2016 pada Bidang Ketahanan Pangan diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator yang belum memenuhi target. Ketiga indikator tersebut terdiri dari 1 indikator dari jenis pelayanan dasar distribusi dan 2 indikator dari akses pangan serta penganekaragaman dan keamanan makanan. Ketercapaian

yang belum memenuhi target tersebut merupakan permasalahan di Bidang Ketahanan Pangan yang perlu segera ditangani dikarenakan pangan berkaitan dengan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan realisasi tahun 2016 sebesar 66,67% belum memenuhi target tahun 2016 yakni sebesar 90%. Kondisi tersebut menunjukkan belum meratanya distribusi dan aksesibilitas terkait pangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan adalah perbaikan sistem pemerataan dan infrastruktur pada bidang pangan.

Permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo lainnya adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH masyarakat Kota Probolinggo tahun 2016 sebesar 89,67% belum memenuhi target tahun 2016 yakni sebesar 90%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi standar kebutuhan gizi. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat daya beli masyarakat dan pemahaman (*mindset*) mengenai pentingnya pemenuhan pola konsumsi yang sesuai kaidah gizi yang masih rendah. dikarenakan realisasi indikator tersebut tahun 2016 sebesar 44,12%. Realisasi tahun 2016 sebesar 44,12% dari indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan juga belum memenuhi target tahun 2016 sebesar 80%. Pengetahuan masyarakat terkait keamanan pangan yang masih kurang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan bahan tambahan makanan pangan yang tidak aman. Selain itu dikarenakan ketersediaan dari bahan makanan pangan tersebut dengan harga yang murah juga menjadi pertimbangan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan

guna meningkatkan PPH serta Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat serta makanan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman). Selain itu faktor tingkat perekonomian masyarakat juga mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat dalam pemenuhan konsumsi yang sehat bergizi.

#### 2.4.2.4. Pertanahan

Kinerja pertanahan merupakan wewenang instansi vertikal Badan Pertanahan. Namun demikian pemerintah daerah juga cukup punya andil untuk memberikan sosialisasi tentang ketertiban pertanahan. Kinerja pelaksanaan urusan pertanahan tingkat capaiannya dapat digambarkan melalui indikator kinerja sebagai berikut

**Tabel 2. 51: Kinerja Layanan Pertanahan Kota Probolinggo Tahun 2012-2016**

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tanah yang Bersertifikat	2.985	3.939	2.912	2.666	2.506	5.691
2	Penyelesaian ijin lokasi	1	1	1	0	0*	n/a
3	Penyelesaian kasus pertanahan	1	4	3	5	5*	n/a

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

\*: angka sementara

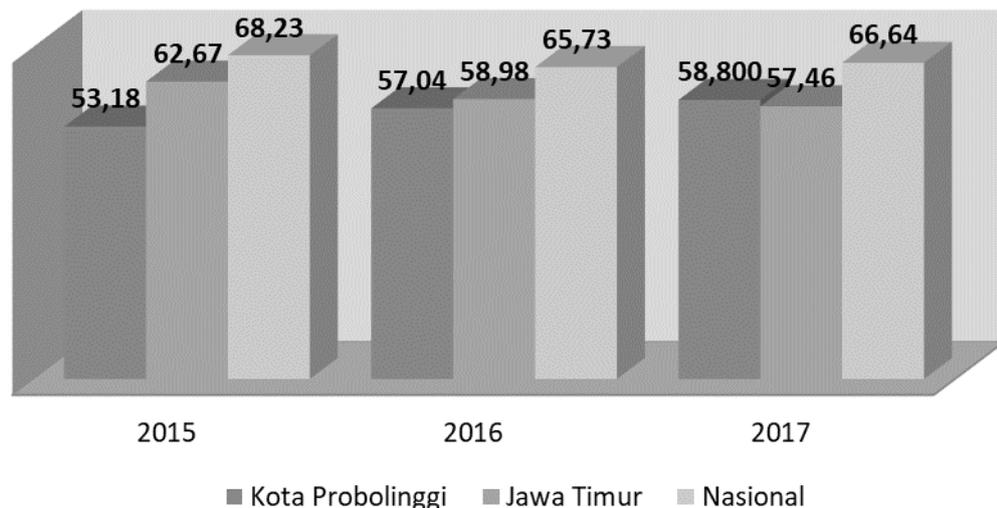
Berdasarkan tabel di atas secara umum kinerja layanan pertanahan Kota Probolinggo cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tanah yang bersertifikat tiap tahunnya telah mencapai angka yang cukup baik. Tidak hanya itu saja dalam dua tahun terakhir terkait permasalahan ijin lokasi Kota Probolinggo tidak menerima permasalahan terkait ijin lokasi dapat disimpulkan

bahwa pada beberapa tahun terakhir permasalahan terkait ijin lokasi semakin sedikit.

#### 2.4.2.5. Lingkungan Hidup

##### ➤ Kinerja Daerah

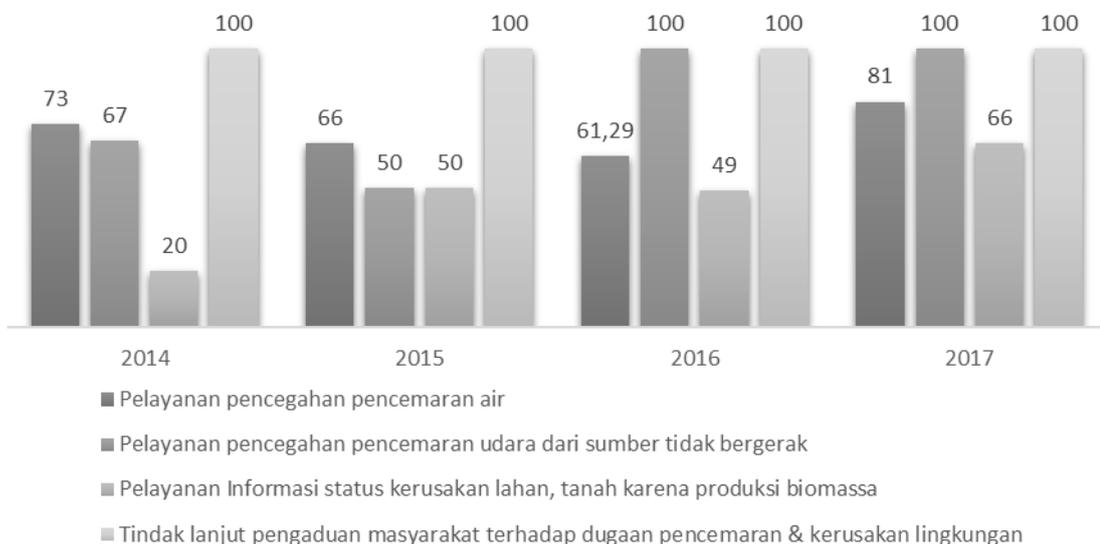
Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di sekitar masyarakat. Lingkungan hidup juga dapat menggambarkan gaya hidup masyarakat yang berkaitan dengan perhatian terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Urusan lingkungan hidup suatu daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan urusan lingkungan hidup mempengaruhi tingkat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator kinerja daerah dari urusan lingkungan hidup dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidup. Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga 2017.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

**Gambar 2. 29: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

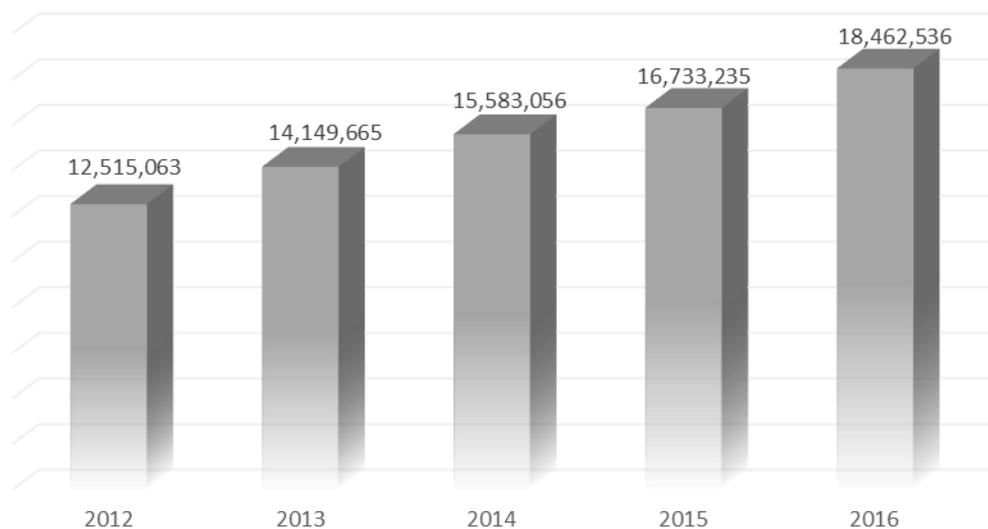
Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan tren positif. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik diatas yang menunjukkan adanya kenaikan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2017 sebesar 58,80 atau mengalami kenaikan sebesar 1,76 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Probolinggo mengalami perkembangan yang positif dalam pembangunan urusan lingkungan hidup. Urusan di bidang lingkungan hidup juga dapat dilihat dari pelayanan terkait kelestarian lingkungan, penanganan sampah dan jumlah penegakan hukum lingkungan hidup. Berikut merupakan grafik yang memaparkan persentase perkembangan pelayanan dalam urusan lingkungan hidup Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017. Secara keseluruhan, IKLH Kota Probolinggo masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

**Gambar 2. 30: Persentase Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Lingkungan Hidup**

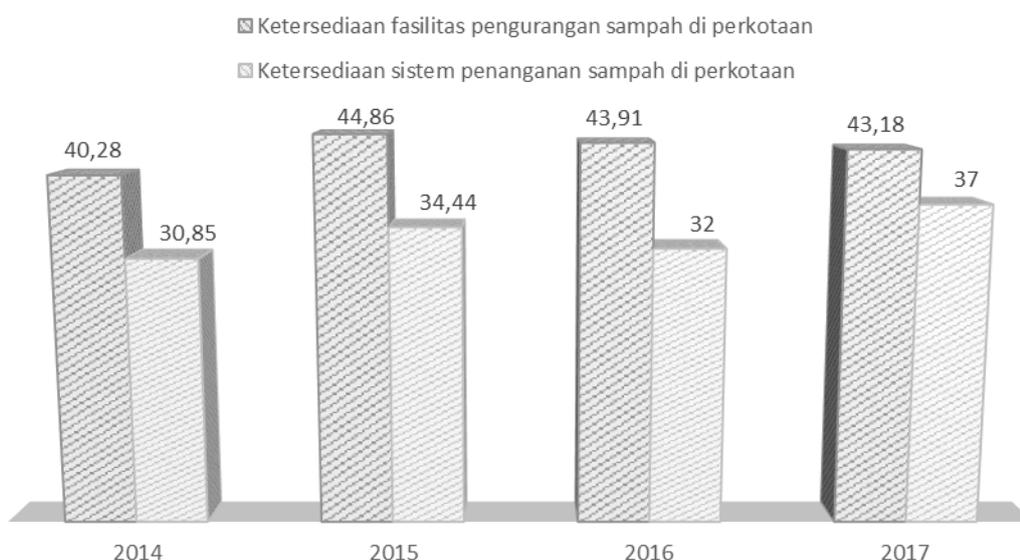
Pelayanan Pemerintah Kota Probolinggo terkait pencegahan pencemaran air dan informasi status kerusakan lahan serta tanah karena produksi biomassa selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Namun kedua pelayanan tersebut telah mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Pelayanan yang paling stabil selama 4 tahun terakhir adalah tidak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan capaian angka 100%. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 namun selama 2016 hingga 2017 stabil mencapai angka 100%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase pelayanan dalam urusan lingkungan hidup tahun 2017 telah mengalami *progress* positif dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu hal utama yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup adalah terkait sampah, berikut merupakan grafik yang memaparkan volume sampah yang masuk TPA (kg/tahun) di Kota Probolinggo tahun 2012 hingga 2016.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

**Gambar 2. 31: Jumlah Volume Sampah yang Masuk TPA (Kg/Th)**

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah volume sampah yang masuk di TPA Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Jumlah volume sampah tahun 2016 mencapai 18.462.536 Kg/Tahun. Jumlah tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1.729.301 Kg/Th dibandingkan tahun 2015. Peningkatan volume sampah menunjukkan bahwa jumlah konsumsi masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring semakin tingginya jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan serta gaya hidup masyarakat saat ini. Jumlah volume sampah berkaitan erat dengan pengelolaan sampah suatu wilayah, berikut merupakan grafik yang menyajikan persentase perkembangan penanganan sampah Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

**Gambar 2. 32: Persentase Perkembangan Penanganan Sampah**

Ketersediaan fasilitas dan sistem dalam penanganan sampah di Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017 tidak memiliki perbedaan angka (dalam persentase) yang jauh. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan selama 4 tahun terakhir

yang mengalami penurunan merupakan poin penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan volume sampah yang masuk di TPA (kg/tahun) selama tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, ditambah dengan kepadatan dan gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini maka ketersediaan fasilitas sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun capaian tahun 2017 telah mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu fasilitas dalam pengurangan sampah adalah jumlah tempat pembuangan sampah (TPS). Penegakan hukum terkait lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk sistem terkait penanganan sampah. Berikut merupakan tabel yang menyajikan jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan jumlah penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.

**Tabel 2. 52: Jumlah TPS per Satuan Penduduk dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2012-2016**

Urusan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah TPS per Satuan Penduduk	1:2.100	1:2.500	1:2.700	1:2.700	1:2.750
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Kali)	10	12	31	18	8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Probolinggo tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 50 dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah TPS tahun 2016 mencapai rasio 1:2.750 per satuan penduduk. Jumlah penegakan hukum lingkungan hidup mengalami fluktuasi selama

tahun 2012 hingga 2016. Tahun 2014 sempat mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat dari jumlah tahun 2013. Tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan dan mencapai jumlah 8 pada tahun 2016. Berikut merupakan tabel yang memaparkan perkembangan urusan lingkungan hidup Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.

**Tabel 2. 53: Perkembangan Urusan Lingkungan Hidup**

Rincian	2014	2015	2016	2017
Luas Tempat Pemakaman umum per satuan Penduduk (Hektar)	56,4	56,4	56,4	56,4
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	1,01	1	1,37	1,37
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	10	25	25	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Hal yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup diantaranya adalah terkait dengan penggunaan lahan dan upaya dalam pelestarian lingkungan. Salah satu wujud penggunaan lahan suatu wilayah adalah tempat pemakaman umum. Luas tempat pemakaman umum per satuan penduduk (hektar) di Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017 stabil pada angka 56,4 hektar. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam pelestarian lingkungan diantaranya adalah penurunan emisi gas rumah kaca dan cakupan penghijauan. Secara garis besar penurunan emisi gas rumah kaca selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan capaian tahun 2016 dan 2017 sebesar 1,37%. Cakupan penghijauan pada wilayah rawan longsor dan sumber mata air stabil pada angka 25% selama tahun 2015 hingga 2017 dimana telah mengalami kenaikan sebesar 15% dari tahun 2014.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Lingkungan Hidup terdapat 14 indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian indikator bidang Lingkungan Hidup:

**Tabel 2. 54: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Lingkungan Hidup**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2018	2019		
Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1 Unit IPLT	1 Unit IPLT	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	466	459	Meningkat	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target
Kualitas air danau	na	na	Meningkat	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	49.09	50	Meningkat	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	78.36%	75.53%	Meningkat menjadi 80%	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target
Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Ada	Ada	Meningkat/ Ada	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedau	7.35	7.35	Meningkat/ Ada	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	na	na	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Data belum tersedia
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	43.91%	43.18% (656 Kg/ Hari)	20 ton per hari (skala nasional) (Skala Kota : 173,91 Kg/ Hari)	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	1	1	Meningkat	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	11.60%	9.91%	Meningkat	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0	0	5,5 juta ha (skala nasional)	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	0	0	Ada	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1	0	Meningkat	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

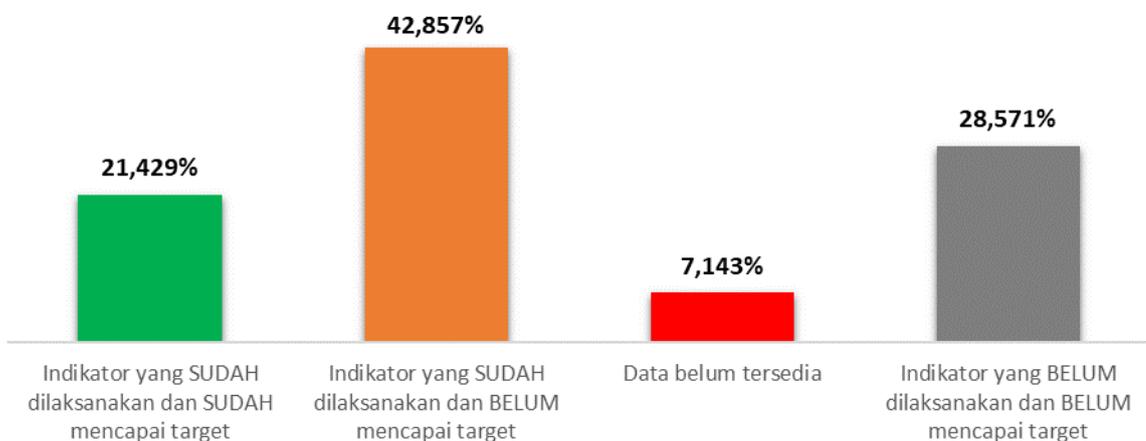
Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Indikator bidang Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional ada 3 indikator. Ketiga indikator tersebut adalah Kualitas air sungai

sebagai sumber air baku dengan capaian tahun 2017 sebesar 50; Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang dengan capaian tahun 2017 sebesar 43.18% (656 Kg/ Hari); Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional ada 4 indikator sedangkan Data yang belum tersedia terdapat pada 1 indikator. Enam (6) indikator lainnya pada bidang Lingkungan Hidup SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target nasional.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

### **Gambar 2. 33: Capaian Indikator SDGs Bidang Lingkungan Hidup**

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Kota Probolinggo hampir sebagian besar belum telah melaksanakan indikator SDGs bidang Lingkungan Hidup namun belum mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari persentasenya sebesar 42,86%. Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target sebesar 21,43%. Indikator yang BELUM dilaksanakan oleh Kota Probolinggo sebesar 28,57%. Ketidakterediaan data SDGs bidang Lingkungan Hidup sebesar 7,14%.

➤ **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Lingkungan Hidup terdapat 4 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 55: Capaian Standar Pelayanan Minimum bidang Lingkungan Hidup**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2015		2016	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	73	57	66	68	61
2	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	67	35	50	50	100
3	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa	Persentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	20	33	50	49	70

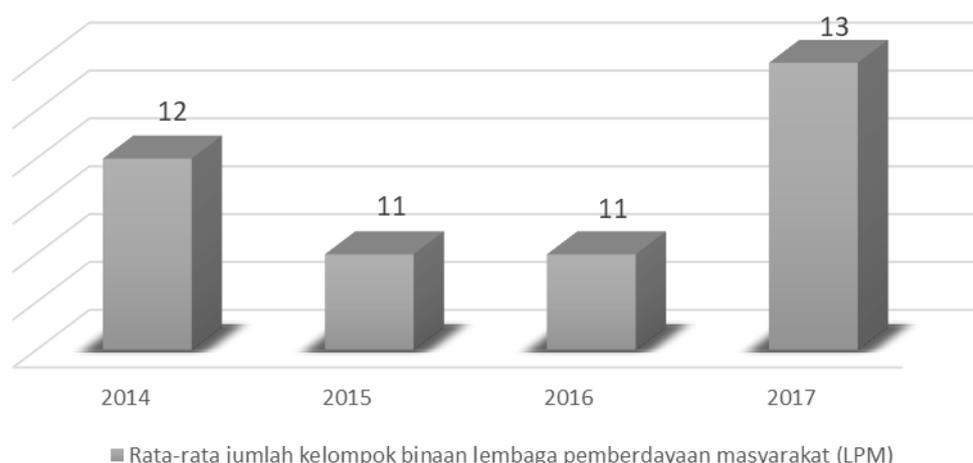
No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2015		2016	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
4	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	90	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Probolinggo tahun 2016 Bidang Lingkungan Hidup diatas menunjukkan bahwa jenis pelayanan dasar yang belum memenuhi target adalah Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air. Indikator Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dengan realisasi sebesar 61% belum memenuhi target tahun 2016 yakni sebesar 68%. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran pengelola kegiatan atau usaha terkait pengelolaan limbah cair. Upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air adalah pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan secara berkala serta ketegasan penegakan sanksi terhadap pelaku kegiatan/usaha terkait pengelolaan limbah oleh Badan Lingkungan Hidup. Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti segera mengingat keterkaitannya dengan kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah industri atau pelaku usaha serta kelestarian lingkungan hidup.

#### 2.4.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

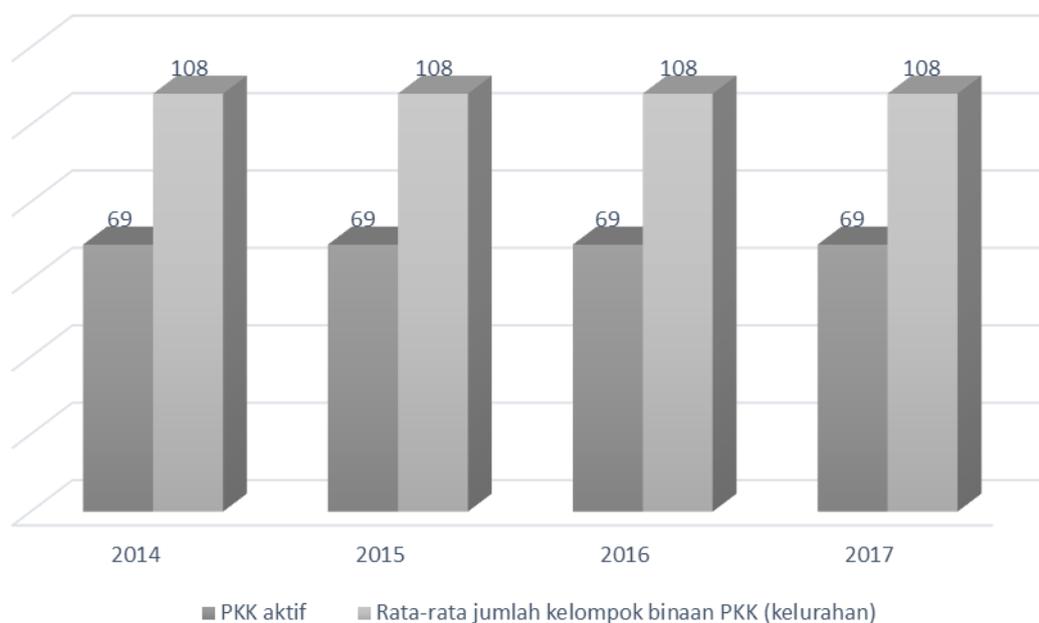
Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan pemberdayaan masyarakat dan desa menggambarkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Masyarakat desa merupakan salah satu aktor yang berperan dalam pembangunan desa tersebut. Melalui pemberdayaan masyarakat desa maka keswadayaan masyarakat dapat meningkat yang kemudian juga akan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat desa merupakan bentuk upaya peningkatan peran kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa. Salah satu wadah dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan LPM di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.



Sumber: Bagian Pemerintahan Sekda Kota Probolinggo

**Gambar 2. 34: Perkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Secara rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan. Rata-rata kelompok binaan LPM tahun 2017 sebesar 13. Namun selama 4 tahun terakhir tidak ada LPM yang mendapatkan prestasi. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya pengembangan organisasi LPM. Bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya adalah PKK. Berikut merupakan grafik perkembangan PKK Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.

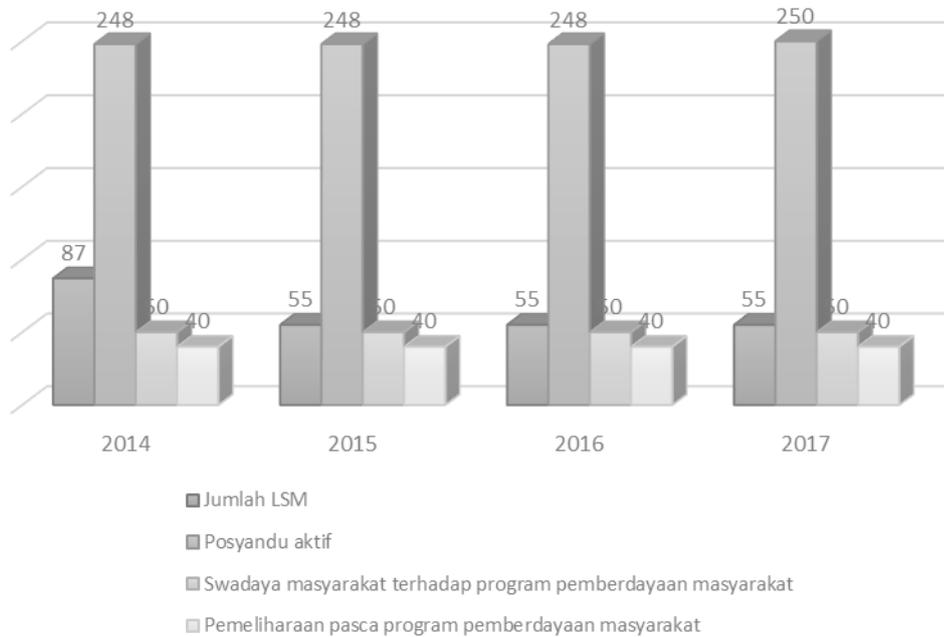


Sumber: Bagian Pemerintahan Sekda Kota Probolinggo

**Gambar 2. 35: Perkembangan PKK**

Selama tahun 2014 hingga 2017 jumlah PKK yang aktif di Kota Probolinggo stabil pada jumlah 69. Hal tersebut sejalan dengan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK setiap Kelurahan. Kestabilan jumlah PKK yang aktif dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK setiap Kelurahan tersebut menunjukkan masih kurangnya

pengembangan PKK di Kota Probolinggo selama 4 tahun terakhir. Perkembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa lainnya Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Bagian Pemerintahan Sekda Kota Probolinggo

**Gambar 2. 36: Perkembangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Secara garis besar perkembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 mencapai angka yang stabil. Jumlah LSM selama tahun 2015 hingga 2017 stabil sebanyak 55 namun apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 32 LSM. Hal yang perlu diperhatikan adalah terkait produktivitas dan kualitas LSM sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga tidak hanya berkaitan dengan kuantitas dari lembaganya. Jumlah posyandu aktif tahun 2017 sebanyak 250 dimana angka tersebut mengalami

kenaikan sebanyak 2 dibandingkan tahun 2014 hingga 2016 yang stabil pada angka 248. Upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam pemberdayaan masyarakat dan desa yang perlu diperhatikan adalah jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kedua indikator tersebut stabil pada angka 50 dan 40 selama 4 tahun terakhir. Dengan capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dan desa masih perlu ditingkatkan terutama terkait pengembangan program dan proses monitoring serta evaluasi guna meningkatkan keswadayaan masyarakat.

#### **2.4.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **➤ Kinerja Daerah**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga sejahtera tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

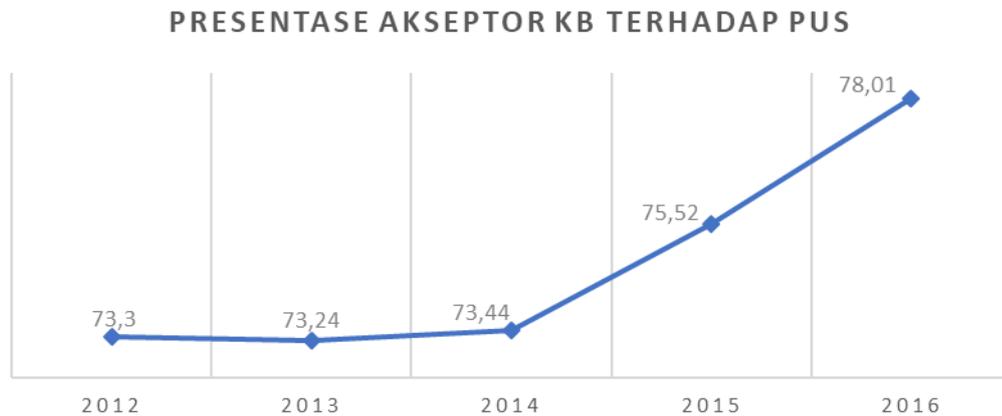
**Tabel 2. 56: Capaian Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Probolinggo Tahun 2012 – 2016**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	Jumlah akseptor KB	36,159	36,167	37.370	35,323	34,397
<b>2</b>	Jumlah pasangan usia subur PUS	49.330	49.382	46,799	46,774	44,091
<b>3</b>	Persentase akseptor KB terhadap PUS	73.3	73.24	73.44	75.52	78.01

*Sumber* : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pada tabel diatas dapat dilihat data indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera kota probolinggo terdapat tiga indikator yakni, jumlah akseptor KB, jumlah pasangan usia subur PUS

dan Persentase akseptor KB terhadap PUS. Penggunaan akseptor KB oleh pasangan usia subur dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



**Gambar 2. 37: Persentase Akseptor KB terhadap PUS**

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa penggunaan akseptor KB setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2012 dan 2013 sempat mengalami penurunan yakni tahun 2012 sebesar 73.3 dan 2013 sebesar 73.24 selanjutnya tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 73.44 tahun 2015 sebesar 75.52 dan tahun 2016 sebesar 78.01.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/  
Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di kota Probolinggo terdapat 10 Indikator yang dapat dihitung. Dari 10 indikator terdapat 3 indikator yang telah terpenuhi, 6 indikator belum terpenuhi dan 1 indikator belum telaksana dan belum mencapai target. Adapun indikator tersebut dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 57: Capaian Indikator SDGs Urusan KB dan Keluarga Sejahtera**

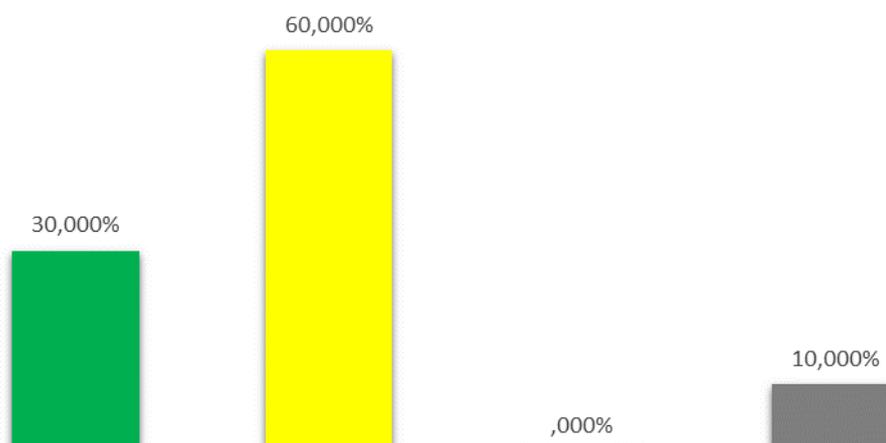
Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	78,33%	77,49%	Meningkat menjadi 65%	
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	27,15%	27,48%	Meningkat menjadi 66%	
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	77,98%	77,14%	Meningkat menjadi 65%	
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	27,50%	27,82%	Meningkat menjadi 23,5%	
Total Fertility Rate (TFR).	5,74	5,82	Menurun menjadi 2,28	
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	20%	20%	Meningkat menjadi 70%	
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	77,98%	77,14%	Meningkat	
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	15,83%	16,36%	Menurun menjadi 9,9%	
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	77,98%	77,14%	Meningkat menjadi 85%	
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0,57%	0,57%	Menurun	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terdapat sebagian besar capaian yang belum memenuhi target dari 10 indikator yang ada dalam TPB bidang KB dan Keluarga Sejahtera. 10 indikator tersebut yakni Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, dan Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern yang telah mencapai target. Indikator Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern, *Total Fertility Rate (TFR)*, Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif, Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi), dan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern yang belum memenuhi target. Serta indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir yang belum berjalan dan belum memenuhi target dengan capaian 0,57% dalam dua tahun.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

**Gambar 2. 38: Capaian Indikator SDGs Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

➤ **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

**Tabel 2. 58: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang KB dan Keluarga Sejahtera Tahun 2014 dan 2016**

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014 (%)	REALISASI TAHUN 2014 (%)	TARGET TAHUN 2016 (%)	REALISASI TAHUN 2016 (%)
1.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3.50%	2.82%	3.50%	2.70%
2.	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%	73.27%	65%	78.30%
3.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	5%	14.20%	5%	21.60%
4.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%	94.41%	70%	90.10%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014 (%)	REALISASI TAHUN 2014 (%)	TARGET TAHUN 2016 (%)	REALISASI TAHUN 2016 (%)
5.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	84.54%	87%	83.30%
6.	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	1 Petugas per 2 (dua) Desa/Kelurahan	1,45/1	1 Petugas per 2 (dua) Desa/Kelurahan	0.70%
7.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	5-Jan	1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	1.00%
8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	30%	0 (Disediakan BKKBN Provinsi)	30%	0 (Disediakan BKKBN Provinsi)
9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data SPM Kota Probolinggo

Pada data SPM diatas dapat dilihat terdapat Sembilan indikator SPM yang dapat dihitung antara lain Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun dengan terget tahun 2014 sebesar 3,50 dan realisasinya 2,82. Tahun 2016 target sebesar 3,50 realisasinya 2,70 pada dua tahun terakhir ini dapat

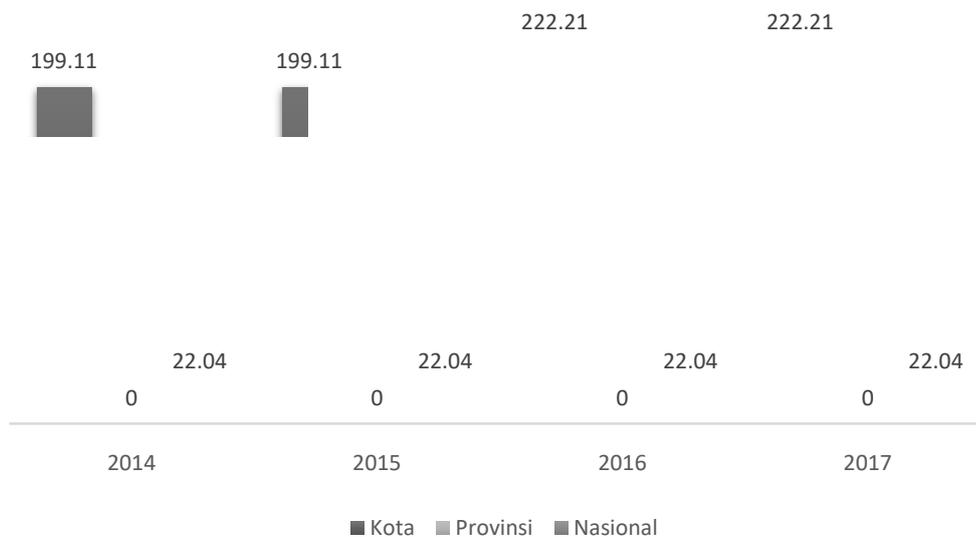
dilihat realisasinya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan pada tahun 2016 realisasinya cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif dengan target tahun 2014 dan 2016 sebesar 65% dan realisasi 2014 73,27% tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 78,30%. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) target tahun 2014 dan 2016 sebesar 5% dan realisasi tahun 2014 sebesar 14,20% kemudian meningkat sebesar 21,60% angka ini melampaui target yang telah ditetapkan. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan target sebesar 70% dan realisasi tahun 2014 sebesar 94,41% tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 90,10%. Untuk indikator Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB realisasi tahun 2014 dan 2016 belum memenuhi target sebesar 87%, akan tetapi realisasi pada tahun 2016 cenderung menurun sebesar 83% dibandingkan 2014 sebesar 84%. Selain itu indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan, Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan, Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun dan Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun telah mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **2.4.2.8. Perhubungan**

##### **➤ Kinerja Daerah**

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal

tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dalam hal transportasi untuk masyarakat. Urusan perhubungan juga menggambarkan ketersediaan fasilitas umum transportasi dan aksesibilitas masyarakat terhadapnya. Berikut merupakan grafik yang memaparkan panjang jalan di Kota Probolinggo:



Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2018

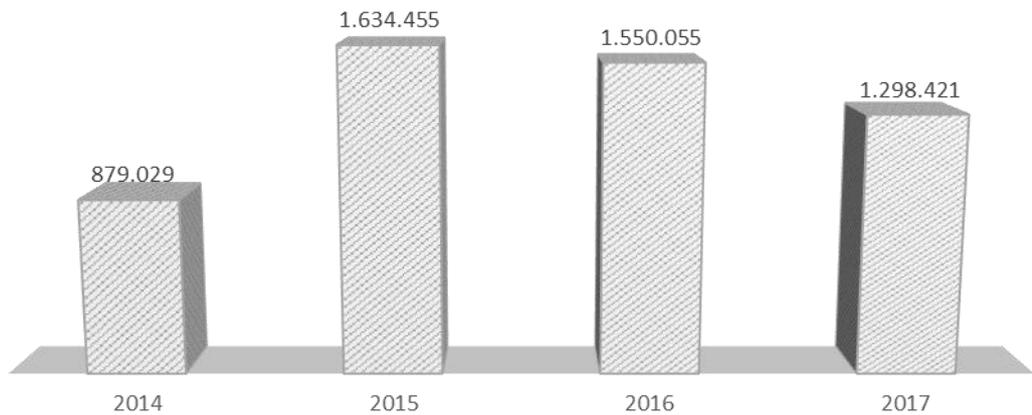
**Gambar 2. 39: Panjang Jalan di Kota Probolinggo**

Grafik diatas menunjukkan bahwa panjang jalan Kota Probolinggo mengalami kenaikan mulai ditahun 2016 dari sebelumnya 199,11 Km di tahun 2015 menjadi 222,21 Km di tahun 2016. Namun panjang jalan Nasional cenderung tetap, yakni 22,04 Km.

**Tabel 2. 59: Data Perhubungan**

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	1.550.055	1.353.298	973.600
2	Data Organda	1	1	1
3	Jumlah Angkutan Darat	311.117	319.812	334.331

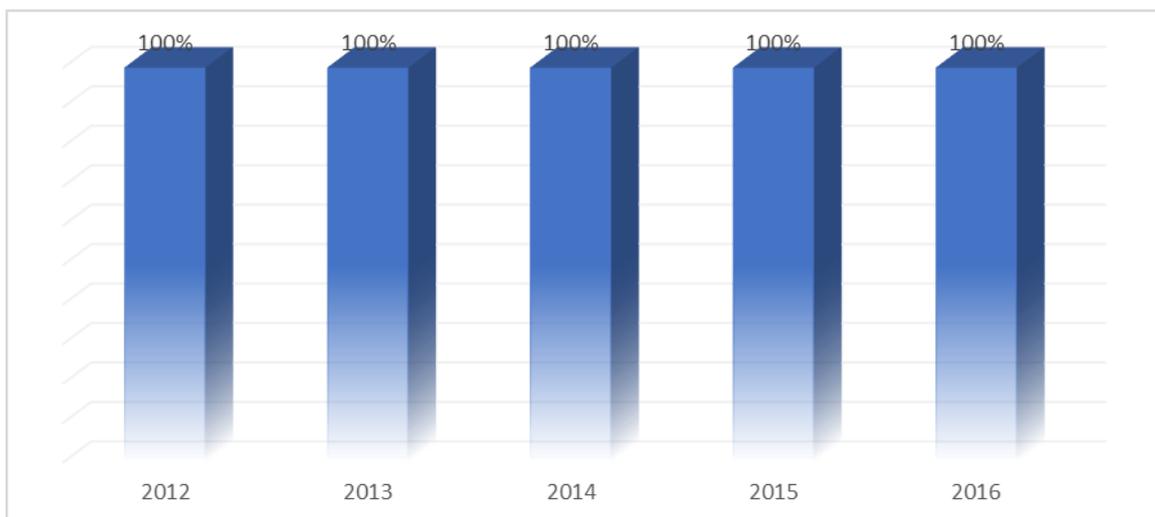
Sumber: Dinas Perhubungan



Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 – 2019

### **Gambar 2. 40: Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

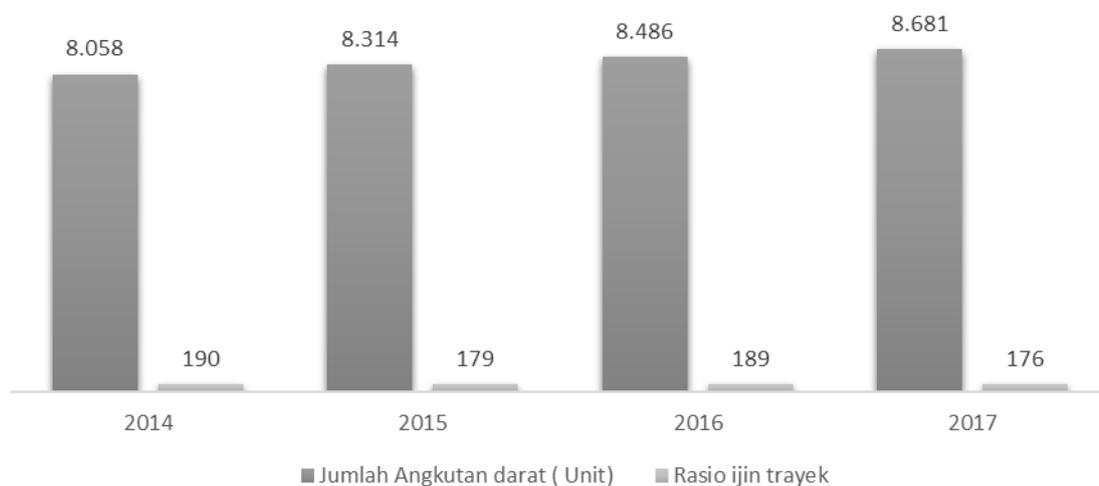
Secara garis besar jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Probolinggo selama 4 tahun terakhir mengalami tren penurunan. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2017 sebanyak 1.298.421. Selama tahun 2014 hingga 2017 jumlah arus penumpang angkutan umum paling banyak dicapai tahun 2015 yakni sebanyak 1.634.455 dimana hal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang berkaitan dengan jumlah arus penumpang angkutan umum adalah persentase penumpang angkutan umum yang dapat dilayani. Berikut merupakan grafik yang menyajikan data tersebut.



Sumber: Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

**Gambar 2. 41: Persentase Penumpang Angkutan yang Dapat Dilayani**

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase penumpang angkutan umum yang dapat dilayani di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami stabilitas. Selama tahun 2012 hingga 2016 mencapai angka 100%. Stabilitas pencapaian 100% selama lima tahun tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah menjalankan tugasnya dalam memenuhi pelayanan masyarakat sebagai penumpang angkutan umum dengan baik. Faktor yang berkaitan dengan jumlah arus penumpang angkutan umum dan persentase penumpang angkutan umum yang dapat dilayani diantaranya adalah jumlah angkutan darat serta rasio ijin trayek. Berikut merupakan grafik yang menyajikan data tersebut.



Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 – 2019

**Gambar 2. 42: Jumlah Angkutan Darat dan Rasio Ijin Trayek**

Jumlah angkutan darat di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan. Jumlah angkutan darat tahun 2017 mencapai 8.681 unit. Berbeda dengan jumlah angkutan darat, rasio ijin trayek selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Selama tahun 2014 hingga 2017 rasio ijin trayek terbesar dicapai pada tahun 2014 dengan angka 190. Rasio ijin trayek tahun 2017 sebesar 176. Urusan perhubungan yang berkaitan dengan transportasi juga berkaitan dengan KIR. Berikut merupakan tabel yang memaparkan perkembangan urusan perhubungan terkait KIR di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.

**Tabel 2. 60: Perkembangan Urusan Perhubungan terkait KIR**

Rincian	2014	2015	2016	2017
<b>Jumlah uji KIR angkutan umum (unit)</b>	5.095	5.232	7.106	7.840
<b>Kepemilikan KIR angkutan umum (unit)</b>	5.095	5.232	7.106	7.840
<b>Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) ( menit)</b>	40	40	40	40
<b>Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rupiah)</b>	37.500- 57.500	37.500- 57.500	37.500- 57.500	37.500- 57.500

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 – 2019

Angkutan umum yang memiliki KIR di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017 secara keseluruhan telah melakukan uji KIR angkutan umum. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kedua data yang sama selama 4 tahun terakhir. Lama pengujian kelayakan angkutan umum memiliki angka yang stabil yakni selama 40 menit. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum juga stabil pada kisaran harga Rp 37.500 hingga Rp 57.500. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan dari beberapa indikator lain dalam urusan perhubungan di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.

**Tabel 2. 61: Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Perhubungan**

Rincian	2014	2015	2016	2017
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus (unit)	2 / - / 1	2 / - / 1	- / - / -	- / - / -
Pemasangan rambu-rambu (unit)	873	903	932	984
Cakupan Layanan Angkutan Umum pada jaringan jalan Kota (angkutan)	30	30	30	30
Ketersediaan Halte pada jalur trayek Angkutan Umum (unit)	21	21	21	24
Ketersediaan terminal Angkutan Umum penumpang untuk pelayanan Trayek Angkutan Umum -> penyesuaian trayek dan ketersediaan terminal Angkutan Umum Kota (unit)	2	2	-	-
Ketersediaan fasilitas pelengkap jalan (rambu, marka, guardrail, dll) pada jaringan jalan kota (unit)	1.749	1.754	1.942	15.558
Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor à untuk minimal 4000 kendaraan (unit)	1	1	1	1
Pemenuhan Standart keselamatan Angkutan Umum trayek dalam kota (unit)	204	204	189	176

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 – 2019

Capaian indikator lain dalam urusan perhubungan di Kota Probolinggo yang mengalami kestabilan selama tahun 2014 hingga 2017 diantaranya adalah cakupan layanan angkutan umum pada

jaringan jalan Kota sebanyak 30 angkutan dan ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor untuk minimal 4000 kendaraan sebanyak 1 unit. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus (unit) pada tahun 2016 hingga 2017 tidak mengalami penambahan. Sejalan dengan ketersediaan terminal Angkutan Umum penumpang untuk pelayanan Trayek Angkutan Umum -> penyesuaian trayek dan ketersediaan terminal Angkutan Umum Kota (unit) yang tidak mengalami penambahan selama 2 tahun terakhir. Tahun 2017 ketersediaan Halte pada jalur trayek Angkutan Umum mengalami kenaikan sebesar 3 unit sehingga mencapai 24 unit. Kenaikan tersebut terjadi setelah stabil pada angka 21 selama tahun 2014 hingga 2016.

Jumlah pemasangan rambu-rambu dan ketersediaan fasilitas pelengkap jalan (rambu, marka, *guardrail*, dll) pada jaringan jalan kota mengalami peningkatan selama tahun 2014 hingga 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan berkendara melalui penyediaan fasilitas telah dilakukan dengan baik. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah pemenuhan standart keselamatan angkutan umum trayek dalam kota dikarenakan mengalami tren penurunan selama 4 tahun terakhir.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)***

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Perhubungan terdapat 4 indikator yang dapat dihitung. Antara lain dengan capaian berikut:

**Tabel 2. 62: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Perhubungan**

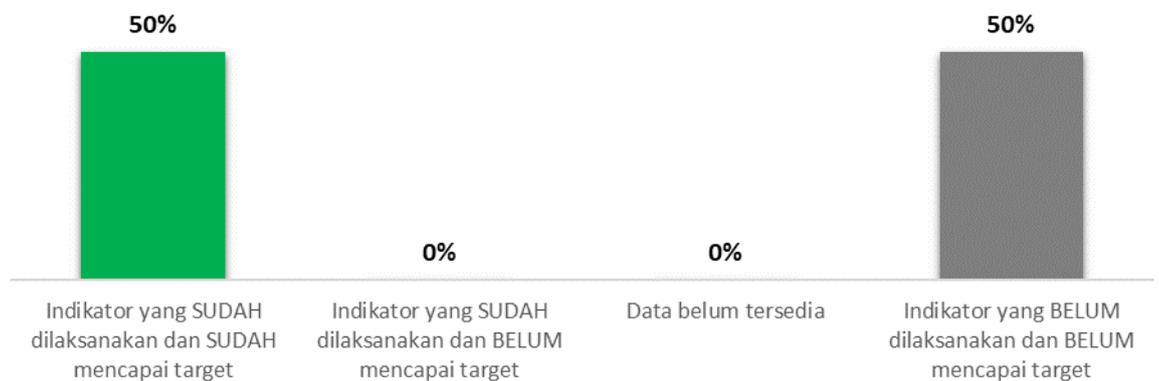
Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Panjang jalur kereta api	na	na	Bertambah 3.258 km	
Jumlah dermaga penyeberangan	1	1	Meningkat	
Jumlah pelabuhan strategis	na	na	24 pelabuhan (skala nasional)	
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	16,28%	40,44%	Meningkat menjadi 32%	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari keempat (4) indikator SDGs bidang Perhubungan terdapat 2 indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target oleh Kota Probolinggo. Kedua indikator tersebut diantaranya adalah jumlah dermaga penyeberangan sebanyak 1 dermaga serta 40,44% persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada tahun 2017. Berlawanan dengan hal tersebut, terdapat 2 indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional. Indikator tersebut adalah panjang jalur kereta api dan jumlah pelabuhan strategis.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

**Gambar 2. 43: Capaian Indikator SDGs Bidang Perhubungan**

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat jumlah yang seimbang antara indikator SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target dengan indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target. Hal tersebut terlihat dari persentase sebesar 50% pada kedua indikator. Indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target serta data yang belum tersedia sebesar 0%.

➤ **Standar Pelayanan Minimum**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Perhubungan terdapat 10 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 63: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Perhubungan**

Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Pelayanan Angkutan Jalan</b>				
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	75	26	75	26

Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	81	100	92
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang dilayani angkutan umum dalam trayek	40	100	40	100
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada Kabupaten/Kota	60	26	60	68
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60	100	60	100
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50	96	50	92
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	88	100	88
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi, Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40	77	40	94
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	47	100	0
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100	95	100	95

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Probolinggo tahun 2016 Bidang Perhubungan diatas menunjukkan bahwa dari 10 terdapat 5 indikator yang belum memenuhi target. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 26% belum memenuhi target tahun 2016 sebesar 75%. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dengan realisasi sebesar 92% belum memenuhi target tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi sebesar 88% dari Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor belum memenuhi target tahun 2016 sebesar 100%. Indikator Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum dengan realisasi 0% belum memenuhi target tahun 2016 sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan belum terlaksanakannya indikator tersebut sehingga memerlukan perhatian lebih. Realisasi sebesar 95% dari indikator Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota belum memenuhi target tahun 2016 sebesar 100%.

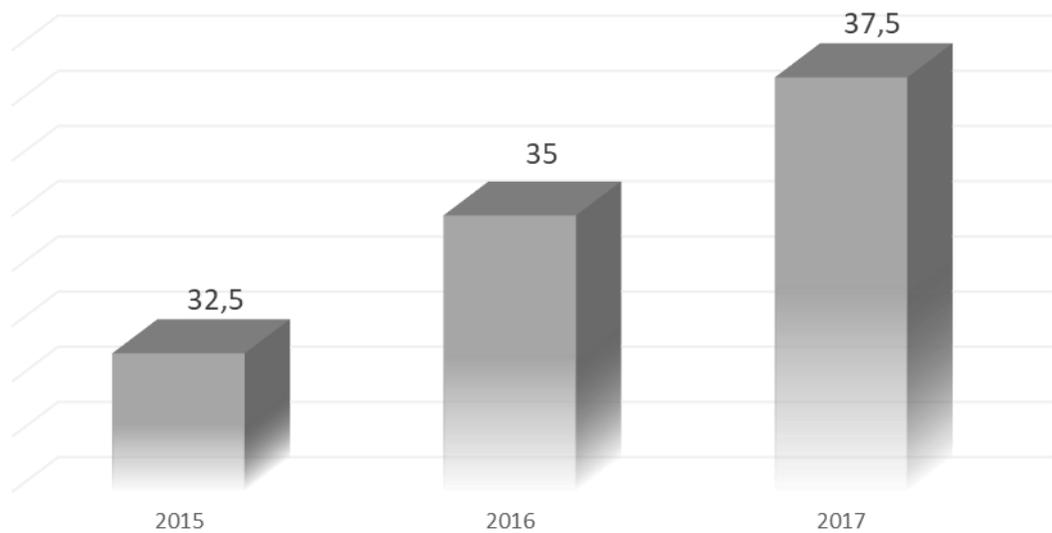
Permasalahan dalam SPM Bidang Perhubungan adalah pelanggaran peraturan dalam berkendara dan lalu lintas diantaranya adalah masih adanya angkutan umum yang tidak membawa Surat Uji Berkala (STUK), Surat Ijin Trayek dan Surat Ijin Pengusahaan Angkutan (SIPA); pelanggaran parkir di tepi jalan; pelanggaran atas larangan kendaraan besar masuk kota; serta biaya kontribusi pelaksanaan diklat teknis perhubungan yang besar. Permasalahan lainnya berkaitan dengan ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana terkait Pelayanan Angkutan Jalan; ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang pengujian dan pengawasan kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum serta pemenuhan standar keselamatan angkutan umum.

Upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan diatas adalah peningkatan sosialisasi serta pengawasan terkait peraturan dalam berkendara dan lalu lintas. Peningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum dan sanksi atas pelanggaran lalu lintas juga sangat diperlukan. Selain itu koordinasi dengan pihak-pihak juga dibutuhkan dalam pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas. Permasalahan di bidang Perhubungan merupakan salah satu permasalahan yang urgent dikarenakan berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

#### **2.4.2.9. Komunikasi dan Informasi**

##### **➤ Kinerja Daerah**

Urusan di bidang komunikasi dan informatika merupakan urusan yang mempengaruhi perkembangan urusan di bidang lainnya guna proses pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan perkembangan di bidang komunikasi dan informatika menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian target pengembangan di bidang lainnya melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Di era globalisasi saat ini pemanfaatan kemajuan teknologi merupakan salah satu strategi percepatan pembangunan suatu daerah. Perkembangan di bidang komunikasi dan informatika juga menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan masyarakat. Berikut merupakan grafik yang menyajikan Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government di Kota Probolinggo selama tahun 2015 hingga 2017.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

**Gambar 2. 44: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government**

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persentase perangkat daerah Kota Probolinggo yang menerapkan E-Government selama tahun 2015 hingga 2017 mengalami perkembangan positif. Hal tersebut dikarenakan capaian selama tiga tahun terakhir terjadi kenaikan. Capaian tahun 2017 sebesar 37,55% mengalami kenaikan sebesar 2,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan positif tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan perkembangan teknologi informasi telah diterapkan dalam proses pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan urusan komunikasi dan informatika di Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017.

**Tabel 2. 64: Perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika**

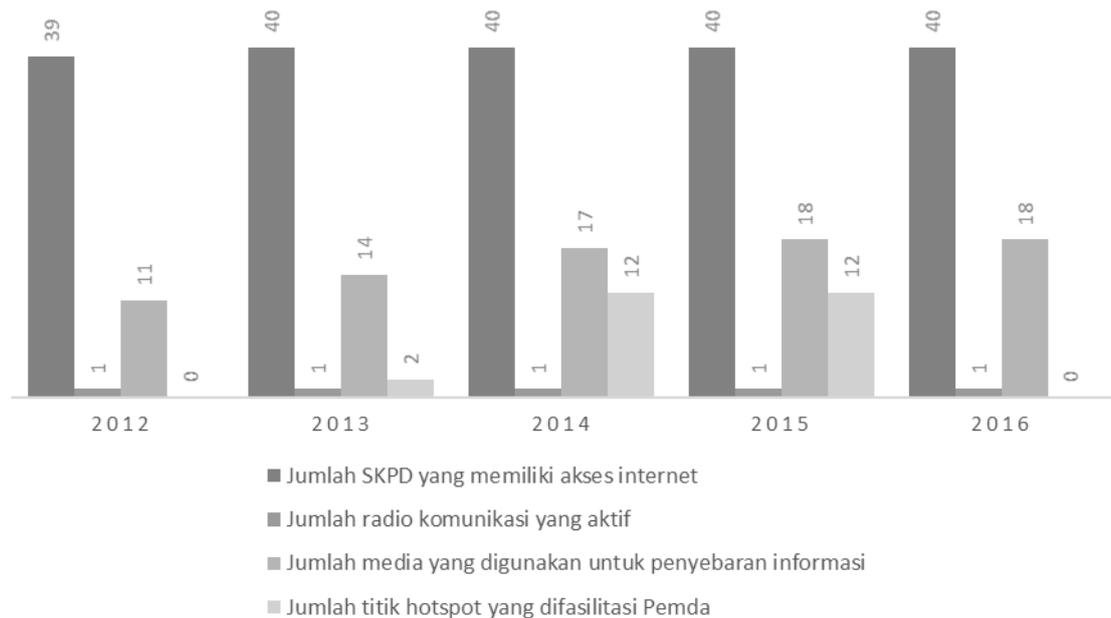
<b>Rincian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Jumlah jaringan komunikasi (titik)</b>	43	50	50	52
<b>Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (usaha)</b>	70/jml penduduk	74/jml penduduk	60/jml penduduk	50 / jml penduduk
<b>Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)</b>	2/11	2/11	3/15	3/38
<b>Jumlah penyiaran radio/tv lokal (unit)</b>	6/1	6/1	6/1	6/1
<b>Website milik pemerintah daerah (unit)</b>	58	65	71	71
<b>Pameran/expo (kegiatan)</b>	6	6	5	8

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara garis besar perkembangan urusan komunikasi dan informatika Kota Probolinggo tahun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan. Jumlah website milik pemerintah daerah tahun 2017 sejumlah 71 dengan jumlah surat kabar nasional ataupun lokal sebanyak 3/38 media. Jumlah jaringan komunikasi tahun 2017 sebanyak 52 titik dimana angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 2 titik dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penyiaran radio atau televisi lokal di Kota Probolinggo selama 4 tahun terakhir stabil pada angka 6/1 unit. Pameran atau expo terkait komunikasi dan informatika yang dilaksanakan tahun 2017 sebanyak 8 kegiatan. Penurunan terjadi pada rasio wartel/warnet terhadap penduduk (usaha) selama 4 tahun terakhir sehingga tahun 2017 hanya mencapai 50 per jumlah penduduk.

Urusan di bidang komunikasi dan informatika juga dapat dilihat dari jumlah PD yang memiliki akses internet, jumlah radio komunikasi yang aktif dan jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi serta jumlah titik hotspot yang difasilitasi oleh

Pemerintah Daerah. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan indikator lainnya dalam urusan komunikasi dan informatika di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

**Gambar 2. 45: Perkembangan Indikator Lainnya dalam Urusan Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan grafik diatas secara garis besar jumlah PD yang memiliki akses internet dan jumlah radio komunikasi yang aktif mengalami stabilitas. Jumlah PD yang memiliki akses internet tahun 2012 sebanyak 39 kemudian meningkat sebanyak 1 sehingga tahun 2013 hingga 2016 stabil mencapai angka 40. Kota Probolinggo memiliki satu radio komunikasi yang aktif tahun 2012 hingga 2016. Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi dan jumlah titik hotspot yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah terus mengalami peningkatan selama tahun 2012 hingga 2016. Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi tahun 2016

sebanyak 18 media atau mengalami kenaikan sebanyak 1 dibandingkan tahun 2014. Jumlah titik hotspot yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2013 yakni sebanyak 10 titik sehingga tahun 2014 dan 2015 mencapai 12 titik. Data terkait jumlah titik hotspot yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah tahun 2016 masih belum diketahui.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 7 indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian ketiga indikator:

**Tabel 2. 65: Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2014	2015		
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	na	na	Meningkat	
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	71.05%	71.24%	Meningkat	
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	71.05%	71.24%	Meningkat	
Proporsi individu yang menggunakan internet	87.53%	87.61%	Meningkat	
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	82.64%	83.07%	Meningkat menjadi 80%	
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam	0	0	Meningkat	

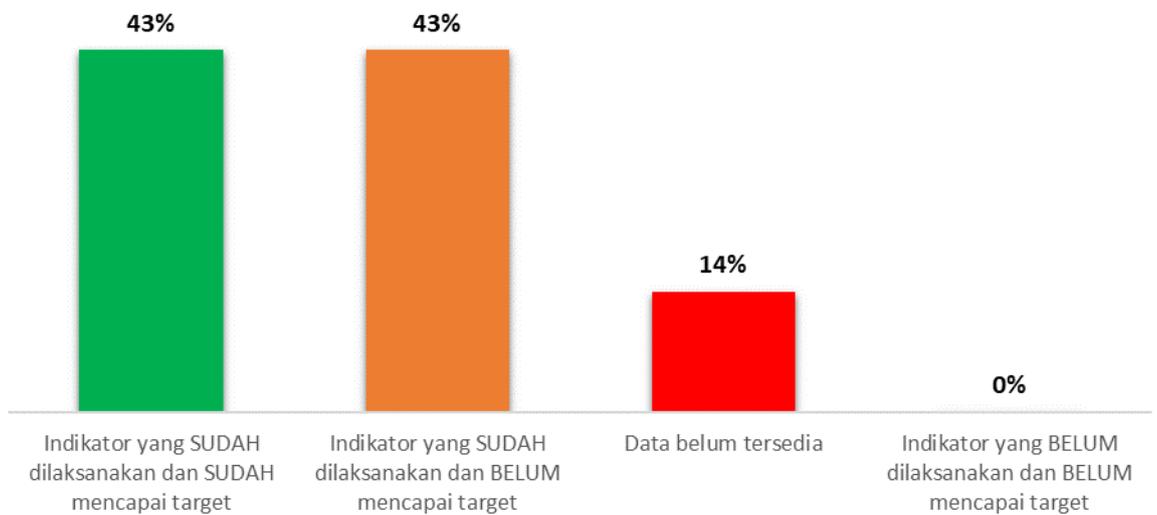
Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan				
Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	6.56%	7.18%	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	71.05%	71.24%	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data diatas terdapat 1 indikator SDGs bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Probolinggo yang Belum tersedia datanya, yakni Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jumlah yang sama terdapat pada indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target dengan indikator yang SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target. Kedua jenis indikator tersebut berjumlah 3. Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target diantaranya adalah Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam sebanyak 71,24%; Proporsi individu yang menggunakan internet sebanyak 87.61% serta Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan sebanyak 83,07%.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

**Gambar 2. 46: Capaian Indikator SDGs Bidang Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa 43% indikator Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Probolinggo SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target. 43% lainnya SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target. Indikator yang belum tersedia datanya sebesar 14%.

➤ **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat 6 indikator yang dapat dihitung, sebagai berikut:

**Tabel 2. 66: Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Komunikasi dan Informatika**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2015		2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pelaksanaan	Pelaksanaan	100	100	100	233	100	233

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Indikator Standar Pelayanan Minimum	2014		2015		2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	n Diseminasi Informasi Nasional	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
		1. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi						
		2. Media baru seperti website (media online)	100	100	100	100	100	100
		3. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	100	100	100	175	100	175
		4. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ atau	100	100	100	100	100	192
5. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	100	100	100	358	42	358		
<b>2</b>	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Probolinggo tahun 2016 Bidang Komunikasi dan Informatika diatas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator telah memenuhi target tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jenis pelayanan dasar Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional serta Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat telah dicapai dengan baik. Diantara 6 indikator terdapat 4 indikator yang mampu melebihi target tahun 2016. Keempat indikator tersebut dari jenis pelayanan dasar Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti majalah,radio, dan televisi dengan realisasi sebesar 233% telah mampu melebihi target tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi sebesar 175% dari indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat telah melebihi target sebesar 100%. Indikator Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya dengan realisasi sebesar 192% telah melebihi target tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi tahun 2016 dari indikator Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho sebesar 358% juga telah melebihi target tahun 2016 yakni sebesar 42%.

Hal yang perlu diperhatikan kembali dalam SPM di Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang memadai. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta kinerja. Selain itu peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan pengembang industri telekomunikasi

dan teknologi informasi. Bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan proses pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan optimalisasi bidang komunikasi dan informatika sebagai media penunjang proses pembangunan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan.

#### 2.4.2.10. Kepemudaan dan Olahraga

**Tabel 2. 67: Indikator Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Klub Olah Raga	284,00	65,00	22,89%
2	Jumlah Gedung Olah Raga	2,00	3,00	150,00%
3	Jumlah organisasi Pemuda	9,00	20,00	222,22%
4	Jumlah Organisasi Olah Raga	85,00	26,00	30,59%
5	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	16,00	5,00	31,25%
6	Jumlah Kegiatan Olah Raga	22,00	51,00	231,82%
7	Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta)	7,00	0,00	0,00%
8	Lapangan Olah Raga	146,00	88,00	60,27%

Indikator Jumlah Klub Olah Raga sejumlah 284 klub dan tercapai 22.89% Indikator ini belum mengalami peningkatan dari target yang dalam RPJMD, dikarenakan Klub Olah Raga di Kota Probolinggo sejak tahun 2016 tidak bertambah hanya 65 klub olah raga yang masih aktif. Selain itu Indikator Jumlah Gedung Olah Raga sejumlah 2 GOR dan tercapai 150% Indikator ini sudah mengalami peningkatan dari target yang ada dalam RPJMD yang ada. Indikator lain terkait kepemudaan adalah Jumlah Organisasi Pemuda sejumlah 9 organisasi dan tercapai 222.22% Indikator ini sudah mengalami peningkatan dari target RPJMD yang ada.

Indikator Jumlah Kegiatan Kepemudaan sejumlah 16 kegiatan dan tercapai 31.25% Indikator ini belum peningkatan dari target RPJMD yang ada. Dikarenakan dari 5 Kegiatan tersebut sudah dapat mengakomodir seluruh Kegiatan Kepemudaan yang ada.

#### 2.4.2.11. Koperasi dan UMKM

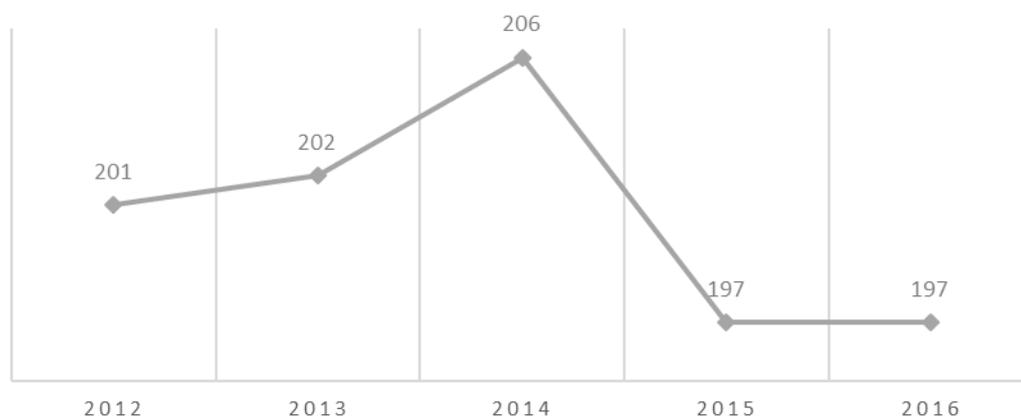
Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2. 68: Data Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Probolinggo Tahun 2012– 2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	jumlah koperasi aktif	201	202	206	197	197
2	jumlah UKM non BPR/LKM UKM	32	38	38	38	38
3	Jumlah BPR/LKM	21	21	21	21	21

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pada tabel diatas dapat dilihat indikator urusan Koperasi dan UKM kota Probolinggo terdapat tiga indikator yakni, jumlah koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM. Pada indikator jumlah koperasi aktif dapat grafikkan seperti berikut:



**Gambar 2. 47: Jumlah Koperasi Aktif**

Pada grafik diatas dapat dilihat realisasi jumlah koperasi yang aktif di Kota Probolinggo mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampai dengan 2014 sedangkan tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan dan tahun 2015 ke 2016 mengalami stagnan sebesar 197 koperasi yang masih aktif.

#### 2.4.2.12. Penanaman Modal

##### ➤ Kinerja Daerah

Nilai investasi yang meningkat tidak diiringi dengan jumlah investor berskala nasional, karena hal ini investasi yang diberikan hanya kepada usaha kecil dan menengah. Adapun gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan penanaman modal daerah di Kota Probolinggo antara lain dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2. 69: Data Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2012-2017**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional (Jumlah PMA/PMDN)	20	17	43	48	64	69
2	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp)	806.304.399.178	516.923.720.960	2.269.779.452.592	1.824.377.467.526	740.612.581.171	4.121.827.39
3	Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah	3.551 jenis usaha	3.555 jenis usaha	3.626 jenis usaha	3.206 jenis usaha	4.424 jenis usaha	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah investor berskala nasional (jumlah PMA/PMDN) Kota Probolinggo dari tahun 2012 – 2017 mengalami fluktuatif. Penurunan jumlah investor terjadi pada tahun 2013 sementara di tahun 2014 – 2017 terus mengalami

kenaikan. Penurunan jumlah investor pada tahun 2013 tersebut diikuti oleh menurunnya jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp) di tahun yang sama. Hal tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi di tahun 2014, dimana jumlah investor kembali mengalami kenaikan yang juga diikuti dengan naiknya jumlah nilai investasi PMA/PMD (Rp). Berbeda dengan indikator jumlah investor berskala nasional (Jumlah PMA/PMDN) yang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan, indikator jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp) pada tahun 2015 dan 2016 justru mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena investasi yang diberikan hanya kepada usaha kecil dan menengah. Disisi lain meningkatnya jumlah investor berskala nasional juga membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Probolinggo dengan meningkatnya investor berskala nasional dapat membuat peluang lapangan kerja lebih meningkat lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun 2016 jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah telah mencapai angka 4.424 jenis usaha.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Non Dasar Bidang Penanaman Modal terdapat 3 indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Penanaman Modal ini pada SDGs termasuk ke dalam Tujuan 8 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua, dan Tujuan 12 yaitu Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan. Secara rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan

Wajib Non Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 70: Capaian Indikator SDGs Bidang Penanaman Modal**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	37	38	Meningkat	
Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	n/a	n/a	Menurun (mendekat)	
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	1	1	Meningkat	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data BELUM tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa indikator Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa merupakan indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Sedangkan untuk indikator Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 merupakan indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mampu memenuhi target nasional. Terakhir yaitu indikator Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) merupakan indikator yang datanya masih belum tersedia.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2018

**Gambar 2. 48** Capaian Indikator SDGs Bidang Penanaman Modal

#### 2.4.2.13. Kebudayaan

Pelayanan pada bidang kebudayaan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Adapun gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2. 71: Data Urusan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun 2012-2017**

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah sarana seni dan budaya	1	2	2	2	2	2
2	Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya	3	4	7	22	23	23
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	1	1	-	-	3	2

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan layanan dalam bidang kebudayaan yang mana terdapat peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya

semakin baik sehingga tidak terjadi penurunan jumlah dari tahun sebelumnya.

#### 2.4.2.14. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2. 72 Data Kinerja Indikator Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo Tahun 2012 – 2016**

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	92,82	92,51	91,82	92,81	93,51
2	Jumlah Layanan AktanKelahiran	3.683	4.348	4.362	5.240	4.347
3	Jumlah Kepemilikan KTP	156.556	127.586	160.048	161.921	166.879
4	Jumlah Kepemilikan KK	61.459	63.811	65.011	66.142	71.881

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dapat dilihat dari tabel diatas empat indikator kependudukan dan catatan sipil yakni rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, jumlah layanan akta kelahiran, jumlah kepemilikan KTP dan jumlah kepemilikan KK. Pada indikator jumlah rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dari tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan ketercapaian, sedangkan tahun 2015 angka capaiannya mulai meningkat akan tetapi tahun 2016 mulai mengalami penurunan kembali. Indikator layanan akta kelahiran pada tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yakni sebesar 3,683 meningkat menjadi 4,348 sedangkan tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 4 dan kembali mengalami peningkatan

sebesar 5.24 di tahun 2015 sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 4,347.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 7 indikator yang dapat dihitung.

**Tabel 2. 73 Capaian Indikator SDGs Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika**

Indikator	Capaian		Target 2019	Keterangan
	2016	2017		
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	n/a	n/a	Menurun	
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	≤ 21 th	≤ 21 th	Meningkat menjadi 77,4%.	
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	≤ 21 th	≤ 21 th	Meningkat menjadi 21 tahun	
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	85,17%	100%	Meningkat	
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	63,68%	64,82%	Meningkat menjadi 77,4%	
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	83%	88,1%	Meningkat menjadi 85%	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Berdasarkan pada tabel diatas terdapat satu indikator yang belum tercapai yakni indikator persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah targetnya mencapai angka 77,4% sedangkan pada realisasinya tahun 2017 hanya mencapai angka 64,82% sehingga perlu peningkatan pada indikator tersebut. Sedangkan satu indikator belum terdapat data yang disediakan pada KLHS Kota Probolinggo. Lima indikator lainnya telah tercapai dengan angka capain yang cukup baik.

#### 2.4.2.15. Persandian

Urusan di bidang persandian merupakan urusan yang menunjang keberhasilan proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan urusan persandian menggambarkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan melalui kebijakan, penyediaan infrastruktur serta peningkatan terkait pengawasan dan pengendalian dalam proses pembangunan. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data perkembangan urusan persandian di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.

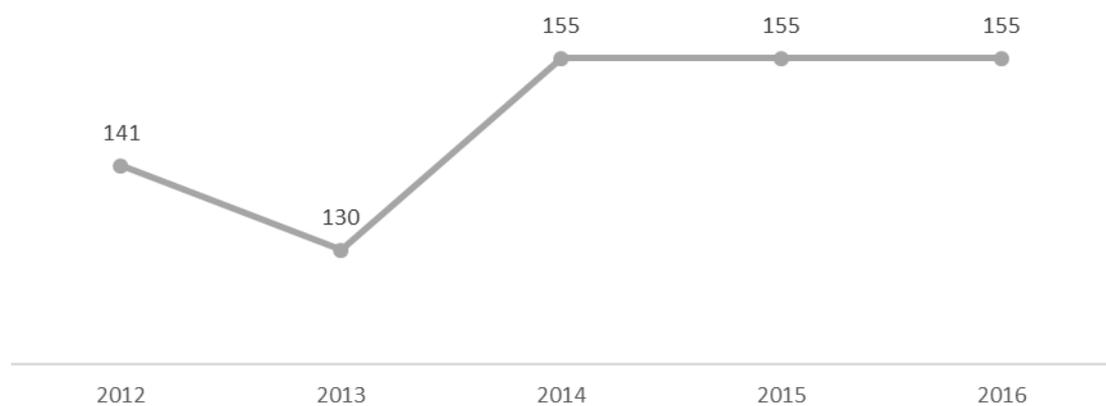
**Tabel 2. 74: Perkembangan Urusan Persandian**

Rincian	2014	2015	2016	2017
Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk (%)	21	23	26	29
Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	22	22	22	22
Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kota (orang)	464	522	580	1.034

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase jumlah perlindungan masyarakat (linmas) per jumlah 10.000 dan jumlah petugas linmas di Kota Probolinggo

selama tahun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan. Persentase jumlah perlindungan masyarakat (linmas) per jumlah 10.000 tahun 2017 sebesar 29% sedangkan jumlah petugas linmas di Kota sebanyak 1.034 orang. Hal yang berbeda terjadi pada rasio pos siskamling per jumlah desa atau kelurahan selama 4 tahun terakhir stabil pada angka 22%. Berikut merupakan grafik yang menyajikan jumlah pelanggaran K3 di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

### **Gambar 2. 49 Jumlah Pelanggaran K3 Kota Probolinggo Tahun 2012-2016**

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar jumlah pelanggaran K3 di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami kenaikan. Tahun 2013 jumlah pelanggaran K3 sempat mengalami penurunan sebanyak 11 sehingga menjadi 130. Namun tahun 2014 mengalami kenaikan kembali sebanyak 25 sehingga menjadi 155 pelanggaran K3. Jumlah pelanggaran K3 tahun 2015 hingga 2016 masih berada pada jumlah yang sama dengan tahun 2014. Berikut merupakan tabel yang memaparkan data perkembangan pelayanan dalam

urusan persandian di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.

**Tabel 2. 75: Perkembangan Pelayanan dalam Urusan Persandian**

Uraian Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (ada / tidak)</b>	ada	ada	ada	ada	ada
<b>Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (ada / tidak)</b>	ada	ada	ada	ada	ada
<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran</b>	5,64 kmz				

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika*

Perkembangan pelayanan dalam urusan persandian di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat dari ketersediaan survey indeks kepuasan masyarakat (SKM) dan sistem informasi pelayanan perijinan serta cakupan pelayanan besaran bencana kebakaran. Selama 5 tahun terakhir Kota Probolinggo menyediakan survei indeks kepuasan masyarakat dan sistem informasi pelayanan perijinan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 sebesar 5,64 kmz. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pelayanan dalam urusan persandian telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan cukup baik.

#### **2.4.2.16. Perpustakaan**

Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan perpustakaan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2. 76: Data Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Probolinggo  
Tahun 2012 – 2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Taman baca	2	2	2	2	2	2	2
2	Pengunjung jumlah perpustakaan per tahun	193,082	191,973	189,398	214,358	192,922	133.439	132.436
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (perpustakaan umum)	44,911	45,444	46,524	46,845	48,107	50.611	51.224
4	Jumlah Rintisan perpustakaan Baru	104	105	105	30	30	121	121

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

Pada indikator kinerja urusan perpustakaan terdapat empat indikator yakni, taman baca, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, dan jumlah perpustakaan milik pemda. Indikator Jumlah Rintisan Perpustakaan Baru Tahun 2014 sebanyak 105 perpustakaan, sedangkan tahun 2015 menurun drastis hanya 30 perpustakaan baru, kondisi ini dikarenakan keterbatasan kerjasama untuk pengadaan dan pengelolaan perpustakaan baru. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kota Probolinggo tahun 2012-2018 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



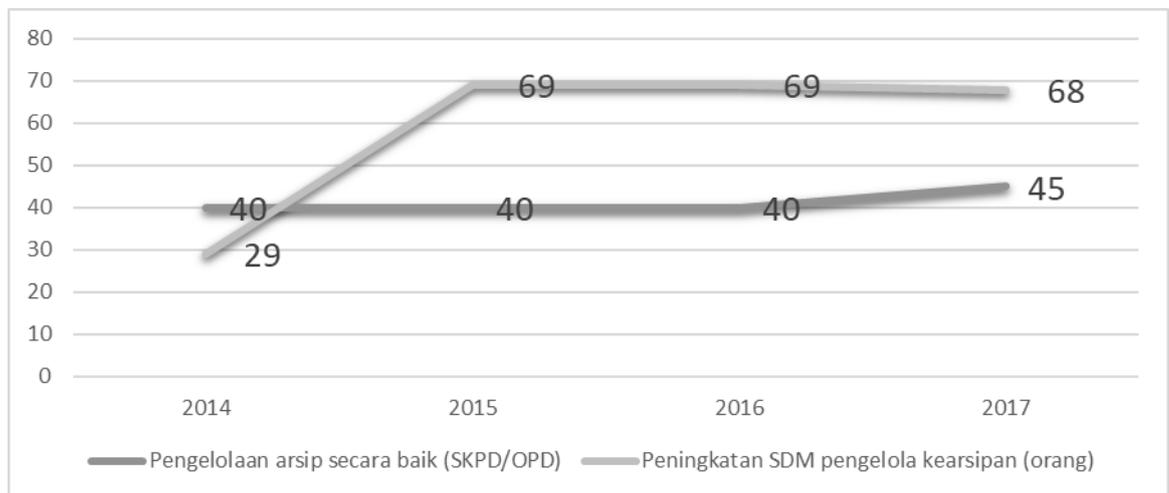
**Gambar 2. 50: Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun**

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan yakni 193,082 pada tahun 2012, 191,973 tahun 2013, 189,398 tahun 2014. Tahun 2015 naik menjadi 214.358 dan tahun 2016 kembali turun menjadi 192.922, dan kembali menurun ditahun 2017 menjadi 132.439. hal ini dikarenakan adanya relokasi gedung perpustakaan umum dalam selama masa rehab gedung serta penurunan minat baca masyarakat dikarenakan semakin canggihnya teknologi untuk pencarian informasi melalui hp, dll.

#### **2.4.2.17. Kearsipan**

Urusan di bidang kearsipan merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan proses pembangunan suatu daerah berkaitan dengan proses perencanaan dan pengorganisasian. Urusan kearsipan menggambarkan pengelolaan arsip dan fasilitas

yang mendukung pengelolaan arsip. Kearsipan merupakan salah satu unsur yang penting dalam perencanaan. Hal tersebut dikarenakan arsip merupakan bentuk pengorganisasian informasi dalam proses perencanaan, sedangkan perencanaan merupakan langkah awal yang penting dan menentukan keberhasilan proses pembangunan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan data perkembangan urusan kearsipan Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2017.



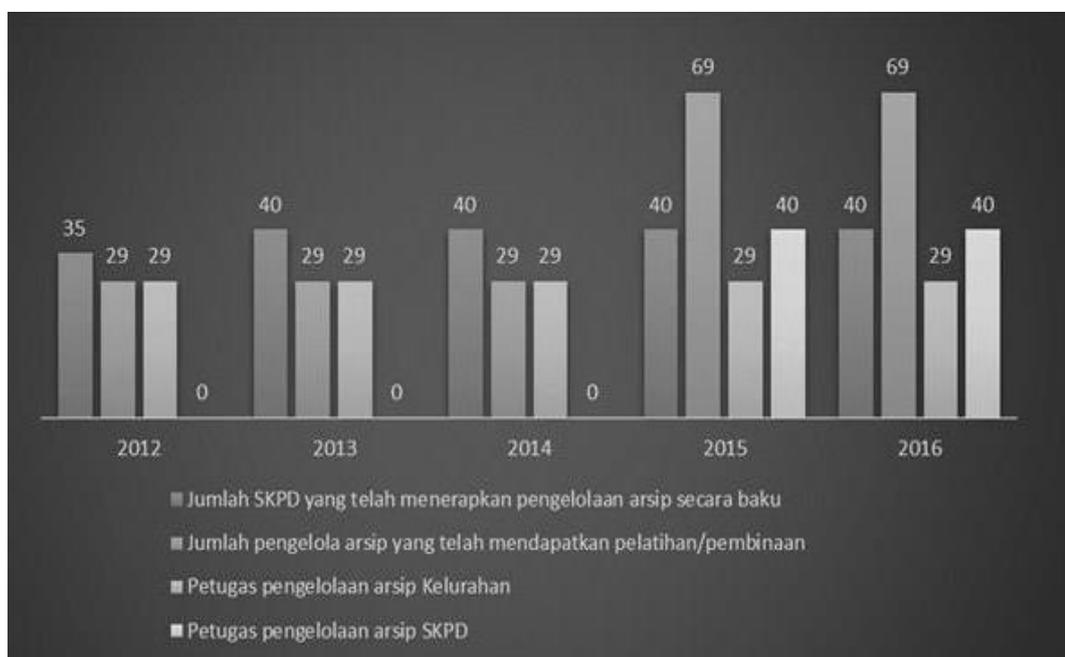
Sumber: Dinas Perputakaan dan Kearsipan

**Gambar 2. 51: perkembangan urusan kearsipan Kota Probolinggo Tahun 2014- 2017.**

Urusan kearsipan terdiri dari dua hal pokok yakni proses pengelolaan dan sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip. Oleh sebab itu perkembangan urusan kearsipan dapat dilihat dari jumlah pengelolaan arsip secara baik (PD) dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Jumlah pengelolaan arsip secara baik di Kota Probolinggo selama tahun 2014 hingga 2016 mengalami stagnansi pada angka 40 namun tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 45 PD. Peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yakni sebesar 40 orang. Namun tahun 2017 mengalami

penurunan sebanyak 1 orang sehingga berjumlah 68 orang. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa urusan kearsipan masih memerlukan perhatian guna pengembangan kualitasnya.

Perkembangan SDM dalam urusan kearsipan dapat dilihat dari jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, jumlah pengelola arsip yang telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan dan jumlah petugas pengelolaan arsip Kelurahan serta jumlah petugas pengelolaan arsip PD. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan SDM dalam urusan kearsipan di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016.



Sumber: Dinas Perputakaan dan Kearsipan

### Gambar 2. 52: Perkembangan SDM dalam Urusan Kearsipan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, jumlah pengelola arsip yang telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan dan jumlah petugas pengelolaan arsip PD di Kota Probolinggo selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan. Jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan

arsip secara baku tahun 2013 meningkat sebesar 5 dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mencapai 40 selama tahun 2013 hingga 2016. Jumlah pengelola arsip yang telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan tahun 2013 meningkat sebesar 40 dibandingkan tahun 2014 sehingga capaian jumlah tahun 2015 dan 2016 sebanyak 69. Jumlah yang stabil terdapat pada jumlah petugas pengelolaan arsip Kelurahan yakni sebanyak 29 selama kurun waktu lima tahun tersebut. Jumlah petugas pengelolaan arsip PD di Kota Probolinggo tahun 2015 dan 2016 sebanyak 40.

### **2.4.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **2.4.3.1. Pertanian**

Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk. Lebih dari itu, mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Pada wilayah selatan Kota Probolinggo jumlah luasan lahan pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan trend yang tidak begitu baik. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya sektor lain dalam perekonomian Kota Probolinggo dan juga dipengaruhi oleh factor menurunnya jumlah luasan lahan pertanian. Berikut yang termasuk sektor pertanian adalah:

#### **1. Tanaman Pangan**

Adapun Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan di Kota Probolinggo pada tahun 2014 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 77: Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2014 – 2017**

Jenis	Produksi (ton)				Luas Panen (ha)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Padi	16.591,70	17.734,40	17.742,00	15.880,20	2.469,00	2.608,00	2.590,00	2.388,00
Jagung	30.196,80	28.132,60	35.000,00	29.736,72	4.194,00	3.812,00	5.000,00	4.212,00
Bawang Merah	2.563,00	2.645,00	722,00	3.680,00	310,00	303,00	147,00	396,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

## 2. Perkebunan

Perkebunan bukan merupakan komoditas utama di Kota Probolinggo mengingat Kota Probolinggo tidak termasuk kategori wilayah yang memiliki lahan perkebunan, sehingga usaha perkebunan rakyat hanya sebatas usaha sampingan sebagai penunjang kehidupan keluarga saja. Adapun Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2014 s.d 2017.

**Tabel 2. 78: Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2017**

Jenis	Produksi (ton)			Luas Panen (ha)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Tembakau	6,00			5,25		
Tebu	34,60	27,24	13,09	2.022,40	2.441,47	2.824,00
Kelapa	5,48	5,48	5,48	15,90	21,71	21,73
Kapuk Randu	1,89	1,89	1,89	0,21	0,55	0,56

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 – 2019

## 3. Perikanan

Potensi Perikanan laut di Kota Probolinggo memiliki peluang yang sangat besar untuk dioptimalkan. Peluang ini melihat dari letak geografis Kota Probolinggo yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dengan panjang pantai 7 km. Namun dalam

kurun waktu empat tahun terakhir ini perikanan tangkap dan budidaya mengalami penurunan, untuk perikanan tangkap dikarenakan oleh cuaca buruk dan tidak menentu serta jumlah armada perikanan (Kapal Balai) yang mengalami penurunan. Sedangkan penurunan produksi budidaya terjadi dikarenakan sering terjadi hujan deras yang mengakibatkan pematang tambak jebol sehingga terjadi gagal panen dan menyebabkan produksi budidaya air payau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berbeda dengan jumlah produksinya, nilai produksi budidaya mengalami kenaikan dikarenakan komoditas yang mempunyai harga yang tinggi seperti udang vanamel mengalami kenaikan produksi, disaat komoditas produksi budidaya yang lain mengalami penurunan jumlah produksi. Berikut ini data produksi perikanan di Kota Probolinggo dalam kurun waktu Tahun 2014 s.d Juni 2018

**Tabel 2. 79: Data Produksi Peternak Tahun 2014 – 2017**

Jenis		2014	2015	2016	2017
<b>Perikanan Tangkap</b>					
	Jumlah Produksi (Ton)	15.997,313	15.082,526	19.748,586	19.249,600
	Nilai Produksi (Rp)	319.108.079.140	353.416.817.448	419.394.901.500	408.165.295.300
<b>Perikanan Budidaya</b>					
	Jumlah Produksi (Ton)	511,054	447,383	487,210	461,430
	Nilai Produksi (Rp)	7.052.804.600	7.621.391.040	10.314.660.000	10.437.030.000

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

#### **2.4.3.2. Industri**

##### **➤ Kinerja Daerah**

Pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo selama Tahun 2014 s.d 2017 menunjukkan kinerja positif. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian

nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor riil. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha industri, nilai produksi dan nilai investasi. Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam table dibawah ini:

**Tabel 2. 80: Data Profil Industri Tahun 2014 – 2017**

Jenis	2014	2015	2016	2017
<b>Industri agro dan kimia (IAK)</b>	802 unit	941 unit	941 unit	946 unit
<b>Industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA)</b>	138 unit	148 unit	167 unit	158 unit
<b>Industri alat transportasi, elektronika dan telematika (IATT)</b>	15 unit	17 unit	2 unit	11 unit
<b>Total Industri</b>	955 unit	1.106 unit	1.110 unit	1.115 unit
<b>Nilai produksi</b>	1.174.816.709.425	5.109.050.852.360	5.319.032.842.300	3.297.448.097.316
<b>Nilai Investasi</b>	365.035.698.000	78.095.292.715	260.254.100.400	139.970.900.889

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Fokus Urusan Urusan Perdagangan dan Industri terdapat empat indikator yang telah dilaksanakan oleh Kota Probolinggo. Empat indikator tersebut diantaranya adalah proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita, laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri, dan proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. Berikut ini adalah tabel capaian indikator TPB Urusan Urusan Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo:

**Tabel 2. 81: Capaian Indikator SDGs Urusan Industri**

Indikator	Capaian		Target	aKeterangan
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	0,0016%	0,0011%	Meningkat	
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3,21%	5,39%	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	9,00	6,52	Meningkat	
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	n/a	n/a	Meningkat	

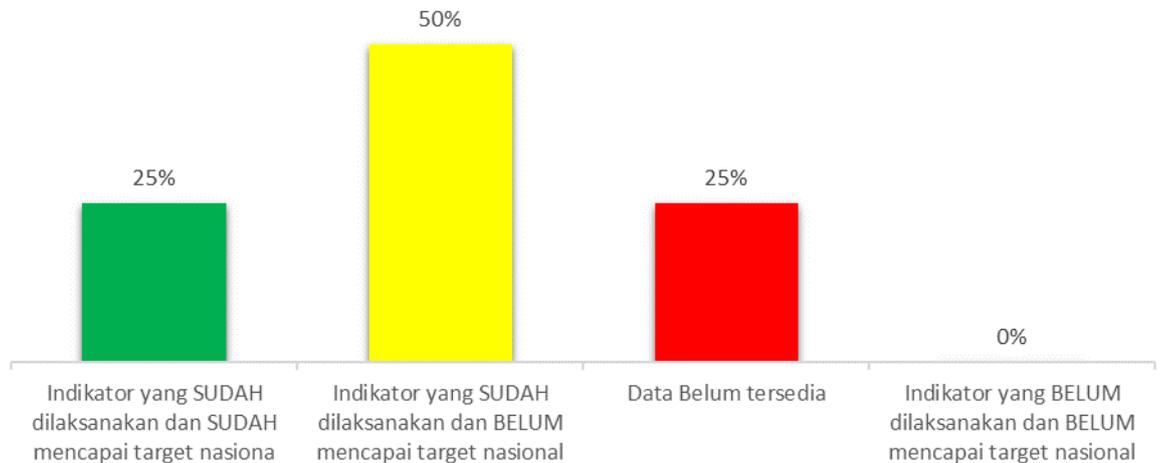
Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Data belum tersedia
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita di tahun 2016 sebesar 0,0016% kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan sehingga menjadi 0,0011%. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur pada tahun 2016 sebesar 3,21% dan meningkat menjadi 5,39% pada tahun 2017. Proporsi nilai tambah industri kecil belum tersedia data. Terakhir adalah proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit yang mengalami penurunan di tahun 2017 sehingga menjadi 6,52. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) fokus urusan industri di Kota Probolinggo ada yang mengalami peningkatan dan penurunan, dan hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah, karena indikator TPB urusan industri sangat

berpengaruh pada keadaan ekonomi daerah dan juga kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

**Gambar 2. 53: Capaian Indikator SDGs Urusan Industri**

### 2.4.3.3. Pariwisata

#### ➤ Kinerja Daerah

Kota Probolinggo merupakan kota transit yang menghubungkan kota-kota di wilayah sebelah barat dan timur di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam perkembangannya Kota Probolinggo telah berkembang menjadi kota tujuan wisata, hiburan dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan karena menjadi tempat transit bagi wisatawan yang akan melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali. Berikut potensi wisata yang ada di Kota Probolinggo.

**Tabel 2. 82: Potensi Wisata Kota Probolinggo**

No.	Jenis Obyek Wisata	Nama Obyek Wisata	Alamat
1	Wisata Alam	-	-

No.	Jenis Obyek Wisata	Nama Obyek Wisata	Alamat
2	Wisata Budaya	Museum Probolinggo	Jl. Suroyo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211
		Museum Dr. Moh Saleh	Jl.DR.Moh.Saleh No 1, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
3	Wisata Religi	Gereja Merah	Jl. Suroyo No.32, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Klenteng Tri Dharma	Jl. Wr. Supratman No.127, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
4	Wisata Buatan	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa Timur, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Kolam Renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Kolam Renang Olympic	Kedopak, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231
		Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rachmad, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa Timur, Indonesia, Wisata Primadona, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kota Probolinggo bukan tanpa alasan karena sesuai dengan data Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2018 tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Probolinggo dari Tahun 2014 s.d 2017 terus mengalami lonjakan kenaikan yang sangat signifikan. Berikut tabel kunjungan wisatawan di Kota Probolinggo.

**Tabel 2. 83: Kunjungan Wisata Tahun 2014 – 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Wisatawan Domestik	465.362	516.327	539.488	965.555
2	Wisatawan Mancanegara	489	1.759	4.298	3.648
	<b>Total Wisatawan</b>	<b>465.851</b>	<b>518.086</b>	<b>543.786</b>	<b>969.203</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Melihat potensi tersebut Pemerintah Kota Probolinggo melakukan langkah-langkah dalam rangka mengembangkan wisata di Kota Probolinggo diantaranya wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan yang diharapkan dapat menjadikan Kota Probolinggo sebagai tempat tujuan wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara.

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Fokus Urusan Pariwisata terdapat empat indikator yang telah dilaksanakan oleh Kota Probolinggo. Empat indikator tersebut diantaranya adalah jumlah wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara, jumlah devisa sektor pariwisata dan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. Dari empat indikator tersebut sebanyak 2 indikator sudah dilaksanakan dan sudah memenuhi target nasional. Sedangkan 1 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan juga 1 indikator belum tersedia data. Berikut ini adalah tabel capaian indikator TPB Urusan Pariwisata Kota Probolinggo:

**Tabel 2. 84: Capaian Indikator TPB Urusan Pariwisata**

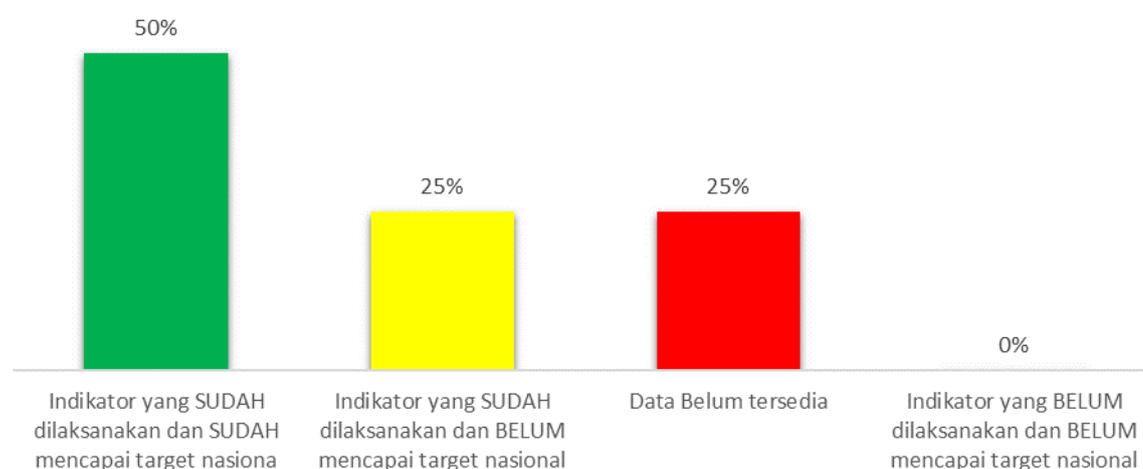
Indikator	Capaian		Target	Keterangan
Jumlah wisatawan mancanegara.	4,298	3,648	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	539,488	965,555	Meningkat	
Jumlah devisa sektor pariwisata.	4.347.793.164	5.058.920.946	Meningkat	

Indikator	Capaian	Target	Keterangan
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	n/a	n/a	Meningkat menjadi 8%

Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

**Gambar 2. 54: Capaian Indikator SDGs Urusan Pariwisata**

#### 2.4.3.4. Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum

dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

**Tabel 2. 85: Pengembangan Nilai Ekspor Komoditi Industri**

KOMODITI	2016		2017		2018	
	VOLUME	NILAI (US\$ 000)	VOLUME	NILAI (US\$ 000)	VOLUME	NILAI (US\$ 000)
KULIT	866,75	182.545,55	135.726,05	525.081,16	383.653,55	908.677,17
PLYWOOD & KAYU OLAHAN	1.720,81	6.891,41	789.083,79	49.441.243,58	92.336,53	43.856.746,56
KIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKAN OLAHAN	6.982,86	1.610.400,00	4.456.400,00	12.697.104,35	945.000,00	2.760.853,51
<b>JUMLAH</b>	<b>9.570,42</b>	<b>1.799.836,96</b>	<b>5.381.209,84</b>	<b>62.663.429,09</b>	<b>1.420.990,08</b>	<b>47.526.277,24</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Nilai Ekspor Kota Probolinggo tertinggi adalah Plywood dan kayu olahan dengan nilai 43,8 Milyar pada tahun 2018, sedangkan tertinggi kedua adalah ikan olahan dengan nilai 2,7 milyar pada tahun 2018. Komoditi tersebut terus mengalami perkembangan sejak tahun 2016 sehingga berpengaruh terhadap total nilai ekspor Kota Probolinggo yang mencapai 47,5 Milyar pada tahun 2018

**Tabel 2. 86: Perkembangan Ekspor dan Impor Komoditi Kota Probolinggo**

URAIAN	2015	2016	2017	2018
<b>JUMLAH NILAI EKSPOR (US\$ 000)</b>	60.442.322,24	92.632.188,00	219.186.896,20	69.007.677,23
<b>JUMLAH NILAI IMPOR (US\$ 000) PER KOMODITI</b>	1.091.345,10	29.399.136,00	59.446.760,08	200.906.094,48

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Jika dicermati, tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2018 nilai impor Kota Probolinggo lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor. Nilai ekspor pada tahun 2018 sebesar 69 Milyar sedangkan nilai impor mencapai 200,9 Milyar. Namun pada tahun 2017 nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sektor perdagangan Kota Probolinggo masih belum stabil.

#### 2.4.4. Fokus Urusan Pemerintahan Penunjang Pemerintahan

##### ➤ Kinerja Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan Umum dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Kota Probolinggo pada periode 2015-2017. IKD di Kota Probolinggo pada periode tersebut antara adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase e-Government PERANGKAT DAERAH Yang Terintegrasi, Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Indeks Profesionalisme Aparatur, dan Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah. Berikut ini adalah capaian indikator bidang pemerintahan umum:

**Tabel 2. 87: Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum**

IKD BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2015	2016	2017
Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	62,66
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	79,3	81,25
Persentase e-Government	32,5	35	37,5
PERANGKAT DAERAH Yang Terintegrasi	WDP	WDP	WTP
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	44,05	51,11	60,14
Nilai SAKIP	3,209	3,244	N/A
Nilai LPPD			
Indeks Profesionalisme Aparatur	N/A	N/A	87,04
Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	N/A	N/A	19,03

Sumber: LKPJ AMJ Kota Probolinggo, 2014 – 2019

➤ **Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat melalui 13 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan oleh Kota Probolinggo. Dari 13 indikator tersebut yang telah mencapai target nasional sebanyak 5 indikator, yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah 5 indikator. Selain itu masih terdapat 1 indikator belum tersedia dan 2 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Berikut ini adalah tabel rincian capaian indikator TPB Layanan Penunjang Pemerintahan Kota Probolinggo:

**Tabel 2. 88: Capaian Indikator TPB Layanan Penunjang Pemerintahan Kota Probolinggo**

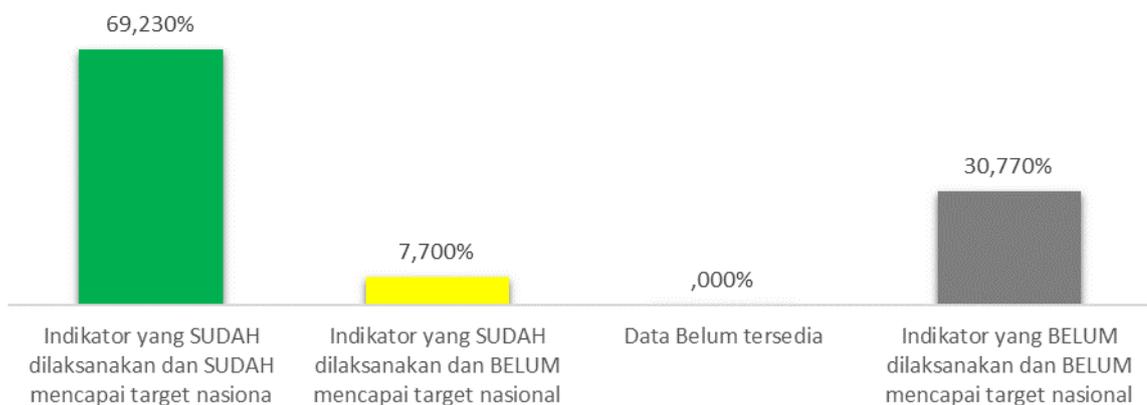
Indikator	Capaian		Target	Keterangan
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	80,75%	82,08%	Meningkat	
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WDP	WTP	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	51,11%	60,14%	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	82,64%	83,07%	Menjadi menjadi 80%	

Indikator	Capaian		Target	Keterangan
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	n/a	n/a	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1,68%	1,87%	Meningkat	
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	115,03%	131,93%	Di atas 12%	
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	3,41%	4,05%	Meningkat	
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a	ada	
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a	ada	
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	85,17%	100,00%	Meningkat	
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	63,68%	64,82%	Meningkat menjadi 77,4%	
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	83,00%	88,10%	Meningkat menjadi 85%	

Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2018

Keterangan:

	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional
	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo Tahun 2018

**Gambar 2. 55: Capaian Indikator SDGs Penunjang Urusan Pemerintahan**

➤ **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Berikut ini adalah tabel capaian SPM bidang pemerintahan dalam negeri di Kota Probolinggo tahun 2014 – 2016:

**Tabel 2. 89: Capaian SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri**

NO	INDIKATOR	TARGET 2016	REALISASI 2014 (%)	REALISASI 2015 (%)	REALISASI 2016 (%)
1.	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	100	100	100
2.	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100%	91,82	88	93,51
3.	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	83%	88,42	81	85,17

NO	INDIKATOR	TARGET 2016	REALISASI 2014 (%)	REALISASI 2015 (%)	REALISASI 2016 (%)
4.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	35%	4,89	15,5	55,17
5.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100%	90	90	93,7
6.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x Patroli dalam sehari	100	100	75,6
7.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1.018	0	0	45,58
8.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	64,17%	64,17	64,17	64,17
9.	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	75%	76,92	62,5	62,5
10	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	56,25%	37,5	37,5	37,5
11.	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	33%	33	33	33

Sumber: Laporan SPM Kota Probolinggo

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa SPM bidang pemerintahan dalam negeri memiliki 11 indikator. Dari 11 indikator tersebut dibagi dalam 3 jenis pelayanan dasar. Pertama yaitu pelayanan dokumen kependudukan memiliki 4 indikator. Dari 4 indikator tersebut yang sudah mencapai target sebanyak 3 indikator, dan yang belum mencapai target 1 indikator. Indikator yang belum mancapai target dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan kartu tanda

penduduk, dari target yang ditetapkan 100% yang tercapai masih 93,51%, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan kartu identitas penduduk Pemeliharaan. Oleh karena itu pemerintah melalui PERANGKAT DAERAH yang berkaitan harus melakukan sosialisasi agar target dari cakupan penerbitan kartu tanda penduduk dapat tercapai. Kedua pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 3 indikator, dan 3 indikator tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, karena dengan tidak tercapainya target tersebut dapat dikatakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Probolinggo belum maksimal. Terakhir adalah pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran sebanyak 4 indikator. Dari 4 indikator tersebut yang telah mencapai target sebanyak 2 indikator, dan yang belum mencapai target juga 2 indikator, yaitu tingkat waktu tanggap (response time rate) dan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.

## **2.5. ASPEK DAYA SAING**

### **2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multifliereffect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita / angka konsumsi rata-rata rumah tangga per

kapita sebulan (pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah.

#### 2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk kota Probolinggo, indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga tersebut pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 2. 90: Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Per Bulan di Kota Probolinggo Tahun 2012-2016**

NO	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan	519.361	752.280	935.007	1.011.453	1.175.484
2	Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan)	260.576	327.104	355.449	414.077	465.244
3	Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (non pangan)	258.785	425.176	579.558	597.376	710.240

Sumber : BPS Kota Probolinggo

Ket : \*) : Estimasi BAPPEDA

Berdasarkan tabel di atas, konsumsi rata-rata rumah tangga setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. dibandingkan dengan konsumsi rata-rata rumah tangga dalam hal

pangan, konsumsi rumah tangga dalam hal non pangan melebihi jumlah konsumsi pangan. Dengan adanya data ini dapat diketahui, rata-rata masyarakat Kota Probolinggo lebih sering menggunakan pengeluaran rumah tangga untuk hal-hal non pangan. Angka capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebulan dalam urusan pangan mencapai 465.244 dari konsumsi non pangan sebesar 710.240.

### 2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur kota dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan infrastruktur akan memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multipliereffect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan menyediakan infrastruktur kota salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

#### 2.5.2.1. Ketersediaan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur perhubungan sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka arus distribusi barang dan orang serta jasa transportasi lainnya akan berjalan lancar. Fasilitas perhubungan yang tersedia di Kota Probolinggo dalam rangka menunjang daya saing daerah tersebut adalah:

**Tabel 2. 91: Fasilitas Perhubungan Darat di Kota Probolinggo Tahun 2015**

No	Uraian	Keterangan	
1	Fasilitas Perhubungan Darat	1.	Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Tipe A
		2.	Fasilitas Parkir Angkutan Barang
		3.	Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Keterangan	
		4.	Shelter / Halte
2	Fasilitas Perhubungan Laut	-	
3	Jumlah orang melalui terminal/stasiun/dermaga per tahun	± 1.550.055 orang	

Berdasarkan tabel di atas, dibandingkan dengan fasilitas perhubungan darat, fasilitas perhubungan laut tidak sefarian fasilitas perhubungan darat. Sedangkan fasilitas perhubungan darat yang tersedia ada terminal bus antar kota antar provinsi tipe A, fasilitas parkir angkutan barang, pengujian kendaraan bermotor, dan shelter/halte. Dengan adanya fasilitas yang terbilang cukup memumpuni sehingga jumlah orang yang melalui terminal/stasiun/dermaga pertahunnya berkisar sekitar 1.550.055, angka ini terbilang cukup tinggi dan mampu memberikan kontribusi terhadap APBD.

**Tabel 2. 92: Kondisi Jalan di Kota Probolinggo Tahun 2017**

Kondisi	Kepemilikan			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kota	
<b>Baik</b>	22,04	0	103,57	125,61
<b>Sedang</b>	0	0	58,25	58,25
<b>Rusak</b>	0	0	32,07	32,07
<b>Rusak Berat</b>	0	0	5,22	5,22

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka

Data kondisi fasilitas berhubungan berupa jalan di Kota Probolinggo menunjukkan bahwa fasilitas perhubungan masih perlu ditingkatkan. Kondisi jalan “sedang” tercatat 58,25 Km sedangkan kondisi rusak sepanjang 32,07.

#### **2.5.2.2. Penataan Ruang Kota**

Penataan ruang kota yang memungkinkan tersedianya wilayah industri dan niaga akan berdampak pada upaya

peningkatan daya saing daerah. Sesuai dengan struktur tata ruang kota Probolinggo, dari luas wilayah kota 56,667 Km<sup>2</sup>. peruntukan kawasan kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2. 93: Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2016**

No.	Penggunaan Lahan	Total (Ha)	%
1	Mangrove	59,06	1,04
2	RTH	10,72	0,19
3	Pertanian	3.042,09	53,68
4	Tambak	124,45	2,20
5	Permukiman	1.860,57	32,83
6	Fasilitas Pendidikan	79,67	1,41
7	Fasilitas Kesehatan	5,21	0,09
8	Fasilitas Peribadatan	7,91	0,14
9	Fasilitas Perkantoran	38,64	0,68
10	Fasilitas Bangunan Umum	4,65	0,08
11	Fasilitas Olahraga (Lapangan)	14,88	0,26
12	Fasilitas Transportasi	107,93	1,90
13	Perdagangan Dan Jasa	102,95	1,82
14	Industri dan Pegudangan	142,44	2,51
15	Kawasan Pertanahan dan Keamanan	17,47	0,31
16	TPA/TPST	5,11	0,09
17	Gardu Induk PLN	4,46	0,08
18	Makam	38,50	0,68
<b>Jumlah</b>		<b>5.666,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber data: Hasil perhitungan peta digital, Bappeda Bidang Fisik

Berdasarkan tabel di atas, secara umum penataan ruang Kota Probolinggo 50% lebih ke dalam penggunaan lahan pertanian, kemudian 32% mengarah pada pemukiman penduduk. Dari jumlah yang telah terdata, penggunaan lahan Kota Probolinggo terbilang cukup baik dengan mempertahankan sebagian besar kawasan penghijauan baik guna lahan pertanian dan mangrove persentasenya lebih besar dibandingkan dengan fasilitas permukiman dan beberapa fasilitas umum lainnya. Dari delapan belas penggunaan lahan di Kota Probolinggo yang telah

terdata lahan gardu induk PLN persentasenya lebih kecil dibandingkan yang lain, kemudian fasilitas bangunan umum, TPA/TPST, dan fasilitas kesehatan.

### 2.5.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangkamenunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka segala urusan yang berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator ketersediaan fasilitas ini dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank yang ada di Kota Probolinggo hingga saat ini. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah.

**Tabel 2. 94: Kantor Bank Menurut Tipe di Kota Probolinggo Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Bank Konvensional</b>					
1.1	Bank Umum	20	20	20	20	29
1.2	BPR	15	15	6	6	7
2	<b>Bank Syariah</b>					
2.1	Bank Umum	4	4	4	4	5
2.2	BPR	5	5	4	4	0

Sumber : BPS Kota Probolinggo

\*) : Estimasi Bappeda Litbang

Berdasarkan tabel di atas kantor Bank di Kota Probolinggo telah mengalami penurunan yang tidak stabil dalam beberapa tahun. Total Bank Konvensional, Bank umum jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Sampai dengan tahun

2016 total kantor Bank Umum Konvensional telah mencapai 20 kantor sedangkan Bank umum Syariah sebanyak 4 kantor.

#### **2.5.2.4. Fasilitas Hotel dan Penginapan**

Ketersediaan fasilitas hotel dan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Apalagi posisi strategis Kota Probolinggo yang menghubungkan Kota-Kota Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo dan Banyuwangi di sebelah Timur, dan Kota-Kota Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya di sebelah Barat. Banyaknya fasilitas hotel dan penginapan menunjukkan perkembangan kegiatan perekonomian pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

**Tabel 2. 95: Jumlah Fasilitas Hotel dan Akomodasi lainnya di Kota Probolinggo Tahun 2012-2016**

NO	URAIAN	JUMLAH			
		2014	2015	2016	2017
1	Hotel dan akomodasi lainnya	17	19	19	27

Sumber : BPS Kota Probolinggo

Berdasarkan tabel di atas, jumlah hotel dan akomodasi di Kota Probolinggo meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 21 hotel/akomodasi pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan perkembangan perekonomian yang positif bagi Kota Probolinggo. Selain itu, peningkatan jumlah hotel dan akomodasi di Kota Probolinggo juga diharapkan dapat menunjang perkembangan pariwisata di Kota Probolinggo.

#### **2.5.2.5. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan**

Ketersediaan restoran dan rumah makan di suatu daerah dapat mendorong dan memberi insentif bagi tumbuhnya daya

tarik investasi di daerah tersebut. Banyaknya restoran dan rumah makan juga menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Bagi kehidupan kota, tumbuhnya usaha restoran dan rumah makan juga menunjukkan bahwa dinamika perekonomian kota sangat kondusif bagi upaya menunjang tumbuhnya daya saing daerah. Gambaran mengenai keadaan restoran dan rumah makan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 96: Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan Kota Probolinggo Tahun 2013-2016**

NO	URAIAN	JUMLAH			
		2013	2014	2015	2016
1	Jenis Usaha Restoran / Rumah Makan	16	17	21	23

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

Perekonomian Kota Probolinggo melalui fasilitas restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan positif. Jumlah usaha restoran/rumah makan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 23 usaha di tahun 2016. Hal ini merupakan potensi ekonomi yang dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan perekonomian Kota Probolinggo.

#### **2.5.2.6. Fasilitas Air Bersih dan Listrik**

Ketersediaan air bersih dan listrik bagi kehidupan warga masyarakat dan kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif bagi upaya pengembangan daya saing daerah. Gambaran mengenai ketersediaan air bersih di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel 2. 97: Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik  
Kota Probolinggo**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kapasitas air bersih yang dapat disediakan secara keseluruhan (Produksi Air)	5.880.500	5.921.800	5.833.900	6.047.400	6.203.800
2	Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih	17.630	17.833	18.021	18.252	18.747
3	Persentase air bersih yang tersalurkan kepada pelanggan	76,12%	75,29%	75,72%	76,03%	75,82%
4	Persentase RT yang telah mendapat aliran listrik	99,27%	99,28%	99,30%	99,30%*	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan kapasitas air bersih meningkat pada tahun 2016, dengan bertambahnya kapasitas air bersih maka banyaknya pengguna air bersih dikalangan rumah tangga juga meningkat pada tahun 2016. Dengan begitu persentase air bersih yang tersalurkan kepada masyarakat dapat melebihi angka 50%. Sedangkan persentase rumah tangga yang telah mendapat aliran listrik sampai pada tahun 2016 telah terpenuhi hampir 100%.

### **2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Ada beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi

daerah, seperti kondisi keamanan dan politik daerah, kemudahan pelayanan perijinan investasi, adanya peraturan daerah yang menunjang investasi daerah, adanya beban pajak dan retribusi daerah. Gambaran kondisi iklim berinvestasi di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai indikator sebagai berikut:

#### 2.5.4.1. Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri

Masuknya investasi, baik itu Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri. Stabilitas kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu daerah, adalah merupakan modal penting dalam menarik minat investasi. Data yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan politik dalam negeri tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

**Tabel 2. 98: Kondisi Keamanan dan Politik dalam Negeri Kota Probolinggo**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus-kasus kriminalitas yang terjadi	336	435	1.114	1.707	1.707
2	Angka kriminalitas	459	168	284	323	323
3	Jumlah kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa	9	7	8	7	7
4	Jumlah kasus mogok kerja	Izin mogok kerja dari Disnaker				

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Probolinggo memiliki tingkat keamanan yang kurang kondusif setiap tahunnya mulai tahun 2012-2016. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus kriminalitas dan angka kriminalitas yang terjadi di Kota Probolinggo setiap tahunnya. Pada

tahun 2015 jumlah kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Probolinggo meningkat sebanyak 593 kasus dari tahun sebelumnya.

#### 2.5.4.2. Kondisi Pelayanan Perijinan Investasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat bergantung pada berbagai insentif yang diberikan, antara lain dalam bentuk kemudahan pelayanan perijinan investasi. Semakin banyak insentif yang diberikan akan mendorong minat investor dalam menanamkan modalnya, dan sebaliknya sulitnya pengurusan ijin investasi akan mengurangi minat investasi ke suatu daerah. Gambaran mengenai pelayanan perijinan investasi di Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 99: Pelayanan Perijinan Investasi Kota Probolinggo Tahun 2012-2016**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	388	426	451	340	328
2	Surat Keterangan Rencana Kota	72	317	0	0	-
3	Persetujuan Prinsip / Ijin Lokasi	47	40	43	48	64
4	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	706	757	828	715	638
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	745	649	785	713	700
6	Ijin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI)	5	3	8	1	5
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	8	1	6	16	11
8	Ijin Gangguan (HO)	234	285	225	317	272
9	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	278	188	219	121	96
10	Ijin Usaha Pariwisata (IUP)	77	17	4	68	98
11	Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah	92	88	129	129	130
12	Ijin Penutupan Sebagian Badan Jalan	0	0	0	0	-

13	Ijin Penempatan Bedak	108	61	33	67	409
14	Ijin Reklame	419	475	447	258	659
15	Ijin Hiburan	76	66	28	54	38
16	Ijin Usaha Perikanan	3	2	5	4	3
17	Surat Penangkapan Ikan	8	18	12	8	0
18	Surat Pengolahan Ikan	-	1	5	2	5
19	Ijin Pemakaman	318	431	306	305	275
20	Ijin Undian Gratis Berhadiah	2	2	0	0	0
21	Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)	27	18	4	0	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

### 2.5.4.3. Peraturan Daerah Penunjang Investasi

Peraturan Daerah adalah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang bersifat formal. Melalui peraturan daerah dapat diketahui adanya insentif ataupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Peraturan daerah yang mendukung iklim investasi di daerah adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. Gambaran mengenai adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 100: Data Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Probolinggo Tahun 2012-2016

No	Tahun	Klasifikasi Perda		
		Terkait Perijinan	Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	Terkait Ketenagakerjaan
1	2012	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemdokan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	-
2	2013	Perda No. 5 Tahun 2013	Perda No. 2 Tahun	-

No	Tahun	Terkait Perijinan	Klasifikasi Perda	
			Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	Terkait Ketenagakerjaan
		tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan terbatas BPR Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi	
	2014	Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu	Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada BPR Jatim	-
4	2015	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan.	-
5	2016	-	-	-
<b>Jumlah</b>		7	5	-

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara mendasar berubah sejak kehadiran peraturan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan pusat- daerah. Selain memperoleh anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menggunakannya berdasarkan pedoman umum yang diatur di dalam peraturan perundangundangan. Pemberian anggaran yang lebih besar kepada pemerintah daerah tersebut harus diimbangi dengan pembaharuan manajemen keuangannya. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak hanya dituntut mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melainkan juga akuntabilitasnya.

##### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharan. Dalam pengelolaan

anggaran/ keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau juga dikenal dengan Anggaran Daerah adalah suatu bentuk kongkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan Daerah;
2. Anggaran Belanja Daerah;
3. Pembiayaan Daerah.

### **1. Pendapatan**

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berikut rincian dari pendapatan daerah Kota Probolinggo:

**Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

No.	Uraian	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>682,356,214,061.16</b>	<b>872,815,764,197.61</b>	<b>859,993,069,407.28</b>	<b>886,186,420,396.52</b>	<b>910,852,078,015.87</b>	<b>987,602,131,967.90</b>	<b>8.14</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>78,404,116,981.16</b>	<b>135,062,805,887.61</b>	<b>142,434,720,375.28</b>	<b>171,307,335,436.52</b>	<b>203,937,860,275.87</b>	<b>175,789,670,858.90</b>	<b>20.65</b>
<b>1.1.1.</b>	Pajak daerah	20,951,122,357.00	24,457,670,693.00	26,691,349,430.00	31,076,858,870.05	38,751,038,006.00	41,197,934,466.00	14.66
<b>1.1.2.</b>	Retribusi daerah	11,870,773,952.09	15,330,543,060.00	12,702,076,865.00	12,831,539,509.00	13,059,933,889.00	13,446,115,747.00	3.55
<b>1.1.3.</b>	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	739,526,618.98	762,559,815.47	783,805,224.22	997,533,281.00	1,403,455,530.28	1,376,617,776.70	14.39
<b>1.1.4.</b>	Lain-lain PAD yang sah	44,842,694,053.09	94,512,032,319.14	102,257,488,856.06	126,401,403,776.47	150,723,432,850.59	119,769,002,869.20	28.25
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>495,494,215,850.00</b>	<b>532,707,444,981.00</b>	<b>555,092,998,083.00</b>	<b>613,830,831,039.00</b>	<b>624,680,854,085.00</b>	<b>666,819,341,771.00</b>	<b>6.16</b>
<b>1.2.1.</b>	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	48,536,474,850.00	54,015,790,981.00	53,262,028,083.00	59,828,576,539.00	53,402,335,042.00	103,360,369,258.00	21.01
<b>1.2.2.</b>	Dana alokasi umum	414,534,284,000.00	454,208,196,000.00	463,649,666,000.00	470,212,966,000.00	461,952,836,000.00	461,402,648,000.00	2.24
<b>1.2.3.</b>	Dana alokasi khusus	32,341,470,000.00	24,483,458,000.00	38,181,304,000.00	83,332,171,500.00	109,325,683,043.00	102,056,324,513.00	34.89

No.	Uraian	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.4	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	81,987,000.00			457,117,000.00			0.00
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>108,457,881,230.00</b>	<b>205,045,513,329.00</b>	<b>162,465,350,949.00</b>	<b>101,048,253,921.00</b>	<b>82,233,363,655.00</b>	<b>144,993,119,338.00</b>	<b>17.64</b>
1.3.1	Hibah		-	5,819,040,000.00	-	-	20,733,080,000.00	-50.00
1.3.2	Dana darurat		-	-	-	-		0.00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	43,267,073,230.00	64,595,377,329.00	60,256,691,949.00	65,288,012,921.00	81,634,373,655.00	78,795,704,838.00	14.50
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	58,099,963,000.00	86,059,278,000.00	67,335,536,000.00	-	-		-24.54
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,090,845,000.00	32,447,497,000.00	-	2,276,060,000.00		45,464,334,500.00	0.00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	682,356,214,061.16	21,943,361,000.00	29,054,083,000.00	33,484,181,000.00	598,990,000.00	-	-16.85

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018

## **2. Belanja**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Berikut rincian dari realisasi belanja daerah Kota Probolinggo:

**Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

No.	Uraian	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>655,772,250,384.43</b>	<b>778,254,103,607.97</b>	<b>731,680,260,276.83</b>	<b>911,768,784,364.92</b>	<b>957,598,284,549.55</b>	<b>947,112,971,040.46</b>	<b>8.24</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>335,262,153,415.02</b>	<b>357,419,858,576.00</b>	<b>384,666,679,125.72</b>	<b>404,061,412,510.75</b>	<b>341,105,030,685.00</b>	<b>372,227,283,282.00</b>	<b>2.56</b>
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai	301,273,207,631.60	339,315,809,262.00	364,931,668,202.72	378,293,526,303.75	316,694,743,080.00	336,578,321,210.00	2.77
<b>2.1.2</b>	Belanja Subsidi	-	-	-	33,060,000.00	48,450,000.00	58,800,000.00	13.58
<b>2.1.3</b>	Belanja Hibah	22,000,794,406.42	12,223,966,000.00	15,377,755,000.00	22,092,733,000.00	21,843,899,892.00	32,726,759,495.00	14.74
<b>2.1.4</b>	Belanja Bantuan Sosial	10,509,120,000.00	4,205,450,000.00	2,230,815,925.00	1,298,850,000.00	1,706,522,850.00	1,548,150,000.00	-25.32
<b>2.1.5</b>	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	622,972,777.00	643,396,802.00	463,139,998.00	575,955,036.00	752,045,863.00	1,252,045,864.00	19.34
<b>2.1.6</b>	Belanja Tidak Terduga	856,058,600.00	1,031,236,512.00	1,663,300,000.00	1,767,288,171.00	59,369,000.00	63,206,713.00	-0.43
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>320,510,096,969.41</b>	<b>420,834,245,031.97</b>	<b>347,013,581,151.11</b>	<b>507,707,371,854.17</b>	<b>616,493,253,864.55</b>	<b>574,885,687,758.46</b>	<b>14.94</b>
<b>2.2.1</b>	Belanja Pegawai	65,612,242,153.00	83,299,897,199.00	74,655,165,202.00	50,168,794,248.00	52,143,725,856.00	55,689,441,645.00	-1.10
<b>2.2.2</b>	Belanja Barang dan Jasa	186,736,243,008.67	230,610,989,994.25	198,066,714,766.42	309,832,797,580.32	325,168,161,072.74	356,409,256,950.20	16.05
<b>2.2.3</b>	Belanja Modal	68,161,679,882.74	106,923,357,838.72	74,291,701,182.69	147,705,780,025.85	239,181,366,935.81	162,786,989,163.26	31.03

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018

### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/ saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan tampaknya masih fluktuatif perkembangannya, rata-rata tahun 2013 sampai dengan 2018 lebih besar penerimaan pembiayaan, yang didominasi oleh penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Untuk pengeluaran pembiayaan, pembiayaan dialokasikan pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah. Berikut rincian dari realisasi pembiayaan daerah Kota Probolinggo:

**Tabel 3.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 – 2018**

No.	Uraian	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48,489,039,925.73</b>	<b>74,913,283,602.46</b>	<b>168,724,944,192.10</b>	<b>297,037,753,322.55</b>	<b>270,382,807,634.79</b>	<b>225,975,119,088.42</b>	<b>46.07</b>
<b>3.1.1.</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	45,989,039,925.73	74,913,283,602.46	168,724,944,192.10	297,037,753,322.55	270,382,807,634.79	223,415,613,785.34	47.57
<b>3.1.2.</b>	Pencairan Dana Cadangan	2,500,000,000.00	-	-	-	-	2,559,505,303.08	0.00
<b>3.1.3.</b>	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>3.1.4.</b>	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>3.1.5.</b>	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman*	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>3.1.6.</b>	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,500,000,000.00</b>	<b>39,359,557.83</b>	<b>-</b>	<b>-99.48</b>

No.	Uraian	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	2,500,000,000.00	39,359,557.83	-	-66.14
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	750,000,000.00	-	-	-	-	0.00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	0.00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah**	-	-	-	-	-	-	0.00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018

### **3.1.2 Neraca Daerah**

#### **1. Perkembangan Neraca Daerah**

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini sangat penting artinya bagi manajemen pemerintah daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Banyak pihak yang sangat berkepentingan terhadap neraca daerah, bukan hanya pihak eksekutif daerah saja tetapi juga legislatif, masyarakat dan pengguna lainnya untuk mengetahui kualitas aset yang dimiliki oleh daerah dan bagaimana pengelolaannya, apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota Probolinggo menyusun neraca dengan mengumpulkan, mencatat anggaran dan realisasinya kedalam pos-pos neraca. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi

keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Untuk mengetahui kondisi neraca daerah Kota Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4. Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>ASET</b>	<b>1.610.683.606.364,99</b>	<b>1.799.999.771.872,66</b>	<b>1.404.218.057.744,74</b>	<b>1.496.043.374.918,82</b>	<b>1.592.418.090.129,47</b>	<b>1.681.778.008.505,24</b>
<b>1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>105.523.394.053,21</b>	<b>194.851.996.960,55</b>	<b>330.064.224.954,74</b>	<b>321.228.462.833,13</b>	<b>277.074.965.866,25</b>	<b>306.902.726.825,54</b>
1.1.1	Kas	75.027.352.102,46	168.758.862.514,29	297.081.284.722,55	271.084.121.591,17	224.361.547.534,35	266.464.280.015,86
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	25.142.436.748,29	18.792.640.180,62	25.338.289.908,85	41.452.956.085,30	42.927.560.092,03	29.409.705.015,12
1.1.4	Belanja Dibayar Dimuka	484.766.184,16	528.702.213,34	555.458.800,33	692.090.373,50	55.125.503,50	194.353.439,77
1.1.5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
1.1.6	Persediaan	4.868.839.018,30	6.771.792.052,30	7.089.191.523,01	7.999.294.783,16	9.724.232.736,37	10.834.388.354,79
<b>1.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>18.208.417.416,16</b>	<b>14.034.247.117,67</b>	<b>14.458.496.460,90</b>	<b>14.177.746.819,94</b>	<b>17.361.095.108,80</b>	<b>24.214.288.852,63</b>
1.2.1	Investasi Non Permanen	4.037.909.980,93	3.957.409.104,51	4.007.300.958,55	3.950.314.630,97	3.904.561.593,81	3.867.105.982,39
1.2.2	Investasi Permanen	14.170.507.435,23	10.076.838.013,16	10.451.195.502,35	10.227.432.188,97	13.456.533.514,99	20.347.182.870,24
<b>1.3</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>1.474.032.683.171,62</b>	<b>1.577.355.824.313,44</b>	<b>1.048.111.955.038,10</b>	<b>1.139.887.285.250,75</b>	<b>1.260.067.192.535,47</b>	<b>1.301.883.268.367,34</b>
1.3.1	Tanah	363.850.242.260,00	374.012.613.868,00	375.750.033.868,00	375.750.033.868,00	454.934.642.730,69	471.818.412.032,12
1.3.2	Peralatan dan Mesin	202.672.524.914,41	237.583.340.386,41	266.615.157.116,14	342.759.152.757,35	425.413.109.507,31	472.693.723.089,46
1.3.3	Gedung dan Bangunan	411.008.241.963,48	437.785.761.927,26	456.263.395.412,07	476.303.431.822,76	504.891.210.399,16	507.824.277.194,58
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	476.964.895.678,23	508.444.016.352,17	531.766.986.715,12	601.782.893.497,95	608.513.217.711,68	707.881.648.143,21
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	18.253.465.115,50	18.777.549.215,50	19.411.816.065,50	20.333.864.010,52	20.769.740.403,50	21.097.313.956,50
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.283.313.240,00	752.542.564,10	558.196.501,00	6.196.789.670,48	11.416.868.691,48	11.267.664.638,48
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	-602.253.630.639,73	-683.238.880.376,31	-765.871.596.908,35	-890.699.770.687,01
<b>1.4</b>	<b>Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.539.359.557,83</b>	<b>0,00</b>

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.539.359.557,83	0,00
<b>1.5</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>12.919.111.724,00</b>	<b>13.757.703.481,00</b>	<b>11.583.381.291,00</b>	<b>18.249.880.015,00</b>	<b>35.375.477.061,12</b>	<b>48.777.724.459,73</b>
1.5.1	Aset Tidak Berwujud	2.771.639.560,00	2.968.750.160,00	3.042.450.160,00	4.827.910.660,00	6.156.255.660,00	7.016.751.660,00
1.5.2	Aset Lain-lain	10.147.472.164,00	10.788.953.321,00	10.952.342.731,00	16.534.327.025,00	102.123.417.778,92	115.988.227.408,37
1.5.3	Amortisasi	0,00	0,00	-2.411.411.600,00	-3.112.357.670,00	-3.953.401.240,00	-4.723.017.660,00
1.5.4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.950.795.137,80	-69.504.236.948,64
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>3.519.467.351,02</b>	<b>5.495.373.568,91</b>	<b>13.414.917.418,42</b>	<b>38.895.302.029,48</b>	<b>14.981.305.536,23</b>	<b>13.059.407.482,06</b>
<b>2.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>3.519.467.351,02</b>	<b>5.495.373.568,91</b>	<b>13.414.917.418,42</b>	<b>38.895.302.029,48</b>	<b>14.981.305.536,23</b>	<b>13.059.407.482,06</b>
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	261.797.675,00	377.082.238,00	945.004.808,33	952.472.718,33	944.700,00	981.450,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.257.669.676,02	5.118.291.330,91	12.469.912.610,09	37.942.829.311,15	14.980.360.836,23	13.058.426.032,06
2.1.7	Kewajiban Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>1.607.164.139.013,97</b>	<b>1.794.504.398.303,75</b>	<b>1.390.803.140.326,32</b>	<b>1.457.148.072.888,33</b>	<b>1.577.436.784.593,24</b>	<b>1.668.718.601.023,18</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.610.683.606.364,99</b>	<b>1.799.999.771.872,66</b>	<b>1.404.218.057.744,74</b>	<b>1.496.043.374.917,81</b>	<b>1.592.418.090.129,47</b>	<b>1.681.778.008.505,24</b>

**Sumber** : Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018

**Keterangan** : Data Neraca Daerah Tahun 2018 bersumber dari LKPD 2018 yang telah diaudit (*Audited*)

**Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Probolinggo  
Tahun 2013 - 2018**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rata-rata Pertumbuhan (%)</b>
<b>I</b>	<b>ASET</b>	<b>1,67%</b>
<b>1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>29,68%</b>
1.1.1	Kas	38,75%
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	20,00%
1.1.3	Piutang	9,05%
1.1.4	Belanja Dibayar Dimuka	39,85%
1.1.5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-20,00%
1.1.6	Persediaan	17,92%
<b>1.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>8,02%</b>
1.2.1	Investasi Non Permanen	-0,85%
1.2.2	Investasi Permanen	11,09%
<b>1.3</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>-0,79%</b>
1.3.1	Tanah	5,61%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	18,65%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	4,34%
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8,36%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	2,94%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	205,18%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	8,37%
<b>1.4</b>	<b>Dana Cadangan</b>	<b>-19,69%</b>
1.4.1	Dana Cadangan	-19,69%
<b>1.5</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>35,99%</b>
1.5.1	Aset Tidak Berwujud	21,95%
1.5.2	Aset Lain-lain	118,00%
1.5.3	Amortisasi	15,11%
1.5.4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,16%
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>63,18%</b>
<b>2.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>63,18%</b>
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00%
2.1.2	Utang Bunga	0,00%
2.1.3	Utang Pajak	0,00%
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	0,00%
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	19,89%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	66,34%
2.1.7	Kewajiban Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00%</b>

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00%
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00%
<b>III</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>1,59%</b>

**Sumber** : Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diuraikan penjelasan terkait dengan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Melihat pada kondisi aset dapat diketahui bahwa jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo saat ini meliputi: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Nilai aset Pemerintah Kota Probolinggo dalam setiap tahun (antara tahun 2013 hingga 2018) memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,67%, dimana pertumbuhan tersebut lebih banyak ditunjang oleh pertumbuhan dari aset lancar dengan rata-rata setiap tahun sebesar 29,68% dan aset lainnya sebesar 35,99%. Sedangkan untuk investasi jangka panjang rata-rata dalam setiap tahun memiliki pertumbuhan sebesar 8,02%. Sebagian besar aset yang dimiliki oleh Pemerintah

Kota Probolinggo dalam bentuk aset tetap dengan rata-rata proporsi setiap tahunnya (selama tahun 2013 hingga 2018) sebesar 81,09%, sedangkan aset lancar berada pada posisi berikutnya dengan rata-rata proporsi sebesar 16,33%. Untuk investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya memiliki proporsi dengan rata-rata setiap tahun di bawah 2%.

Pada tahun 2013 nilai aset Pemerintah Kota Probolinggo dalam neraca tercatat sebesar Rp. 1.610.683.606.364,99, dimana pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 11,75% atau sebanyak Rp. 189.316.165.507,67, sehingga dengan demikian nilai aset pada akhir tahun 2014 menjadi Rp. 1.799.999.771.872,66. Pertumbuhan aset yang terjadi pada tahun 2014 antara lain disebabkan oleh adanya pertumbuhan aset lancar khususnya kas yang mengalami pertumbuhan dari tahun 2013 sebesar 124,93%, sedangkan secara akumulatif aset lancar mengalami pertumbuhan sebesar 84,65%. Keberadaan aset Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 21,99% atau sebanyak Rp. 395.781.714.127,92, sehingga nilai aset pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak Rp. 1.404.218.057.744,74. Penurunan tersebut terdorong oleh penurunan nilai aset tetap sebesar -33,55% yang disebabkan oleh adanya penurunan nilai konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diberlakukan dengan nilai sebesar Rp. 602.253.630.639,73, sehingga mengurangi nilai buku aset yang dimiliki. Kondisi aset Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,54%, yaitu menjadi Rp. 1.496.043.374.918,82. Pertumbuhan pada tahun 2016 lebih banyak disebabkan oleh peningkatan nilai aset lainnya, khususnya dalam bentuk aset tidak berwujud dan aset lain-lain dengan pertumbuhan di atas 50% dari

tahun 2015. Pada tahun 2017 nilai aset Pemerintah Kota Probolinggo

tercatat sebanyak Rp. 1.592.418.090.129,47 atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,44% dari tahun 2016. Pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2017 lebih banyak disebabkan oleh peningkatan pada kepemilikan aset lainnya sebesar 93,84% yang bersumber dari aset lain-lain. Selain itu, pada tahun 2017 investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan sebesar 22,45%, khususnya dalam bentuk investasi permanen. Pada tahun 2017 posisi aset lancar justru mengalami penurunan sebesar 13,75% sebagai dampak dari penurunan nilai kas dan belanja dibayar dimuka. Kondisi pada tahun 2018 nilai aset Pemerintah Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% dari tahun 2017, sehingga pada tahun tersebut nilai aset tercatat sebanyak Rp. 1.681.778.008.505,24. Terjadinya pertumbuhan nilai aset pada tahun 2018 secara signifikan disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan pada investasi jangka panjang, aset lainnya, dan aset lancar masing-masing sebesar 39,47%, 37,89%, dan 10,77%.

## 2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Probolinggo. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam setiap tahun secara keseluruhan berbentuk kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa pendapatan diterima dimuka dan utang jangka pendek lainnya, dimana nilai utang jangka pendek lainnya lebih dominan dengan

rata-rata proporsi setiap tahunnya (selama tahun 2013 hingga 2018) sebesar 96,03%.

Nilai kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo dalam setiap tahun mengalami pertumbuhan dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 63,18%, dimana untuk utang jangka pendek lainnya rata-rata setiap tahun memiliki pertumbuhan sebesar 66,34%, sedangkan pendapatan diterima dimuka sebesar 19,89%. Pada tahun 2013 nilai kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo tercatat sebanyak Rp. 3.519.467.351,02. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 56,14%, sehingga menjadi Rp. 5.495.373.568,91. Pada tahun 2015 dan 2016 kewajiban jangka pendek Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 144,11% pada tahun 2015 dan sebesar 189,94% pada tahun 2016, sehingga nilai kewajiban yang dimiliki tercatat pada tahun 2015 sebanyak Rp. 13.414.917.418,42 dan tahun 2016 sebanyak Rp. 38.895.302.029,48. Pertumbuhan nilai kewajiban jangka pendek yang tinggi pada tahun 2015 disebabkan oleh tingginya pertumbuhan pada masing-masing jenis kewajiban, yaitu di atas 100%. Sedangkan pada tahun 2016 terjadinya pertumbuhan sebagian besar disebabkan oleh peningkatan utang jangka pendek lainnya yang tercatat sebesar 204,28% dari nilai tahun 2015. Seiring dengan semakin meningkatnya kewajiban, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk mengurangi nilai kewajiban yang dimiliki. Hal tersebut terwujud dengan menurunnya nilai kewajiban jangka pendek sebesar 61,48%, sehingga di tahun 2017 nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo tercatat menjadi Rp. 14.981.305.536,23. Pada tahun 2018 nilai kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo kembali mengalami penurunan sebesar 12,83%,

sehingga menjadi Rp. 13.059.407.482,06. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jenis kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu utang Jangka Pendek Lainnya.

### 3. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Rata-rata pertumbuhan nilai ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam setiap tahunnya (selama tahun 2013 hingga 2018) tercatat sebesar 1,59%. Keberadaan nilai ekuitas dana dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan. Pada tahun 2013 nilai ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo tercatat sebanyak Rp. 1.607.164.139.013,97, jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 11,66%, sehingga menjadi Rp. 1.794.504.398.303,75. Seiring dengan menurunnya nilai aset dan meningkatnya nilai kewajiban yang dimiliki pada tahun 2015, maka nilai ekuitas dana pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 22,50%, sehingga menjadi Rp. 1.390.803.140.326,32. Pada tahun 2016, dengan meningkatnya nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo turut meningkatkan nilai ekuitas dana menjadi Rp. 1.457.148.072.888,33 atau sebesar 4,77%. Pada tahun 2017 nilai ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo kembali mengalami pertumbuhan sebesar 8,26%, sehingga nilai ekuitas dana di tahun 2017 menjadi Rp. 1.577.436.784.593,24. Sedangkan pada tahun 2018 nilai ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,79%, sehingga nilai ekuitas dana di tahun 2018 menjadi Rp. 1.668.718.601.023,18. Pertumbuhan tersebut selain ditunjang oleh meningkatnya nilai

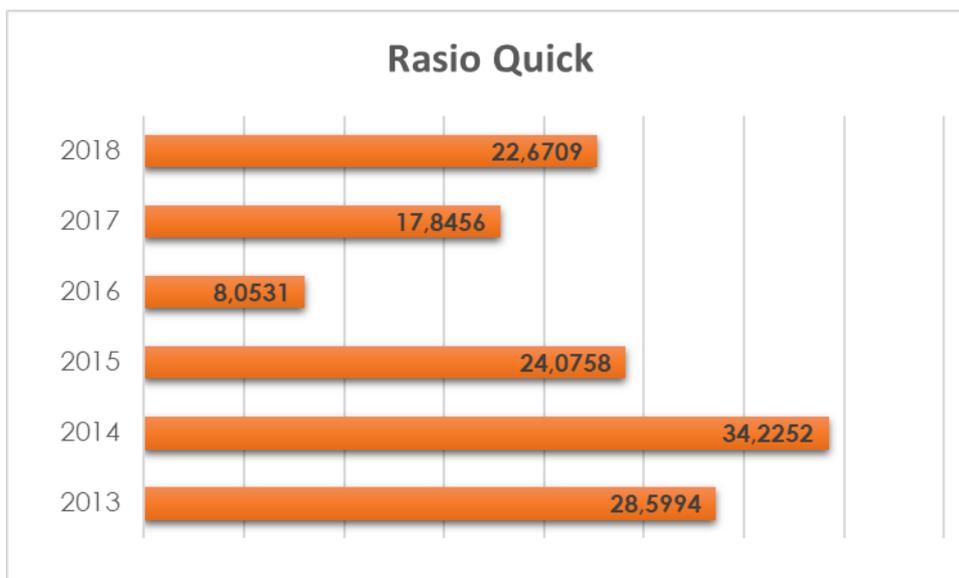
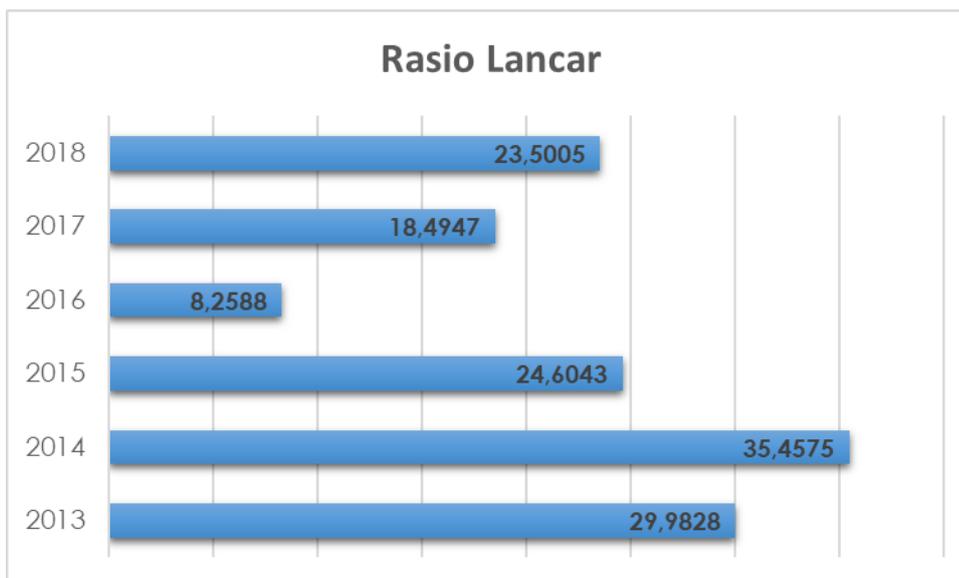
aset, juga dipengaruhi oleh menurunnya nilai kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2018.

#### **A. Rasio Neraca Daerah**

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap neraca yang telah diselenggarakan dan disusun. Analisis rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya, serta melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Analisis rasio tersebut dilaksanakan melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **1. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah Kota Probolinggo dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio yang digunakan untuk melihat likuiditas antara lain adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Untuk melihat secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



**Sumber** : Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

**Gambar 3.1. Rasio Likuiditas Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Rasio lancar menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Probolinggo dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aset lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran

standar untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai rasio lancar Kota Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018 tercatat berada di atas 1 (satu), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Kota Probolinggo selama tahun 2013 hingga 2018 dalam kategori baik. Pada tahun 2013 nilai rasio lancar Kota Probolinggo berada pada angka 29,9828. Seiring dengan peningkatan nilai aset lancar yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai kewajiban jangka pendek, maka nilai rasio lancar pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 35,4575. Pada tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan aset lancar Pemerintah Kota Probolinggo mengalami perlambatan, sedangkan pertumbuhan kewajiban jangka pendek menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga nilai rasio lancar pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 24,6043 dan pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 8,2588. Pada tahun 2017 nilai kewajiban jangka pendek mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan aset lancarnya, sehingga nilai rasio lancar pada tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 menjadi 18,4947, yang artinya Pemerintah Kota Probolinggo mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya sebanyak 18 kali peminjaman selama satu tahun. Pada tahun 2018 seiring dengan menurunnya nilai kewajiban jangka pendek, nilai rasio lancar mengalami kenaikan menjadi 23,5005, yang artinya Pemerintah Kota Probolinggo mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya sebanyak 23 kali peminjaman selama satu tahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, maka kemampuan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada tahun 2017 dan 2018 dinilai

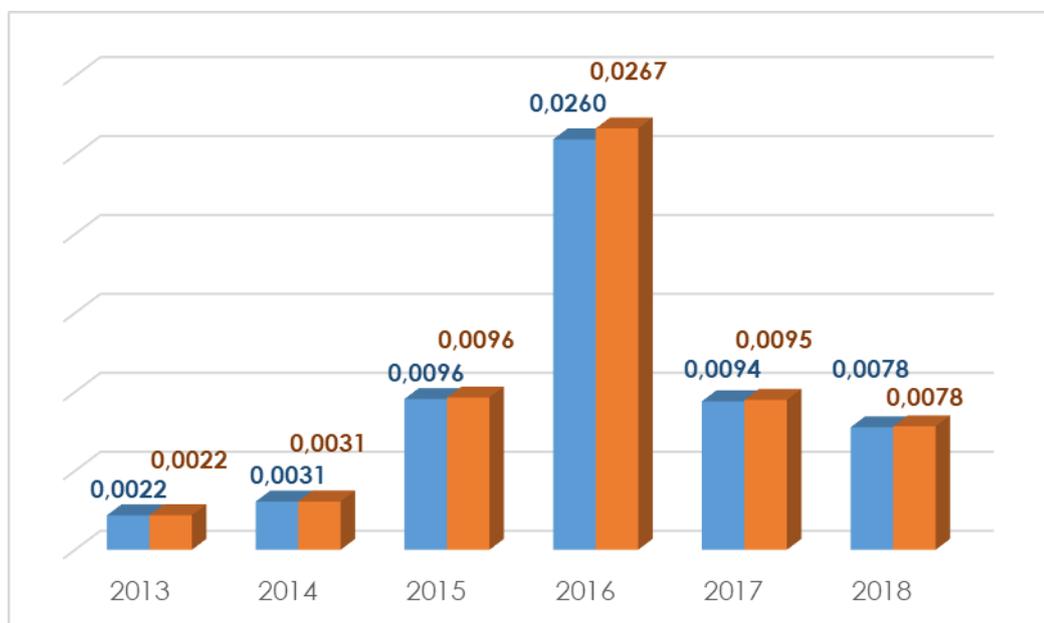
lebih baik, dimana kemampuan bayar pada tahun 2016 hanya sebesar 8 kali.

Ratio *Quick* disebut juga *acid test ratio*, merupakan perimbangan antara jumlah aset lancar dikurangi persediaan, dengan jumlah kewajiban jangka pendek. Persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio *quick* karena persediaan merupakan komponen aset lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Sepertihalnya rasio lancar, rasio *quick* Kota Probolinggo pada tahun 2013 sampai tahun 2018 tercatat memiliki nilai di atas 1 (satu), sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Kota Probolinggo berdasarkan nilai rasio *quick* pada tahun 2013 hingga 2018 dalam kategori baik. Semakin besar rasio ini menunjukkan kondisi yang semakin baik. Pada tahun 2013 nilai rasio *quick* Kota Probolinggo tercatat sebesar 28,5994, dimana pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 34,2252. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan nilai aset lancar dan semakin meningkatnya persediaan, serta meningkatnya nilai kewajiban jangka pendek, maka nilai rasio *quick* pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan menjadi 24,0758 pada tahun 2015 dan 8,0531 pada tahun 2016. Seiring dengan menurunnya nilai kewajiban jangka pendek pada tahun 2017 yang mencapai 61,48% dari tahun 2016, maka nilai rasio *quick* pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 17,8456, dimana Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2017 memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang lebih baik dari tahun 2016, yaitu sebanyak 17,8 kali. Pada tahun 2018 nilai rasio *quick* tercatat kembali mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu mencapai 22,6709. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar kewajiban

jangka pendek pada tahun 2018 semakin baik dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017.

## 2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah Kota Probolinggo dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain: Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio hutang terhadap modal. Berikut adalah gambar yang menunjukkan hasil perhitungan kedua rasio tersebut di Kota Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018.



**Keterangan :** ■ Rasio Total Hutang thd Total Aset  
■ Rasio Hutang terhadap Modal

**Sumber :** Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

### **Gambar 3.2. Rasio Solvabilitas Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan sejauh mana kewajiban yang dimiliki dapat ditutupi oleh aset. Berdasarkan data pada gambar di atas dapat terlihat bahwa dalam setiap tahunnya nilai rasio total hutang terhadap total aset di Kota

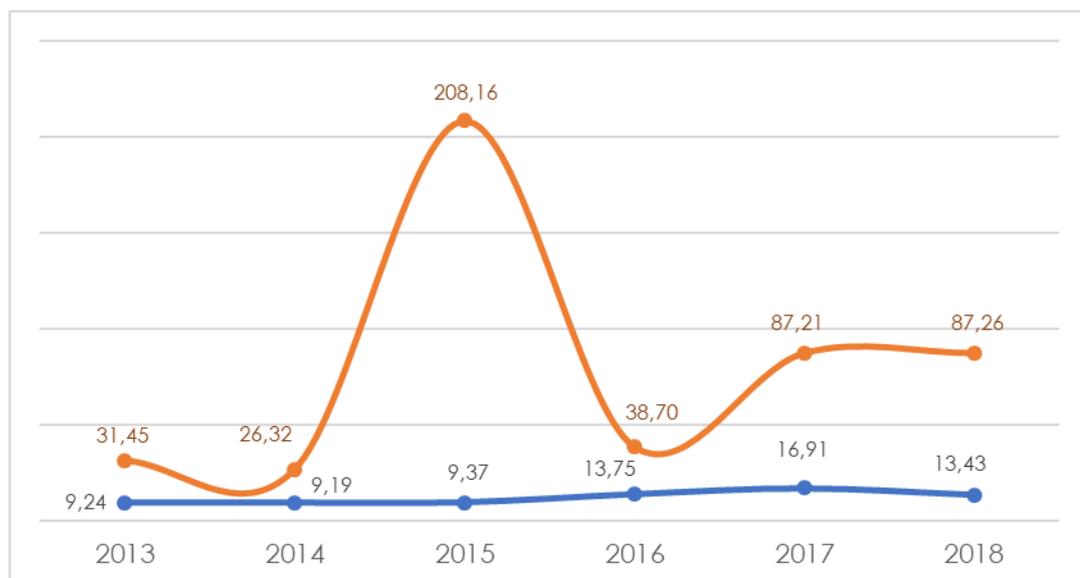
Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2016 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2013 rasio total hutang terhadap total aset Kota Probolinggo tercatat sebesar 0,0022, dimana pada tahun 2014 hingga 2016 nilai tersebut mengalami pertumbuhan sehingga pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,0260 yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan nilai kewajiban/ hutang. Pada tahun 2017 dan 2018 dengan adanya penurunan nilai kewajiban/ hutang menyebabkan nilai rasio total hutang terhadap total aset mengalami penurunan menjadi 0,0094 pada tahun 2017 dan 0,0078 pada tahun 2018. Nilai rasio yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016, dimana nilai rasionya lebih kecil. Semakin kecil rasionya, maka menunjukkan kondisi yang semakin aman (*solvable*). Selain itu, nilai rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Probolinggo dalam setiap tahun masih menunjukkan pada angka di bawah 5%, artinya komposisi hutang terhadap aset masih berada di bawah nilai tersebut.

Rasio hutang terhadap modal menggambarkan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh hutang dan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu). Semakin kecil rasio hutang terhadap modal menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berdasarkan hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal pada tabel di atas, rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2013 sampai tahun 2018 berada di bawah angka 1 (satu). Pada tahun 2013 nilai rasio tercatat sebesar 0,0022, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sehingga menjadi 0,0267. Pada

tahun 2017 dan 2018 nilai rasio mengalami penurunan sehingga menjadi 0,0095 pada tahun 2017 dan 0,0078 pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjamin keseluruhan hutang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik, dimana hal ini ditandai dengan tren rasio yang nilainya kurang dari 1 (satu) dari tahun ke tahun.

### 3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Kota Probolinggo. Rasio aktivitas dalam pembahasan ini dilihat dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Adapun nilai rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Keterangan :** — Rata-rata umur piutang  
 — Rata-rata umur persediaan

**Sumber :** Neraca Daerah & CALK Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

**Gambar 3.3. Rasio Aktivitas Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Rata-rata umur piutang adalah rasio yang digunakan untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Melihat data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa rata-rata umur piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam setiap tahunnya menunjukkan adanya perkembangan, dimana bentuk piutang yang dimiliki antara lain adalah: piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain. Pada tahun 2013 nilai rata-rata umur piutang tercatat sebanyak 9,24 hari, sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 16,91 hari. Seiring dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan piutang, maka pada tahun 2018 nilai rata-rata umur piutang mengalami penurunan menjadi 13,43 hari.

Seperti halnya rata-rata umur piutang, rata-rata umur persediaan menggambarkan berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif. Bila melihat pada data yang tersedia, nilai Rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari 38,70 hari pada tahun 2016 menjadi 87,26 hari, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo semakin efektif.

### **3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

#### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

##### **1. Pendapatan**

Sumber pendapatan terbanyak Kota Probolinggo berasal dari Dana Perimbangan yang proporsi rata-rata Tahun 2013 - 2018 mencapai 68% dari total pendapatan daerah. Secara spesifik, pendapatan terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan proporsi rata-rata mencapai 54,10% dari total pendapatan daerah. Artinya, Kota Probolinggo masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya menggambarkan bahwa Kota Probolinggo telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Rincian proporsi realisasi

pendapatan Kota Probolinggo dapat tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6. Proporsi Realisasi Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

No.	Uraian	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>11%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>19%</b>	<b>22%</b>	<b>18%</b>
1.1.1.	Pajak daerah	3%	3%	3%	4%	4%	4%
1.1.2.	Retribusi daerah	2%	2%	1%	1%	1%	1%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7%	11%	12%	14%	17%	12%
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>73%</b>	<b>61%</b>	<b>65%</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>	<b>68%</b>
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	7%	6%	6%	7%	6%	10%
1.2.2.	Dana alokasi umum	61%	52%	54%	53%	51%	47%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	5%	3%	4%	9%	12%	10%
1.2.4.	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>16%</b>	<b>23%</b>	<b>19%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>15%</b>
1.3.1.	Hibah	0%	0%	1%	0%	0%	2%
1.3.2.	Dana darurat	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	6%	7%	7%	7%	9%	8%
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi	9%	10%	8%	0%	0%	0%

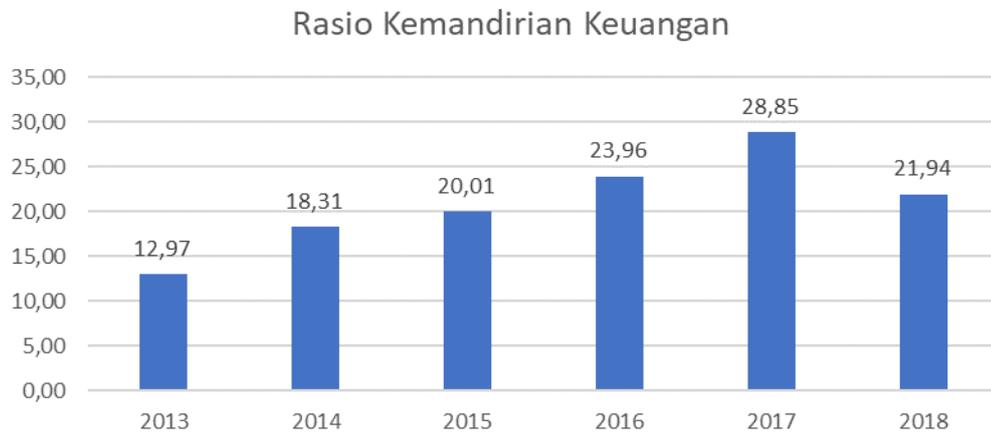
No.	Uraian	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	khusus****)						
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0%	4%	0%	0%	0%	5%
1.3.6	Pendapatan Lainnya	1%	3%	3%	4%	0%	0%

**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD Kota Probolinggo dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu Rasio Kemandirian Fiskal Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Analisis pendapatan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut

#### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

**Gambar 3.4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Tingkat keuangan Kota Probolinggo masih tergolong sangat rendah dengan pola hubungan Instrukturif pada tahun 2013 - 2016. Artinya, Kota Probolinggo masih masih bergantung pada transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Namun berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Probolinggo menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan kemandirian yang terjadi setiap tahun. Pada tahun 2017 Kota Probolinggo berhasil meningkatkan kemandirian keuangan daerah hingga mencapai 28,85 dan masuk ke dalam kriteria "Konsultatif". Tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan dengan pola hubungan instrukturif. penurunan terjadi disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang menurun. Kota Probolinggo berkomitmen untuk menjadi daerah dengan keuangan daerah yang mandiri, namun pada tahun 2018 mengalami kendala dalam pengelolaan pendapatan daerah.

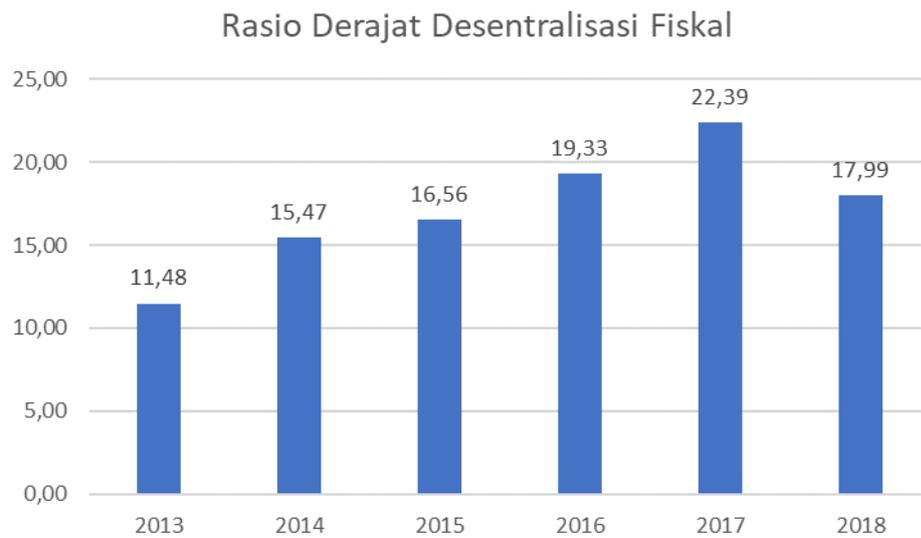
Pedoman untuk melihat pola hubungan dan kemandirian keuangan daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

**b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Probolinggo dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Sumber** : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

**Gambar 3.5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

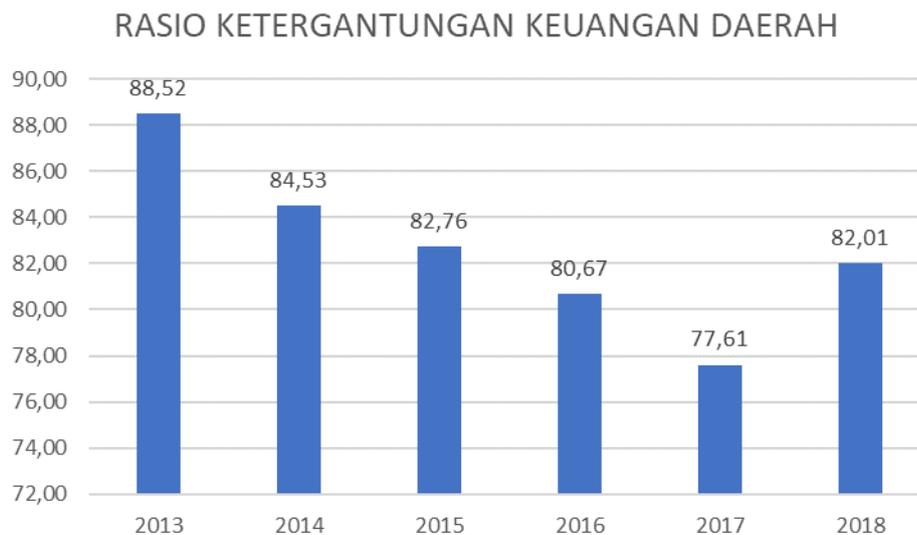
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga berhasil mencapai angka 22,39 pada tahun 2017 dengan kriteria “Sedang”. Angka tersebut lebih baik dari pada empat tahun sebelumnya dimana Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo tahun 2013 - 2016 berada pada kategori “Kurang”. Artinya, kemampuan keuangan daerah Kota Probolinggo dalam memaksimalkan PAD terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya masih kurang. Pada tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan PAD sehingga dapat menjalankan fungsi desentralisasi yang baik dalam sisi keuangan daerah. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal**

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

**c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Probolinggo dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

**Gambar 3.6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Rasio ketergantungan keuangan Kota Probolinggo cenderung mengalami tren yang positif. Tingkat ketergantungan keuangan terhadap pendapatan transfer setiap tahunnya mengalami penurunan. Artinya, pemerintah Kota Probolinggo sudah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan mengoptimalkan PAD. Walaupun mengalami penurunan, tingkat ketergantungan keuangan Kota Probolinggo masih dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan**

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

**d. Rasio Efektivitas**

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan yang dijalankan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas Kota Probolinggo dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

**Gambar 3.7. Rasio Efektivitas Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

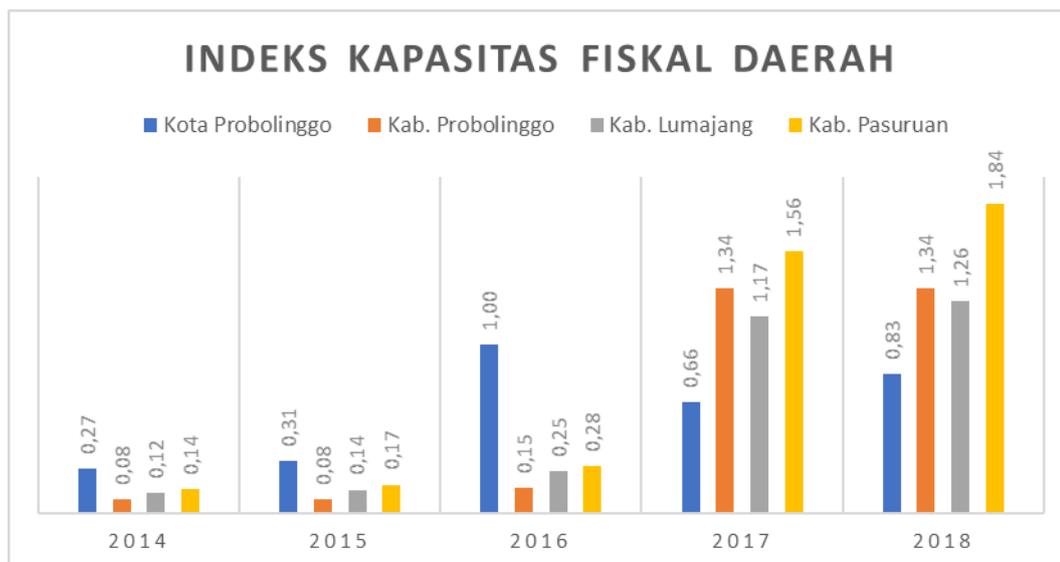
Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas Kota Probolinggo cenderung fluktuatif. Namun, mulai tahun 2014 - 2018 rasio efektivitas cenderung mengalami penurunan. Walaupun demikian, kinerja keuangan Kota Probolinggo pada tahun 2013 - 2018 masuk kedalam kategori "Sangat Efektif". Artinya, kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan terlaksana dengan sangat baik. Kriteria penilaian rasio efektivitas tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.10. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

#### **e. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah**

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kapasitas Fiskal Kota Probolinggo dan daerah sekitarnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Sumber :** Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2014 - 2018

**Gambar 3.8. Rasio Indeks Kapasitas Daerah Tahun 2014 - 2018**

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2014 - 2016 Kota Probolinggo memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik dari daerah sekitarnya, yaitu Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, dan Kab. Probolinggo. Namun pada tahun 2017 dan 2018, Indeks Kapasitas Fiskal Kota Probolinggo mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebanyak 0,34 dengan kriteria "Rendah" di tahun 2017. Sebaliknya, daerah-daerah sekitar Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka lebih dari 1,14 dan masuk ke dalam kriteria "Tinggi". Kriteria penilaian indeks kapasitas fiskal daerah tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.11. Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah**

Nilai IKFD	Kriteria
$IKFD \geq 2,05$	Sangat Tinggi
$1,14 \leq IKFD < 2,05$	Tinggi
$0,72 \leq IKFD < 1,14$	Sedang
$0,53 \leq IKFD < 0,72$	Rendah
$IKFD < 0,53$	Sangat Rendah

## 2. Belanja

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Proporsi realisasi belanja daerah Kota Probolinggo tahun 2013 - 2018 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.12. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Probolinggo Tahun 2013 – 2018**

No.	Uraian	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>46%</b>	<b>53%</b>	<b>44%</b>	<b>36%</b>	<b>39%</b>	<b>35%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	44%	50%	41%	33%	36%	68%
2.1.2	Belanja Subsidi	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.1.3	Belanja Hibah	2%	2%	2%	2%	3%	-238%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1%	0%	0%	0%	0%	-322%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0%	0%	0%	0%	0%	18%
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	0%	0%	0%	0%	0%	110%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>54%</b>	<b>47%</b>	<b>56%</b>	<b>64%</b>	<b>61%</b>	<b>167%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	11%	10%	6%	5%	6%	145%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30%	27%	34%	34%	38%	125%
2.2.3	Belanja Modal	14%	10%	16%	25%	17%	305%

**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Probolinggo tahun 2013 - 2018 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.13. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2013	366,885,449,784.60	655,772,318,459.43	55.95
2	Tahun anggaran 2014	422,615,706,461.00	779,004,103,607.97	54.25
3	Tahun anggaran 2015	439,586,833,404.72	731,680,260,276.83	60.08
4	Tahun anggaran 2016	428,462,320,551.75	914,268,784,364.92	46.86
5	Tahun anggaran 2017	368,838,468,936.00	957,637,644,107.38	38.52
6	Tahun anggaran 2018	392,267,762,855.00	947,112,971,040.46	41.42

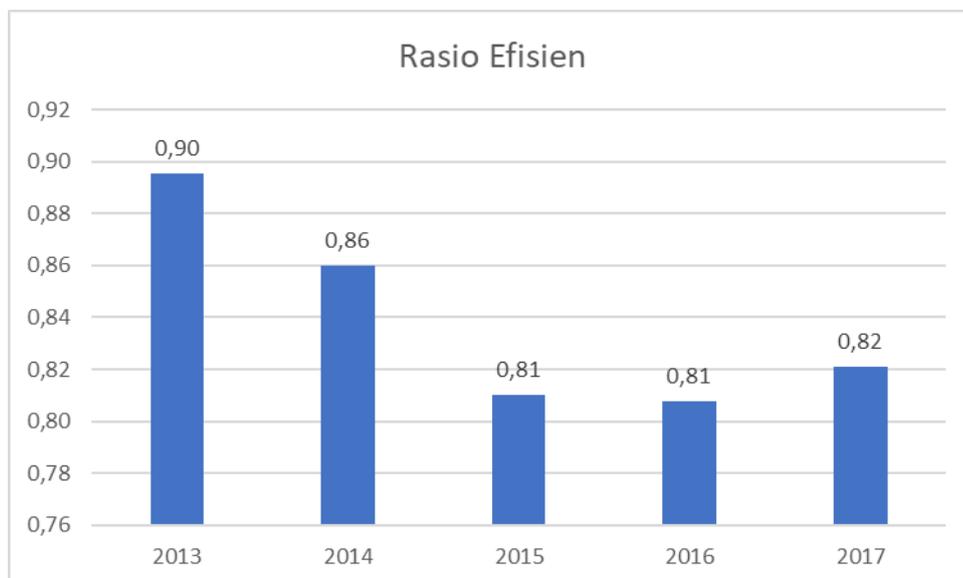
**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kota Probolinggo pada tahun 2013 - 2017 cenderung fluktuatif. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kota Probolinggo tahun 2013 - 2017 adalah sebesar 49.51%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kota Probolinggo relatif sudah cukup baik dari sisi Belanja. karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur berada di bawah 50%. pada tahun 2017 Kota Probolinggo berhasil menekan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran hingga mencapai 38.52%. Meski demikian, Pemerintah Kota Probolinggo perlu

meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja aparatur Kota Probolinggo. Pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 41.42%, artinya di tahun 2018 belanja pegawai meningkat akibat dari tambahan angka pada rekrutan pegawai.

#### a. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja Kota Probolinggo disajikan dalam grafik di bawah ini.



**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

**Gambar 3.9. Rasio Efisiensi Belanja Kota Probolinggo Tahun 2013 -2017**

Berdasarkan grafik di atas, rasio efisiensi belanja Kota Probolinggo tahun 2013 - 2017 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan nilai yang menurun. Walaupun mengalami fluktuasi, tingkat efisiensi belanja Kota Probolinggo masih masuk ke

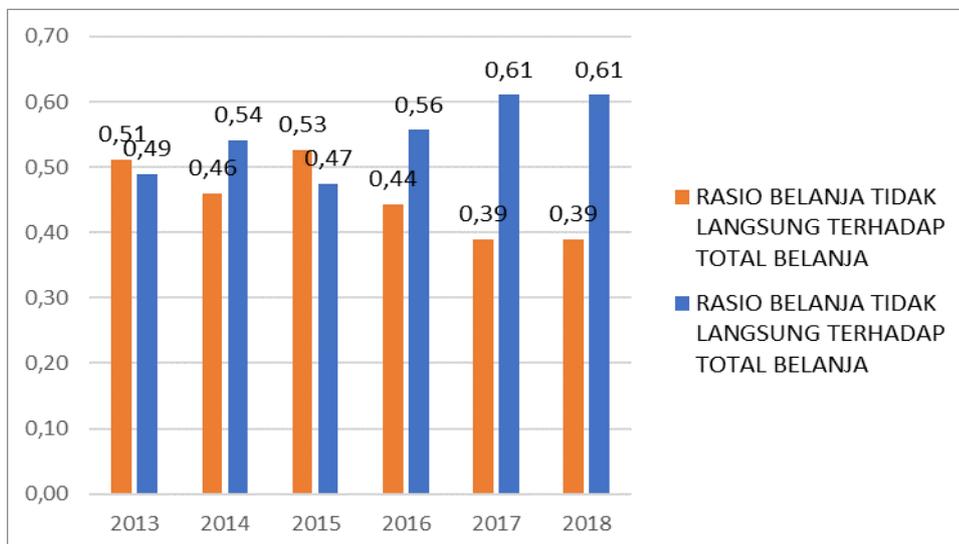
dalam kategori “Efisien” dengan nilai rasio di bawah 1,00. Kriteria penilaian rasio efisiensi belanja tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.14. Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja**

Persentase Proporsi Belanja	Kriteria
< 100%	Efektif
≥ 100%	Tidak Efektif

**b. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja**

Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja tersaji pada grafik di bawah ini.



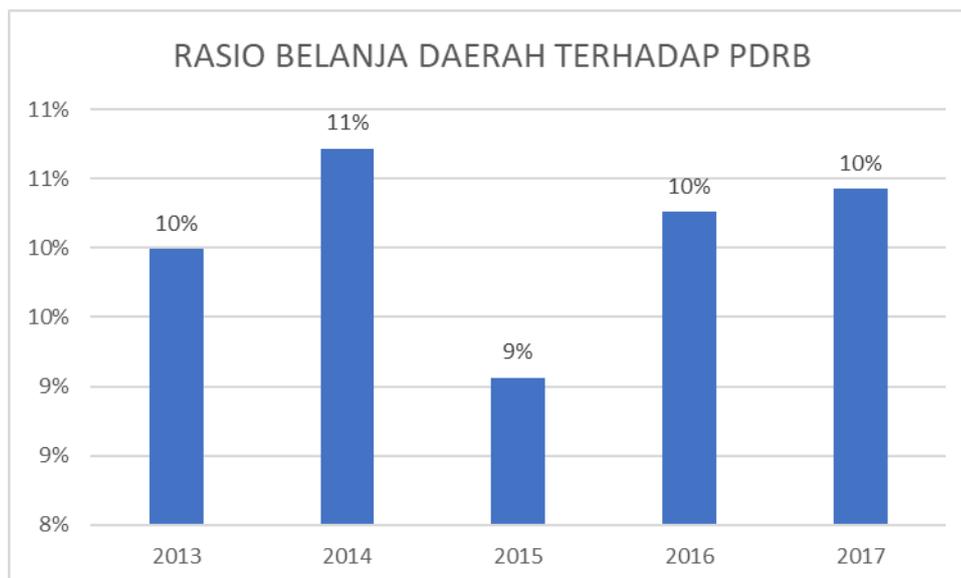
**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

**Gambar 3.10. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Berdasarkan grafik di atas, tren rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, dan rasio belanja langsung terhadap total belanja cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 - 2018 Kota Probolinggo lebih banyak menghabiskan belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Artinya, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung daripada belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program yang cenderung efektif. Namun jika diteliti lebih lanjut, Pemerintah Kota Probolinggo perlu meningkatkan upaya untuk menurunkan rasio belanja tidak langsung dan menaikkan rasio belanja langsung atau mempertahankan rasio belanja langsung yang lebih banyak dari belanja tidak langsung. Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Probolinggo perlu meningkatkan lagi kinerja keuangannya.

### **c. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB**

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kota Probolinggo dijelaskan pada grafik di bawah ini.



**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

**Gambar 3.11. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2017**

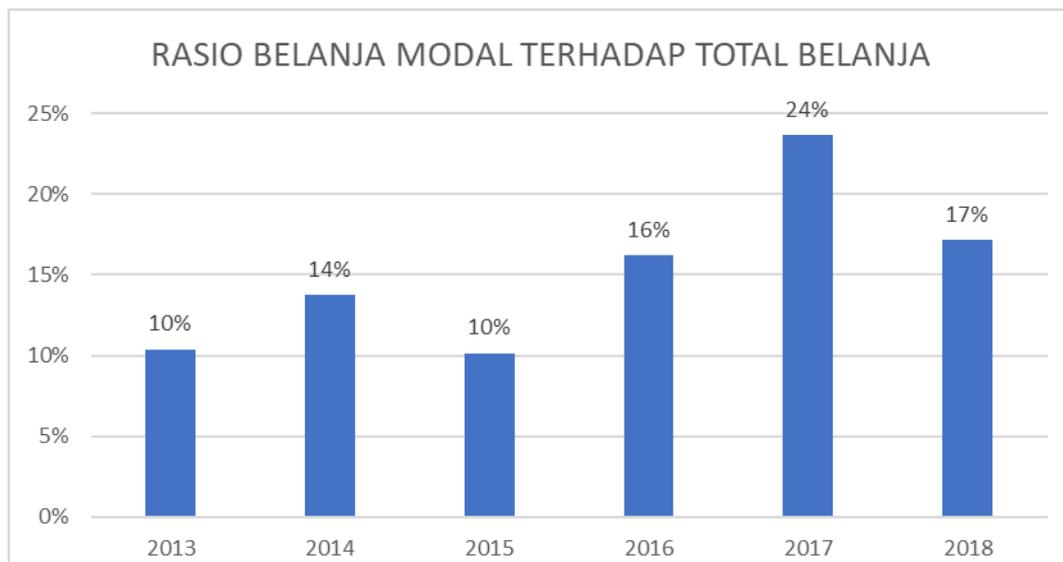
Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kota Probolinggo tahun 2013 - 2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2015, Rasio belanja daerah terhadap PDRB mengalami kenaikan dan stabil pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Kota Probolinggo konsisten dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas belanja daerahnya hingga mencapai angka 0,10 pada tahun 2017.

#### **d. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja**

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5 - 20 persen. Pengeluaran belanja modal akan memberi manfaat dalam

jangka menengah dan panjang. Sedangkan Rasio Belanja Modal terhadap Dana Alokasi umum (DAU) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN TA 2017, Dana Transfer Umum diarahkan  $\geq 25\%$  untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Hal tersebut diatur dalam revisi PMK 48/PMK.07/2016.

Rasio belanja modal terhadap total belanja dan DAU Kota Probolinggo dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Sumber** : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

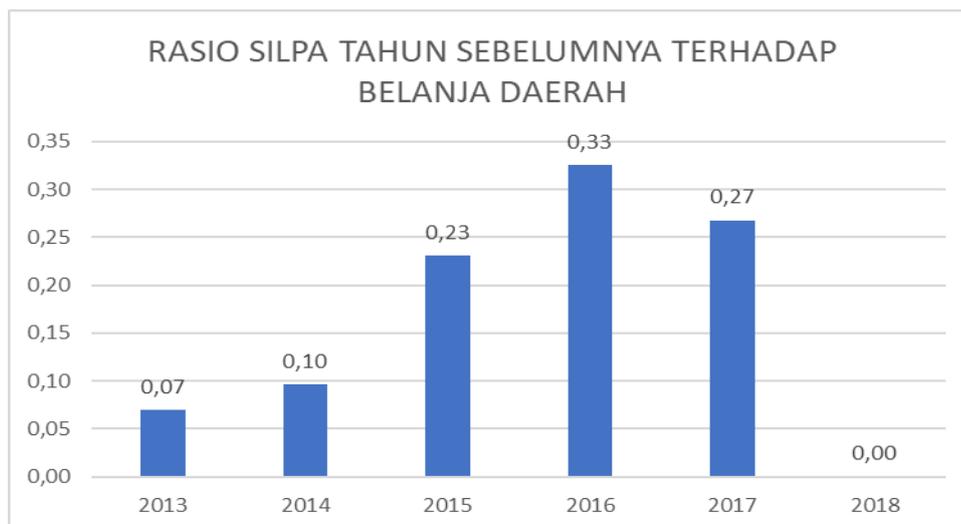
**Gambar 3.12. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Rasio belanja modal terhadap total belanja Kota Probolinggo mengalami penurunan pada tahun 2015 namun menunjukkan tren positif sampai tahun 2017 hingga mencapai angka 24%. Rata-rata

rasio belanja modal terhadap total belanja Kota Probolinggo mencapai 15%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo masih menghabiskan 15% dari total belanja untuk pembangunan fisik. Sebagaimana rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap DAU juga mengalami penurunan pada tahun 2015 namun menunjukkan tren positif sampai tahun 2017 hingga mencapai angka 52%. Rasio belanja modal terhadap DAU Kota Probolinggo tahun 2016 - 2018 berhasil berada di atas ketentuan yang ditetapkan yaitu 25% dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yang masih di bawah ketentuan. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan lagi rasio belanja modal dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur terutama fasilitas publik dan ekonomi di Kota Probolinggo.

**e. Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah**

Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Probolinggo tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Sumber :** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

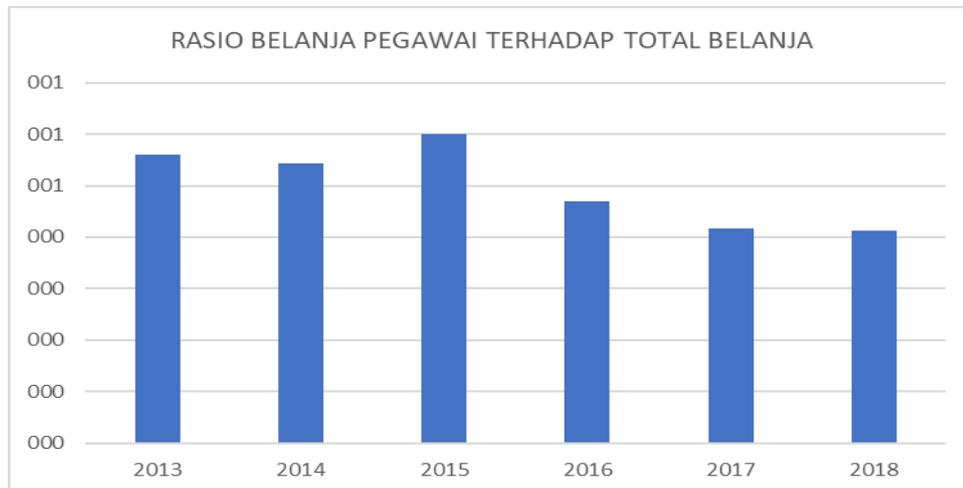
**Gambar 3.13. Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Grafik di atas menggambarkan tren rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Probolinggo tahun 2013 - 2017 yang cenderung meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 6%. Grafik tersebut menggambarkan kemampuan Kota Probolinggo dalam penyerapan SILPA tahun sebelumnya pada tahun 2014 - 2017 belum efektif karena terus mengalami peningkatan. Penurunan rasio pada tahun 2017 mulai menunjukkan upaya penyerapan SILPA yang lebih baik dari tahun - tahun sebelumnya.

#### **f. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja**

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan

dari Belanja Pegawai langsung (BPL) dan Belanja Pegawai tidak langsung (BTL). Rasio belanja pegawai terhadap total belanja Kota Probolinggo tahun 2013 - 2018 tersaji pada grafik di bawah ini.



**Sumber :** Laporan Realisasi Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018 (Diolah)

**Gambar 3.14. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

Berdasarkan grafik di atas, rasio belanja pegawai terhadap total belanja Kota Probolinggo tahun 2013 - 2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 - 2018 rasio belanja pegawai terhadap total belanja berada di bawah 50%. Artinya, tren ini relatif baik karena angka rasio yang cenderung menurun menunjukkan bahwa porsi anggaran tidak didominasi oleh belanja pegawai atau belanja yang tidak berpengaruh terhadap kinerja program.

### **3.2.2 Analisis Pembiayaan**

#### **1. Analisis Defisit Riil**

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

**Tabel 3.15. Tabel Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	682,356,214,061.16	872,815,764,197.61	859,993,069,407.28	886,186,420,396.52	910,852,078,015.87	987,602,131,967.90
	Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	655,772,250,384.43	778,254,103,607.97	731,680,260,276.83	911,768,784,364.92	957,598,284,549.55	947,112,971,040.46
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	750,000,000.00	-	2,500,000,000.00	39,359,557.83	-
	<b>Defisit riil</b>	<b>26,583,963,676.73</b>	<b>93,811,660,589.64</b>	<b>128,312,809,130.45</b>	<b>-28,082,363,968.40</b>	<b>-46,785,566,091.51</b>	<b>40,489,160,927.44</b>

**Sumber** : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

## 2. Analisis Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi tabel berikut:

**Tabel 3.16. Komposisi Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2013 - 2018**

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Defisit Riil						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	95%	100%	100%	100%	100%	99%
2	Pencairan Dana Cadangan	5%	0.00	0.00	0.00	0.00	1%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sumber** : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2013-2018 (Diolah)

### **3.3 KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan informasi mengenai pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024, serta tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam beberapa tahun selanjutnya (tahun 2019 hingga 2024). Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah melihat pada hasil analisis trend yang diperoleh berdasarkan pada data historis selama 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek. Selain mempertimbangkan hasil analisis trend, dalam perumusan proyeksi juga turut mempertimbangkan kecenderungan pencapaian maupun pertumbuhan pendapatan dan belanja di Kota Probolinggo, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kota Probolinggo.

Berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kota Probolinggo selama tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,22%, untuk belanja daerah secara keseluruhan dalam beberapa tahun tersebut diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,32%. Sedangkan pada pembiayaan diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -27,84% untuk penerimaan pembiayaan, dan 24,00% untuk pengeluaran pembiayaan.

Melihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata pada tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan sebesar 17,91%, dimana pada tahun 2020 jumlah realisasi diperkirakan mencapai Rp. 200.275.000.951,65, sedangkan

pada tahun 2024 menjadi Rp. 400.418.494.873,82. Semakin tingginya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo semakin baik, hal ini tentunya menjadi konsekuensi seiring dengan meningkatnya belanja daerah dalam setiap tahun, serta sebagai antisipasi apabila terjadi penurunan tingkat pertumbuhan dana perimbangan dimasa mendatang, dan perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap penurunan dana transfer dari pusat ke daerah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata mencapai 17,91% pada dasarnya didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dalam setiap tahun mengalami peningkatan, diharapkan mencapai hingga diatas 6%.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo telah mencapai 5,88%, dimana pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 5,86%. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo dalam setiap tahun akan semakin meningkat hingga diatas 6%, mengingat pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pernah mencapai diatas angka 6%, yaitu sebesar 6,47%.

2. Keberadaan pengembangan pelabuhan dan pembangunan infrastruktur lainnya di Kota Probolinggo diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap berkembangnya kegiatan usaha di Kota Probolinggo, sehingga dengan berkembangnya kegiatan usaha dapat mampu memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Masih adanya potensi pajak daerah di Kota Probolinggo yang harus dilakukan pemungutan secara optimal melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga turut mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Bila melihat pada data historis dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo pada tahun 2013 hingga 2018 mencapai 20,88%, sehingga dengan demikian pertumbuhan pada tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan sebesar 17,91% masih realistis. Untuk dana perimbangan pada tahun 2019 hingga 2024 rata-rata diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 3,34%, dimana dari ketiga sumber dana perimbangan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan memiliki pertumbuhan yang paling kecil, yaitu sebesar 2,57%. Rendahnya tingkat pertumbuhan antara lain disebabkan oleh adanya pengaruh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2019 hingga 2024 rata-rata diperkirakan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 9,26%, dimana pertumbuhan terbesar diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya seiring dengan meningkatnya kendaraan bermotor.

Untuk proyeksi belanja daerah dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan mencapai 6,32%, dimana untuk belanja tidak langsung rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 3,75%, sedangkan untuk belanja langsung rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 7,82%. Pada belanja tidak langsung, belanja pegawai pada tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 3,87%, dimana besaran pertumbuhan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dalam setiap tahunnya.

Sedangkan pada belanja langsung, rata-rata pertumbuhan belanja pegawai diperkirakan mencapai 4,89% dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mampu mencapai target kinerja yang telah dirumuskan. Untuk belanja barang dan jasa maupun belanja modal di Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 rata-rata diperkirakan memiliki pertumbuhan masing-masing sebesar 7,73% untuk belanja barang dan jasa, dan 8,60% untuk belanja modal. Bila melihat pada komposisi belanja daerah dapat diketahui bahwa belanja langsung diperkirakan memiliki proporsi yang lebih besar, dimana rata-rata selama tahun 2019 hingga 2024 mencapai 63,62%, sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar 36,38%. Untuk belanja pegawai pada jenis belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan memiliki proporsi rata-rata sebesar 38,91% dari total belanja daerah.

Pertumbuhan penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan rata-rata sebesar -27,84%, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -7,84% dan pencairan dana cadangan. Dana cadangan dicairkan pada tahun 2023 untuk membiayai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode selanjutnya. Untuk pertumbuhan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 hingga 2024 diperkirakan rata-rata sebesar 24,00%, yang merupakan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dilakukan dengan memperhatikan pada Peraturan Daerah terkait pembentukan dana cadangan.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.17. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2024 Kota Probolinggo**

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2019 (APBD) (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>7,22</b>	<b>1.072.630.800.872,66</b>	<b>1.183.721.706.452,64</b>	<b>1.257.832.012.523,04</b>	<b>1.343.444.510.690,23</b>	<b>1.421.306.720.703,48</b>	<b>1.519.258.401.257,35</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>17,91</b>	<b>175.927.450.503,66</b>	<b>200.275.000.951,65</b>	<b>232.960.332.476,29</b>	<b>274.892.855.673,79</b>	<b>330.006.054.927,19</b>	<b>400.418.494.873,82</b>
1.1.1.	Pajak daerah	23,13	33.372.238.111,00	45.370.962.829,41	53.009.710.927,43	63.050.137.197,44	76.319.199.764,16	93.786.157.908,52
1.1.2.	Retribusi daerah	3,62	13.115.794.235,00	13.325.120.914,24	13.789.459.691,57	14.330.044.164,04	14.954.240.675,01	15.662.622.548,22
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7,75	1.525.548.647,66	1.684.982.744,12	1.785.788.862,23	1.905.980.448,19	2.048.514.912,45	2.215.112.934,87
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	17,77	127.913.869.510,00	139.893.934.463,88	164.375.372.995,06	195.606.693.864,12	236.684.099.575,58	288.754.601.482,21
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3,34</b>	<b>724.881.244.374,00</b>	<b>776.945.687.425,05</b>	<b>799.895.555.024,02</b>	<b>819.944.885.983,25</b>	<b>834.768.645.878,27</b>	<b>853.376.270.071,85</b>
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	2,90	117.225.191.374,00	123.503.764.173,14	124.392.891.069,04	131.442.891.132,27	132.171.144.860,82	135.060.271.756,71
1.2.2.	Dana alokasi umum	2,57	482.709.978.000,00	517.844.267.916,66	524.824.361.218,25	522.707.206.039,78	532.181.658.627,52	547.261.723.664,27
1.2.3.	Dana alokasi khusus	6,57	124.946.075.000,00	135.597.655.335,25	150.678.302.736,73	165.794.788.811,20	170.415.842.389,93	171.054.274.650,87
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>9,26</b>	<b>171.822.105.995,00</b>	<b>206.501.018.075,94</b>	<b>224.976.125.022,73</b>	<b>248.606.769.033,19</b>	<b>256.532.019.898,02</b>	<b>265.463.636.311,68</b>
1.3.1	Hibah	0,00	20.709.000.000,00	20.572.371.428,57	24.039.812.857,14	27.507.254.285,71	30.974.695.714,29	34.442.137.142,86
1.3.2	Dana darurat	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	10,02	58.062.726.995,00	77.794.665.139,57	81.119.053.851,46	84.443.442.563,36	87.767.831.275,25	91.092.219.987,14
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8,66	56.385.478.000,00	63.157.373.907,80	70.742.574.514,13	83.483.312.184,12	83.518.656.708,48	84.560.366.781,68
1.3.6	Pendapatan Lainnya	8,84	36.664.901.000,00	44.976.607.600,00	49.074.683.800,00	53.172.760.000,00	54.270.836.200,00	55.368.912.400,00

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2019 (APBD) (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6,32</b>	<b>1.162.988.690.872,66</b>	<b>1.263.721.706.452,64</b>	<b>1.330.332.012.523,04</b>	<b>1.405.444.510.690,23</b>	<b>1.496.806.720.703,48</b>	<b>1.579.258.401.257,35</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3,75</b>	<b>447.958.505.197,66</b>	<b>464.429.002.590,14</b>	<b>480.874.433.677,71</b>	<b>503.520.045.004,50</b>	<b>519.002.515.266,30</b>	<b>538.545.317.972,33</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	3,87	414.673.974.083,66	432.175.595.585,26	447.369.805.381,09	468.759.195.416,14	482.980.944.386,20	501.279.224.943,35
2.1.2	Belanja Subsidi	4,59	75.000.000,00	86.622.857,14	100.588.928,57	114.555.000,00	128.521.071,43	142.338.000,00
2.1.3	Belanja Hibah	3,03	26.657.485.250,00	27.221.869.531,59	28.149.264.671,69	29.081.659.811,79	30.018.554.951,89	30.939.400.091,99
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1,16	2.800.000.000,00	2.342.543.200,00	2.483.185.015,00	2.623.826.830,00	2.764.468.645,00	2.905.110.460,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	11,39	752.045.864,00	993.575.064,86	1.061.197.323,79	1.128.819.582,71	1.196.441.841,64	1.264.064.100,57
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	-4,64	3.000.000.000,00	1.608.796.351,29	1.710.392.357,57	1.811.988.363,86	1.913.584.370,14	2.015.180.376,43
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>7,82</b>	<b>715.030.185.675,00</b>	<b>799.292.703.862,50</b>	<b>849.457.578.845,33</b>	<b>901.924.465.685,73</b>	<b>977.804.205.437,17</b>	<b>1.040.713.083.285,02</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	4,89	60.393.061.081,00	66.257.441.881,41	67.903.340.602,24	69.759.182.804,48	73.750.277.192,21	76.558.428.974,33
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,73	392.749.100.091,00	447.627.021.159,48	471.977.466.383,82	497.655.481.846,43	536.835.689.582,83	568.535.601.259,43
2.2.3	Belanja Modal	8,60	261.888.024.503,00	285.408.240.821,62	309.576.771.859,27	334.509.801.034,82	367.218.238.662,13	395.619.053.051,26
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>-27,84</b>	<b>90.357.890.000,00</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>70.000.000.000,00</b>	<b>75.500.000.000,00</b>	<b>60.000.000.000,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	-7,84	90.357.890.000,00	80.000.000.000,00	75.000.000.000,00	70.000.000.000,00	65.000.000.000,00	60.000.000.000,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-20,00	-	-	-	-	10.500.000.000,00	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2019 (APBD) (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	-	-	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman*	0,00	-	-	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	24,00	-	-	2.500.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah**	0,00	-	-	-	-	-	-

Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kebijakan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk mencapainya. Adapun beberapa kebijakan yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut.

**a. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 meliputi:

1. Meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Probolinggo dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menyediakan *database* subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Probolinggo yang *up to date*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung potensi pendapatan, merumuskan target tahunan, serta menentukan sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT);
4. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;

6. Meningkatkan kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
7. Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah Kota Probolinggo untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan/ pemungutan/ sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Probolinggo;
10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**b. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 meliputi:

1. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;

2. Pengalokasian belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang mengacu pada prioritas pembangunan Kota Probolinggo;
3. Pengelolaan belanja daerah dilakukan secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual, serta prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH, serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya, sedangkan untuk tunjangan pegawai diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN);
6. Belanja langsung dalam setiap tahunnya diupayakan mencapai komposisi di atas 60%, dimana proporsi belanja langsung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya secara bertahap dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku;
7. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo sebagian besar diarahkan pada pembangunan infrastruktur sosial - ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi pelayanan dasar;
8. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **c. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 meliputi:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diupayakan nilainya semakin kecil dalam setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi;
2. Secara bertahap melakukan penyusunan alternatif pembiayaan keuangan daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran;
3. Pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode selanjutnya;
4. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/ masyarakat antara lain melalui penyusunan kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/ swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

### **3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan

untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah di Kota Probolinggo selama 5 lima tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungannya adalah dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub bab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Probolinggo**

No	Uraian	Proyeksi				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan	1.183.721.706.452,64	1.257.832.012.523,04	1.343.444.510.690,23	1.421.306.720.703,48	1.519.258.401.257,35
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	10.500.000.000,00	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	80.000.000.000,00	75.000.000.000,00	70.000.000.000,00	65.000.000.000,00	60.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.263.721.706.452,64	1.332.832.012.523,04	1.413.444.510.690,23	1.496.806.720.703,48	1.579.258.401.257,35
	Dikurangi:					
1	Belanja Tidak Langsung	464.429.002.590,14	480.874.433.677,71	503.520.045.004,50	519.002.515.266,30	538.545.317.972,33
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	2.500.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>799.292.703.862,50</b>	<b>849.457.578.845,33</b>	<b>901.924.465.685,73</b>	<b>977.804.205.437,17</b>	<b>1.040.713.083.285,02</b>

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas selanjutnya dapat diketahui bahwa jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Probolinggo diperkirakan dalam setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 715.030.185.675,00 pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp. 799.292.703.862,50 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Probolinggo diperkirakan mencapai Rp. 849.457.578.845,33, sedangkan pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 901.924.465.685,73, pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp. 977.804.205.437,17, hingga pada tahun 2024 diperkirakan menjadi Rp. 1.040.713.083.285,02. Adapun rata-rata pertumbuhan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 mencapai 7,82%.

Melihat pada hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024, selanjutnya dapat dilakukan alokasi dalam bentuk rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan berdasarkan tingkatan prioritas (Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III). Prioritas I meliputi belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas II meliputi belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta Prioritas III meliputi belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikut disajikan data terkait dengan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Probolinggo, serta kerangka penggunaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024.

**Tabel 3.19. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Probolinggo**

Uraian	Proyeksi				
	2020	2021	2022	2023	2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>799.292.703.862,50</b>	<b>849.457.578.845,33</b>	<b>901.924.465.685,73</b>	<b>977.804.205.437,17</b>	<b>1.040.713.083.285,02</b>
Prioritas I	567.194.147.418,50	597.557.601.691,55	631.365.244.767,43	687.509.998.921,32	729.134.044.268,03
Prioritas II	185.782.301.451,00	201.482.054.025,79	216.564.973.843,30	232.709.547.621,69	250.073.919.572,52
Prioritas III	46.316.254.993,00	50.417.923.128,00	53.994.247.075,00	57.584.658.894,16	61.505.119.444,47

Berdasarkan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tabel di atas, selanjutnya dapat diketahui persentase alokasi kapasitas riil keuangan daerah seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.20. Alokasi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Probolinggo**

Uraian	Alokasi									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
<b>Prioritas I</b>	567.194.147.418,50	70,96	597.557.601.691,55	70,35	631.365.244.767,43	70,00	687.509.998.921,32	70,31	729.134.044.268,03	70,06
<b>Prioritas II</b>	185.782.301.451,00	23,24	201.482.054.025,79	23,72	216.564.973.843,30	24,01	232.709.547.621,69	23,80	250.073.919.572,52	24,03
<b>Prioritas III</b>	46.316.254.993,00	5,79	50.417.923.128,00	5,94	53.994.247.075,00	5,99	57.584.658.894,16	5,89	61.505.119.444,47	5,91
<b>Total</b>	<b>799.292.703.862,50</b>	<b>100</b>	<b>849.457.578.845,33</b>	<b>100</b>	<b>901.924.465.685,73</b>	<b>100</b>	<b>977.804.205.437,17</b>	<b>100</b>	<b>1.040.713.083.285,02</b>	<b>100</b>

**BAB IV**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

**4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki permasalahan yang terbagi menjadi Akar masalah, Masalah dan Masalah pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan yang strategis di Kota Probolinggo dan perlu dianalisis untuk memberi landasan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1: Akar Masalah, Masalah, dan Masalah Pokok Pembangunan**

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
Dana BOS masih belum terkelola dengan baik	Masih belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pendidikan	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Pendidikan
Kurangnya sarana-prasarana pendidikan		
Sebanyak 3,73% SMP/MTs belum berakreditasi minimal B		
Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat belum mencapai 114,09%	Kurangnya Masyarakat terhadap layanan pendidikan	
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) belum menunjukkan peningkatan		
Masih terdapat 0,66% penduduk umur ≥ 15 tahun yang belum melek aksara		

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	
kurangnya tenaga guru	Ketersediaan dan Distribusi Tenaga Pendidik yang masih kurang		
Belum idealnya distribusi guru			
Menurunnya minat baca masyarakat	Aksesibilitas perpustakaan masyarakat masih belum optimal		
Kurang updatenya koleksi buku di perpustakaan			
Sebanyak 71,81% penduduk masih memiliki prevalensi tekanan darah tinggi	Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan Keluarga berencana masih rendah	Belum Efektifnya Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	
Sebesar 38,52% perempuan usia reproduksi belum menggunakan alat kontrasepsi metode modern			
Masih terdapat 8% PUS yang belum mengetahui dan memahami tentang metode kontrasepsi modern			
Proporsi perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait kontrasepsi menurun sebesar 0,84%			
Unmeet KB yang tidak terpenuhi meningkat sebesar 6,46%			
penggunaan akseptor KB masih belum menyentuh seluruh masyarakat yang telah menikah			
Penurunan ASFR 15-19 tahun masih sebanyak 58			
Total Fertility Rate (TFR) masih kurang sebesar 3,54 dari target ideal			
Sebanyak 1,4% populasi dewasa masih memiliki prevalensi HIV			
Sebanyak 13,89% penduduk belum tercakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan
Masih terdapat sebanyak 59,70% penduduk yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			
Tingginya angka kematian bayi dan Ibu hamil	Angka Kematian ibu dan anak masih tinggi		
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita masih mengalami kenaikan			
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak relatif naik			
Belum teraturnya pemeriksaan rutin terhadap ibu hamil			
Kurangnya sosialisasi terkait penggunaan sarana prasarana	Belum memadainya prasarana olahraga	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masih	

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
olahraga untuk masyarakat umum		kurang
Pengelolaan sektor pertanian masih belum optimal	Produksi pertanian masih rendah	Kapasitas Produksi Belum Meningkat Secara Signifikan
Penurunan luas lahan panen setiap tahun		
Alih fungsi lahan Pertanian		
Penurunan jumlah armada perikanan (Kapal Balai)	Penurunan Armada Perikanan	
Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif	Koperasi aktif masih sedikit	
Daya saing Usaha mikro kecil masih belum optimal	Daya saing Usaha mikro kecil masih belum optimal	
Masih belum optimalnya pembinaan kepemudaan	Masih belum optimalnya pengembangan wirausaha baru	
Masih rendahnya jumlah wira usaha baru		
Minimnya minat wirausaha pada pemuda		
Lemahnya perhatian terhadap karakteristik lokal yang merupakan daya tarik utama, khususnya kesenian dan kebudayaan	Masih belum optimalnya pengembangan pariwisata kebudayaan dan kesenian daerah	
Penurunan nilai investasi pada tahun 2015 dan 2017	iklim investasi daerah yang masih belum stabil	
kurangnya fasilitas umum yang ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus	Masih belum optimalnya ketercukupan fasilitas umum bagi masyarakat dan kebutuhan khusus	Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Sosial belum Optimal
Belum terpetakannya prioritas pembangunan FASUM penunjang layanan dasar		
Sebanyak 42,06% rumah tangga belum memiliki akses sumber air minum layak dan berkelanjutan	Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi	
Terdapat 42,06% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak		
Masih terdapat 42,06% penduduk yang belum bisa mengakses layanan air minum aman dan berkelanjutan		
Masih terdapat kekurangan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri sebanyak 113,6 m3/detik		
Penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air masih sebesar 80,10%		
Pemerataan pembangunan infrastruktur masih kurang		

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
Sebanyak 14,19% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		
Rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja masih sebanyak 459 atau lebih sedikit dari tahun sebelumnya (2016)		
Sebanyak 14,19% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		
Lemahnya fungsi kontrol terhadap penggunaan tanah melalui IMB		
Tidak tertatanya perkembangan kawasan permukiman		
Tidak terlaksanakannya Kegiatan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah	Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih belum optimal	Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih belum optimal
Semakin sedikitnya cakupan rumah layak huni yang terjangkau		
meningkatnya kawasan permukiman kumuh		
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih kurang dari capaian sebesar 35,31%	Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat masih rendah	Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat masih rendah
angka Kemiskinan dalam batas 7-8%		
Masih terdapat 20,14% penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pendapatan		
Alokasi sumber daya program pemberantasan kemiskinan masih rendah		
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) mengalami penurunan menjadi 47,20%	penurunan angka Kemiskinan belum optimal	
Sebanyak 910 keluarga yang masih mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan		
garis kemiskinan semakin meningkat, namun indeks kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya		
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) mengalami penurunan menjadi 47,20%	Pengeluaran untuk layanan pokok menurun	
penanganan PMKS yang masih belum mencakup seluruh wilayah di kecamatan.	Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal	Akomodasi Terhadap Masalah Sosial, Kemiskinan dan PMKS Belum Menunjukkan Progres Signifikan

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
<p>Tidak efektifnya treatment yang diberikan terhadap PMKS</p> <p>Masih terdapat 94 korban bencana sosial yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Belum terdapat pendampingan psikososial lagi terhadap korban bencana sosial</p>		
<p>Kurang optimalnya peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>masih rendahnya modal sosial masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Masih terdapat 20% perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan</p> <p>Masih terdapat 0,17% perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual</p> <p>Masih terdapat 0,57% rumah tangga yang mengalami kejadian hukuman fisik dan/atau agresi psikologis pada anak (umur 1 - 17 tahun) oleh pengasuh</p> <p>Sebanyak 0,86% perempuan dan laki-laki muda (umur 18-24 tahun) dan sebelum umur 18 tahun mengalami kekerasan seksual</p> <p>Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak</p> <p>Masih terdapat 50% korban kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan komprehensif</p> <p>kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak</p>	<p>Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak</p>
<p>Masih terdapat beberapa SKPD dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan belum melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).</p> <p>Keterwakilan perempuan di DPRD masih tetap, yaitu sebanyak 5 orang.</p> <p>Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga</p>	<p>Masih rendahnya Pengarustamaan Gender</p>	<p>Masih rendahnya Pengarustamaan Gender</p>

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
eksekutif mengalami penurunan menjadi 14,29%		
Keterwakilan perempuan di DPRD masih tetap, yaitu sebanyak 5 orang		
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial masih sebesar 17,24%		
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan masih mengalami pertumbuhan sebesar 0,19%		
Tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintahan, legislatif, dan kelompok masyarakat masih rendah		
Belum optimalnya penerapan SOP oleh PERANGKAT DAERAH	Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan SOP dan SPM masih belum optimal	
Belum seluruhnya fasilitas publik menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister		
Belum optimalnya pemanfaatan program/kegiatan yang beririsan dengan agenda provinsi		
Kepemilikan akta kelahiran penduduk miskin dan rentan belum merata		
kualitas Perencanaan dan Pengawasan dalam implementasi program kerja masih kurang	Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan dan Implementasi pembangunan masih rendah	Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan belum terorganisir dan tersistem dengan baik
Jumlah institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan menurun menjadi 68		
Masih belum optimalnya PERANGKAT DAERAH dalam penyusunan LPPD		
Minimnya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan	Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan masih rendah	
Belum optimalnya pengelolaan anggaran terkait pekerjaan umum		
Perencanaan anggaran dalam program kerja masih kurang tepat (estimasi kenaikan tarif dasar terlalu besar daripada harga pasaran)		
Rasio ketergantungan terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi	upaya pemaksimalan sumber-sumber pendapatan daerah masih belum optimal	Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum berjalan optimal
Kapasitas fiskal kota probolinggo lebih rendah dibandingkan daerah sekitar		
Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendanaan lain		

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dalam setiap tahun semakin meningkat.	Pengelolaan Piutang Daerah Belum Optimal	
Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB per kapita mengalami penurunan	Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah masih belum optimal	
Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri mengalami penurunan		
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian turun sebesar 2,57%	Penurunan tenaga kerja pada sektor informal pertanian dan manufaktur	
Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor manufaktur menurun setiap tahun		
Tingkat setengah pengangguran meningkat menjadi 5,02% (2015)		
Persentase akses UMKM ke layanan keuangan masih sangat rendah, kurang sebesar 19,2% dari target	Masih terbatasnya Akses Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun Industri Kecil Menengah (IKM)	
Jumlah wisatawan mancanegara menurun menjadi 3.648 orang	Penurunan Jumlah Wisatawan Mancanegara	
PDB per kapita masih berada di bawah target sebanyak Rp. 8.885.491,-	Laju Pertumbuhan PDB Perkapita masih dibawah target	
Laju pertumbuhan PDB per kapita stagnan pada angka 5,88%		
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) masih belum mencapai target sebesar 30%	Indeks Resiko Bencana Masih Tinggi	Indeks Resiko Bencana Masih Tinggi
Belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan		
Meningkatnya trend potensi konflik	Adanya potensi konflik pemicu bencana social	
Persentase sampah yang tertangani masih kurang sebesar 4,86% dari target nasional	Manajemen Pengelolaan Sampah Masih Belum Optimal	Belum efektifnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Pengelolaan sampah plastik dengan melibatkan masyarakat masih kurang		
Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Masih belum optimalnya pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan sumber daya lingkungan	
Masih terdapat produk yang tidak ramah lingkungan dan produk ramah lingkungan yang belum teregister		
Peningkatan pengendalian dampak perubahan iklim dan peningkatan penanganan energi terbarukan		

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
Proporsi tutupan lahan mengalami penurunan sebesar 1,69%		
Belum tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan pemanfaatan dan akses sumber daya genetik secara adil dan merata		
Masih kurangnya ketersediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		
Pengawasan dan pemanfaatan lahan belum optimal	Pengawasan dan pemanfaatan lahan belum optimal	
Penataan dan Pemeliharaan Taman belum optimal	Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau belum optimal	
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih belum memiliki sertifikat	Masih belum Optimalnya pengelolaan manajemen sistem teknologi, informasi dan komunikasi daerah	
Ketersediaan jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) masih tetap	Ketersediaan metadata belum maksimal	Ketersediaan dan Sistem Informasi dan Komunikasi di Kota Probolinggo Masih kurang mutakhir untuk mengakomodir tuntutan pembangunan modern saat ini
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website mengalami penurunan menjadi 10.333 pengunjung		
Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) masih kurang sebesar 22,82% dari populasi	Pelayanan jaringan broadband belum merata	
Jumlah masyarakat yang belum terlayani jaringan broadband sebesar 28,76%		

## 4.2 ISU STRATEGIS

### 4.2.1 Isu Internasional

#### 1. Capaian Sustainable Development Goals di Kota Probolinggo melalui Telaah KLHS

Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai

September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah (RPJMD) Kota.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar 4. 1: 17 Tujuan SDGs**

**1) Tanpa Kemiskinan:**

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat

**2) Tanpa Kelaparan:**

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan

**3) Kehidupan sehat dan sejahtera:**

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia

**4) Pendidikan Berkualitas:**

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang

**5) Kesetaraan Gender:**

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan

**6) Air Bersih dan Sanitasi Layak:**

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua

**7) Energi Bersih dan Terjangkau:**

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua

**8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:**

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua

**9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:**

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi

**10) Berkurangnya**

**Kesenjangan:**

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi

**11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan:**

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan

**12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab:**

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

**13) Penanganan Perubahan Iklim:**

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya

**14) Ekosistem Laut:**

Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

**15) Ekosistem Darat:**

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

**16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh:**

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif

**17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:**

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan



Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Merujuk terhadap Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 222 indikator yang menjadi acuan Kota Probolinggo, yang

harus dicapai untuk mendukung indikator SDG`s. Berikut merupakan capaian KLHS Kota Probolinggo yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG`s:

**Tabel 4. 2: capaian KLHS Kota Probolinggo yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG`s**

TUJUAN	NAMA TUJUAN	Total Indikator	Sudah-Sudah	Sudah-Belum	Belum-Belum	Tidak ada Data	Persentase Capaian Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	24	12	8	0	4	50,00
2	Tanpa Kelaparan	11	2	1	0	8	18,18
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	11	5	4	14	32,35
4	Pendidikan Berkualitas	13	2	6	0	5	15,38
5	Kesetaraan Gender	14	1	1	0	12	7,14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	0	3	2	13	0,00
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	2	0	0,00
8	Pekerjaan layan dan Pertumbuhan Ekonomi	19	5	3	0	11	26,32
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	13	2	0	3	8	15,38
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	1	3	4	3	9,09
11	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	13	5	1	3	4	38,46
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	2	1	0	2	40,00
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	2	0	0	0	100,00
14	Ekosistem Lautan	0	0	0	0	0	0,00
15	Ekosistem daratan	4	1	1	1	1	25,00
16	16. Perdamaian Keadilan Kelembagaan	21	7	2	0	12	33,33
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	16	4	1	1	10	25,00
TOTAL		222	57	36	20	107	
PERSENTASE		100%	25,91%	16,36%	9,09%	48,64%	

Sejak SDG`s disepakati dan menjadi indikator nasional yang sekaligus dimandatkan di Kota dan Provinsi, isu terbesar sebelum capaian indikator SDG`s adalah mampukah daerah dalam menyediakan data capaian SDG`s. Hal tersebut dikarenakan 222 indikator yang menjadi kewenangan daerah, selama ini tidak terukur dan terinventarisir dengan baik. Sebagai contoh Cimahi yang dijadikan Pilot Project capaian SDG`s hanya mampu menyediakan 50% dari indikator yang diemban. Data diatas

menunjukkan ketersediaan Data SDG`s Kota Probolinggo yang masih juga sangat minim. Dari total data yang tersedia, 57 indikator atau 25,91% yang tersebar dalam 17 tujuan SDG`s telah tercapai. Sedangkan 36 indikator atau 16,36% indikator tidak tercapai, dan sisanya adalah 20 indikator atau 9,09% indikator belum dilaksanakan dan 107 atau 48,64 % indikator tidak terdapat datanya. Untuk itu tantangan kedepan Kota Probolinggo terhadap capaian SDG`s yang paling utama adalah mencukupi kebutuhan data, melaksanakan indikator yang belum dilaksanakan, dan terakhir adalah mencapai indikator yang belum tercapai.

Meskipun demikian, untuk menjawab amanat Permendagri 86 tahun 2017 maka diperlukan memunculkan isu dari telaah Gap Expectation realisasi indikator SDGs terhadap target 2019. Berikut merupakan capaian indikator SDG`s khususnya yang belum mencapai target:

**Tabel 4. 3: Capaian Indikator SDG`S Khususnya Yang Belum Mencapai Target**

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Meningkat menjadi 95%	35,3%	-59,70%
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Menurun menjadi 2,8 juta (Tingkat penurunan sebesar 6,67%, di Kota Probolinggo = penurunan sebanyak 407 orang di 2019 atau menjadi 5.697 orang)	660700,00%	-910
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	57,94%	-42,06%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	Meningkat menjadi 100%	85,81%	-14,19%

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		layak dan berkelanjutan.	pada tahun 2019 menjadi 100%.			
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Meningkat menjadi 151 ribu (Kota Probolinggo = 294)	200 Paket	-9400,00%
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Meningkat menjadi 81,5 ribu	0,00%	Tidak Mengalami Peningkatan
		Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	8,66%	Tidak Mengalami Peningkatan
		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	0,471959707	Tidak Mengalami Peningkatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	12,09%	Tidak Mengalami Penurunan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
	Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	4,80%	Tidak Mengalami Penurunan
		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	57,19	- 35,31%	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Menurun menjadi <0,5%	1,9%	- 1,4%
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Menurun menjadi 24,3%	1.688 (96,11%)	- 71,81%
		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Meningkat menjadi 66%	<b>27,48%</b>	<b>- 38,52%</b>

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		kontrasepsi metode modern.				
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Menurun menjadi 38	96,14	- 58,14
		Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Menurun menjadi 2,28	5,82	- 3,54
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Meningkat menjadi minimal 95%	81,102	- 13,89
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Meningkat menjadi 81%	77,27%	- 3,73%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Meningkat menjadi 114,09%	103,12%	- 10,97%

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
	Semua	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Meningkat	94,87 (APM SD/MI/Paket A); 93,47 (APM SMP/MTs/Paket B); 90,89 (APM SMA/SMK/MA/Paket C)	Tidak Mengalami Peningkatan
		Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Meningkat menjadi 96,1%	95,44%	- 0,66%
		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	bertambah sebanyak 16 (84, 21%)	0,0019	-0,8402
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	0,2	Tidak Mengalami Penurunan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.				
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Meningkat menjadi 70%	0,2	-0,5
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Menurun menjadi 38 tahun	96,14%	-58
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Meningkat	5	Tidak Mengalami Peningkatan
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat	17,24%	Tidak Mengalami Peningkatan
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi,	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	0,7714	Tidak Mengalami Peningkatan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		dan layanan kesehatan reproduksi.				
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Menurun menjadi 9,9%	0,1636	-0,0646
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Meningkat menjadi 85%	0,7714	0,0786
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	57,94%	-42,06%
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	500 Liter/ Detik	-113,6 m3/detik

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	57,94%	-42,06%
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	80,10%	Tidak Mengalami Peningkatan
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	85,81%	14,19%
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	45900,00%	Tidak Mengalami Peningkatan
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	5,88	Tidak Mengalami Peningkatan
		PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	41.114.509	- 888549100,00%
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	5,08% (2016)	Tidak Mengalami Peningkatan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	0,25	5,08% (2016)	-19,92%
		Tingkat setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	5,02% (2016)	Tidak Mengalami Penurunan
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional) (36.900 setiap kabupaten/kota)	364,80%	-33252
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	0,00%	Tidak Mengalami Peningkatan
		Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	19,76%	Tidak Mengalami Peningkatan
		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	6,52	Tidak Mengalami Peningkatan
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	20,14%	Tidak Mengalami Penurunan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat	6800,00%	Tidak Mengalami Peningkatan
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Menurun menjadi 30%	-	-11800,00%
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	Tidak Ada	Belum Tersedia
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Meningkat menjadi 80%	75,53%	-4,86%
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Meningkat	2	Tidak Mengalami Peningkatan
		Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	6 SPM	Tidak Mengalami Peningkatan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Meningkat	1	Tidak Mengalami Peningkatan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Meningkat	0,099055647	Tidak Mengalami Peningkatan
		Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	0	Tidak tersedia
		Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Meningkat	0	Tidak Mengalami Peningkatan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	0,0057	Tidak Mengalami Penurunan
		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Menurun	0,2	Tidak Mengalami Penurunan
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	0,0086	Tidak Mengalami Penurunan
		Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Meningkat	5	Tidak Mengalami Peningkatan
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat	14,29%	Tidak Mengalami Peningkatan

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Meningkat	0	Tidak Mengalami Peningkatan
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 77,4%	64,82%	-0,1258
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat penetrasi akses tetap pital lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	7,18%	-0,228232527

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR TPB (SDG's)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	CAPAIAN (EXISTING) TAHUN 2017	GAP DG TARGET RPJMN 2019
		Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	71,24%	-0,2876
		Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	-	Tidak Mengalami Peningkatan
		Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	1033300,00%	Tidak Mengalami Peningkatan

## **2. Peluang dan Tantangan Revolusi Industri 4.0**

Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industry secara fundamental dikenal dengan revolusi industry 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Revolusi 1.0 atau revolusi pertama dimulai pada akhir abad ke 18 dengan ditandai ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Pada saat itu, industry diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Pada revolusi industry pertama, proses industry yang awalnya membutuhkan tenaga manusia dan hewan, digantikan dengan mesin uap tersebut.

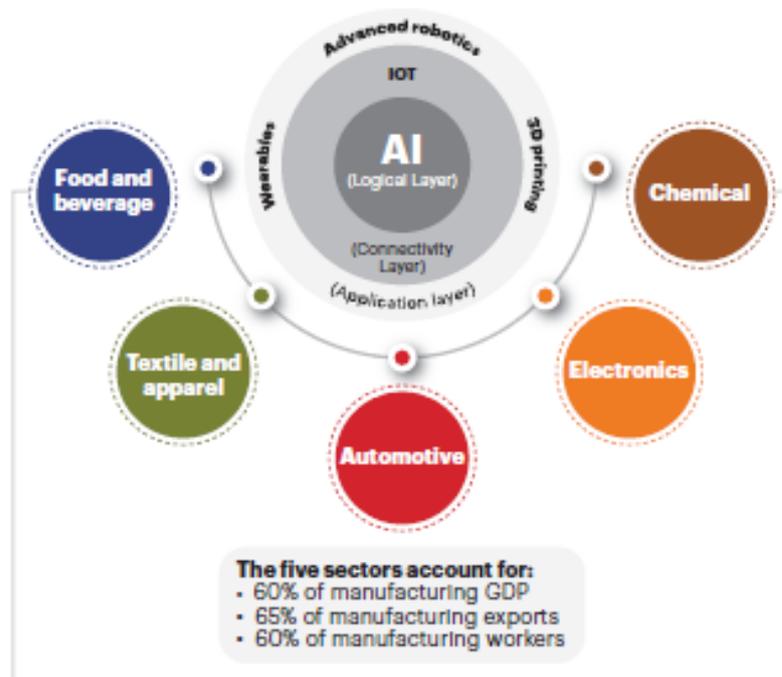
Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap ini listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama industry. Pada tahap ini berkembangnya jumlah program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu dikembangkan juga produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati pada 1870.

Revolusi industry 3.0 ditandai muncul perdana pada awal tahun 1970. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Revolusi industry generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni model 084-969. Sistem otomatisasi berbasis computer ini membuat mesin industry tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih murah, namun isu tenaga kerja tentunya masih menjadi masalah pada tahap ini.

Sedangkan revolusi industry 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya "The Fourth Industrial Revolution". Beliau menegaskan bahwa revolusi industry 4.0 telah mengubah kerja

manusia secara fundamental. Pada saat ini industry telah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Berdasarkan analisis Mckinsey Global Institute, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industry dengan bijak dan hati-hati. Sebagai contoh berikut merupakan bidang-bidang yang memperoleh terobosan berkat kemajuan teknologi 1) Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano, 3) Bioteknologi; 4) Teknologi Kuantum, 5) Blokhain; 6) Teknologi Berbasis Internet; dan 7) Printer 3D.

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan yang lebih luas.



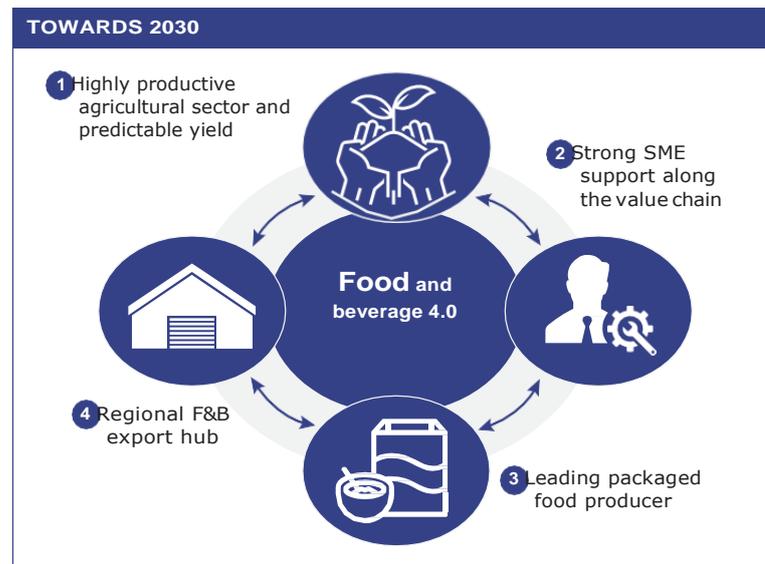
**Gambar 4. 2: Sektor Penunjang Industri 4.0**

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030 melalui lima sektor manufaktur daya saing regional yang meliputi makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik.

### **1) Makanan dan minuman: Membangun industri F&B powerhouse di ASEAN**

Pada tahun 2016, sektor ini berkontribusi 29 persen dari PDB manufaktur, 24 persen ekspor manufaktur, dan menyerap 33 persen tenaga kerja sektor manufaktur. Jika dibandingkan dengan

negara lain, sektor makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena didukung oleh sumber daya pertanian yang berlimpah dan permintaan domestik yang besar.

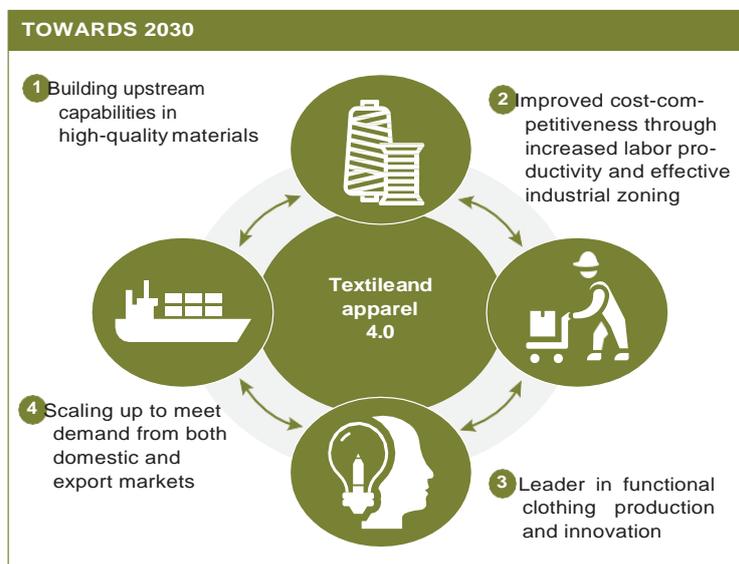


**Gambar 4. 3: Food and beverage 4.0**

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- a) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- b) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

## 2) Tekstil dan pakaian: Menuju produsen functional clothing terkemuka



**Gambar 4. 4: Textile and apparel 4.0**

Pada tahun 2016, sektor ini berkontribusi 7 persen dari PDB manufaktur, 15 persen dari ekspor manufaktur, dan 20 persen dari tenaga kerja manufaktur. Secara historis, sektor ini merupakan kontributor ekspor manufaktur terbesar kedua di Indonesia. Adopsi 4IR di sektor ini akan membuat Indonesia mampu mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pangsa pasar global.

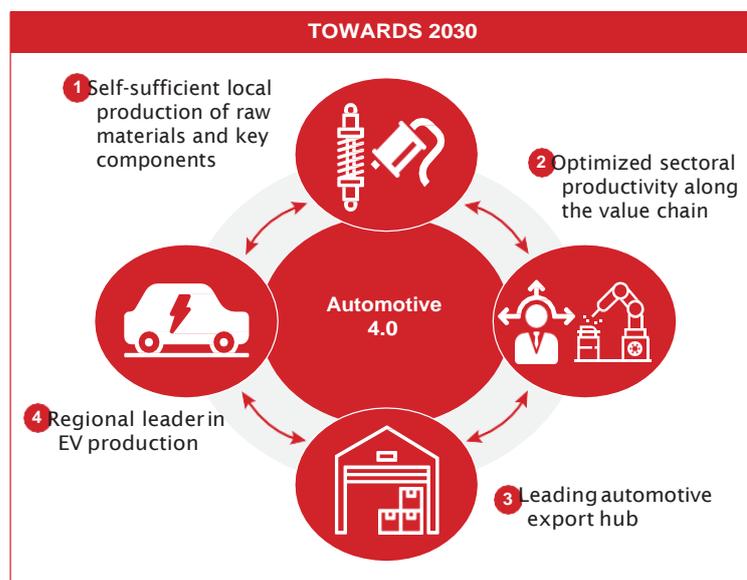
Strategi tekstil dan pakaian 4.0 termasuk:

- Meningkatkan ke-mampuan di sektor hulu, fokus pada produksi serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya yang lebih rendah dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
- Meningkatkan produktifitas manufaktur dan buruh melalui penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik serta peningkatan ketrampilan. Lebih lanjut, seiring dengan pertumbuhan

ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian dasar (basic clothing) menjadi pakaian fungsional, seperti baju olahraga.

- c) Membangun kemampuan produksi functional clothing dan
- d) Meningkatkan skala ekonomi untuk memenuhi permintaan functional clothing yang terus berkembang, baik di pasar domestik maupun ekspor.

### 3) Otomotif: Menjadi pemain terkemuka dalam ekspor ICE dan EV



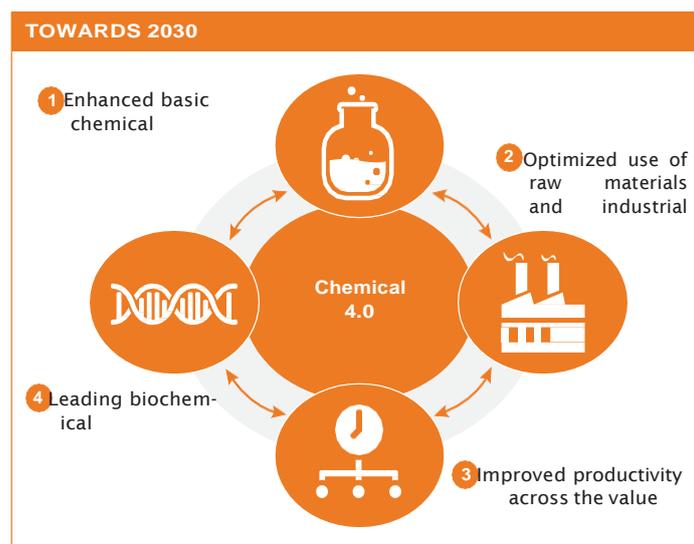
**Gambar 4. 5: Automotive 4.0**

Didukung pasar domestik serta investasi yang kuat dari berbagai perusahaan otomotif terkemuka, Indonesia ingin menjadi produsen mobil terbesar di ASEAN. Indonesia saat ini sudah menjadi eksportir otomotif kedua terbesar di wilayah ini, walaupun produksi kendaraan masih tergantung impor bahan baku mentah (logam dan kimia) maupun komponen elektronik penting lainnya. Selain itu, seiring penetrasi kendaraan listrik (EV) dunia yang diperkirakan akan meningkat tajam pada tahun 2020, Indonesia akan fokus dalam mendukung pengembangan EV.

Strategi otomotif 4.0 termasuk:

- a) Meningkatkan produksi local dalam hal volume dan efisiensi produksi bahan baku dan komponen penting melalui adopsi teknologi dan pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan zona industri terpadu dan platform logistik yang lebih efisien.
- b) Bekerjasama dengan perusahaan OEM dunia untuk meningkatkan ekspor, dengan fokus pada multi-purpose vehicles (MPV), kendaraan murah ramah lingkungan, dan sport utility vehicles (SUV).
- c) Membangun ekosistem untuk industri EV, dimulai dengan kemampuan manufaktur sepeda motor listrik, kemudian mengembangkan kemampuan mobil listrik berdasarkan adopsi EV yang tak terelakkan di masa mendatang.

#### 4) Kimia: Menjadi Pemain Terkemuka Di Industri Biokimia



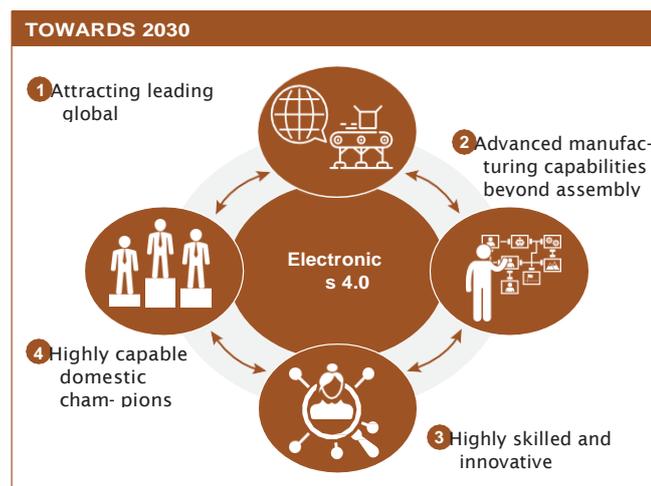
**Gambar 4. 6: Chemical 4.0**

Sektor industri kimia adalah dasar dari industri manufaktur karena produknya digunakan secara luas oleh sektor manufaktur lainnya, seperti elektronika, farmasi, dan otomotif. Perkuatan sektor industri kimia sangat penting untuk dapat membangun industri manufaktur yang dapat bersaing secara global. Indonesia saat ini masih berada pada tahap pengimpor bahan kimia dasar, namun

ingin memperluas kapasitas dan membangun kemampuannya untuk menjadi net eksportir dan produsen bahan kimia spesialis. Indonesia akan memakai sumber daya pertaniannya yang melimpah sebagai salah satu modal untuk membangun keunggulan produksi produk biokimia yang berdaya saing. Strategi Industri 4.0 termasuk:

- a) Mendorong pembangunan kapasitas pasokan petrokimia dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
- b) Membangun industri kimia dengan biaya kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya migas dan optimalisasi lokasi zona industri, termasuk pembangunan lokasi produksi kimia yang lebih dekat dengan lokasi ekstraksi gas alam. Selain itu, mengadopsi teknologi 4IR dan mempercepat kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong produktifitas
- c) Mengembangkan kemampuan produksi kimia generasi berikut dalam produksi biofuel dan bioplastik.

## 5) Elektronik: Mengembangkan kemampuan pelaku industri domestic



**Gambar 4. 7: Electronics 4.0**

Industri elektronik Indonesia masih berkembang dan bergantung pada impor komponen dan produksi lokal dari pemain-pemain global. Produksi lokal masih terkonsentrasi pada perakitan sederhana dan belum banyak terlibat dalam proses yang bernilai tambah.

Strategi elektronik 4.0 adalah:

- a) Menarik pemain global ter-kemuka dengan paket insentif yang menarik
- b) mengembangkan kemampuan dalam memproduksi komponen elektro-nik bernilai tambah.
- c) Mengem-bangkan kemampuan tenaga kerja dalam negeri melalui pelatihan intensif dan menarik tenaga kerja asing di bidang tertentu yang dibutuhkan
- d) mengembangkan pelaku industri unggulan dalam negeri yang berkompeten untuk mendorong inovasi lanjutan dan mempercepat transfer teknologi.

## **4.2.2 Isu Nasional**

### **1. Telaah Rancangan Teknokratik RPJMN 2019-2024**

Merujuk terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah ditafsirkan melalui otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun terlepas dari penjelasan diatas, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat externalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi

tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar untuk daerah dapat menjalankan urusannya, namun dengan catatan tetap memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan terhadap pemerintah di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengacu terhadap prinsip tersebut, maka dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, seperti yang kita tahu RPJM Nasional saat ini adalah pada tahap ke 3 yakni tahun 2019-2024. Sedangkan RPJM Nasional tahap ke 4 atau tahun 2019-2024 belum dapat dijadikan acuan pembangunan, hal tersebut mengingat Pemilihan Umum Presiden baru dilaksanakan pertengahan tahun 2019. Oleh karena itu, untuk dapat menerka prioritas nasional pada tahun 2019-2024 maka harus memperhatikan tahapan dan skala prioritas RPJP Nasional pada tahap ke IV dan arahan Bappenas rancangan teknokratis RPJMN 2020-2025.

RPJP Nasional merupakan representasi dari fokus pembangunan pemerintah. Dengan cita-cita yang direpresentasikan melalui visi dan dijabarkan melalui misi RPJP Nasional. Visi Indonesia 2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur". Berikut penjabaran masing-masing point visi nasional 2025.



**Gambar 4. 8: Visi dan Misi RPJPN 2020-2025**

Berikut merupakan penjelasan poin-poin Visi Indonesia tahun 2025:

a. Mandiri:

Maksud mandiri dalam Visi Indonesia tahun 2025 adalah Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sderajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

b. Maju:

Makusd dari maju dalam Visi Indonesia tahun 2025 adalah diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemandapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum

c. Adil:

Maksud dari adil dalam Visi Indonesia tahun 2025 adalah tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, bai kantar individu, gender, maupun wilayah.

d. Makmur:

Maksud dari makmur dalam Visi Indonesia tahun 2025 adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga

dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsain.Sebagai upaya mencapai Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur berikut dikrucutkan terhadap 8 Misi untuk mewujudkan pembangunan nasional yakni sebagai berikut:



## VISI DAN MISI RPJPN 2020-2025 (1/2)



Kedelapan MISI untuk mewujudkan visi pembangunan Nasional sebagai berikut :



**Gambar 4. 9: Misi RPJPN**

Selanjutnya berdasarkan 1 Visi dan 8 Misi RPJP Nasional tersebut dikerucutkan dengan tema” Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”. Berikut merupakan Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2019-2024 yang diinisiasi oleh Bappenas.



## Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024



**Gambar 4. 10: Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024**

Mengacu terhadap RPJPN yang telah menjelaskan lebih spesifik poin-poin fokus 2019-2024, berikut merupakan poin-poin yang merupakan fokus pembangunan skala prioritas tahap ke IV atau tahun RPJM Nasional 2019-2024:

- Fokus dari skala prioritas RPJP Nasional tahap ke IV adalah mendorong percepatan pencapaian Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Pemerintah fokus terhadap kelembagaan politik dan hokum yang kondusif. Dimana terciptanya supremasi hokum dan penegakan hak asasi manusia, serta

terjaganya seluruh keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Aspek kesejahteraan masyarakat pemerintah fokus terhadap makin meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya terepresentasikan melalui semakin rendahnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan tentunya adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses baik pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak atas kehidupan dasar mereka.
- d. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh melalui keterpaduan atau integrasi antara industry, pertanian, kelautan, sektor jasa, dan sumber daya alam. Struktur perekonomian yang unggul juga sebagai bentuk representasi terhadap pelayanan pendidikan dan berkembangnya IPTek.
- e. Pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang rendah.
- f. Mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan terus memelihara keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam, yang menjadi nilai tambah dan daya saing bangsa.

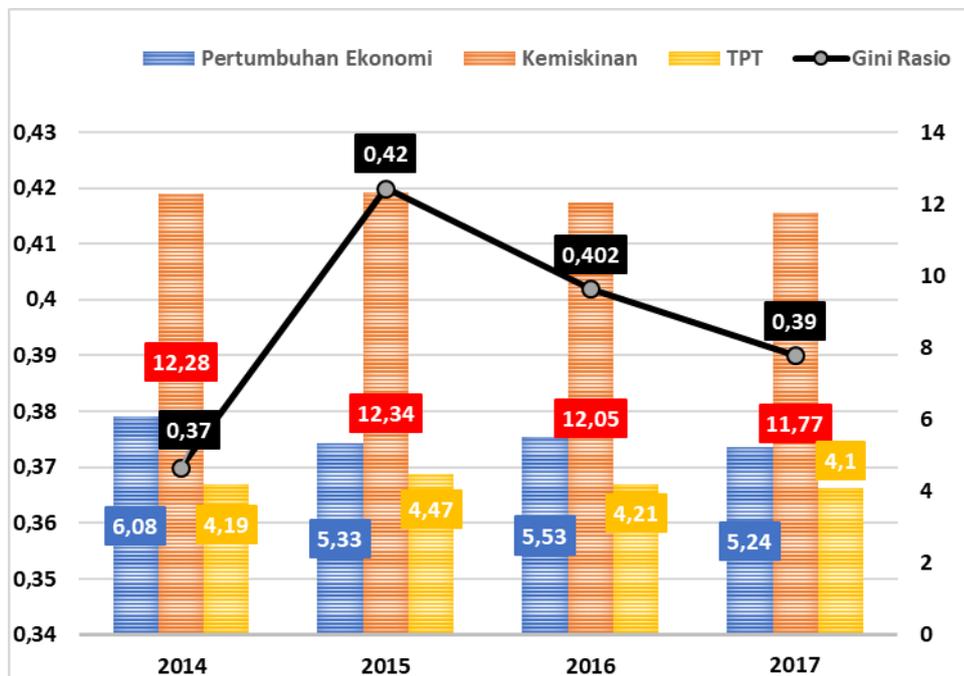
Mengingat skala prioritas RPJP Nasional tahap IV merupakan tahapan terakhir dari rangkaian skala prioritas RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Maka selain fokus pada skala prioritas tahap IV diatas, pemerintah juga harus memastikan skala prioritas pembangunan

nasional pada tahap sebelumnya telah tercapai. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan visi Indonesia Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur dapat tercapai pada tahun 2025.

### 4.2.3 Isu Regional Provinsi Jawa Timur

#### 1. Gambaran Umum Kondisi Pembangunan Provinsi Jawa Timur

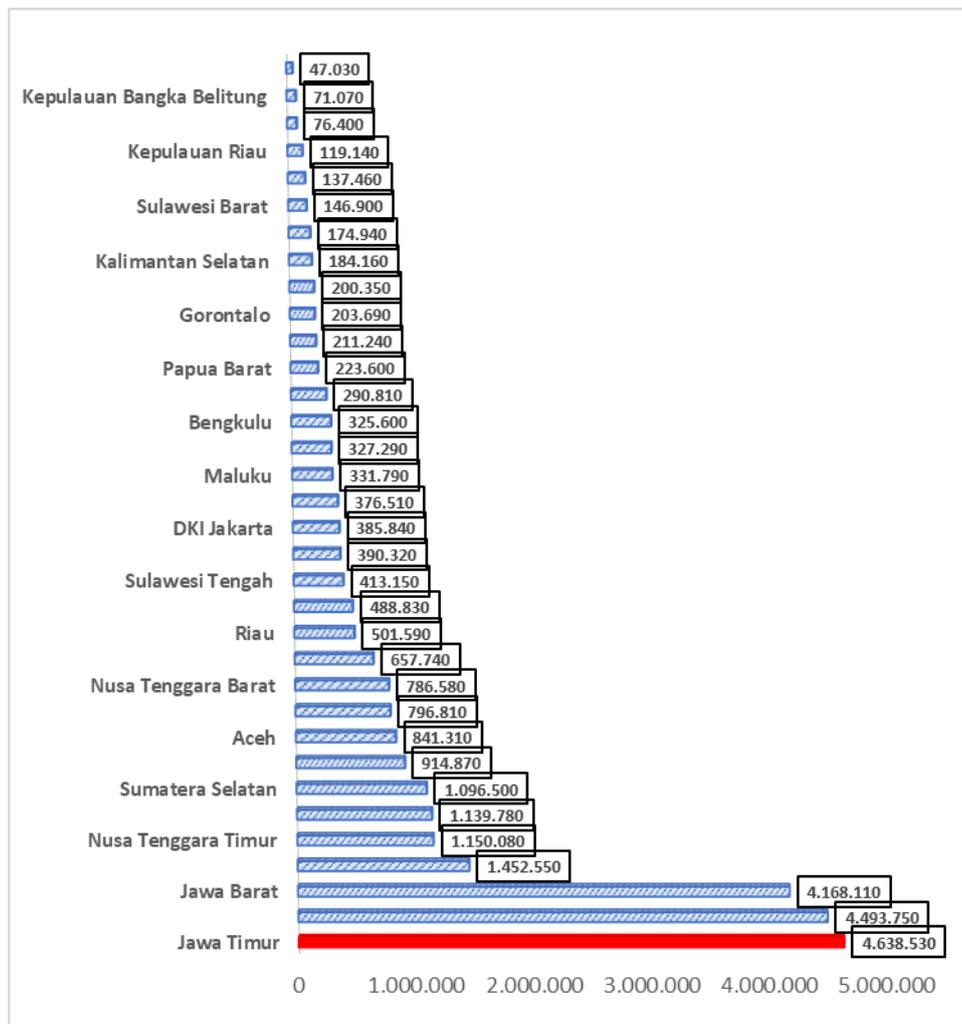
Berkaca terhadap beberapa tahun terakhir, kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berada diatas rata-rata Nasional dengan rata-rata capaian diatas 5%. Sebagai orientasi kesejahteraan masyarakat, seharusnya angka tersebut seharusnya juga berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan, pengangguran terbuka, dan kesenjangan antar kelas pendapatan yang direpresentasikan melalui indeks gini. Berikut merupakan gambaran umum kondisi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, TPT, dan Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4. 11: Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan, TPT dan gini Rasio

Data diatas merupakan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Dalam interval tahun 2014-2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur nampaknya perlu untuk kita apresiasi, dimana mencapai rata-rata diatas 5% dengan puncaknya ditahun 2014 yang mencapai 6,08%. Sedangkan ditahun 2015, 2016, da 2017 cenderung fluktuatif ditengah tidak menentunya kondisi perekonomian nasional.

Kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur tersebut sedikit banyak memberikan implikasi terhadap sektor lainnya, khususnya persentase masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur dengan tren penurunan pada tahun 2014-2017.



**Gambar 4. 12: Angka Kemiskinan**

Secara kuantitas, angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur mencapai 4.638.530 merupakan jumlah penduduk miskin terbanyak dari provinsi lainnya di Indonesia. Berikut merupakan gambaran jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan provinsi.

Grafik diatas menggambarkan setidaknya terdapat 3 provinsi dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 1.5 juta penduduk yakni adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, namun Provinsi Jawa Timur masih tetap provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. 5 kabupaten yang merupakan kantong kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan dengan persentase penduduk miskin rata-rata melebihi 15%. Meskipun demikian, persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terus mengalami tren penurunan khususnya pada interval 2014-2017.

Selain itu beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dari grafik diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur dalam 3 Tahun, Cenderung Fluktuatif. Meningkat di Tahun 2015 Turun Kembali di Tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut sejalan pula dengan Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur yang mengalami Peningkatan dari 0,37 (2014) ke 0,42 (2015). Kemudian Turun di Tahun 2016 (0,402) dan 2017 (0,39). Secara umum, kesimpulan kondisi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah grafik tersebut menunjukkan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, TPT, dan gini ratio memiliki pergerakan yang sama setiap tahunnya.

## **2. Telaah RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031**

Dalam proses penyusunan RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan

jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031,

Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Kota Probolinggo dalam Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam RTRW Provinsi Jawa Timur termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota.

Selanjutnya, Kota Probolinggo dalam penetapan fungsi wilayah pembangunan (WP) termasuk dalam WP Probolinggo–Lumajang dengan pusat di Kota Probolinggo meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan;

#### **4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan**

##### **1. Telaah RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025**

Merujuk terhadap Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan Republik Indonesia merupakan kesatuan dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Hal tersebut berlaku disemua level pemerintahan baik di pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten / kota. Di tingkat pemerintah pusat dan daerah UU 25 Tahun 2004 adalah pengganti dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian mulai berlaku pada tahun 2005.

Sebagai pedoman teknisnya, UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN diturunkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010. Dijelaskan bahwa dari serangkaian tahapan telaah dokumen perencanaan terkait dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, secara tersurat termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 Tahun 2017 telaah RPJPD Kota Probolinggo tahun 2005-2025 merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD. Hal tersebut mengingat bahwa pada nyatanya RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ke 4 dari RPJPD Kota Probolinggo tahun 2005-2025.

Secara umum cakupan telaah RPJMD Kota Probolinggo tahun 2005-2025 yang merujuk dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 adalah melihat realisasi kinerja sasaran pokok yang terepresentasikan melalui indikator yang ditetapkan dalam RPJPD dengan melihat target kinerja yang ditetapkan. Namun yang menjadi temuan dalam RPJPD Kota Probolinggo tahun 2005-2025 adalah sasaran pokok belum terepresentasikan terhadap indikator yang lebih bersifat measurable (terukur) dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya memberikan hambatan terhadap membaca apa yang harus dicapai secara tegas dalam masing-masing periode RPJMD.

Berikut merupakan sasaran pokok, fokus pembangunan RPJPD Tahap IV (2019-2024), dan Platform Politik Wali Kota Probolinggo terpilih.

**Tabel 4. 4: Sasaran pokok Pembangunan**

No	Sasaran Pokok Pembangunan	Fokus Pembangunan 2019-2024	Misi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024	Program Prioritas Wali Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
1	Meningkatnya kegiatan industri, perdagangan, dan transportasi	<p>Mengembangkan kerjasama dan jejaring guna perkuatan daya saing produk industri kecil dan menengah</p> <p>Akselerasi pengembangan ekspor produk-produk unggulan daerah guna meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah</p> <p>Mewujudkan profesionalisme penyediaan fasilitas jasa pelayanan transportasi yang mendukung terwujudnya citra kota indaditas</p>	<p><b>MISI II:</b> MEMBANGUN POTENSI DAERAH MENJADI DAYA TARIK DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN</p>	<p><b>Bidang Industri:</b> Mengembangkan kawasan industri bersinergi dengan perdagangan</p>
2	Meningkatnya kualitas pembangunan pendidikan	Memantapkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan	<p><b>MISI I:</b> MEMANTAPKAN KOTA PROBOLINGGO SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</p>	<p><b>Bidang Pendidikan:</b> Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah negeri/swasta. Pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi bagi SMA/SMK/MA (negeri/swasta) pemberdayaan Madrasah Diniyah, TPA/TPQ, dan Pendidikan Keagamaan Non Muslim</p>
3	Meningkatkan daya saing serta kemandirian sumberdaya manusia			
4	Terwujudnya kota yang bersih, sehat, tertib, aman, dan indah	Memantapkan upaya pelebagaan peranserta para pemangku kepentingan dalam penanganan dan pengelolaan persampahan dan berbagai upaya dalam mewujudkan kota bestari		
5	Terciptanya pengamalan nilai-nilai agama dalam bermasyarakat	Memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama		

No	Sasaran Pokok Pembangunan	Fokus Pembangunan 2019-2024	Misi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024	Program Prioritas Wali Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
		<b>Memantapkan Kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat</b>		
6	<b>Meningkatnya masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan berbudi luhur</b>			
7	<b>Terwujudnya hubungan yang harmoni dalam kehidupan antar kelompok masyarakat.</b>	<p><b>Memantapkan terpeliharanya rasa kesetia kawan sosial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat</b></p> <p><b>Melanjutkan dan memantapkan pelaksanaan kebijakan tahap sebelumnya guna lebih memperkokoh hubungan yang harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</b></p>		
8	Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat	Melanjutkan kebijakan tahap sebelumnya dengan fokus peningkatan, pengembangan, dan pemantapan upaya-upaya berbasis pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	<b>MISI I:</b> MEMANTAPKAN KOTA PROBOLINGGO SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<b>Bidang Kesehatan:</b> Membangun rumah sakit baru sebagai rumah sakit rujukan wilayah timur Jawa Timur. Ambulance perkulurahan, Pelayanan kesehatan Standart nasional (Gratis). Pelayanan Kesehatan ibu hamil sampai melahirkan dan memberi makanan bergizi bagi balita setiap bulan
9	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	<p>Memantapkan pelaksanaan kebijakan pengembangan lingkungan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat</p> <p>Pelebagaan upaya pemantapan penurunan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular serta angka penyakit potensial wabah</p>		
10	Terwujudnya peningkatan kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama penduduk miskin, melalui puskesmas dan rumah sakit	<p>Melanjutkan upaya peningkatan dan perluasan aksesibilitas masyarakat khususnya masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Rumah Sakit dan Puskesmas dan Jaringannya</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Rumah Sakit dan Puskesmas</p>		

No	Sasaran Pokok Pembangunan	Fokus Pembangunan 2019-2024	Misi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024	Program Prioritas Wali Kota Probolinggo Tahun 2019-2024		
		Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin				
11	Terjaminnya ketersediaan pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan	Melanjutkan kebijakan optimalisasi upaya pemenuhan mengikuti perkembangan standar mutu, ketersediaan dan pemerataan obat di Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya				
		Pemenuhan standart peralatan medis di Rumah Sakit				
		Pemenuhan luasan tanah, pembangunan / relokasi sesuai standart Rumah Sakit Kelas B				
12	Terwujudnya keberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses sumber daya produktif dan pelayanan dasar	Menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif secara maksimal				
		Menjamin aksesibilitas masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas				
13	Terciptanya perluasan lapangan kerja disektor informal maupun formal					
14	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Melanjutkan pemenuhan tuntutan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja				
		Melanjutkan ke bijakan memantapkan peran pemerintah daerah sebagai regulator untuk mendorong sektor swasta untuk aktif meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mewujudkan norma hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja				
15	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Mempertahankan kondisi iklim usaha yang kondusif secara berkesinambungan agar tetap terjaga kebijakan akselerasi investasi pembangunan daerah dan tetap terbukanya peluang berusaha untuk tumbuhnya investasi baru			<b>MISI II:</b> MEMBANGUN POTENSI DAERAH MENJADI DAYA TARIK DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN	<b>Bidang Iklim Investasi dan Lapangan Kerja:</b> Menggairahkan iklim investasi sebagai penopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menciptakan lapangan kerja menuju masyarakat sejahtera

No	Sasaran Pokok Pembangunan	Fokus Pembangunan 2019-2024	Misi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024	Program Prioritas Wali Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
16	Berkembangnya kegiatan kewirausahaan, koperasi dan terwujudnya keunggulan kompetitif UMKM	Menjaga kondisi terus tumbuh berkembangnya kemandirian UKM sehingga memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah	<b>MISI I:</b> MEMANTAPKAN KOTA PROBOLINGGO SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<b>Bidang Industri dan Perdagangan:</b> Memperluas jaringan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
17	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah		<b>MISI II:</b> MEMBANGUN POTENSI DAERAH MENJADI DAYA TARIK DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN	<b>Bidang Pembangunan:</b> Mempertahankan Brand Probolinggo dengan mengacu pada infrastruktur standart nasional dan perubahan iklim
18	Terwujudnya pemenuhan dan pemerataan penyediaan infrastruktur kota	Memantapkan infrastruktur perekonomian kota untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian kota dan mengantisipasi berkembangnya ekonomi agropolitan di kawasan sekitar kota		
19	<b>Terwujudnya pemenuhan ketahanan pangan yang berkualitas dengan mempertahankan dan memanfaatkan lahan serta mengolah potensi lokal</b>			
20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya tingkat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, air, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Melanjutkan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat disertai upaya penguatan sistem penegakkan hukum lingkungan  Pemantapan kinerja pengelolaan persampahan kota dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut berbasis pemberdayaan masyarakat	<b>MISI II:</b> MEMBANGUN POTENSI DAERAH MENJADI DAYA TARIK DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN	<b>Bidang Lingkungan:</b> Menciptakan lingkungan hidup Bestari, menjadikan masyarakat merasa nyaman hidup di kota sendiri
21	<b>Terwujudnya rasa aman, tentram, tertib, dan damai di masyarakat.</b>	<b>Pemantapan kelembagaan dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Linmas</b> <b>Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</b> <b>Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan</b>		

No	Sasaran Pokok Pembangunan	Fokus Pembangunan 2019-2024	Misi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024	Program Prioritas Wali Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
		<p><b>sosial menuju persatuan dan kesatuan bangsa</b></p> <p><b>Penegakkan supremasi hukum pembangunan budaya hukum dan pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan serta peningkatan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia</b></p>		
22	Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang prima	<p>Memantapkan upaya pengembangan tatalaksana pelayanan publik dan peningkatan profesionalisme aparat pelaksanaan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan keinginan harapan masyarakat</p> <p>Mengembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif ikut meningkatkan kualitas pelayanan publik</p>	<p><b>MISI III:</b> MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, PROFESIONAL, JUJUR DAN BERSIH</p>	<p><b>Bidang Pemerintah:</b> Menciptakan pemerintahan yang profesional, melayani warga secara prima</p>
23	Terwujudnya birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, dan bertanggungjawab, serta profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	<p>Memantapkan dan mengembangkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada perodesasi sebelumnya</p> <p>Terus memantapkan implementasi kebijakan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, guna mewujudkan otonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat</p>		

Pada prinsipnya tabel diatas bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa sasaran dan fokus RPJPD Kota Probolinggo tahun 2005-2025 khususnya periode ke IV telah diterjemahkan dan menjadi prioritas pula pada tahun RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024. Secara umum dalam RPJPD Kota Probolinggo tahun 2005-2025 memiliki 8 Misi pembangunan jangka panjang, yang kemudian diturunkan kedalam 16 tujuan, dan 23 sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Sedangkan prioritas pembangunan walikota terpilih terinterpretasikan melalui 1 Visi, 3 Misi, dan 10 Program Prioritas Walikota. Karena pada prinsipnya

pembangunan jangka menengah daerah yang dimanefestasikan melalui RPJMD Kota Probolinggo harus mengacu terhadap pembangunan jangka panjang, maka berikut merupakan catatan penting terkait telaah RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 terhadap RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024.

- 1) Secara umum sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Probolinggo tahun 2005-2025 no 19 yang terfokus terhadap **“Terwujudnya Pemenuhan Ketahanan Pangan Yang Berkualitas Dengan Mempertahankan Dan Memanfaatkan Lahan Serta Mengolah Potensi Lokal”** belum terakomodir dalam 10 program prioritas Wali Kota Probolinggo. Walaupun secara umum sasaran 19 didukung melalui Misi 1. Namun 10 program prioritas Wali Kota tidak ada yang menyentuh terkait ketahanan pangan, yang mungkin Wali Kota terpilih tidak menangkap hal tersebut menjadi isu yang harus dituntaskan pada periode RPJMD 2019-2024. Secara umum sasaran tersebut, terinterpretasikan melalui Indikator dalam yakni **“Skor Pola Harapan Pangan”**
- 2) Secara umum sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Probolinggo tahun 2005-2025 no 4, 5, 6, 7, dan 21 yang terfokus terhadap **“Harmonisasi Sosial Masyarakat Kota Probolinggo yang Meliputi: Kota yang Bersih, Nyaman, Indah, Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan, Berbudi Luhur, dan Kerukunan Antaer Kelompok Masyarakat”** belum terakomodir dalam 10 program prioritas Wali Kota Probolinggo. Walaupun secara umum sasaran 4, 5, dan 7 didukung melalui Misi 2. Namun 10 program prioritas Wali Kota tidak ada yang menyentuh terkait harmonisasi masyarakat, yang mungkin Wali Kota terpilih tidak menangkap hal tersebut menjadi isu yang harus dituntaskan pada periode RPJMD 2019-2024. Secara

umum sasaran tersebut, terinterpretasikan melalui Indikator Sasaran dalam Misi 2 yakni “**Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)**”

## 2. Telaah RPJMD Daerah Sekitar Kota Probolinggo

Telaah dokumen RPJMD daerah sekitar Kota Probolinggo bertujuan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun telaah RPJMD daerah sekitar Kota Probolinggo antara lain Kabupaten Probolinggo Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah tabel telaah RPJMD daerah sekitar:

**Tabel 4. 5: telaah Dokumen Daerah Sekitar**

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Probolinggo	2013-2018	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHK 2010	Berdasarkan Kebijakan terkait pada RPJMD daerah sekitar maka dapat diketahui bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan RPJMD Kota Probolinggo antara lain: 1. Pengembangan Jasa pergudangan dan transportasi dalam memanfaatkan potensi pelabuhan daerah sehingga mampu mendukung daerah sekitar
			Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi lapangan usaha industri pengolahan ADHK 2010	
			Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum ADHK 2010	
			Peningkatan Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB	
			Peningkatan pelayanan prima (investasi)	
2	Kabupaten Lumajang	2018-2023	Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik	
			Melaksanakan penyelenggaraan <i>good and clean governance</i> melalui pengembangan e-	

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			<i>government</i>	dalam perdagangan.
			percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah	2. Pengembangan Industri Pengolahan hal tersebut dalam memanfaatkan
			membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal	pengembangan daerah sekitar yang terfokus pada hasil pertanian.
			melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas	3. Pengembangan Kota Probolinggo sebagai pusat perdagangan
			melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan	bagi daerah sekitar khususnya Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Pasuruan terkait dengan potensi pelabuhan dan berada Jalur Utama jalan pantura.
3	Kabupaten Pasuruan	2013-2018	Menumbuhkembangkan pasar desa dan produk unggulan.	
			Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal	
			Menciptakan iklim usaha yang kondusif	
			Meningkatkan produktivitas pertanian	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM	
			Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif	
			Menumbuhkembangkan kebudayaan dan kearifan lokal serta pembangunan destinasi yang berwawasan lingkungan	

Berdasarkan tabel telaah RPJMD daerah sekitar Kota Probolinggo di atas maka dapat diketahui dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo maka hal yang perlu dipertimbangkan sehingga terciptanya sinergitas antar daerah dan meningkatkan daya saing Kota Probolinggo terhadap daerah sekitarnya antara lain:

1. Pengembangan Jasa pergudangan dan transportasi dalam memanfaatkan potensi pelabuhan daerah sehingga mampu mendukung daerah sekitar dalam perdagangan.
2. Pengembangan Industri Pengolahan hal tersebut dalam memanfaatkan pengembangan daerah sekitar yang terfokus pada hasil pertanian.
3. Pengembangan Kota Probolinggo sebagai pusat perdagangan bagi daerah sekitar khususnya Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Pasuruan terkait dengan potensi pelabuhan dan berada Jalur Utama jalan pantura.

### **3. Telaah RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028**

Penataan ruang dan wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat pula, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan seluruh masyarakat. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan berdasarkan prinsip berkelanjutan. Oleh sebab itu, adanya kegiatan penelaahan RTRW menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun

2009-2028, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah, hal ini sesuai dengan tujuan penataan ruang Kota Probolinggo yaitu **“Mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional”** dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penelaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

1. Rencana struktur ruang Kota Probolinggo meliputi:
  - a. SPPK A berpusat di Mayangan diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, fasilitas umum, industri, pergudangan, parkir truk, kawasan lindung mangrove, pengembangan pelabuhan, permukiman nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), jalur hijau, pariwisata dan sarana olahraga ;
  - b. PPK B berpusat di Kanigaran diarahkan mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, jalur hijau dan kawasan hankam ;
  - c. SPPK C berpusat di Kademangan diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, pertanian, industri pergudangan, perumahan, fasilitas umum, jalur hijau dan terminal regional;
  - d. SPPK D berpusat di Wonoasih diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, perumahan, fasilitas pendidikan, jalur hijau, pertanian dan sarana olahraga ; dan
  - e. SPPK E berpusat di Kedopok diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, agro industri, industri kecil, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, perumahan, jalur hijau.
  - f. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan berada di masing-masing kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana Kota Probolinggo meliputi :
  - a. sistem jaringan transportasi meliputi: jaringan jalan, terminal dan sub terminal, prasarana dan sarana pejalan kaki, prasarana dan sarana angkutan umum, transportasi kereta api, transportasi laut ;
  - b. sistem jaringan telematika ;
  - c. sistem jaringan energi dan kelistrikan ;
  - d. sistem jaringan sumber daya air ;
  - e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan ; dan
  - f. sistem jaringan prasarana kegiatan sektor informal.
  
3. Beberapa rencana strategis terkait jaringan prasarana di Kota Probolinggo antara lain:
  - a. pengembangan Jalan Lingkar Utara di pesisir Utara Kota Probolinggo yang secara langsung bersambung dengan rencana Jalan Lingkar Utara Kecamatan Dringu yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, meliputi : Jalan Sukarno Hatta – Jalan Anggrek – Jalan Ikan Tongkol – Jalan Ikan Tengiri – Jalan Raden Patah – Pertigaan Jalan Raden Wijaya ;
  - b. Pembangunan Jalan Bypass yang meliputi : Jalan Ketapang – Jalan Anggrek – Jalan RadenPatah – Jalan Raden Wijaya – Jalan Panglima Sudirman ;
  - c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana pejalan kaki berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difable, seperti: trotoar dan penyeberangan jalan diatas jalan, pada permukaanjalan dan dibawah jalan meliputi : jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder.

- d. Rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi laut yang meliputi pengembangan pelabuhan umum (barang), pelabuhan umum (penumpang), pelabuhan perikanan pantai (PPP), pelabuhan khusus dan terminal peti kemas.
  - e. Penambahan jaringan perpipaan air bersih terutama pada kawasan selatan (Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Wonoasih) ;
  - f. Peletakan pedagang kaki lima meliputi: AlunAlun, Jalan DR. Sutomo, Jalan Brigjen. Katamsa, Jalan Basuki Rachmat, Jalan Sukarno Hatta, Len Jelenan.
4. Selanjutnya beberapa rencana strategis terkait pola ruang di Kota Probolinggo adalah:
- a. Perlindungan sekitar mata air dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber mata air ;
  - b. Rencana pelestarian kawasan sempadan pantai yang meliputi :
    - pengendalian dan pengelolaan perkembangan kegiatan perikanan terutama pembukaan area tambak udang dengan memperhatikan aspek lingkungan ;
    - mempertahankan keberadaan hutan mangrove dengan menjaga keberadaan lahannya dari berbagai kegiatan budidaya diatasnya ; dan
    - hutan mangrove dikembangkan di kawasan Pantai Kelurahan Ketapang, kawasan Pantai Kelurahan Pilang, kawasan Pantai Kelurahan Sukabumi, kawasan Pantai Kelurahan Mangunharjo dan kawasan Pantai Kelurahan Mayangan.

c. Rencana pelestarian kawasan konservasi budaya dan sejarah di Kota Probolinggo meliputi :

- Kawasan di sekitar gedung dan bangunan bernilai sejarah dan budaya harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian dan menjadikan gedung dan bangunan bernilai sejarah dan budayatetap terlihat dari berbagai sudut pandang ;
- Benda cagar budaya berupa bangunan fungsional (digunakan sampai saat ini) seperti masjid, gereja, rumah dan berbagai bangunan peninggalan kolonial Belanda harus dikonservasi dan direhabilitasi untuk bangunan yang mulai rusak ; dan
- Penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.

d. Penanganan kawasan rawan bencana alam di Kota Probolinggo meliputi :

- Penanganan kawasan rawan bencana gunung berapi
- Penanganan kawasan rawan bencana gelombang pasang (tsunami)
- Penanganan kawasan genangan air (banjir)
- Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran
- Penanganan kawasan rawan bencana angin puting beliung

e. Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah sebesar 20% dan ruang terbuka hijau (RTH) privat sebesar 10%.

- f. RTH publik penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kota yang dilakukan secara bertahap per tahun sesuai dengan prioritas dan tahapan pembangunan 5 tahunan dengan potensi pengembangan RTH Publik
- g. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan terdiri atas : pengembangan industri pelabuhan, industri sepanjang Jalan Brantas, agroindustri di Kecamatan Kedopok dan industri kecil.
- h. Kawasan pariwisata dialokasikan pada daerah :
- Pantai sebelah Timur kegiatan dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan galangan kapal nelayan;
  - Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) di Kelurahan Mangunharjo ; dan
  - Pengembangan kegiatan wisata diantaranya mata air Sumber Wetan di Kelurahan Sumber Wetan, Sungai Umbul dan Kasbah ;
- i. Rencana pengembangan perumahan meliputi :
- Alokasi ruang kawasan perumahan yang terdiri dari : perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah ;
  - Pengendalian perkembangan kawasan perumahan, terutama untuk perkembangan perumahan pada kawasan yang memiliki intensitas tinggi akan dibatasi/dikendalikan dengan persyaratan yang ketat;
  - Rencana Pembangunan Rusunawa dan Rusunami ;
  - Penataan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan.
- j. Arahannya rencana pengembangan untuk kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Probolinggo meliputi :

- Kegiatan perdagangan dan jasa masih akan dipusatkan di Kecamatan Mayangan dan Kanigaran sesuai dengan kondisi saat ini dengan skala pelayanan kota dan wilayah
  - Pusat perdagangan dan jasa baru dikembangkan di sub pusat-sub pusat baru sesuai dengan rencana struktur tata ruang yang telah disusun ; dan
  - Pengendalian penggunaan lahan perdagangan dan jasa pada lokasi rencana Jalan Lingkar Utara dan by pass agar tidak terjadi dominasi penggunaan lahan dan pemusatan kegiatan.
- k. Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana meliputi :
- memanfaatkan daerah/kawasan yang berada di sekitar lokasi rawan bencana dengan topografi yang lebih tinggi dari lokasi rawan bencana ;
  - memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana meliputi: Alun-Alun, stadion Bayuangga, Kantor Kecamatan, balai RW, kantor kelurahan maupun ruangterbuka hijau dan ruang terbuka non hijau ; dan
  - evakuasi diarahkan ke arah kawasan selatan (menjauhi kawasan pesisir) untuk kawasanrawan abrasi pantai dan gelombang pasang mengikuti jalur evakuasi bencana meliputi JalanAnggrek, Jalan Belanak, Jalan Kerapu, Jalan Tongkol, Jalan Ikan Paus, Jalan Raden Patah, Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jalan K.H. Mansyur, Jalan Suroyo, Jalan Raden Wijaya, Jalan Dr. Moch. Saleh, Jalan D.I. Panjaitan, Jalan GatotSubroto, Jalan Hayam Wuruk ; dan

- Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) bencana.
- l. Arahan pengembangan kawasan peruntukan pendidikan meliputi :
- perbaikan/renovasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai ;
  - pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kecamatan Kademangan ;
  - pembangunan SLTP Negeri 11 di Kecamatan Kademangan ;
  - pembangunan kompleks pendidikan diarahkan di Jalan Mastrip, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Semeru ; dan
  - penyediaan sarana pendidikan pra sekolah dan SD diarahkan terdistribusi secara merata di tiap-tiap kecamatan.
- m. Arahan pengembangan kawasan peruntukan kesehatan meliputi :
- peningkatan kualitas sarana kesehatan Rumah Sakit yang memiliki skala pelayanan regional ;
  - penyediaan sarana kesehatan Rumah Sakit yang menangani penyakit tertentu;
  - penyediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan BKIA di Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopok ; dan
  - Rencana relokasi Rumah Sakit Umum.
5. Struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kota Probolinggo juga memuat rencana kawasan strategis yang meliputi:
- a. Rencana Pengembangan Kawasan strategis hankam

- b. Rencana Pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
- c. Rencana Pengembangan Kawasan strategis sosial dan budaya
- d. Rencana Pengembangan Kawasan strategis peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- e. Rencana Pengembangan Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.

Berpijak pada muatan RTRW tersebut serta memperhatikan dinamika kebijakan serta pemanfaatan ruang di Kota Probolinggo maka beberapa isu strategis terkait penataan ruang di Kota Probolinggo adalah:

- a. Rencana Pelabuhan Probolinggo sebagai pelabuhan pengumpul perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini di karenakan rencana pengembangan pelabuhan ini juga termasuk dalam rencana pengembangan pelabuhan nasional. Sehingga di perlukan sinkronisasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengembangan pelabuhan.
  - Pemanfaatan ruang aktivitas pelabuhan yang bersinggungan dengan Kawasan Lindung.
  - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan.
  - Penetapan alokasi ruang kawasan industri pendukung dalam RTRW.
  - Penetapan alokasi pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar pelabuhan.

- Perubahan batas wilayah administrasi di wilayah perairan.
- b. Rencana TPA Regional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031 yang direncanakan melayani Kota dan Kabupaten Probolinggo.
- c. Rencana Perluasan TPA.
- d. Keberadaan jalan Tol Pasuruan – Probolinggo yang melintas di wilayah selatan yang diindikasikan akan mengurangi arus menerus di Jalur Pantura di tengah kota.
- e. Rencana Jalan By Pass dan Jalan Lingkar Selatan.
- f. Aktivasi Rel Kereta Api dari pelabuhan menuju tengah kota.
- g. Inventarisasi dan Penetapan KP2B.
- h. Rencana pembangunan Rumah Sakit di wilayah selatan.
- i. Belum terpenuhinya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah.
- j. Belum optimalnya pemanfaatan informasi geospasial dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan.

#### **4.2.5 Perumusan Isu Strategis Kota Probolinggo**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, Telaah SDGs, isu regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW, KLHS). Hasil perumusan isu strategis akan menghasilkan alternatif isu strategis dalam pembangunan Kota Probolinggo. Adapun **Alternatif Isu Strategis** Kota Probolinggo antara lain:

1. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pendidikan
2. Ketersediaan dan Distribusi Tenaga Pendidik yang masih kurang
3. Aksesibilitas perpustakaan masyarakat masih belum optimal
4. Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan Keluarga berencana masih rendah
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan
6. Angka Kematian ibu dan anak masih tinggi
7. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masih kurang
8. Produktifitas pertanian masih rendah
9. Penurunan produksi dan produktifitas perikanan tangkap
10. Masih Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha koperasi
11. Daya saing Usaha mikro kecil masih belum optimal
12. Masih belum optimalnya pengembangan wirausaha baru
13. Masih belum optimalnya pengembangan pariwisata
14. iklim investasi daerah yang masih belum stabil
15. Masih belum optimalnya ketercukupan fasilitas umum bagi masyarakat dan kebutuhan khusus
16. Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi
17. Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih belum optimal
18. Kurangnya tingkat ketersediaan dalam memenuhi kebutuhan pangan
19. Penurunan angka Kemiskinan belum optimal
20. Pengeluaran untuk layanan pokok menurun
21. Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal
22. Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak
23. Masih Rendahnya Keadilan dan Kesetaraan gender
24. Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan SOP dan SPM masih belum optimal
25. Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan dan Implementasi pembangunan masih rendah
26. Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan kebudayaan dan kesenian daerah

- pengelolaan keuangan masih rendah
27. upaya pemaksimalan sumber-sumber pendapatan daerah masih belum optimal
  28. Pengelolaan Piutang Daerah Belum Optimal
  29. Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah masih belum optimal
  30. Penurunan tenaga kerja pada sektor informal pertanian dan manufaktur
  31. Masih terbatasnya Akses Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun Industri Kecil Menengah (IKM)
  32. Penurunan Jumlah Wisatawan Mancanegara
  33. Indeks Resiko Bencana Masih Tinggi
  34. Manajemen Pengelolaan Sampah Masih Belum Optimal
  35. Masih belum optimalnya pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan sumber daya lingkungan
  36. Peningkatan pengendalian dampak perubahan iklim dan peningkatan penanganan energi terbarukan
  37. Masih belum Optimalnya pengelolaan manajemen sistem teknologi, informasi dan komunikasi daerah
  38. Masih tingginya masyarakat yang belum memiliki akses internet
  39. Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau belum optimal
  40. Laju Pertumbuhan PDB Perkapita masih dibawah target
  41. Peningkatan produktivitas sektor transportasi dan pergudangan
  42. Peningkatan jumlah IKM
  43. Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan yang meningkat
  44. Inflasi daerah yang stabil
  45. Indeks Pendidikan sudah tinggi
  46. Peningkatan kualitas tenaga pengajar
  47. Peningkatan indeks Kesehatan
  48. Peningkatan daya beli masyarakat
  49. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat
  50. Peningkatan jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
  51. Peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja
  52. Lapangan kerja informal sektor non pertanian meningkat
  53. Peningkatan penerapan e-gov pada perangkat daerah
  54. Kapasitas produksi belum meningkat secara signifikan dan penurunan armada perikanan
  55. Peningkatan Jumlah Wisatawan Lokal
  56. Devisa sektor pariwisata meningkat
  57. Pekerja pada industri pariwisata semakin banyak
  58. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
  59. Peningkatan kinerja kelitbangan daerah
  60. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi publik
  61. Pengguna moda transportasi umum meningkat
  62. Standar pelayanan perkotaan sudah terpenuhi
  63. Peningkatan Rasio Panjang jalan
  64. Belanja modal kota probolinggo meningkat
  65. Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas sudah merata
  66. Kelahiran yang mendapatkan fasilitas kesehatan meningkat
  67. Pemberian imunisasi dasar lengkap sudah merata
  68. Penggunaan Metode kontrasepsi (CPR) sudah merata
  69. Median usia kawin pertama perempuan sudah baik

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>70. Penduduk yang memiliki telepon genggam semakin banyak</li> <li>71. Penurunan angka penderita wabah penyakit dan TBC di masyarakat</li> <li>72. Peningkatan Ketercukupan Gizi Pada Ibu dan Bayi</li> <li>73. Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata</li> <li>74. Peningkatan penanggulangan lahan kritis</li> <li>75. Peningkatan rasa aman masyarakat</li> <li>76. Peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai</li> <li>77. Penataan Kelembagaan Sumberdaya air sudah terlaksana</li> <li>78. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan data kependudukan sudah tinggi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>79. Peningkatan Akses Perbankan bagi masyarakat</li> <li>80. Penduduk yang memiliki telepon genggam semakin banyak</li> <li>81. Peningkatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa</li> <li>82. Kepatuhan pelaksanaan pelayanan publik</li> <li>83. Potensi peningkatan pendapatan pajak daerah</li> <li>84. Peningkatan kualitas Data Statistik BPS</li> <li>85. Proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat</li> <li>86. Peningkatan Koordinasi lintas sektor dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat</li> <li>87. Potensi Konflik Sosial Dapat Ditangani Dengan Baik</li> </ul> |
|--|---|

Berdasarkan alternatif isu strategis di atas selanjutnya akan dilakukan pembobotan atas setiap alternatif isu strategis tersebut. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Adapun dalam pembobotan alternatif isu strategis dilakukan dengan dengan mempertimbangkan 5 klasifikasi antara lain:

<b>NO</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Skor</b>
1	Berhubungan dengan Visi - Misi	(Nilai 0 - 25)
2	Prioritas Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)	(Nilai 0 - 15)
3	Tingkat Kepentingan untuk Diselesaikan	(Nilai 0 - 25)
4	Termasuk dalam SPM	(Nilai 0 - 15)
5	Merupakan Prioritas Nasional dan Provinsi	(Nilai 0 - 20)

Skoring atas alternatif isu strategis dilakukan oleh stakeholder terkait terutama oleh Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan skoring alternatif isu strategis akan diambil skor terbesar yang selaras dengan visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program unggulan Wali Kota. Adapun isu strategis yang telah ditentukan sebagai isu strategis pembangunan Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan antara lain:

1. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pendidikan,
2. upaya pemaksimalan sumber-sumber pendapatan daerah masih belum optimal,
3. Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih belum optimal,
4. Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah masih belum optimal,
5. Ketersediaan dan Distribusi Tenaga Pendidik yang masih kurang,
6. Iklim investasi daerah yang masih belum stabil,
7. Potensi peningkatan pendapatan pajak daerah,
8. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan,
9. Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi,
10. Kurangnya tingkat ketersediaan dalam memenuhi kebutuhan pangan,
11. Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau belum optimal,
12. Peningkatan produktivitas sektor transportasi dan pergudangan,
13. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat,
14. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah,
15. Angka Kematian ibu dan anak masih tinggi,
16. penurunan angka Kemiskinan belum optimal,
17. Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan

- SOP dan SPM masih belum optimal,
18. Manajemen Pengelolaan Sampah Masih Belum Optimal,
  19. Peningkatan kualitas tenaga pengajar,
  20. Masih belum optimalnya pengembangan pariwisata kebudayaan dan kesenian daerah,
  21. Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata,
  22. Peningkatan rasa aman masyarakat,
  23. Produktifitas pertanian masih rendah,
  24. Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak,
  25. Indeks Resiko Bencana Masih Tinggi,
  26. Masih belum Optimalnya pengelolaan manajemen sistem teknologi, informasi dan komunikasi daerah,
  27. Masih belum optimalnya pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan sumber daya lingkungan,
  28. Peningkatan pengendalian dampak perubahan iklim dan peningkatan penanganan energi terbarukan,
  29. Peningkatan daya beli masyarakat,
  30. Peningkatan penerapan e-gov pada perangkat daerah
  31. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi publik,
  32. Penurunan angka penderita wabah penyakit dan TBC di masyarakat,
  33. Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan dan Implementasi pembangunan masih rendah,
  34. Penurunan tenaga kerja pada sektor informal pertanian dan manufaktur,
  35. Indeks Pendidikan sudah tinggi,
  36. Masih belum optimalnya pengembangan wirausaha baru,
  37. Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal,
  38. Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan yang meningkat,
  39. Daya saing Usaha mikro kecil masih belum optimal,
  40. Masih Rendahnya Keadilan dan Kesetaraan gender,

41. Kapasitas produksi belum meningkat secara signifikan dan penurunan armada perikanan,
42. Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan Keluarga berencana masih rendah,
43. Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan masih rendah,
44. Potensi Konflik Sosial Dapat Ditangani Dengan Baik.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **5.1 VISI**

Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Probolinggo yang direpresenatsikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kota Probolinggo, maka Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yang merupakan Visi Politik yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yakni:

"Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik,  
Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman"

Dalam dokumen RPJMD ini Visi Wali Kota Probolinggo terpilih disesuaikan dengan kebutuhan teknokratik, sehingga mengalami sedikit penyesuaian tanpa merubah esensi dari janji politis yang secara tersurat dan tersirat disampaikan Wali Kota terpilih kepada masyarakat Kota Probolinggo. **Sehingga Visi Pembangunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yakni :**

**“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”**

Berikut merupakan poin-poin Visi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024:

**VISI PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024  
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK,  
BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN**



**BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK**

Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh di awal Visi menggambarkan pemerintahan Kota Probolinggo 2019-2024 menjadikan **PARTISIPASI RAKYAT SEBAGAI GARDA DEPAN PEMBANGUNAN** Kota Probolinggo yang “Lebih Baik”.



**TRANSPARAN**

Merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. “**Transparan**” berpegang teguh terhadap **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama **MENGAWAL KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO**.



**BERKEADILAN**

Merupakan sebuah kondisi dimana **PEMBANGUNAN DAPAT DIRASAKAN OLEH SELURUH LAPISAN MASYARAKAT** Kota Probolinggo. “**Berkeadilan**” yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki **HAK YANG SAMA DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN**



**AMAN**

Merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. “**Rasa Aman**” merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat **KONDUSIFITAS KOTA PROBOLINGGO** yang aman tercipta



**SEJAHTERA**

Merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. “**Sejahtera**” kaitannya dengan kondisi dimana **TURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN**, hingga **TERJANGKAUNYA AKSES TERHADAP KEBUTUHAN POKOK DAN LAYANAN DASAR** di Kota Probolinggo.



**BERKELANJUTAN**

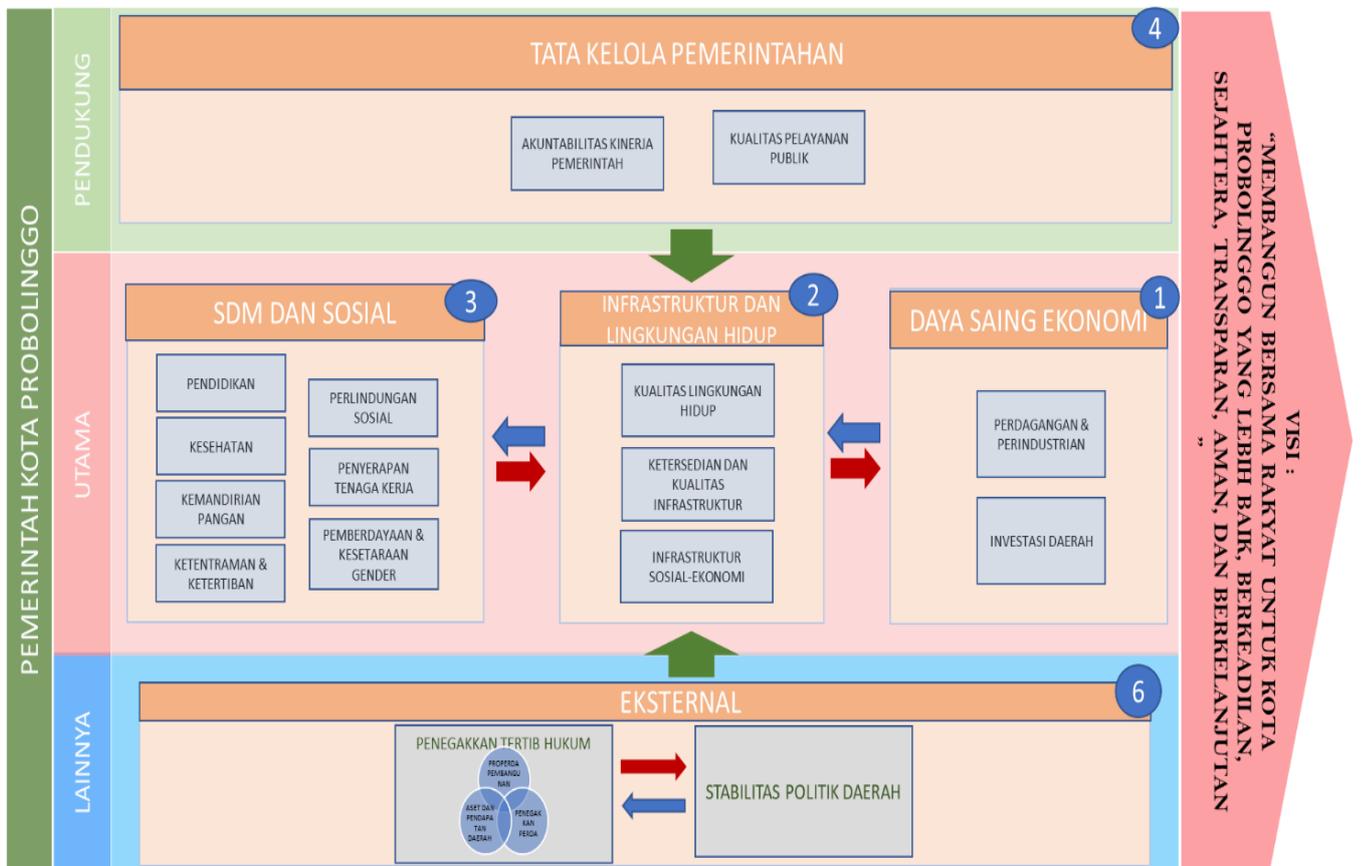
Merupakan Kondisi dimana aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian utama dan pengendali dalam operasionalisasi Pembangunan, dimana Pelaksanaan **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN UNTUK KELESTARIAN KOTA**

Berikut merupakan penjelasan detail mengenai Visi RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024:

<b>VISI:</b> <b>“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”</b>	
<b>POKOK-POKOK VISI</b>	<b>PENJABARAN VISI</b>
<b>Membangun Bersama Rakyat Kota Probolinggo yang Lebih Baik</b>	Penekanan <b>“Bersama Rakyat”</b> yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan <b>“Lebih Baik”</b> dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.
<b>Berkeadilan</b>	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang <b>“Berkeadilan”</b> memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.
<b>Sejahtera</b>	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang <b>“Sejahtera”</b> dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.
<b>Transparan</b>	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang <b>“Transparan”</b> dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.

<b>VISI:</b> <b>“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”</b>	
<b>POKOK-POKOK VISI</b>	<b>PENJABARAN VISI</b>
<b>Aman</b>	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang <b>“Aman”</b> dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta
<b>Berkelanjutan</b>	Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang <b>“Berkelanjutan”</b> dapat direpresentasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Namun juga dengan teguh menjunjung tinggi konsep <i>sustainable development</i> . Dimana apa yang kita bangun saat ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak

Sebagai upaya pemerintah daerah Kota Probolinggo dalam mencapai Visi atau cita-cita Kepala Daerah terpilih, maka merujuk terhadap amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Permenpan RB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi Pemerintah bahwa guna menjalankan Visi dan Misi maka instansi pemerintah harus menyusun peta proses bisnis. Hal tersebut bertujuan agar dalam pencapaian Visi dan Misi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga, berikut merupakan Peta Proses Bisnis dari pencapaian Visi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024:



Berdasarkan gambaran proses bisnis pencapaian Visi Kota Probolinggo diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara umum, 3 poin penting yang terepresentasikan melalui proses utama dalam mewujudkan Visi Kota Probolinggo adalah SDM dan Sosial, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Daya Saing Ekonomi. Sedangkan dalam proses pendukung Tata Kelola Pemerintah sebagai pondasi pencapaian Visi dan dalam Proses Lainnya Stabilitas Politik Daerah dan Penegakkan Hukum yang turut berpengaruh terhadap pencapaian Visi Kota Probolinggo.

## 5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan

upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan factor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kota Probolinggo tahun 2019-2024. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut.

Misi politik Kepala Daerah terpilih Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 terbagi menjadi 3, sebagai berikut:

- MISI 1 Memantapkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
- MISI 2 Membangun Potensi Daerah Menjadi Daya Tarik Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Didukung Infrastruktur Ramah Lingkungan
- MISI 3 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Profesional, Jujur Dan Bersih

Sejalan dengan Misi yang menjadi janji politik Kepala Daerah terpilih Kota Probolinggo, maka sebagaimana visi yang telah ditetapkan dengan mensinergikan platform politik dan teknokratik, berikut merupakan Misi Pembangunan Daerah pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, yang disesuaikan dengan pendekatan perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan.

**MISI 1 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial**

**MISI 2 Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas**

**MISI 3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

**MISI 4 Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik**

Dengan memperhatikan isu strategis Kota Probolinggo, berikut merupakan linieritas antara isu strategis dengan misi Kota Probolinggo tahun 2019-2024:

NO	ISU STRATEGIS	MISI
1	Produktifitas pertanian masih rendah	<b>MISI I:</b> Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
2	Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah masih belum optimal	
3	Iklim investasi daerah yang masih belum stabil	
4	Masih belum optimalnya pengembangan pariwisata kebudayaan dan kesenian daerah	
5	Penurunan tenaga kerja pada sektor informal pertanian dan manufaktur	
6	Masih belum optimalnya pengembangan wirausaha baru	
7	Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan yang meningkat	
8	Kapasitas produksi belum meningkat secara signifikan dan penurunan armada perikanan	
9	Daya saing Usaha mikro kecil masih belum optimal	
10	Masih belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pendidikan,	<b>MISI II:</b> Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas
11	Ketersediaan dan Distribusi Tenaga Pendidik yang masih kurang	
12	Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan	
13	Kurangnya tingkat ketersediaan dalam memenuhi kebutuhan pangan	
14	Penyerapan tenaga kerja yang meningkat	
15	Angka Kematian ibu dan anak masih tinggi	
16	Penurunan angka Kemiskinan belum optimal	
17	Peningkatan kualitas tenaga pengajar	
18	Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata	
19	Peningkatan rasa aman masyarakat	
20	Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak	
21	Indeks Resiko Bencana Masih Tinggi	
22	Peningkatan daya beli masyarakat	
23	Penurunan angka penderita wabah penyakit dan TBC di masyarakat	
24	Indeks Pendidikan sudah tinggi	
25	Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal	
26	Masih Rendahnya Keadilan dan Kesetaraan gender	
27	Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan Keluarga	

NO	ISU STRATEGIS	MISI	
	berencana masih rendah		
28	Potensi Konflik Sosial Dapat Ditangani Dengan Baik		
29	Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi publik	<b>MISI III:</b> Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
30	Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih belum optimal		
31	Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi		
32	Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau belum optimal		
33	Peningkatan produktivitas sektor transportasi dan pergudangan		
34	Manajemen Pengelolaan Sampah Masih Belum Optimal		
35	Peningkatan pengendalian dampak perubahan iklim dan peningkatan penanganan energi terbarukan		
36	Masih belum optimalnya pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan sumber daya lingkungan		
37	upaya pemaksimalan sumber-sumber pendapatan daerah masih belum optimal,		<b>MISI IV:</b> Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik
38	Potensi peningkatan pendapatan pajak daerah		
39	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah		
40	Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan SOP dan SPM masih belum optimal		
41	Masih belum Optimalnya pengelolaan manajemen sistem teknologi, informasi dan komunikasi daerah		
42	Peningkatan penerapan e-gov pada perangkat daerah		
43	Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan dan Implementasi pembangunan masih rendah		
44	Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan masih rendah		

Gambaran diatas merupakan wujud bahwa terdapat linieritas isu strategis terhadap misi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan bahwa disusunnya misi memperhatikan isu dan permasalahan daerah Kota Probolinggo.

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024:

## **MISI I PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING BERBASIS SEKTOR POTENSIAL**

Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan, dan perindustrian

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 :



## **MISI II SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS**

Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya

yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah



mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 :

### **MISI III INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**

Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks kualitas lingkungan hidup.

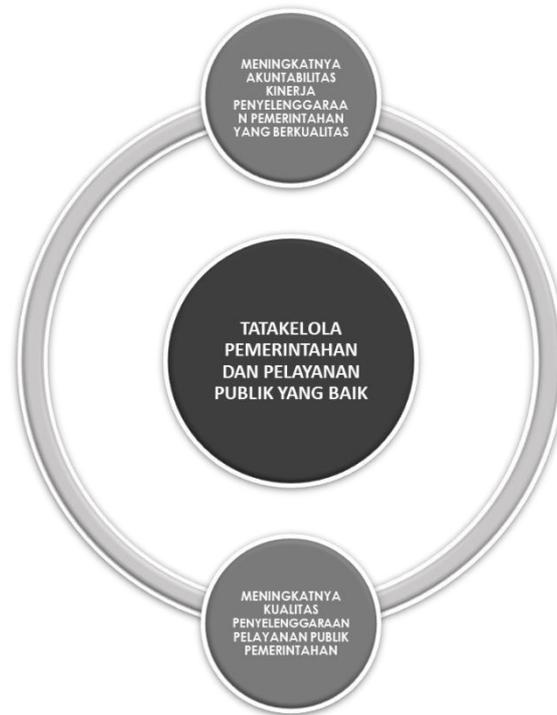
Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 :



#### **MISI IV TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK**

Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya, profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan *support system* yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo. Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melali sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 :



### 5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk terhadap landasan ideal normative dalam penyusunan RPJMD yakni Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan RPJMD adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kota Probolinggo secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, sarat utama Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah *measurable* dan *tangible*.

*Measurable* dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah dalam perumusannya, Tujuan dan Sasaran RPJMD harus

dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilevel Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang melekat pada lebel Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan *Tangible* yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik nyata dalam representasi keberhasilan pencapaian IKU dan IKD maupun nyata dalam kegagalan pencapaian IKU dan IKD.

Berikut merupakan rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024:

### **5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi I**

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni **“Pembangunan Ekonomi Yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
- 2) Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:

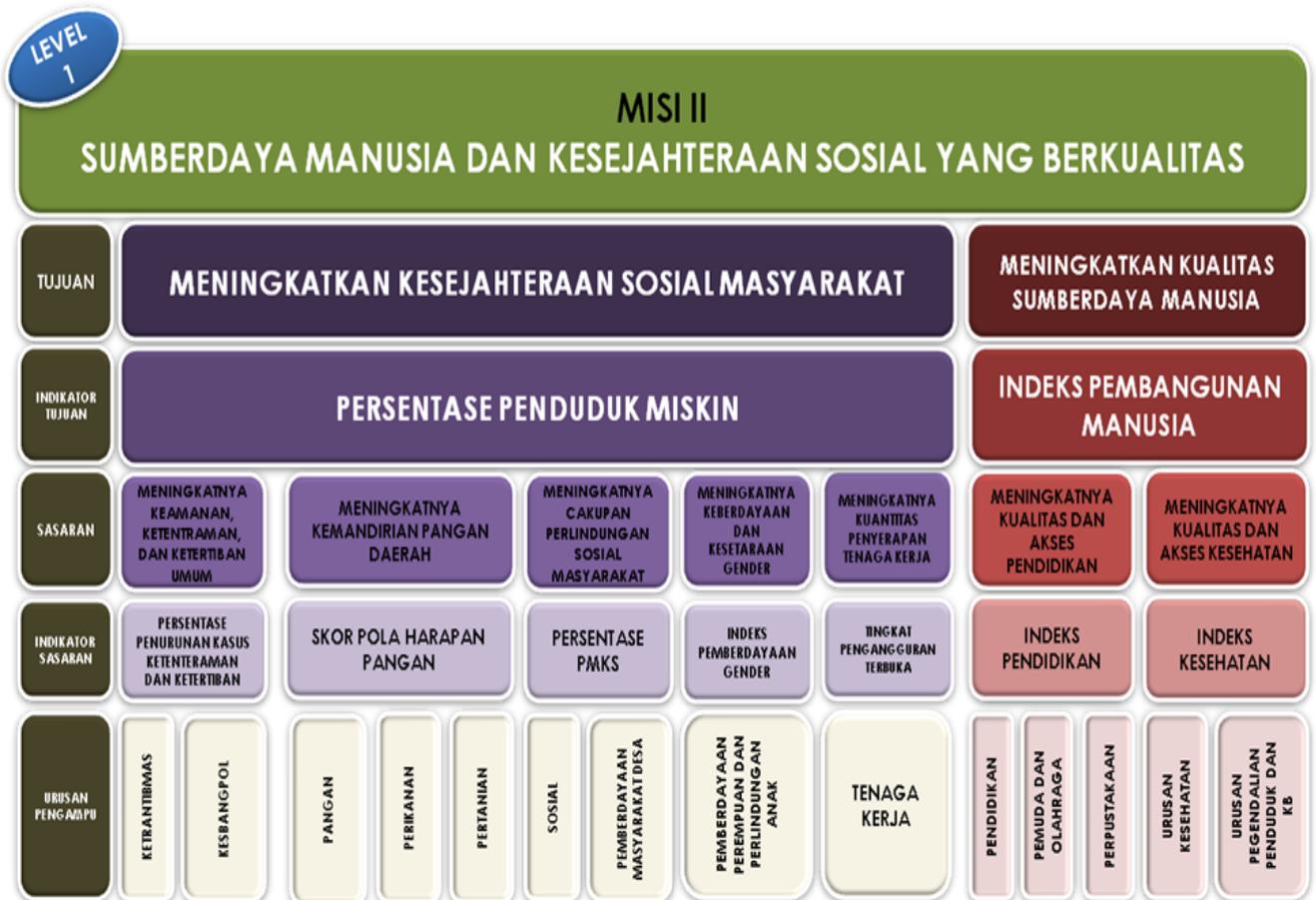


### 5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni **“Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
  - 1) Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja
  - 2) Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat
  - 3) Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah
  - 4) Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum
  - 5) Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender
- b. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
  - 1) Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
  - 2) Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



### 5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi III

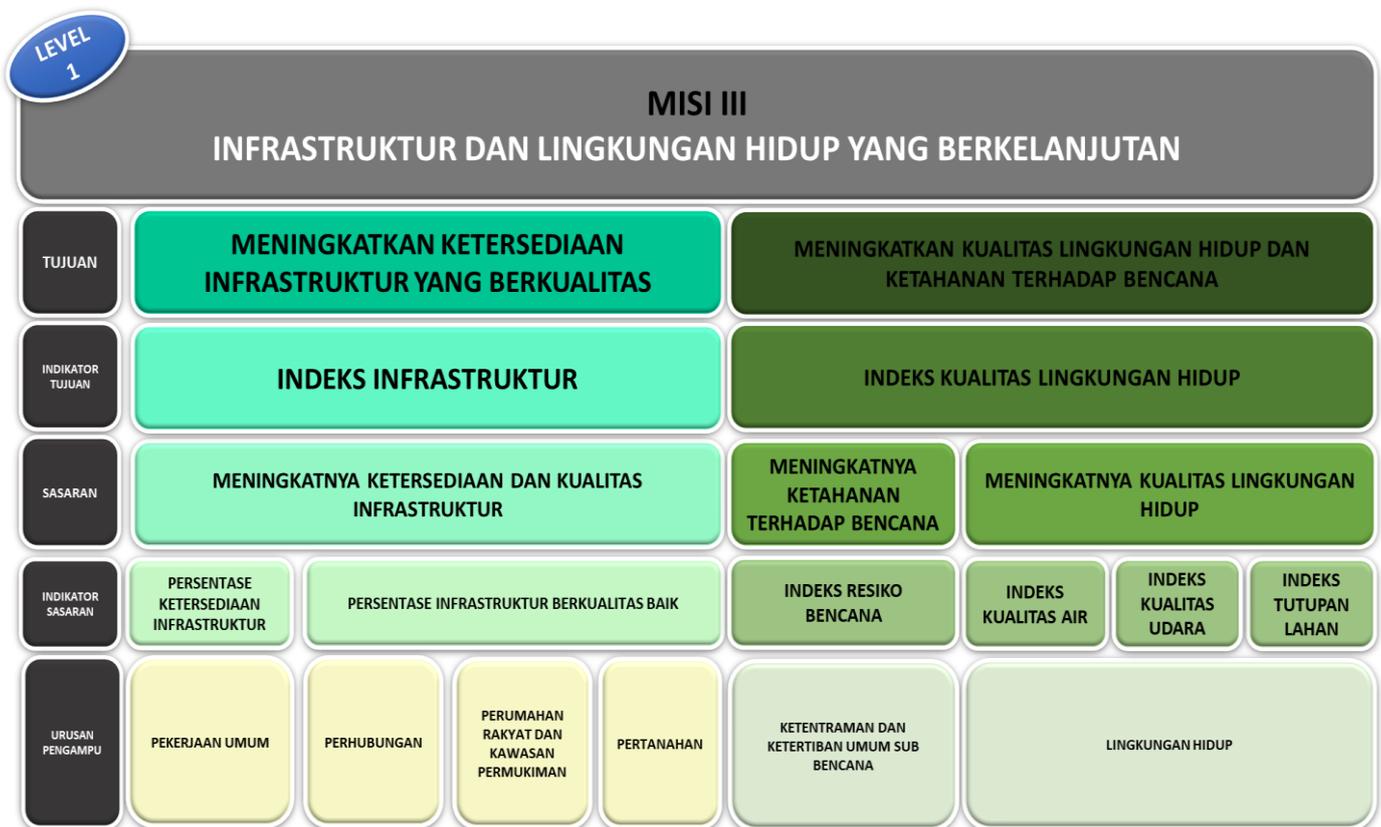
Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni “**Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
  - 1) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur

b. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- 2) Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



### 5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni **“Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas
- 2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi IV RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Berikut merupakan linieritas antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2021:

**Tabel 5. 1 VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024**

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					2018	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>VISI</b>													
<b>"BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN"</b>													
1	Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,94	5,99	6,02	6,05	6,07	6,1	6,1		
		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	-12	0,5	0,7	0,9	1	1,2	1,2	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
												Koperasi dan UMKM	DKUPP
		Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	%	10,06	10,46	10,86	11,26	11,66	12,06	12,06	Perdagangan	DKUPP
												Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
												Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					2018	2020	2021	2022	2023	2024			
												Koperasi dan UMKM	DKUPP
			Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	%	7,74	8,04	8,34	8,64	8,94	9,24	9,24	Perindustrian	DKUPP
												Pertanian	Disperta, KP dan Perikanan
												Perikanan	
2	Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	7,2	7,1	7,05	7	6,95	6,9	6,9		
		Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,64	3,47	3,3	3,13	2,96	2,79	2,79	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	%	31,17%	31,03%	29,43%	27,79%	26,63%	24,85%	24,85%	Sosial	Dinsos PP dan PA Kecamatan
												Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Skor Pola Harapan Pangan	Skor	90,15	91,1	91,4	91,7	92	92,3	92,3	Pangan	Disperta, KP dan Perikanan
										Pertanian			
												Perikanan	
		Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	%	2	2	2	2	2	2	10	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
												Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					2018	2020	2021	2022	2023	2024			
		Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67,76	68,55	68,95	69,35	69,75	70,15	70,15	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Dinsos, PP dan PA
		<b>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Indeks	<b>72,53</b>	<b>73,59</b>	<b>74,09</b>	<b>74,59</b>	<b>75,09</b>	<b>75,59</b>	<b>75,59</b>		
		Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,66	0,69	0,69	0,7	0,71	0,72	0,72	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
												Perpustakaan	Disperpusip
		Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,77	0,77	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79	Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB RSUD
												Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					2018	2020	2021	2022	2023	2024			
3	Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	Indeks	69,59	71,28	72,46	73,69	75,74	77,09	77,09		
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	%	69,21	70,45	71,38	72,59	75,04	75,78	75,78	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR, Perkim
			Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	%	69,96	72,1	73,55	74,8	76,45	78,4	78,4	Perhubungan	Dinas Perhubungan
												Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas PUPR, Perkim
												Pertanahan	
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,51	59,11	59,6	59,98	60,3	60,65	60,65		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	50,8	51	51,5	51,8	52	52	Lingkungan Hidup	DLH
Indeks Kualitas Udara	Indeks		84,77	84,9	85	85,1	85,2	85,5	85,5				
Indeks Tutupan Lahan	Indeks		40,2	46	47	47,5	48	48,5	48,5				

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					2018	2020	2021	2022	2023	2024			
		Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	148	147	145	143	140	138	138	Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sub Bencana	BPBD
4	Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik	<b>Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Indeks	<b>60,71</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>81</b>		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai Sakip	Skor	70,49	80	82	83	84	85	85	Unsur Staf	Sekretariat Daerah
												Pengawasan	Inspektorat
												Perencanaan	Bappeda Litbang
			Penelitian dan Pengembangan										
		Nilai LPPD	Skor	N/A	3,25	3,25	3,26	3,26	3,27	3,27	Unsur Staf	Sekretariat Daerah	
											Pengawasan	Inspektorat	
											Kearsipan	Disperpusip	
		Indeks SPBE	Indeks	2,53	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	
											Statistik		
Persandian													
Opini BPK Terhadap LKPD	Peringkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan	BPPKAD			
									Pengawasan	Inspektorat			

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					2018	2020	2021	2022	2023	2024			
			Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	62	63	63,5	64	64,5	65	65	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	BKPSDM
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat	Indeks	81,5	82	82,25	82,5	82,75	83	83	Unsur Staf	Sekretariat Daerah
	Administrasi Kependudukan											Dispendukcapil	
	Penanaman Modal											Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	
	Fungsi Koordinasi											Kecamatan	
	Kesehatan											RSUD	
												Dinas Kesehatan, PP dan KB	
	Unsur Staf	Sekretariat DPRD											

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan proses *consecutive* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kota Probolinggo. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktifitas FGD, *scoring*, analisis

*balanced scorecard*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Probolinggo.

## **6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advise aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat

inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

**Tabel 6. 1 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1**

<b>MISI 1: Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial</b>			
<b>ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Nilai Investasi Daerah</b>			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimilikinya beberapa aset penunjang pengembangan sektor pertanian</li> <li>• Dimilikinya aset penunjang aktifitas perdagangan</li> </ul>	<b>Build on Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Mall Pelayanan Publik yang mendukung kemudahan perijinan</li> <li>• Pengoptimalan Sistem OSS (Online Single Submisttion)</li> <li>• Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan koperasi</li> <li>• Peningkatan Volume Perdagangan Daerah</li> </ul>
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sektor pertanian masih belum optimal</li> <li>• Belum terkelolanya aset-aset strategis daerah dengan baik</li> <li>• Pengelolaan sektor pertanian masih belum optimal</li> <li>• Belum terkelolanya aset-aset strategis daerah dengan baik</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan konsep good farming practice dalam mengembangkan sektor pertanian</li> <li>• Pemetaan aset strategis pemerintah berdasarkan Jenis, lokasi dan potensi pemanfaatannya</li> </ul>
<b>Oportunities</b>	-	<b>Exploit Opportunities</b>	-
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan nilai investasi pada tahun 2015 dan 2017</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjagaan iklim investasi daerah</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah</b></li> <li>• <b>Upaya Pemaksimalan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Masih Belum Optimal</b></li> </ul>	<b>Strategi</b>	<b>Memastikan proses pengurusan izin berusaha mudah dan sistem pemungutan pajak dapat berjalan efisien, dan menyeluruh terhadap semua objek pajak</b>
<b>ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri</b>			
<b>Strenghts</b>		<b>Build on Strengths</b>	
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas fiskal kota probolinggo lebih rendah dibandingkan daerah sekitar</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan sumber-</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan efektifitas sistem pemungutan pajak</li> <li>• Peningkatan efisiensi pengalokasian belanja berdasarkan sumber-pendapatan Meningkatkan PAD</li> </ul>

**MISI 1: Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>sumber pendanaan lain</li> <li>Rasio ketergantungan terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi</li> <li>Rasio pajak semakin tinggi</li> <li>Pendanaan pajak terhadap belanja meningkat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penekanan Belanja Yang Tidak Diperlukan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran</li> <li>Pencarian Alternatif-Alternatif Pendanaan Lain Diluar Pajak Daerah</li> <li>Inisiasi Pembentukan PD Pasar</li> <li>Pengoptimalan City Branding</li> <li>Pelestarian Budaya Daerah dan Peningkatan Potensi Pariwisata</li> </ul>
<b>Oportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi objek pajak masih besar/banyak</li> <li>sektor transportasi dan pergudangan masuk dalam 3 besar pembentuk struktur ekonomi</li> <li>pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor perdagangan yang merupakan potensi keunggulan daerah</li> <li>Nilai Produksi Perikanan Budidaya tahun 2014 - 2017 mengalami peningkatan</li> </ul>	<b>Exploit Opportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan untuk perluasan objek pajak dan memberikan keringanan pajak/amnesti pajak</li> <li>Inisiasi Pembentukan BUMD Pendukung Pelabuhan</li> <li>Penggunaan aset-aset penunjang pen gembangan sektor pertanian</li> <li>Pengoptimalan penggunaan aset-aset penunjang pen gembangan sektor perdagangan</li> <li>Fasilitasi sarana prasarana penunjang aktifitas perdagangan, serta menjaga iklim usaha supaya tetap sehat dan kondusif</li> <li>Penjagaan stabilitas harga pada komoditas perikanan budidaya</li> <li>Pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan wirausaha baru</li> </ul>
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri mengalami penurunan</li> <li>Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB per kapita mengalami penurunan</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Pasar Agro yang Terintegrasi Sebagai Sarana Perdagangan Regional untuk Hasil Pertanian Kota Probolinggo</li> <li>Peningkatan daya saing usaha mikro dan industry kecil serta menengah</li> <li>Pemastian ketersediaan tenaga kerja di bidang manufaktur yang berkualitas dan memastikan jalur distribusi hasil industri terhadap pasar bebas hambatan.</li> <li>Peningkatan daya saing industri kecil</li> </ul>

**MISI 1: Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan konsep good farming practice dalam mengembangkan sektor pertanian</li> <li>• Memastikan kelancaran arus transportasi antara pusat kegiatan Produksi, pergudangan menuju pada pusat kegiatan ekonomi (pusat jual beli/Pasar)</li> <li>• Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan pertanian dan perikanan</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Produksi pertanian masih rendah</i></li> <li>• <i>Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah masih belum optimal</i></li> <li>• <i>Peningkatan produktivitas sektor transportasi dan pergudangan</i></li> <li>• <i>Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat</i></li> <li>• <i>Kapasitas produksi belum meningkat secara signifikan dan penurunan armada perikanan</i></li> </ul>	<b>Strategi</b>	<b>Memastikan semua infrastruktur penunjang rantai dan jalur distribusi dari sektor produksi hingga pasar tersedia dengan kualitas baik/sangat baik (untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat)</b>

**Tabel 6. 2 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2**

MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pada indeks pendidikan</li> <li>• Rata-rata lama sekolah penduduk terus meningkat</li> <li>• Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat meningkat</li> <li>• Partisipasi sekolah masyarakat tinggi</li> <li>• Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat</li> <li>• Standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika tinggi</li> <li>• Angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun meningkat</li> <li>• Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik meningkat</li> </ul>	<b>Build on Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan serta Peningkatan rata-rata lama sekolah dan memperbaiki sistem pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan</li> </ul>
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) belum menunjukkan peningkatan</li> <li>• Dana BOS masih belum terkelola dengan baik</li> <li>• Kurangnya sarana-prasarana pendidikan</li> <li>• Sebanyak 3,73% SMP/MTs belum berakreditasi minimal B</li> <li>• kurangnya tenaga guru</li> <li>• Belum idealnya distribusi guru</li> <li>• Menurunnya minat baca masyarakat</li> <li>• Kurang updatenya koleksi buku di perpustakaan</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi pembatasan jumlah siswa yang bersekolah di Kota Proolinggo dari luar Kota Probolinggo</li> <li>• Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS, dan mengarahkannya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>• Peningkatan pemerataan kualitas dan akses proses belajar mengajar di Kota Probolinggo</li> <li>• Peningkatan intensitas kegiatan perpustakaan yang meningkatkan minat baca masyarakat</li> <li>• Pengembangan pendidikan masyarakat dan inklusif.</li> </ul>
<b>Oportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemerintah pusat terkait regulasi 20% anggaran pendidikan daerah dari APBD</li> <li>• Banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta yang membuka cabang atau kelas jauh di beberapa daerah</li> </ul>	<b>Exploit Opportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas aktifitas pemuda dan OR</li> <li>• Sinergi terhadap perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk berinvestasi pembangunan cabang dan kampus baru di Kota Probolinggo dan jaminan kemudahan pemuda/I probolinggo untuk berkuliah</li> </ul>

<b>MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas</b>			
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya intervensi pemerintah daerah terhadap pendidikan menengah atas yang masuk kedalam urusan pemerintah provinsi</li> <li>• Inkonsistensi sistem pendidikan tinggi, khususnya transisi pergantian menteri di pemerintah pusat</li> <li>• Data nasional mengungkapkan tingginya pengangguran khususnya untuk lulusan SMK</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan akses pelajar di Kota Probolinggo, khususnya terhadap akses kerja untuk jenjang SMK</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<b>Akses Pendidikan yang sudah luas belum berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang belum merata</b>	<b>Strategi</b>	<b>Sinergitas Stakeholder pengelola Pendidikan dalam upaya pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan inklusif</b>
<b>Analisis Swot Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan</b>			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insiden Tuberkulosis (ITB) menunjukkan penurunan</li> <li>• Kejadian malaria sudah tidak ada</li> <li>• Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sudah baik</li> <li>• Kekurangan gizi (underweight) pada anak balita sudah teratasi</li> <li>• ASI eksklusif pada bayi terpenuhi</li> <li>• Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan meningkat dan merata</li> </ul>	<b>Build On Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan peran masyarakat dalam tindakan preventif penyakit sedini mungkin</li> </ul>
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 71,81% penduduk masih memiliki prevalensi tekanan darah tinggi</li> <li>• Sebanyak 1,4% populasi dewasa masih memiliki prevalensi HIV</li> <li>• Prevalensi anemia pada ibu hamil masih ada</li> <li>• Tingginya angka kematian bayi dan Ibu hamil</li> <li>• Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita masih mengalami kenaikan</li> <li>• Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak relatif naik</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara merata serta menyediakan Rumah Slinggah Rujukan untuk Pasien Miskin di Malang (Rujukan RSUD Saiful Anwar) dan Surabaya (Rujukan RSUD dr. Sutomo)</li> <li>• Peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo</li> <li>• Penurunan TFR dan meningkatkan kualitas keluarga</li> <li>• Peningkatan cakupan keikutsertaan Peserta KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)</li> </ul>

<b>MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum teraturnya pemeriksaan rutin terhadap ibu hamil</li> <li>• Sebanyak 13,89% penduduk belum tercakupkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> <li>• Masih terdapat sebanyak 59,70% penduduk yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</li> </ul>		
<b>Oportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen regulasi pemerintah pusat terkait anggaran Kesehatan 10% dari APBD</li> <li>• Komitmen Kepala Daerah terpilih untuk membangun Rumah Sakit Rujukan di Kota Probolinggo</li> </ul>	<b>Exploit Opportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Baru dan Peningkatan Kelas RSUD Kota Probolinggo</li> </ul>
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya kejelasan hukum mengenai pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah yang berbentuk RSUD</li> <li>• Tidak jelasnya pengelolaan BPJS</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Puskesmas Wonoasih menjadi Rumah Sakit Kelas D dan Pembangunan Puskesmas Baru</li> <li>• Pengembangan kerjasama dan kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<b><i>Pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan dan Kota Probolinggo secara umum</i></b>	<b>Strategi</b>	<b><i>Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Akses dan cakupan layanan kesehatan Kota Probolinggo secara maksimal</i></b>
<b>ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja</b>			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sudah baik</li> <li>• Upah rata-rata perjam pekerja semakin tinggi</li> <li>• Persentase Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengalami kenaikan selama tahun 2014 hingga 2016.</li> <li>• Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sudah baik</li> </ul>	<b>Build on Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Prgram Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan Memperluas Cakupannya</li> <li>• Menjamin Proporsi Upah yang Proporsional dan Tepat Sasaran</li> <li>• Peningkatan dan Mengoptimalkan Kualitas Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja</li> <li>• Peningkatan Kepesertaan Prgram Jaminan Bidang Sosial</li> </ul>
<b>Weakness</b>	-	<b>Overcome Weakness</b>	-

<b>MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas</b>			
<b>Oportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pengangguran Terbuka selama tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan.</li> <li>Angka partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan selama tahun 2014 hingga 2017.</li> <li>Tingkat pengangguran terbuka semakin kecil</li> <li>Ketersediaan tenaga kerja formal sudah baik</li> <li>Lapangan kerja informal sektor non pertanian meningkat</li> <li>Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja semakin tinggi</li> </ul>	<b>Exploit Opportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain seara merata</li> <li>Optimalisasi laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk efektivitas pembangunan</li> </ul>
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian turun sebesar 2,57%</li> <li>Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor manufaktur menurun setiap tahun</li> <li>Tingkat setengah pengangguran meningkat menjadi 5,02% (2015)</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan untuk Peningkatan Skill Serta Re-orientasi Terhadap Sektor Strategis dan Potensial melalui Balai Latihan Kerja (BLK)</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<b><i>Penurunan tenaga kerja pada sektor informal pertanian dan manufaktur</i></b>	<b>Strategi</b>	<b><i>Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja serta optimalisasi sektor-sektor strategis Kota Probolinggo dalam penyediaan lapangan pekerjaan</i></b>
<b>ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat</b>			
<b>Strenghts</b>	-	<b>Build on Strengths</b>	-
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan PMKS Yang Masih Belum Mencakup Seluruh Wilayah Di Kecamatan.</li> <li>Tidak Efektifnya Treatment Yang Diberikan Terhadap PMKS</li> <li>Angka Kemiskinan Dalam Batas 7-8%</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Data base kemiskinan yang akurat</li> <li>Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS</li> <li>Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</li> </ul>

MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas			
<b>Oportunities</b>	-	<b>Exploit Opportunities</b>	-
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial) Mengalami Penurunan Menjadi 47,20%</li> <li>• Sebanyak 910 Keluarga Yang Masih Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan</li> <li>• Masih Terdapat 20,14% Penduduk Yang Hidup Di Bawah 50 Persen Median Pendapatan</li> <li>• Garis Kemiskinan Semakin Meningkat, Namun Indeks Kemiskinan Mengalami Penurunan Setiap Tahunnya</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo sosial</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penurunan Angka Kemiskinan Belum Optimal</b></li> <li>• <b>Penanganan Dan Pembinaan PMKS Masih Belum Optimal</b></li> <li>• <b>Pengeluaran Untuk Layanan Pokok Menurun</b></li> </ul>	<b>Strategi</b>	<b>Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS dan Penekanan Kemiskinan</b>
Analisis Swot Sasaran: Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas konsumsi pangan yang diindikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih kurang dari capaian sebesar 35,31%</li> </ul>	<b>Build On Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan</li> </ul>
<b>Weakness</b>	-	<b>Overcome Weakness</b>	-
<b>Oportunities</b>	-	<b>Exploit Opportunities</b>	-
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penurunan luas lahan panen setiap tahun</li> <li>• Alih fungsi lahan Pertanian</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan rencana induk pengembangan pertanian dengan fokus untuk menemukan alternatif metode tepat guna untuk solusi jangka pendek dan</li> </ul>

<b>MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas</b>			
			teknologi pertanian padat modal <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimalisasi alih fungsi lahan pertanian</li> <li>Peningkatan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan.</li> <li>Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<b><i>Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat masih rendah</i></b>	<b>Strategi</b>	<b><i>Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian dan penguatan sektor strategis Kota Probolinggo</i></b>
<b>ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum</b>			
<b>Strenghts</b>	-	<b>Build on Strengths</b>	-
<b>Weakness</b>	-	<b>Overcome Weakness</b>	-
<b>Oportunities</b>	-	<b>Exploit Opportunities</b>	-
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus kejahatan pembunuhan telah menurun</li> <li>Kematian disebabkan konflik tidak terjadi</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan wawasan kebangsaan disemua elemen masyarakat</li> <li>Pembentukan kewaspadaan dini di masyarakat sehingga memudahkan control terhadap munculnya potensi konflik sosial di masyarakat</li> <li>Peningkatan pengawasan terhadap Perda dan Perkada</li> <li>Peningkatan keamanan dan ketertiban umum</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>Krisis trust terhadap rasa aman masyarakat</i></b></li> </ul>	<b>Strategi</b>	<b><i>Meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi vertical terkait dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat</i></b>
<b>ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender</b>			
<b>Strenghts</b>	-	<b>Build on</b>	-

**MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas**

<b>MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas</b>			
		<b>Strengths</b>	
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang optimalnya peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Masih terdapat 50% korban kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan komprehensif</li> <li>• kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Masih terdapat beberapa SKPD dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan belum melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).</li> <li>• Keterwakilan perempuan di DPRD masih tetap, yaitu sebanyak 5 orang.</li> <li>• Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif mengalami penurunan menjadi 14,29%</li> <li>• Keterwakilan perempuan di DPRD masih tetap, yaitu sebanyak 5 orang</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Penekanan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan komprehensif</li> <li>• Penguatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.</li> <li>• Proporsionalisasi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan.</li> </ul>
<b>Oportunities</b>	-	<b>Exploit Opportunities</b>	-
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masih rendahnya modal sosial masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Masih terdapat 20% perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan</li> <li>• Masih terdapat 0,17% perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Modal Sosial masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Proporsionalisasi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan.</li> </ul>

**MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat 0,57% rumah tangga yang mengalami kejadian hukuman fisik dan/atau agresi psikologis pada anak (umur 1 - 17 tahun) oleh pengasuh</li> <li>• Sebanyak 0,86% perempuan dan laki-laki muda (umur 18-24 tahun) dan sebelum umur 18 tahun mengalami kekerasan seksual</li> <li>• Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak</li> <li>• Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial masih sebesar 17,24%</li> <li>• Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan masih mengalami pertumbuhan sebesar 0,19%</li> <li>• Tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintahan, legislatif, dan kelompok masyarakat masih rendah</li> </ul>		
<b>Masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak</b></li> <li>• <b>Masih rendahnya Pengarustamaan Gender</b></li> </ul>	<b>Strategi</b>	<p><b>Meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan</b></p>

**Tabel 6. 3 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3**

MISI 3: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama tahun 2016-2017 Ketersediaan Halte pada jalur trayek Angkutan Umum mengalami peningkatan.</li> <li>Selama tahun 2014-2017 Jumlah pemasangan rambu-rambu dan Ketersediaan fasilitas pelengkap jalan (rambu marka guardrail,dll) pada jaringan jalan kota mengalami peningkatan.</li> <li>Selama tahun 2014-2017 Jumlah angkutan darat ( Unit), Jumlah uji KIR angkutan umum dan Kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan.</li> <li>Dermaga penyeberangan tersedia</li> </ul>	<b>Build on Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah</li> <li>Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah</li> <li>Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian</li> </ul>
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerataan pembangunan infrastruktur masih kurang</li> <li>Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau belum optimal</li> <li>Tidak terlaksanakannya Kegiatan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah</li> <li>Sebanyak 42,06% rumah tangga belum memiliki akses sumber air minum layak dan berkelanjutan</li> <li>Terdapat 42,06% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak</li> <li>Masih terdapat 42,06% penduduk yang belum bisa mengakses layanan air minum aman dan berkelanjutan</li> <li>Masih terdapat kekurangan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri sebanyak 113,6 m3/ detik</li> <li>Penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air masih sebesar 80,10%</li> <li>Sebanyak 14,19% rumah tangga belum memiliki akses</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi</li> <li>Penataan dan Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>Penataan dan pengembangan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah</li> <li>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial</li> <li>Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan</li> <li>Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan</li> </ul>

<b>MISI 3: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</b>			
	<p>terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 14,19% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</li> <li>• Rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja masih sebanyak 459 atau lebih sedikit dari tahun sebelumnya (2016)</li> </ul>		
<b>Oportunities</b>	-	<b>Exploit Opportunities</b>	-
<b>Threats</b>	-	<b>Block Threats</b>	-
<b>Masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih belum optimal</b></li> <li>• <b>Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat</b></li> </ul>	<b>Strategi</b>	<b>Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan serta mendorong kerjasama penyediaan infrastruktur berskala regional</b>
<b>ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2017 terdapat peningkatan persentase tutupan mangrove</li> </ul>	<b>Build on Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan upaya konservasi kawasan lindung</li> </ul>
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001</li> <li>• Masih terdapat produk yang tidak ramah lingkungan dan produk ramah lingkungan yang belum teregister</li> <li>• Proporsi tutupan lahan mengalami penurunan sebesar 1,69%</li> <li>• Belum tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan pemanfaatan dan akses sumber daya genetik secara adil dan merata</li> <li>• Masih kurangnya ketersediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati</li> <li>• Penataan dan Pemeliharaan Taman belum optimal</li> <li>• Persentase sampah yang tertangani masih kurang sebesar 4,86% dari target nasional</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan partisipasi masyarakat</li> <li>• Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan</li> </ul>

<b>MISI 3: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah plastik dengan melibatkan masyarakat masih kurang</li> </ul>		
<b>Oportunities</b>	-	<b>Exploit Opportunities</b>	-
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian dampak perubahan iklim dan energi terbaharukan masih rendah</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penurunan angka indeks tutupan lahan Kota Probolinggo</b></li> <li>• <b>Resiko pencemaran air karena limbah industri masih sangat tinggi</b></li> </ul>	<b>Strategi</b>	<b>Meningkatkan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berbasis masyarakat.</b>
<b>ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana</b>			
<b>Strenghts</b>	Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana semakin meningkat	<b>Build on Strengths</b>	Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) masih belum mencapai target sebesar 30%</li> <li>• Belum tersedianya infrastruktur peringatan bencana</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana</li> <li>• Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan</li> </ul>
<b>Oportunities</b>	-	<b>Exploit Opportunities</b>	-
<b>Threats</b>	-	<b>Block Threats</b>	-
<b>Masalah</b>	<b>Masih rendahnya angka Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Probolinggo</b>	<b>Strategi</b>	<b>Meningkatkan pengelolaan kebencanaan</b>

**Tabel 6. 4 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 4**

MISI 4: Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah</li> </ul>	<b>Build on Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</li> </ul>
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum optimalnya PERANGKAT DAERAH dalam penyusunan LPPD</li> <li>• Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan masih rendah</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan LPPD</li> <li>• sinergitas perencanaan dan penganggaran melalui integrasi pemanfaatan teknologi</li> <li>• Peningkatan sumber pendanaan Non-APBD melalui CSR dan mekanisme lainnya.</li> <li>• Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP</li> <li>• Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara serta penempatan sesuai kompetensi untuk mendukung profesionalitas aparatur</li> <li>• Peningkatan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>• Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi</li> <li>• Perwujudan Kota Probolinggo sebagai Smart City melalui penerapan e-gov dalam segala bidang di perangkat daerah</li> <li>• Peningkatan manajemen kearsipan dengan didukung SDM yang berkualitas</li> <li>• Pembangunan Block Office</li> </ul>
<b>Oportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemerintah pusat dalam reformasi birokrasi</li> <li>• Pemerintah pusat memberikan intensif dana pada daerah yang mendapatkan nilai sakiip terbaik dan anugrah pangripta.</li> </ul>	<b>Exploit Opportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan Reformasi Birokras</li> <li>• Peningkatan penyelenggaran one data statistik daerah yang berkualitas</li> <li>• Peningkatan penyelenggaraan persandian daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintah</li> </ul>

MISI 4: Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik			
			daerah
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemanfaatan program/kegiatan yang beririsan dengan agenda provinsi</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>harmonisasi antara daerah dan provinsi melalui kerjasama yang intensif</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan belum terorganisir dan tersistem dengan baik</b>	<b>Strategi</b>	<b>Mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian serta mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kelembagaan (SDM), sistem dan pengelolaan keuangan daerah.</b>
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan			
<b>Strenghts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan penerapan e-gov pada perangkat daerah</li> </ul>	<b>Build on Strengths</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan</li> </ul>
<b>Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan SOP dan SPM masih belum optimal</li> <li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih belum memiliki sertifikat</li> </ul>	<b>Overcome Weakness</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayan Publik Kota Probolinggo</li> <li>Peningkatan fasilitas pelayanan publik</li> <li>Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik</li> <li>Peningkatan Profesionalisme aparatur pelayanan publik</li> <li></li> </ul>
<b>Oportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penduduk yang memiliki telepon genggam semakin banyak</li> </ul>	<b>Exploit Opportunities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik</li> <li>Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan kinerja Lembaga Legislatif</li> </ul>
<b>Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan dan Sistem Informasi dan Komunikasi di Kota Probolingo Masih kurang mutakhir untuk mengakomodir tuntutan pembangunan modern saat ini</li> </ul>	<b>Block Threats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah</li> </ul>
<b>Masalah</b>	<b>Masih belum Optimalnya pengelolaan manajemen sistem teknonologi, informasi dan komunikasi daerah</b>	<b>Strategi</b>	<b>Memantapkan upaya pengembangan tata laksana pelayanan publik</b>

## **6.2 ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah

ditetapkan. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk table berikut ini:

**Tabel 6. 5 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo**

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
<b>MISI 1: Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial</b>		
Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing		
<b>Meningkatnya Nilai Investasi Daerah</b>	Memastikan proses pengurusan izin berusaha mudah dan sistem pemungutan pajak dapat berjalan efisien, dan menyeluruh terhadap semua objek pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Mall Pelayanan Publik yang mendukung kemudahan perijinan</li> <li>2. Pengoptimalan Sistem OSS (Online Single Submition)</li> <li>3. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan koperasi</li> <li>4. Peningkatan Volume Perdagangan Daerah</li> <li>5. Pemetaan aset strategis pemerintah berdasarkan Jenis, lokasi dan potensi pemanfaatannya</li> <li>6. Penjagaan iklim investasi daerah</li> </ol>
<b>Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri</b>	Memastikan semua infrastruktur penunjang rantai dan jalur distribusi dari sektor produksi hingga pasar tersedia dengan kualitas baik/sangat baik (untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penekanan Belanja Yang Tidak Diperlukan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran</li> <li>2. Peningkatan efisiensi pengalokasian belanja berdasarkan sumber-pendapatan Meningkatkan PAD</li> <li>3. Pencarian Alternatif-Alternatif Pendanaan Lain Diluar Pajak Daerah</li> <li>4. Inisiasi Pembentukan PD Pasar</li> <li>5. Memastikan efektifitas sistem pemungutan pajak</li> <li>6. Pengoptimalan City Branding</li> <li>7. Pelestarian Budaya Daerah dan Peningkatan Potensi Pariwisata</li> <li>8. Pendataan untuk perluasan objek pajak dan memberikan keringanan pajak/amnesti pajak</li> <li>9. Inisiasi Pembentukan BUMD Pendukung Pelabuhan</li> <li>10. Penggunaan aset-aset penunjang pen gembangan sektor pertanian</li> </ol>

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pengoptimalan penggunaan aset-aset penunjang pen gembangan sektor perdagangan</li> <li>12. Fasilitasi sarana prasarana penunjang aktifitas perdagangan, serta menjaga iklim usaha supaya tetap sehat dan kondusif</li> <li>13. Pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan wirausaha baru</li> <li>14. Pembangunan Pasar Agro yang Terintegrasi Sebagai Sarana Perdagangan Regional untuk Hasil Pertanian Kota Probolinggo</li> <li>15. Peningkatan daya saing usaha mikro dan industry kecil serta menengah</li> <li>16. Penumbuhkembangan produk unggulan daerah di masing-masing kelurahan</li> <li>17. Pemastian ketersediaan tenaga kerja di bidang manufaktur yang berkualitas dan memastikan jalur distribusi hasil industri terhadap pasar bebas hambatan.</li> <li>18. Penerapan konsep good farming practice dalam mengembangkan sektor pertanian</li> <li>19. Memastikan kelancaran arus transportasi antara pusat kegiatan Produksi, pergudangan menuju pada pusat kegiatan ekonomi (pusat jual beli/Pasar)</li> <li>20. Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan pertanian dan perikanan</li> <li>21. Pengembangan Kawasan Mangga dan Anggur sebagai icon Kota Probolinggo</li> </ol>

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
<b>MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas</b>		
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia		
<b>Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan</b>	Sinergitas Stakeholder pengelola Pendidikan dalam upaya pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan inklusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah dan memperbaiki sistem sistem pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan</li> <li>2. Regulasi pembatasan jumlah siswa yang bersekolah di Kota Proolinggo dari luar Kota Probolinggo</li> <li>3. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS, dan mengarahkannya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>4. Meningkatkan pemerataan kualitas dan akses proses belajar mengajar di Kota Probolinggo</li> <li>5. Meningkatkan intensitas kegiatan perpustakaan yang meningkatkan minat baca masyarakat</li> <li>6. Meningkatnya kualitas aktifitas pemuda dan OR</li> <li>7. Mengembangkan pendidikan masyarakat dan inklusif.</li> <li>8. Sinergi terhadap perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk berinvestasi pembangunan cabang dan kampus baru di Kota Probolinggo dan jaminan kemudahan pemuda/I probolinggo untuk berkuliah</li> <li>9. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan akses pelajar di Kota Probolinggo, khususnya terhadap akses kerja untuk lulusan SMK</li> </ol>

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
<b>Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan</b>	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Akses dan cakupan layanan kesehatan Kota Probolinggo secara maksimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan peran masyarakat dalam tindakan preventif penyakit sedini mungkin</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara merata serta menyediakan Rumah SInggah Rujukan</li> <li>3. Peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo</li> <li>4. Pembangunan Rumah Sakit Baru dan Peningkatan Kelas RSUD Kota Probolinggo</li> <li>5. Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Puskesmas</li> <li>6. Pengembangan kerjasama dan kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan</li> <li>7. Penurunan TFR dan meningkatkan kualitas keluarga</li> <li>8. Peningkatan cakupan keikutsertaan Peserta KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur)</li> </ol>
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
<b>Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>		
<b>Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja</b>	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja serta optimalisasi sektor-sektor strategis Kota Probolinggo dalam penyediaan lapangan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat Prgram Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan Memperluas Cakupannya</li> <li>2. Menjamin Proporsi Upah yang Proporsional dan Tepat Sasaran</li> <li>3. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Kualitas Perlindungan dan Keselamatan Tenaga Kerja</li> <li>4. Meningkatkan Kepesertaan Prgram Jaminan Bidang Sosial</li> <li>5. Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain seara merata</li> </ol>

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mengoptimalkan laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk efektivitas pembangunan</li> <li>7. Memberikan Pelatihan untuk Peningkatan Skill Serta Re-orientasi Terhadap Sektor Strategis dan Potensial melalui Balai Latihan Kerja (BLK)</li> </ol>
<b>Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat</b>	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS dan Penekanan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Data base kemiskinan yang akurat</li> <li>2. Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS</li> <li>3. Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>4. Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo sosial</li> <li>5. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota</li> </ol>
<b>Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah</b>	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kota Probolinggo dan penguatan sektor strategis Kota Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan</li> <li>2. Perumusan rencana induk pengembangan pertanian dengan fokus untuk menemukan alternatif metode tepat guna untuk solusi jangka pendek dan teknologi pertanian padat modal</li> <li>3. Minimalisasi alih fungsi lahan pertanian</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan.</li> <li>5. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan</li> </ol>
<b>Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum</b>	Meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi vertical terkait dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan wawasan kebangsaan disemua elemen masyarakat</li> <li>2. Membentuk kewaspadaan dini di masyarakat sehingga memudahkan control terhadap munculnya potensi konflik sosial di masyarakat</li> </ol>

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
	meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan pengawasan terhadap Perda dan Perkada</li> <li>4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum</li> </ol>
<b>Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender</b>	Meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan PPT dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>2. Menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan layanan komprehensif</li> <li>3. Memperkuat kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi.</li> <li>5. Memproporsionalkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan</li> <li>6. Meningkatkan Modal Sosial masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ol>
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
<b>MISI 3: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas</b>		
<b>Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur</b>	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan serta mendorong kerjasama penyediaan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah</li> <li>2. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah</li> <li>3. Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian</li> <li>4. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi</li> <li>5. Penataan dan Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas</li> </ol>

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
	berskala regional	kawasan perumahan dan kawasan permukiman 6. Penataan dan pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah 7. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung informasi geospasial 8. Pengembangan bangunan gedung dan fasilitas umum yang berciri khas lokal dan ramah lingkungan 9. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan 10. Peningkatan Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur Persampahan dan SPAM Reginal
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
<b>Tujuan: Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana</b>		
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Meningkatkan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berbasis masyarakat.	1. Peningkatan upaya konservasi kawasan lindung 2. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan partisipasi masyarakat 3. Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
<b>Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana</b>	Meningkatkan pengelolaan kebencanaan	1. Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana 2. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 3. Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
<b>MISI 4: Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik</b>		
<b>Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik</b>		
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas</b>	Mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian serta mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kelembagaan (SDM), sistem dan pengelolaan keuangan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah</li> <li>3. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan</li> <li>4. Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan LPPD</li> <li>5. sinergitas perencanaan dan penganggaran melalui integrasi pemanfaatan teknologi</li> <li>6. Peningkatan sumber pendanaan Non-APBD melalui CSR dan mekanisme lainnya.</li> <li>7. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP</li> <li>8. Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara serta penempatan sesuai kompetensi untuk mendukung profesionalitas aparatur</li> <li>9. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>10. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi</li> <li>11. Perwujudan Kota Probolinggo sebagai Smart City melalui penerapan e-gov dalam segala bidang di perangkat daerah</li> </ol>

Sasaran	Strategi	Kebijakan Pembangunan
		12. Peningkatan manajemen kearsipan dengan didukung SDM yang berkualitas 13. Pembangunan Block Office 14. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah melalui Penerapan Reformasi Birokrasi 15. Peningkatan penyelenggaraan <i>one data</i> statistik daerah yang berkualitas 16. Peningkatan penyelenggaraan persandian daerah 17. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah 18. harmonisasi antara daerah dan provinsi melalui kerjasama yang intensif
<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan</b>	Memantapkan upaya pengembangan tata laksana pelayanan publik	1. Peningkatan jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayan Publik Kota Probolinggo 2. Peningkatan fasilitas pelayanan publik 3. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik 4. Peningkatan Profesionalisme aparatur pelayanan publik 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik 6. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan kinerja Lembaga Legislatif

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD dan dari tiap tahapan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun untuk penyusunan RPJPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

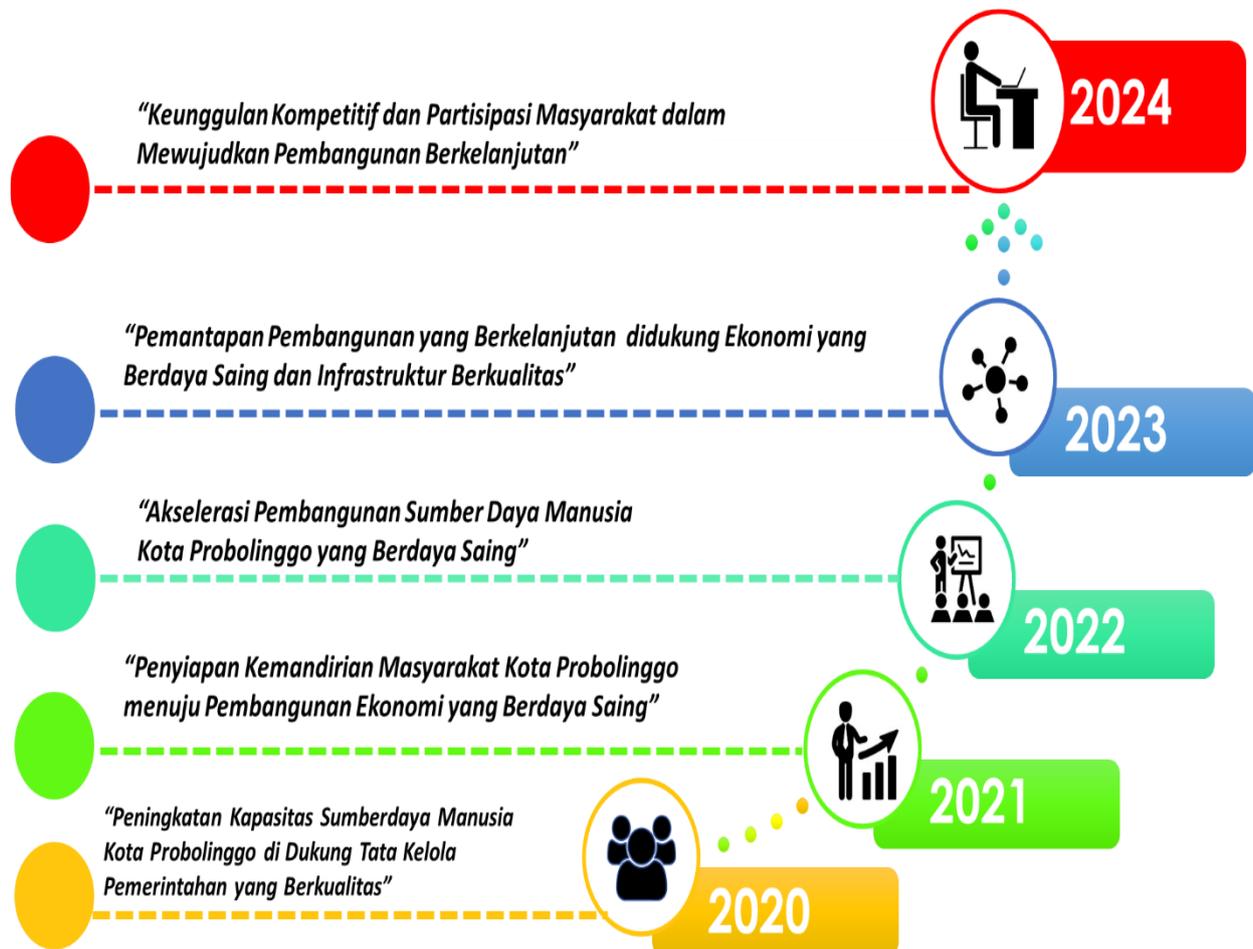
Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Disamping itu pula, pada lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.49 tertulis penyelarasan horizon pengerjaan arah kebijakan terhadap tujuan, sasaran dan strategi, sehingga akan lebih sederhana dan efektif jika menggunakan perspektif strategi. Berikut arsitektur horizon atau timeline pembangunan Kota Probolinggo pada periode RPJMD ini.

**Tabel 6. 6 Arah Kebijakan Pembangunan 2020-2024**

SASARAN PEMBANGUNAN	ARSITEKTUR PEMBANGUNAN				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
<p>Sasaran: Sasaran 13 Sasaran 14</p>	<p>Mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian serta mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kelembagaan (SDM), sistem dan pengelolaan keuangan daerah.</p>				
	<p>Memantapkan upaya pengembangan tata laksana pelayanan publik</p>				
<p>Sasaran: Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 6 Sasaran 8 Sasaran 9</p>	<p>Sinergitas stakeholder pengelolaan pendidikan dalam upaya pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan inklusif.;</p>				
	<p>Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Akses dan cakupan layanan kesehatan Kota Probolinggo secara maksimal</p>				
	<p>Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS dan Penekanan Kemiskinan Melalui Grant dan Pemberdayaan.;</p>				
	<p>Meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi vertical terkait dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;</p>				
	<p>Peningkatan peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan. ;</p>				
<p>Sasaran: Sasaran 1 Sasaran 7 Sasaran 10 Sasaran 12</p>	<p>Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kota Probolinggo dan penguatan sektor strategis Kota</p>				
	<p>Memastikan semua infrastruktur penunjang rantai dan jalur distribusi dari sektor produksi hingga pasar tersedia dengan kualitas baik/sangat baik (untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat)</p>				
	<p>Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan serta mendorong kerjasama penyediaan infrastruktur berskala regional</p>				
	<p>Meningkatkan pengelolaan kebencanaan</p>				
<p>Sasaran: Sasaran 2 Sasaran 5 Sasaran 11</p>	<p>Meningkatkan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berbasis masyarakat.</p>				
	<p>Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja serta optimalisasi sektor-sektor strategis Kota Probolinggo dalam penyediaan lapangan pekerjaan</p>				
	<p>Memastikan proses pengurusan izin berusaha mudah dan sistem pemungutan pajak dapat berjalan efisien, dan menyeluruh terhadap semua objek pajak</p>				

Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:



**Gambar 6. 1** Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

### **6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Wali Kota terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Wali Kota terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Wali Kota terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Permen 13 Tahun 2006, atau kedalam Strategi. Jika bunyi janji Wali Kota terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Berdasarkan kepada keterangan yang disebutkan diatas, beserta ilustrasi yang digambarkan diatas, maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji politik agenda pembangunan Wali Kota Terpilih.

Berdasarkan amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif *balanced scorecard*. Keempat persepektif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perspektif masyarakat/layanan (P1) adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal (P2) adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Perspektif kelembagaan (P3) yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

4. Perspektif keuangan (P4) yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah

Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Wali Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menterjemahkan Visi dan Misinya melalui 10 poin janji politisnya sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan : Menciptakan pemerintahan yang profesional, melayani warga secara prima
2. Bidang Pendidikan : Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah negeri/swasta. Pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi bagi sma/smk/ma (negeri/swasta) pemberdayaan madrasah diniyah (madin), TPA/TPQ, dan pendidikan keagamaan non muslim
3. Bidang Kesehatan : Membangun rumah sakit baru sebagai rumah sakit rujukan wilayah timur jawa timur. Ambulance perkelurahan, pelayanan kesehatan standart nasional. Pelayanan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan dan memberi makanan bergizi bagi balita setiap bulan
4. Bidang Pembangunan : Mempertahankan Brand Probolinggo dengan mengacu pada infrastruktur standart nasional dan perubahan iklim

5. Bidang Iklim Investasi dan Lapangan Kerja :  
Menggairahkan iklim investasi sebagai penopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menciptakan lapangan kerja menuju masyarakat sejahtera
6. Bidang Ekonomi Kerakyatan : Menciptakan sentra produk olahan rakyat berbasis potensi lokal
7. Bidang Industri : Mengembangkan kawasan industri bersinergi dengan perdagangan (Pakar Ekonomi, Bro Ardi)
8. Bidang Industri dan Perdagangan : Memperluas jaringan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
9. Bidang Lingkungan : Menciptakan lingkungan hidup Bestari, menjadikan masyarakat merasa nyaman hidup di kota sendiri.
10. Bidang Kesenian : Mengembangkan seni budaya dan kesenian lokal

Berikut dijelaskan pula poin-poin janji politis beserta penerjemahannya terhadap program perangkat daerah, disajikan sebagai berikut:

No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
<b>Bidang Pemerintahan</b>			
1	Menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada posisi sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki;	Program Peningkatan Kapasitas Birokrasi Perangkat Daerah Program Pengelolaan formasi, informasi dan mutasi pegawai	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) BKPSDM
2	Membangun karakter birokrasi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan terukur dalam menjalankan tugas sebagai pelayan dan abdi masyarakat tanpa diskriminasi ;	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM
3	Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bermartabat.	Program Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
4	Penyusunan rencana kerja (Renja) Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun APBD berpihak kepada kepentingan rakyat demi kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang
No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
<b>Bidang Pendidikan</b>			

No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
1	Menjamin Wajib Belajar 9 Tahun	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN DASAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pengembangan Madrasah Diniyah (Madin) & Pendidikan Agama Non Muslim	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatkan Sarana & Prasarana Pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN DASAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	
4	Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bagi Siswa Menengah Atas (SMA/SMK/MA) Baik Negeri maupun Swasta	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN ADMINISTRASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
<b>Bidang Kesehatan</b>			
1	Membangun Rumah Sakit Rujukan Baru (RSUD) di Wilayah Selatan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Keciptakarya	Dinas PUPR Perkim
2	Meningkatkan dan Membenahi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Layanan Rumah Sakit	RSUD
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
3	Pelayanan Optimal Dokter Jaga 24 Jam di Puskesmas dan RSUD, Serta Gugus Reaksi Cepat (GRC) di Setiap Kelurahan	Program Sumberdaya Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
4	Subsidi Pemerintah Daerah Termasuk Menjangkau Ibu, Bayi, dan Balita	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
<b>Bidang Pembangunan</b>			
1	Menyempurnakan Infrastruktur yang sudah ada dengan asas Pembangunan yang berkelanjutan.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Keciptakarya	Dinas PUPR Perkim
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebinamargaan	
		Program Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PUPR Perkim
2	Merancang pembangunan dengan mempertimbangkan Perubahan Iklim dan ramah Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Pertanahan	Dinas PUPR Perkim
No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
<b>Bidang Iklim Investasi dan Lapangan Kerja</b>			
1	Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Sekitar Kawasan Industri dan Perdagangan	Program Program Penegakan PERDA dan PERKADA	Satpol PP
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
2	Peningkatan Pengetahuan, Pelatihan dan Bekal Keterampilan Pencari Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan

No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
3	Meminimalisir Sengketa Perburuhan	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
4	Memberikan Kemudahan Dalam Keringanan Pajak, Pengurusan dan Penerbitan Perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
5	Pembangunan Angkutan Barang Menjadi Terminal Cargo di Pelabuhan Niaga Tanjung Tembaga	Program Pengembangan Transportasi (Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Perhubungan Laut)	Dinas Perhubungan
No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
<b>Bidang Ekonomi Kerakyatan</b>			
1	Pengembangan Home Industri Melalui Penyaluran Bantuan Dana Bergilir	Program Pengembangan Industri	DKUPP
2	Peningkatan Produksi Pertanian Dan Kelautan Melalui Pendampingan Dan Penyuluhan, Bantuan Kredit Lunak Untuk Pengadaan Paralatan, Kelancaran Distribusi Dan Ketersediaan Pupuk Subsidi, Serta Bantuan Pemasaran Hasil Pertanian Dan Kelautan	Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Disperta, KP dan Perikanan
		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	
		Program Pengembangan Usaha Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	
No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
<b>Bidang Pemberdayaan UMKM</b>			
1	Pendataan UMKM Di Kota Probolinggo	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	DKUPP
2	Memberikan pendampingan dan advokasi dalam meningkatkan kualitas sdm dan mutu produk, serta penyelesaian permasalahan usaha		
3	Bantuan Promosi Dan Pemasaran Produk UMKM Secara Regional Maupun Nasional		
4	Bantuan Pinjaman Lunak Bagi Pelaku UMKM		
5	Pembangunan Sentra UMKM (Sentra Kerajinan, Sentra Kuliner, Sentra Batik) Yang Strategis		
6	Even tahunan SEMIPRO (Pagelaran budaya, kuliner, olahan, jajanan daerah, seni batik dan kerajinan khas Kota Probolinggo )	Program Pelestarian dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
<b>Bidang Industri dan Perdagangan</b>			
1	Penataan Kawasan Industri Dan Perdagangan Yang Bersinergi Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Berdekatan Dengan Hasil Produksi Pertanian Dan Kelautan	Program Pengembangan Industri	DKUPP
		Pengembangan Usaha Perdagangan	
2	Pengoperasian Alat Transportasi Dalam Pendistribusian Produk Industri Dan Perdagangan Mengutamakan Tenaga Lokal	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
<b>Bidang Pengelolaan Lingkungan</b>			

No	Program Politis	Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan	PERANGKAT DAERAH
1	Membentuk Team / Lembaga Rancangan Tata Ruang Kota	Program Penataan Ruang dan Bangunan	Dinas PU dan Perkim
2	Membentuk masyarakat yang berperilaku / berbudaya lingkungan	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
3	Mempotensikan kelompok pemerhati lingkungan yang sudah ada , Sekolah yang sudah mempunyai predikat berbudaya lingkungan , Pembina Lingkungan dan masyarakat peduli lingkungan	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4	Membuat sistem Pengelolaan sampah kota yang tepat untuk menanggulangi masalah persampahan	Pengembangan Pengolahan Sampah Skala Kawasan	
5	Memberikan penyuluhan / pelatihan tentang Pengelolaan Lingkungan khususnya menghadapi perubahan iklim.	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
6	Mempertahankan predikat Kota Adipura sebagai bentuk kepedulian Kota yang Peduli terhadap Lingkungan.	Pengelolaan Informasi dan edukasi lingkungan	
7	Mempersiapkan Metode Pengolahan Sampah dengan Teknologi terbaru untuk menanggulangi menumpuknya sampah , melaksanakan Program Nasional tentang Pengurangan sampah.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
<b>No</b>	<b>Program Politis</b>	<b>Tindak Lanjut Program/Kegiatan/Arah Kebijakan</b>	
<b>Bidang Budaya dan Kesenian</b>			
1	Membangun Gedung Kesenian yang Representatif dalam Penyaluran & Pengembangan Pelestarian Budaya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Keciptakarya	Dinas PU dan Perkim
2	Integrasi Pendidikan Terhadap Muatan Lokal	Peningkatan Mutu Dan Akses Paud Dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Menggali Budaya dan Kesenian Lokal yang Dipromosikan Regional Jatim & Nasional, sehingga Kesejahteraan Pelaku Seni Meningkat	Program Pelestarian dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan uraian diatas, dan kemudian memperhatikan pula perspektif teknokratis dalam menurunkan Visi dan Misi sehingga muncul hubungan kausalitas pencapaian tujuan pembangunan dari level *output*, *outcome*, dan *impact*. Berikut merupakan program pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024:

**Tabel 6. 7. Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024**

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi															
	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Program Peningkatan Penanaman Modal	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan	%	1%	1,20%	1.624.727.250	1,30%	1.394.351.000	1,40%	1.403.405.000	1,50%	1.410.405.000	1,60%	1.417.405.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	0,78	0,8	1.205.000.000	0,8	1.325.400.000	0,8	1.468.232.000	0,8	1.603.690.560	0,8	1.741.985.805	DKUPP
	Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Volume Perdagangan	Pcs	605.418	605.418	8.103.180.388	605.418	9.811.839.407	605.418	10.399.931.378	605.418	11.007.427.947	605.418	11.735.299.344	DKUPP
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase destinasi wisata yang berkembang	%	11%	11%	5.765.000.000	11%	5.975.000.000	11%	6.085.000.000	11%	6.795.000.000	11%	6.920.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Persentase Industri Pariwisata yang berkembang	%	1%	1%		1%		1%		1%				
				Persentase Komunitas ekonomi kreatif yang berkembang	%	10%	10%		10%		10%		10%				
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Cakupan budaya lokal yang dilestarikan	cakupan	15	15	2.022.479.000	20	2.224.726.900	21	2.447.199.590	21	2.691.919.549	23	2.961.111.504	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Kenaikan Omzet Usaha Mikro yang Difasilitasi	%	15%	15%	1.894.360.000	15%	1.989.078.000	15%	2.088.531.900	15%	2.192.958.495	15%	2.302.606.420	DKUPP
	Persentase Pertumbuhan PDRB	Program Pengembangan Industri	Persentase Pengembangan IKM	%	4%	4%	1.123.000.000	4%	1.179.150.000	4%	1.238.107.500	4%	1.300.012.875	4%	1.365.013.520	DKUPP	

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp									
		Perindustrian	Program Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	1%	1%	460.000.000	1%	475.000.000	1%	490.000.000	1%	505.000.000	1%	520.000.000	Disperta, KP dan Perikanan
			Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Peternakan	%	100%	100%	952.000.000	100%	1.086.500.000	100%	1.241.900.000	100%	1.421.920.000	100%	1.629.988.000	
			Program Pengembangan Usaha Perikanan	Nilai Tambah Produk Perikanan	Rp/Kg	27.000	27.200	2.000.000.000	27.400	2.130.000.000	27.600	2.190.000.000	27.800	2.250.000.000	28.000	2.350.000.000	
Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin															
	Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan kesempatan kerja	%	73,80%	75,40%	1.058.745.150	76,20%	1.258.745.150	77,00%	1.458.745.150	77,80%	1.658.745.150	78,60%	1.858.745.150	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.	%	64,00%	65,80%	322.572.600	66,70%	347.572.600	67,60%	372.572.600	68,50%	397.572.600	69,30%	422.572.600	
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	Pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	Persentase	0,45%	0,45%	1.816.838.000	0,49%	1.970.122.400	0,53%	2.138.735.240	0,57%	2.324.209.364	0,62%	2.528.230.900	Dinsos P3A	

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial	Persen tase	0,37%	0,37%	820.980.000	0,40%	873.480.000	0,45%	931.230.000	0,50%	994.755.000	0,55%	1.064.632.500		
			Program Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persen tase	90%	90%	200.000.000	90%	250.000.000	90%	275.000.000	90%	302.500.000	90%	332.750.000		
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	50.168.986.182	100	53.919.178.389	100	58.041.789.817	100	62.574.162.388	100	66.258.092.671		
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1%	1%	2.770.000.000	1%	3.341.000.000	1%	3.865.000.000	1%	4.413.000.000	1%	5.005.000.000	Disperta, KP dan Perikanan	
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	-15%	1%	1.450.000.000	1%	1.660.000.000	1%	1.900.000.000	1%	2.090.000.000	1%	2.300.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Rasio ketersediaan pangan	skor	51	54	1.160.000.000	57	1.300.000.000	60	1.425.000.000	63	1.550.000.000	66	1.675.000.000		
				Persentase Peningkatan pemanfaatan pangan	%	7%	7%		7%		7%							
	Pengembangan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ton/Ha	Tanaman Pangan 13,76	13,84 (0,58%)	3.725.500.000	13,9 (0,43%)	3.775.000.000	13,96 (0,43%)	4.300.000.000	14,02 (0,43%)	4.325.000.000	14,28 (1,85%)	4.350.000.000				

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp									
						Hortikultura 9,49	9,5 (0,11%)		9,51 (0,11%)		9,52 (0,11%)		9,53 (0,11%)		9,54 (0,10%)		
						Perkebunan 89,30	92,5 (3,58%)		93 (0,54%)		94 (1,08%)		95 (1,06%)		96,4 (1,4%)		
			Pengembangan Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Ternak													
				- Sapi Potong	%	2	2	2.056.000.000	2	2.166.200.000	2	2.274.510.000	2	2.388.235.000	2	2.507.646.050	
				- Sapi Perah	%	1	1		1		1		1		1		
				- Kambing	%	1	1		1		1		1		1		
				- Domba	%	1	1		1		1		1		1		
				- Ayam Buras	%	2	2		2		2		2		2		
Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	Program Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	%	2%	2%	839.876.000	2%	900.000.000	2%	910.000.000	2%	920.000.000	2%	930.000.000	Satpol PP	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan jumlah gangguan Trantibum	%	2%	2%	4.657.225.000	2%	4.846.000.000	2%	4.846.000.000	2%	4.846.000.000	2%	4.846.000.000		
		Peningkatan Kesatuan Bangsa	Persentase potensi konflik sosial yang tidak menjadi konflik terbuka	%	100	100	2.376.551.000	100	2.614.206.100	100	2.875.626.710	100	3.163.189.381	100	3.479.508.319	Bakesbangpol	
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	%	48	48	648.240.764	49	713.064.840	50	784.371.324	51	862.808.457	52	949.089.303	Dinsos P3A	

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp									
			Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	Persen tase	100	100	449.118.420	100	494.030.262	100	543.433.288	100	597.776.617	100	657.554.279	
				Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	Persen tase	30	30		30		30		30		30		
	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia															
	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Penduduk Usia 5 - 6 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar PAUD	%	60	75	4.620.000.000	75	4.745.000.000	80	4.865.000.000	80	4.985.000.000	85	5.105.000.000	Disdikbud
Persentase Penduduk Usia 15 - 69 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar				%	60	75	75		80		80		85				
PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN DASAR			Persentase Penduduk Usia 7 - 12 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SD	%	100	100	68.789.476.000	100	70.506.623.600	100	73.395.485.960	100	76.473.234.556	100	78.758.758.012		
			Persentase Penduduk Usia 13 - 15 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SMP	%	97	98		98		98		98		98			
			Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terpenuhi Sarana	%	86	88		89		90		92		94			

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Prasarana											
			PENGEMBANGAN KEPROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal yang memenuhi Standar Kompetensi	%	25	27,5		30,25	33,275		36,6025		40,26275	3.160.316.250	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk		
				Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Kompetensi	%	50	55	2.600.000.000	60,5	2.730.000.000	66,55	2.866.500.000	73,205	3.009.825.000			80,5255	
			PROGRAM PENINGKATAN MUTU KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga yang dibina	%	60	60,5	5.266.150.850	60,75	5.735.265.935	61	6.251.292.529	61,25	6.818.921.781	61,5		7.443.313.959	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Program Pembinaan dan Masyarakat Perustakaan	Persentase perpustakaan dan taman bacaan yang dibina	%	87,3%	87,3%	93.385.000	89,0%	98.054.000	91,0%	102.000.000	93,0%	106.000.000	95,0%		110.000.000	Disperpusip
				Persentase peningkatan sasaran pemasyarakatan perpustakaan	%	76%	76%	117.990.000	79%	118.000.000	84%	119.000.000	89%	125.000.000	94%		131.000.000	
			Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	Indeks Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100%	100%	2.917.929.816	100%	3.117.720.000	100%	4.207.188.280	100%		3.527.491.200	100%

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH dan KB
							Target	Rp									
			Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	80%	80%	24.341.688.578	85%	26.165.519.522	90%	27.739.001.573	95%	29.122.977.141	100%	30.626.417.989	
			Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	%	100%	100%	4.021.670.000	100%	4.151.748.100	100%	4.459.554.590	100%	4.794.197.459	100%	5.158.151.155	
			Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	100%	100%	15.518.250.000	100%	13.201.348.700	100%	13.372.536.100	100%	14.418.219.975	100%	15.554.868.269	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Layanan Rumah Sakit	a. Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang disediakan	%	60	65	65.000.000.000	70	65.000.000.000	75	65.000.000.000	80	65.000.000.000	90	65.000.000.000	RSUD
				b. Persentase Peningkatan Pasien Rujukan dari FKTP	%	60	65		70		75		80		90		
			Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	78,21	78,5	2.204.294.446	79	2.771.943.900	79,55	2.864.398.350	80,11	2.964.023.250	81	3.071.482.350	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
				2. Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu	%	100	100		100		100		100				
	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur															
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Pengembangan dan Pengelolaan Kebinamargaan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	77,62	78%	28.447.189.474	79%	35.800.000.000	80%	41.500.000.000	81%	47.200.000.000	82%	52.800.000.000	Dinas PUPR Perkim

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	%	0	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	Dinas Perhubungan	
			Jumlah Pelanggaran Trayek Angkutan Jalan	unit	51	41,00	9.400.000.000	31,00	11.525.000.000	21,00	13.750.000.000	11,00	16.225.000.000	0,00	19.350.000.000			
			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	unit	8692	8.742		8.792	8.842	8.892	8.942							
		Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	Penataan Ruang dan Bangunan	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	80%	81%	1.304.784.083	82%	1.761.458.512	83%	1.937.604.364	84%	2.615.765.891	85%	2.877.342.480	Dinas PUPR Perkim	
				Pengembangan dan Pengelolaan Keciaptakaryaan	%	85%	86%	41.866.028.924	87%	56.519.139.047	88%	62.171.052.952	89%	83.930.921.485	90%	92.324.013.633		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	%	80%	81%	6.005.483.027	82%	8.107.402.087	83%	8.918.142.295	84%	12.039.492.099	85%	13.243.441.309		
				Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	70%	73%	1.163.935.500	75%	10.575.000.000	78%	11.632.500.000	81%	15.703.875.000	85%	17.274.262.500		
				Penyelenggaraan Pertanahan	%	90%	91%	300.000.000	92%	350.000.000	92%	375.000.000	94%	400.000.000	95%	425.000.000		
		Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup															

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp									
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Mutu Air dan Udara dengan kualitas baik	%	94%	94%	3.045.605.350	95%	3.300.165.885	96%	3.575.182.474	97%	3.922.700.721	98%	4.294.970.793	DLH
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terlayani	%	75%	80%	10.592.058.352	80%	11.621.264.187	82%	12.751.890.605	82%	13.994.004.666	85%	15.358.676.383	
		Indeks Tutupan Lahan	Program Perlindungan dan Konservasi RTH dan Sumber Daya Alam	Persentase Tutupan Lahan Publik	%	7%	20%	4.011.236.725	20%	4.412.360.398	20%	4.853.596.437	20%	5.338.956.081	20%	5.872.851.689	
	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Cakupan Penanggulangan n Bencana	%	90%	90%	1.551.602.000	90%	1.542.787.200	90%	1.801.133.420	90%	1.769.954.262	90%	1.963.609.686	BPBD
Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi															
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai Sakip	Program Peningkatan Kapasitas Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Persen	80%	100%	580.285.000	100%	609.299.250	100%	639.764.213	100%	671.752.423	100%	705.340.044	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah	%	83%	85%	1.600.850.568	87%	1.760.935.625	89%	1.811.796.011	91%	1.992.976.392	93%	2.192.274.140	Inspektorat
			Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	%	61%	65%	268.206.620	74%	295.027.282	83%	324.530.010	92%	356.983.011	100%	392.681.312	

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp									
			Program Penguatan Pengawasan	<i>Persentase Perangkat Daerah yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinisi"</i>	%	30%	35%	1.258.517.190	45%	1.384.368.909	55%	1.385.106.965	65%	1.523.617.662	75%	1.675.979.428	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<i>Persentase keselarasan dokumen perencanaan</i>	Persen	80%	80%	820.717.000	85%	769.238.000	90%	807.699.750	95%	963.438.750	100%	1.169.464.250	Bappeda Litbang
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<i>Persentase PERANGKAT DAERAH lingkup bidang ekonomi yang menyusun dokumen berkualitas baik</i>	Persen	100%	100%	551.680.000	100%	579.264.100	100%	608.227.355	100%	638.638.723	100%	670.570.659	
			Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase PERANGKAT DAERAH lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menyusun dokumen berkualitas baik</i>	Persen	100%	100%	1.422.112.500	100%	1.493.217.600	100%	1.567.878.500	100%	1.646.273.200	100%	1.728.586.500	
			Program Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase PERANGKAT DAERAH lingkup bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat</i>	Persen	80%	80%	1.231.389.600	85%	1.292.959.000	90%	1.331.387.000	95%	1.371.212.000	100%	1.412.493.000	
			Program Penelitian dan Pengembangan	<i>Persentase hasil penelitian yang dikembangkan yang menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah</i>	Persen	66%	66%	1.391.998.500	75%	1.461.598.500	80%	1.534.678.500	85%	1.611.413.000	90%	1.691.983.500	

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp									
	Nilai LPPD		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase PD yang memenuhi data Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku</i>	Persen	100%	100%	1.461.903.000	1	1.534.998.150	1	1.611.748.058	1	1.692.335.460	1	1.776.952.233	Sekretariat Daerah
			Program Pengelolaan Arsip	<i>Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola</i>	%	11,28%	23,00%	265.463.100	7,88%	283.047.500	8,65%	305.000.000	9,10%	323.000.000	9,95%	342.000.000	Disperpusip
	Indeks SPBE		Program Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<i>Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi</i>	%	90%	90,00%	4.354.750.000	90,00%	4.354.750.000	90,00%	4.354.750.000	90,00%	4.354.750.000	90,00%	4.354.750.000	Diskominfo
			Program Pengelolaan e-Government	<i>Persentase PD yang menerapkan Layanan Berbasis elektronik</i>	%	35%	38,50%	1.965.925.000	41,00%	1.967.500.000	43,60%	1.977.500.000	46,20%	1.977.500.000	48,70%	1.982.500.000	
			Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	<i>Persentase release data statistik tepat waktu</i>	%	75,00%	75,00%	800.000.000	75,00%	800.000.000	80,00%	800.000.000	80,00%	800.000.000	85,00%	800.000.000	
			Program Peningkatan Pengelolaan Persandian	<i>Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan</i>	%	16,67%	25,00%	400.000.000	33,33%	450.000.000	41,67%	500.000.000	50,00%	550.000.000	58,33%	600.000.000	
	Opini BPK Terhadap LKPD		Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase Perangkat Daerah Menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas</i>	%	20	20	1.550.000.000	40	1.550.000.000	60	1.550.000.000	80	1.550.000.000	100	1.550.000.000	BPPKAD
			Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah</i>	%	84	85	2.259.825.500	90	2.259.825.500	92	2.259.825.500	94	2.259.825.500	97	2.259.825.500	BPPKAD
	Indeks Profesionalitas Aparatur		Program Pengelolaan Formasi, Informasi dan Mutasi Pegawai	<i>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Ditempatkan sesuai dengan</i>	Persen	84,94	86	2.538.000.000	87	2.746.800.000	88	2.964.600.000	89	3.129.000.000	90	3.301.700.000	BKPSDM

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH			
							Target	Rp												
				<i>Profil Jabatan</i>																
				<i>Persentase Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terpenuhi sesuai ketentuan</i>	Persen	89	90			91		92		93		94				
			Program Pembinaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai	<i>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Lulus Pengembangan Kompetensi</i>	Persen	98,66	90			90		95		95		98				
				<i>Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara</i>	Persen	-20	10	4.207.078.000	10	4.426.900.000	10	4.744.400.000	10	4.540.650.000	10	4.550.000.000				
				<i>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Telah Memenuhi Target Kinerja</i>	Persen	0	90			93		95		97		100				
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pengendalian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	<i>Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dimanfaatkan</i>	Persen	80%	80%	1.426.250.000	81%	1.568.875.000	83%	1.647.318.750	86%	1.729.684.688		89%	1.816.168.922	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik sesuai peraturan perundang undangan</i>	Persen	100%	100%	459.803.750	100%	505.784.125	100%	531.073.331	100%	557.626.998		100%	585.508.348	

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el	orang	168.126	169.000	169.000	169.500	170.000	170.000	170.500	171.000	1.951.635.500	1.951.635.500	Dipendukca pil		
				Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	KK	78.232	79.000	80.000	81.000	82.000	83.000							
				Jumlah Penduduk Pindah Datang yang diData	orang	2.184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100							
			Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	anak	66.548	69.622	72.182	74.622	76.725	79.255	773.620.000	773.620.000					
				Jumlah Penduduk Meninggal yang Memiliki Akte Kematian	orang	1.347	1350	1355	1400	1425	1450							
				Jumlah Penduduk Yang Dilayani Pencatatan Peristiwa Penting	orang	6.814	6702	6764	6887	6982	7077							
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	1.197.350.000	1.197.350.000					
				Persentase Jaringan SIAK Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100							
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu	%	89,12%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%		695.000.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp									
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	<i>Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan</i>	Persen	100%	100%	6.164.732.200	100%	6.662.399.420	100%	7.199.708.012	100%	7.781.071.886	100%	8.410.167.840	Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	<i>Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas dan Labkesda</i>	%	80%	80%	5.317.400.870	85%	5.883.461.056	90%	6.501.609.160	95%	7.177.105.296	100%	7.915.742.324	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Moh Saleh	<i>Persentase Peningkatan Loyalitas Pelanggan RS</i>	%	70	75	100.000.000.000	78	105.000.000.000	80	110.000.000.000	82	115.000.000.000	85	120.000.000.000	RSUD
		<i>Persentase pencapaian standarisasi pelayanan (KARS)</i>		%	75	80	80		82		83		85				
		<i>Persentase pengembangan produk pelayanan kesehatan</i>		%	70	75	80		85		90		95				
		<i>Status capaian Standarisasi pendidikan, penelitian yang berkualitas</i>		Status	B	B	B		A		A		A				
		<i>Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai standart</i>		%	60	65	70		75		80		85				
		<i>Persentase Peningkatan Kompetensi dan Budaya Organisasi berbasis IT</i>		%	50	60	70		80		85		90				
		<i>Persentase Peningkatan tata kelola keuangan RS</i>		%	60	65	70		75		80		85				
		<i>Persentase pencapaian indikator SPM</i>		%	70	75	75		80		80		85				

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal 2018	2020		2021		2022		2023		2024		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp									
							RS										
			Peningkatan Daya Dukung Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Indeks	73 Indeks	70 Indeks	7.000.000.000	71 Indeks	7.400.000.000	72 Indeks	7.900.000.000	73 Indeks	8.300.000.000	74 Indeks	8.800.000.000	Sekretariat DPRD

**BAB VII**  
**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM**  
**PERANGKAT DAERAH**

Secara umum berbeda pada sajian bab VI sebelumnya mengenai program pembangunan yang merupakan program prioritas yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, gambaran dari Bab VII RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 adalah berisikan seluruh program yang dirumuskan perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) PERANGKAT DAERAH yang disertai juga dengan indikator kinerja, pagu indikatif, target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebelum pemerintah daerah Kota Probolinggo menentukan belanjanya setiap tahun dalam periode RPJMD 2019-2024 maka perlu diketahui terlebih dahulu Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Probolinggo yang dihitung dalam Bab III RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Kapasitas Riil Keuangan Daerah merupakan alokasi belanja program untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun kedepan. Kapasitas Riil Kota Probolinggo dihitung dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Selanjutnya untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan menambahkan pendapatan, pencairan dana cadangan, dan Silpa dengan total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama. Berikut merupakan kapasitas Riil Kota Probolinggo yang harus diperhatikan sebagai acuan pengalokasian belanja program Kota Probolinggo:

No	Uraian	Proyeksi				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan	1.183.721.706.452,64	1.257.832.012.523,04	1.343.444.510.690,23	1.421.306.720.703,48	1.519.258.401.257,35
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	10.500.000.000,00	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	80.000.000.000,00	75.000.000.000,00	70.000.000.000,00	65.000.000.000,00	60.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.263.721.706.452,64	1.332.832.012.523,04	1.413.444.510.690,23	1.496.806.720.703,48	1.579.258.401.257,35
	Dikurangi:					
1	Belanja Tidak Langsung	464.429.002.590,14	480.874.433.677,71	503.520.045.004,50	519.002.515.266,30	538.545.317.972,33
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	2.500.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>799.292.703.862,50</b>	<b>849.457.578.845,33</b>	<b>901.924.465.685,73</b>	<b>977.804.205.437,17</b>	<b>1.040.713.083.285,02</b>

Selanjutnya dalam menyajikan daftar program perangkat daerah yang tertuang di Renstra PERANGKAT DAERAH, hal yang perlu diingat bahwa RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 disusun pada tahun awal 2019. Sehingga alokasi belanja dan program pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang pada RKPD 2019 telah definitif dan sedang berlangsung. Untuk itu, tahun perencanaan program RPJMD Kota Probolinggo adalah tahun 2020-2024. berikut program perangkat daerah tahun 2020-2024:

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Probolinggo tahun 2020-2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>																
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																
<b>PENDIDIKAN</b>																
PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Penduduk Usia 5 - 6 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar PAUD	%	60	75	4.620.000.000	75	4.745.000.000	80	4.865.000.000	80	4.985.000.000	85	5.105.000.000	85	24.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Penduduk Usia 15 - 69 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar	%	60	75		75		80		80		85		85		
PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN DASAR	Persentase Penduduk Usia 7 - 12 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SD	%	100	100	68.789.476.000	100	70.506.623.600	100	73.395.485.960	100	76.473.234.556	100	78.758.758.012	100	367.923.578.128	
	Persentase Penduduk Usia 13 - 15 thn yang sedang	%	97	98		98		98		98		98				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>belajar atau sudah tamat belajar SMP</i>																
	<i>Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terpenuhi Sarana Prasarana</i>	%	86	88		89		90		92		94		94			
PENGEMBANGAN KEPROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	<i>Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal yang memenuhi Standar Kompetensi</i>	%	25	27,5	2.600.000.000	30,25	2.730.000.000	33,28	2.866.500.000	36,60	3.009.825.000	40,26	3.160.316.250	40,26	14.366.641.250		
	<i>Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Kompetensi</i>	%	50	55		60,50		66,55		73,21		80,53		80,53			
KESEHATAN																	
Pembiayaan Kesehatan	<i>Persentase Pembiayaan</i>	%	100%	100%	4.021.670.000	100%	4.151.748.100	100%	4.459.554.590	100%	4.794.197.459	100%	5.158.151.155	100%	22.585.321.304	Dinas Kesehatan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Masyarakat	<i>Kesehatan Masyarakat</i>																Pengendalian Penduduk dan KB
Jaminan Kesehatan Nasional	<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional</i>	%	100%	100%	15.518.250.000	100%	13.201.348.700	100%	13.372.536.100	100%	14.418.219.975	100%	15.554.868.269	100%	72.065.223.044		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	<i>Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas dan Labkesda</i>	%	80%	80%	5.317.400.870	85%	5.883.461.056	90%	6.501.609.160	95%	7.177.105.296	100%	7.915.742.324	100%	32.795.318.706		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat</i>	%	100%	100%	2.917.929.816	100%	3.117.720.000	100%	4.207.188.280	100%	3.527.491.200	100%	3.625.740.320	100%	17.396.069.616		
Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Akibat Dampak Rokok	<i>Persentase Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Akibat Dampak Rokok</i>	%	100%	100%	1.125.124.800	100%	6.452.050.000	100%	7.089.255.000	100%	7.818.180.500	100%	8.559.998.550	100%	31.044.608.850		
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<i>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</i>	%	100%	100%	714.523.750	100%	559.350.000	100%	630.000.000	100%	701.500.000	100%	745.100.000	100%	3.350.473.750		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</i>	%	50%	50%		55%		60%		65%		70%		70%			
<b>Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Dampak Rokok</b>	<i>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Dampak Rokok</i>	%	12	12	502.870.000	13	2.250.000.000	13	2.285.000.000	14	2.325.000.000	14	2.350.000.000	14	9.712.870.000		
<b>Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan</b>	<i>Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar</i>	%	80%	80%	24.341.688.578	85%	26.165.519.522	90%	27.739.001.573	95%	29.122.977.141	100%	30.626.417.989	100%	137.995.604.802		
<b>Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya</b>	<i>Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya</i>	%	100%	100%	39.001.843.220	100%	45.061.455.000	100%	51.456.675.650	100%	58.736.179.398	100%	67.032.608.707	100%	261.288.761.975		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok	Persentase Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok	%	100%	100%	872.005.200	100%	3.750.000.000	100%	3.800.000.000	100%	3.850.000.000	100%	3.900.000.000	100%	16.172.005.200	
Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar	%	75%	80%	1.200.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	5.200.000.000	
Program Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Moh Saleh	Persentase Peningkatan Loyalitas Pelanggan RS	%	70	75	100.000.000.000	78	105.000.000.000	80	110.000.000.000	82	115.000.000.000	85	120.000.000.000	85	550.000.000.000	RSUD
	Persentase pencapaian standarisasi pelayanan (KARS)	%	75	80		80		82		83		85				
	Persentase pengembangan produk pelayanan kesehatan	%	70	75		80		85		90		95				
	Status capaian Standarisasi pendidikan, penelitian yang	Status	B	B		B		A		A		A				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>berkualitas</i>																
	<i>Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai standart</i>	%	60	65		70		75		80		85		85			
	<i>Persentase Peningkatan Kompetensi dan Budaya Organisasi berbasis IT</i>	%	50	60		70		80		85		90		90			
	<i>Persentase Peningkatan tata kelola keuangan RS</i>	%	60	65		70		75		80		85		85			
	<i>Persentase pencapaian indikator SPM RS</i>	%	70	75		75		80		80		85		85			
<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Layanan Rumah Sakit</b>	<i>a. Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang disediakan</i>	%	60	65	65.000.000.000	70	65.000.000.000	75	65.000.000.000	80	65.000.000.000	90	65.000.000.000	90	325.000.000.000		
	<i>b. Persentase Peningkatan Pasien Rujukan dari FKTP</i>	%	60	65		70		75		80		90		90			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (RS)	Persentase peningkatan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana RS dana DBHCHT yang terpenuhi	%	60	65	7.000.000.000	70	7.000.000.000	75	7.000.000.000	80	7.000.000.000	85	7.000.000.000	85	35.000.000.000	
	Persentase Alat Kedokteran dan Penunjang yang terpenuhi dari Anggaran DBHCHT	%	60	65		70		75		80		85		85		
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																
Penataan Ruang dan Bangunan	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	80	81	1.304.784.083	82	1.761.458.512	83	1.937.604.364	84	2.615.765.891	85	2.877.342.480	85	10.496.955.330	Dinas PUPR Perkim
Pengembangan dan Pengelolaan Keciptakaryaan	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	%	85	86	41.866.028.924	87	56.519.139.047	88	62.171.052.952	89	83.930.921.485	90	92.324.013.633	90	336.811.156.040	
Pengembangan dan Pengelolaan Kebinamargaan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	77,62	78	28.447.189.474	79	35.800.000.000,00	80	41.500.000.000,00	81	47.200.000.000,00	82	52.800.000.000,00	82	205.747.189.474	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	80	81	6.005.483.027	82	8.107.402.087	83	8.918.142.295	84	12.039.492.099	85	13.243.441.309	85	48.313.960.817	
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	70	73	1.163.935.500	75	10.575.000.000	78	11.632.500.000	81	15.703.875.000	85	17.274.262.500	85	56.349.573.000	Dinas PUPR Perkim
<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																
Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	%	2%	2%	839.876.000	2%	900.000.000	2%	910.000.000	2%	920.000.000	2%	930.000.000	2%	4.499.876.000	Satpol PP
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan jumlah gangguan Trantibum	%	2%	2%	4.657.225.000	2%	4.846.000.000	2%	4.846.000.000	2%	4.846.000.000	2%	4.846.000.000	2%	24.041.225.000	
Pemberantasan Barang kena Cukai ilegal	Persentase Penurunan Barang Cukai Ilegal yang diamankan	%	100%	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	650.000.000	
Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai	Persentase peningkatan jumlah masyarakat	%	100%	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	700.000.000	100%	980.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	yang mendapatkan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-Perundangan di Bidang Cukai																
Perindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai Rnsponsife time	%	20%	30%	2.079.801.000	35%	2.200.000.000	40%	2.300.000.000	45%	2.400.000.000	50%	2.500.000.000	50%	11.479.801.000		
	Persentase peningkatan kompetensi anggota Linmas	%	65%	75%		80%		85%		90%		95%		95%			
Program Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	%	90%	90%	1.551.602.000	90%	1.542.787.200	90%	1.801.133.420	90%	1.769.954.262	90%	1.963.609.686	90%	8.629.086.568	BPBD	
SOSIAL																	
Pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan	Persentase	0,45%	0,45 %	1.816.838.000	0,49 %	1.970.122.400	0,53 %	2.138.735.240	0,57 %	2.324.209.364	0,62 %	2.528.230.900	0,62%	10.778.135.904	Dinsos P3A	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>rehabilitasi dan jaminan sosial</i>																
<b>PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>	<i>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial</i>	Persentase	0,37%	0,37 %	820.980.000	0,40 %	873.480.000	0,45 %	931.230.000	0,50 %	994.755.000	0,55 %	1.064.632.500	0,55%	4.685.077.500		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>TENAGA KERJA</b>																	
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<i>Persentase peningkatan kesempatan kerja</i>	%	73,80%	75,40 %	1.058.745.150	76,20 %	1.258.745.150	77,00 %	1.458.745.150	77,80 %	1.658.745.150	78,60 %	1.858.745.150	78,60 %	7.293.725.750		
<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja</b>	<i>Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.</i>	%	64,00%	65,80 %	322.572.600	66,70 %	347.572.600	67,60 %	372.572.600	68,50 %	397.572.600	69,30 %	422.572.600	69,30 %	1.862.863.000		
<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan</i>	%	80,00%	80,00 %	400.000.000	80,00 %	400.000.000	80,00 %	400.000.000	80,00 %	400.000.000	80,00 %	400.000.000	80,00 %	2.000.000.000		
																	<b>Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja</b>

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																	
Pemberdayaan Perempuan	<i>Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)</i>	Persentase	48	48	648.240.764	49	713.064.840	50	784.371.324	51	862.808.457	52	949.089.303	52	3.957.574.688	Dinsos P3A	
Perlindungan Perempuan dan Anak	<i>Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak</i>	Persentase	100	100	449.118.420	100	494.030.262	100	543.433.288	100	597.776.617	100	657.554.279	100	2.741.912.866		
	<i>Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak</i>	Persentase	30	30		30		30		30		30					
Pembinaan Lingkungan Sosial	<i>Persentase peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan</i>	Persentase		20,89	161.247.500	20,89	177.372.250	20,89	195.109.475	20,89	214.620.423	20,89	236.082.465		984.432.112		
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	78,21	78,5	2.204.294.446	79	2.771.943.900	79,55	2.864.398.350	80,11	2.964.023.250	81	3.071.482.350	81	13.876.142.296	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
	2. Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100				
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el	orang	168.126	169.000	1.452.935.500	169.500	1.819.085.500	170.000	1.466.135.500	170.500	1.327.885.500	171.000	1.951.635.500	171.000	8.017.677.500	Dispenduk capil
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	KK	78.232	79.000		80.000		81.000		82.000		83.000				
	Jumlah Penduduk Pindah Datang yang diData	orang	2.184	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100				
Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	anak	66.548	69622	720.540.000	72182	730.310.000	74622	744.080.000	76725	761.850.000	79255	773.620.000	79255	3.730.400.000	
	Jumlah Penduduk Meninggal	orang	1.347	1350		1355		1400		1425		1450				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>yang Memiliki Akte Kematian</i>																
	<i>Jumlah Penduduk Yang Dilayani Pencatatan Peristiwa Penting</i>	orang	6.814	6702		6764		6887		6982		7077		7077			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	<i>Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pembangunan Daerah</i>	%	100	100	1.063.975.000	100	911.900.000	100	997.750.000	100	1.092.150.000	100	1.197.350.000	100	5.263.125.000		
	<i>Persentase Jaringan SIAK Dalam Kondisi Baik</i>	%	100	100		100		100		100		100		100			
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																	
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif</i>	%	100	100	50.168.986.182	100	53.919.178.389	100	58.041.789.817	100	62.574.162.388	100	66.258.092.671	100	290.962.209.447		Seluruh Kecamatan
Program Keberdayaan Masyarakat	<i>Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi</i>	Persentase	90	90	200.000.000	90	250.000.000	90	275.000.000	90	302.500.000	90	332.750.000	90	1.360.250.000		Dinsos P3A

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</i>																
<b>KETAHANAN PANGAN</b>																	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<i>Rasio ketersediaan pangan</i>	skor	51	54	1.160.000.000	57	1.300.000.000	60,000	1.425.000.000	63	1.550.000.000	66	1.675.000.000	66	7.110.000.000	<b>Disperta, KP dan Perikanan</b>	
	<i>Persentase Peningkatan pemanfaatan pangan</i>	%	7%	7%		7%		7%		7%		7%		7%			7%
<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<i>Persentase Peningkatan Kelompok Olahan Pangan yang Difasilitasi</i>	%	10	50%	365.000.000	30%	440.000.000	30%	485.000.000	20%	535.000.000	20%	625.000.000	20%	2.450.000.000		
<b>PERTANAHAN</b>																	
<b>Penyelenggara an Pertanahan</b>	<i>Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan</i>	%	90%	91%	300.000.000	92%	350.000.000	92%	375.000.000	94%	400.000.000	95%	425.000.000	95%	1.850.000.000	<b>Dinas PUPR Perkim</b>	
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<i>Persentase Mutu Air dan Udara dengan kualitas baik</i>	%	94%	94%	3.045.605.350	95%	3.300.165.885	96%	3.575.182.474	97%	3.922.700.721	98%	4.294.970.793	98%	18.138.625.222	<b>DLH</b>	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perlindungan dan Konservasi RTH dan Sumber Daya Alam	Persentase Tutupan Lahan Publik	%	7	20	4.011.236.725	20	4.412.360.398	20	4.853.596.437	20	5.338.956.081	20	5.872.851.689	20	24.489.001.330	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terlayani	%	75	80	10.592.058.352	80	11.621.264.187	82	12.751.890.605	82	13.994.004.666	85	15.358.676.383	85	64.317.894.192	
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat yang ikut berperan aktif dalam Pengelolaan Lingkungan	Orang	4.821	5.466	705.937.650	5.716	776.531.415	6.316	854.184.557	6.566	939.603.012	6.816	1.033.563.313	6.816	4.309.819.947	
<b>PERHUBUNGAN</b>																
Program Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	%	0	20,00	9.400.000.000	20,00	11.525.000.000	20,00	13.750.000.000	20,00	16.225.000.000	20,00	19.350.000.000	20,00	70.250.000.000	Dinas Perhubungan
	Jumlah Pelanggaran Trayek Angkutan Jalan	unit	51	41,00		31,00		21,00		11,00		0,00		0,00		
	Jumlah Kendaraan Bermotor yang	unit	8692	8742,00		8792,00		8842,00		8892,00		8942,00		8942,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>Lulus Uji KIR</i>																
Program Pengembangan Transportasi	<i>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal</i>	%	50	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00					
	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan</i>	%	0	20,00	11.050.000.000	20,00	12.650.000.000	20,00	14.250.000.000	20,00	15.850.000.000	20,00	17.450.000.000			71.250.000.000	
	<i>Persentase penurunan Jumlah Pelanggaran Kapal &lt;7GT</i>	%	12	2,00		2,00		2,00		3,00		3,00					
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																	
Program Pengelolaan Informasi Publik	<i>Persentase permohonan informasi yang dipenuhi</i>	%	100%	100%	1.310.740.000	100%	1.325.000.000	100%	1.405.000.000	100%	1.460.000.000	100%	1.540.000.000	100%		7.040.740.000	Diskominfo
Program Pengelolaan Komunikasi Publik	<i>Persentase media komunikasi yang dikelola</i>	%	90%	90%	2.842.375.000	90%	2.905.000.000	90%	2.975.000.000	90%	3.030.000.000	90%	3.135.000.000	90%		14.887.375.000	
Program Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<i>Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi</i>	%	90%	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000	90%		21.773.750.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengelolaan e-Government	Persentase PD yang menerapkan Layanan Berbasis elektronik	%	35,00%	38,50 %	1.965.925.000	41,00 %	1.967.500.000	43,60 %	1.977.500.000	46,20 %	1.977.500.000	48,70 %	1.982.500.000	48,70 %	9.870.925.000	
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase informasi kegiatan bidang cukai yang disampaikan	%	50%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.000.000.000	
<b>STATISTIK</b>																
Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Persentase release data statistik tepat waktu	%	75,00%	75,00 %	800.000.000	75,00 %	800.000.000	80,00 %	800.000.000	80,00 %	800.000.000	85,00 %	800.000.000	85,00 %	4.000.000.000	Diskominfo
<b>PERSANDIAN</b>																
Program Peningkatan Pengelolaan Persandian	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan	%	16,67%	25,00 %	400.000.000	33,33 %	450.000.000	41,67 %	500.000.000	50,00 %	550.000.000	58,33 %	600.000.000	58,33 %	2.500.000.000	Diskominfo
<b>KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>																
Program Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	78%	80%	1.205.000.000	80%	1.325.400.000	80%	1.468.232.000	80%	1.603.690.560	80%	1.741.985.805	80%	7.344.308.365	DKUPP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Kenaikan Omzet Usaha Mikro yang Difasilitasi	%	15%	15%	1.894.360.000	15%	1.989.078.000	15%	2.088.531.900	15%	2.192.958.495	15%	2.302.606.420	15%	10.467.534.815	
<b>PENANAMAN MODAL</b>																
Program Peningkatan Penanaman Modal	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan	%	100,00 %	1,20 %	1.624.727.250	1,30 %	1.394.351.000	1,40 %	1.403.405.000	1,50 %	1.410.405.000	1,60 %	1.417.405.000	1,60%	7.250.293.250	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu	%	8912%	93%	663.226.000	93%	692.000.000	93%	693.000.000	93%	694.000.000	93%	695.000.000	93%	3.437.226.000	
<b>KEBUDAYAAN</b>																
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Cakupan budaya lokal yang dilestarikan	cakupan	15	15	2.022.479.000	20	2.224.726.900	21	2.447.199.590	21	2.691.919.549	23	2.961.111.504	23	12.347.436.543	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>PERPUSTAKAAN</b>																
Program Pengelolaan Perpustakaan	IKM Layanan Perpustakaan	Indeks	74,67	76,00	517.000.000	77,00	544.000.000	78,00	571.500.000	79,00	602.825.000	80,00	638.264.500	80,00	2.873.589.500	Disperpusip
Program Pembinaan	Persentase perpustakaan	%	87,25%	87,25 %	211.375.000	89,00 %	216.054.000	91,00 %	221.000.000	93,00 %	231.000.000	95,00 %	241.000.000	95,00 %	1.120.429.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
dan Masyarakat Perustakaan	dan taman bacaan yang dibina																
	Persentase peningkatan sasaran masyarakat perustakaan	%	75,55%	75,55 %		79,00 %		84,00 %		89,00 %		94,00 %		94,00 %			
<b>KEARSIPAN</b>																	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola	%	11,28%	23,00 %	265.463.100	7,88 %	283.047.500	8,65 %	305.000.000	9,10 %	323.000.000	9,95 %	342.000.000	9,95%	1.518.510.600		
Program Pembinaan dan Masyarakat Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standart	%	75,00%	75,00 %	118.082.450	80,00 %	114.000.000	85,00 %	120.000.000	90,00 %	126.000.000	95,00 %	132.000.000	95,00 %	610.082.450	Disperpusip	
	Persentase peningkatan sasaran masyarakat kearsipan	%	66,66%	66,66 %	22.123.000	68,00 %	24.000.000	70,00 %	26.000.000	75,00 %	28.000.000	80,00 %	30.000.000	80,00 %	130.123.000		
<b>PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>																	
PROGRAM PENINGKATAN MUTU KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGA	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga yang dibina	%	60	60,5	5.266.150.850	60,75	5.735.265.935	61	6.251.292.529	61,25	6.818.921.781	61,5	7.443.313.959	61,5	31.514.945.054	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
AN																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
<b>PERIKANAN</b>																	
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1	1	2.770.000.000	1	3.341.000.000	1	3.865.000.000	1	4.413.000.000	1	5.005.000.000	1	19.394.000.000	Disperta, KP dan Perikanan	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan dibidang perikanan	%	20%	20%	480.000.000	25%	540.000.000	33%	600.000.000	40%	660.000.000	46%	720.000.000	46%	3.000.000.000		
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	-14,84%	1%	1.450.000.000	1%	1.660.000.000	1%	1.900.000.000	1%	2.090.000.000	1%	2.300.000.000	5%	9.400.000.000		
Program Pengembangan Usaha Perikanan	Nilai Tambah Produk Perikanan	Rp/Kg	27.000	27.200	2.000.000.000	27.400	2.130.000.000	27.600	2.190.000.000	27.800	2.250.000.000	28.000	2.350.000.000	28.000	10.920.000.000		
<b>PARIWISATA</b>																	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,	Persentase destinasi wisata yang berkembang	%	11%	11%	5.765.000.000	11%	5.975.000.000	11%	6.085.000.000	11%	6.795.000.000	11%	6.920.000.000	11%	31.540.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Industri Pariwisata yang berkembang	%	1%	1%		1%		1%		1%		1%		1%			
	Persentase Komunitas ekonomi kreatif yang berkembang	%	10%	10%		10%		10%		10%		10%		10%			
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pemasaran pariwisata	kali	14	3	1.700.000.000	3	2.025.000.000	3	2.350.000.000	3	2.650.000.000	3	2.915.000.000	15	11.640.000.000		
<b>PERTANIAN</b>																	
Pengembangan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ton/Ha	Tanaman Pangan 13,76	13,84 (0,58 %)	3.725.500.000	13,9 (0,43 %)	3.775.000.000	13,96 (0,43 %)	4.300.000.000	14,02 (0,43 %)	4.325.000.000	14,28 (1,85 %)	4.350.000.000	14,28 (1,85 %)	20.475.500.000		
			Hortikultura 9,49	9,5 (0,11 %)		9,51 (0,11 %)		9,52 (0,11 %)		9,53 (0,11 %)		9,54 (0,10 %)					
			Perkebunan 89,30	92,5 (3,58 %)		93 (0,54 %)		94 (1,08 %)		95 (1,06 %)		96,4 (1,4%)					
Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan	%	1%	1%	460.000.000	1%	475.000.000	1%	490.000.000	1%	505.000.000	1%	520.000.000	1%	2.450.000.000		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Perkebunan																
Pengembangan Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Ternak																
	- Sapi Potong	%	2	2		2		2		2		2		2			
	- Sapi Perah	%	1	1	2.056.000.000	1	2.166.200.000	1	2.274.510.000	1	2.388.235.000	1	2.507.646.050	1	11.392.591.050		
	- Kambing	%	1	1		1		1		1		1		1			
	- Domba	%	1	1		1		1		1		1		1			
- Ayam Buras	%	2	2		2		2		2		2		2				
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Peternakan	%	100%	100%	952.000.000	100%	1.086.500.000	100%	1.241.900.000	100%	1.421.920.000	100%	1.629.988.000	100%	6.332.308.000		
Pembinaan Lingkungan Sosial	Peningkatan Kelompok Pelaku Usaha Peternakan	Kelompok	-	100%	638.500.000	100%	708.465.000	100%	825.162.750	100%	961.451.000	100%	1.120.690.000	100%	4.254.268.750		
	Peningkatan Produk Olahan Pangan Asal Hewan	Produk	-	100%		100%		100%		100%							
PERDAGANGAN																	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Volume Perdagangan	Pcs	605.418	605.418	8.103.180.388	605.418	9.811.839.407	605.418	10.399.931.378	605.418	11.007.427.947	605.418	11.735.299.344	605.418	51.057.678.464	DKUPP
PERINDUSTRIAN																
Program Pengembangan Industri	Persentase Pengembangan IKM	%	4%	4%	1.123.000.000	4%	1.179.150.000	4%	1.238.107.500	4%	1.300.012.875	4%	1.365.013.520	4%	6.205.283.895	DKUPP
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Embrio industri kecil yang mendapatkan pembinaan	%	10%	10%	350.000.000	10%	350.000.000	10%	350.000.000	10%	350.000.000	10%	350.000.000	10%	1.750.000.000	
UNSUR STAFF																
SEKRETARIAT DAERAH																
Program Dukungan Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan yang ditetapkan di bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	84%	84%	1.191.939.927	85%	1.406.955.916	86%	1.477.303.712	87%	1.551.168.897	88%	1.628.727.342	88%	7.256.095.794	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESRA
Program Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100%	100%	1.262.500.000	100%	1.508.749.000	100%	1.584.186.450	100%	1.663.395.773	100%	1.746.565.561	100%	7.765.396.784	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Pelayanan Bidang Hukum	<i>Persentase Produk dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas</i>	Persen	100%	100%	1.350.000.000	100%	1.485.000.000	100%	1.559.250.000	100%	1.637.212.500	100%	1.719.073.125	100%	7.750.535.625	SEKRETARIA T DAERAH BAGIAN HUKUM
	<i>Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani</i>		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	<i>Persentase capaian kinerja program</i>	Persen	100%	100%	8.025.815.000	100%	8.427.105.750	100%	8.848.461.038	100%	9.290.884.089	100%	9.755.428.294	100%	44.347.694.171	SEKRETARIA T DAERAH BAGIAN UMUM
Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	<i>Persentase Capaian Kinerja Program</i>	Persen	100%	100%	10.320.512.452	100%	10.966.186.243	100%	11.514.495.555	100%	12.090.220.333	100%	12.694.731.350	100%	57.586.145.934	SEKRETARIA T DAERAH BAGIAN KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase PD yang memenuhi data Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku</i>	Persen	100%	100%	1.461.903.000	100%	1.534.998.150	100%	1.611.748.058	100%	1.692.335.460	100%	1.776.952.233	100%	8.077.936.901	SEKRETARIA T DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN
Program Peningkatan Kapasitas Birokrasi	<i>Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan</i>	Persen	80%	100%	580.285.000	100%	609.299.250	100%	639.764.213	100%	671.752.423	100%	705.340.044	85%	3.206.440.930	SEKRETARIA T DAERAH BAGIAN ORGANISASI

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Perangkat Daerah	<i>efisien</i>																
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik sesuai peraturan perundang undangan</i>	Persen	100%	100%	459.803.750	100%	505.784.125	100%	531.073.331	100%	557.626.998	100%	585.508.348	100%	2.639.796.552		
Program Pengendalian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	<i>Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang dimanfaatkan</i>	Persen	80%	80%	1.426.250.000	81%	1.568.875.000	83%	1.647.318.750	86%	1.729.684.688	89%	1.816.168.922	89%	8.188.297.359		SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN SUMBER DAYA ALAM
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	<i>Persentase capaian pelaksanaan kegiatan bidang cukai diatas 80%</i>	Persen	80%	80%	375.000.000	81%	412.500.000	83%	453.750.000	86%	499.125.000	89%	549.037.500	89%	2.289.412.500		
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																	
Program Peningkatan Daya Dukung Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	<i>Indeks Kepuasan Anggota DPRD</i>	Indeks	73 Indeks	70 Indeks	7.000.000.000	71 Indeks	7.400.000.000	72 Indeks	7.900.000.000	73 Indeks	8.300.000.000	74 Indeks	8.800.000.000	74 Indeks	39.400.000.000		Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>FUNGSI PENGAWASAN</b>																
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah	%	83%	85%	1.600.850.568	87%	1.760.935.625	89%	1.811.796.011	91%	1.992.976.392	93%	2.192.274.140	93%	9.358.832.736	Inspektorat
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	%	61%	65%	268.206.620	74%	295.027.282	83%	324.530.010	92%	356.983.011	100%	392.681.312	100%	1.637.428.235	
Program Penguatan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinisi"	%	30%	35%	1.258.517.190	45%	1.384.368.909	55%	1.385.106.965	65%	1.523.617.662	75%	1.675.979.428	75%	7.227.590.154	
<b>FUNGSI PENUNJANG</b>																
<b>PERENCANAAN</b>																
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Persen	80%	80%	820.717.000	85%	769.238.000	90%	807.699.750	95%	963.438.750	100%	1.169.464.250	100%	4.530.557.750	Bappeda Litbang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase PERANGKAT DAERAH lingkup bidang	Persen	100%	100%	551.680.000	100%	579.264.100	100%	608.227.355	100%	638.638.723	100%	670.570.659	100%	3.048.380.837	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>ekonomi yang menyusun dokumen berkualitas baik</i>																
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase PERANGKAT DAERAH lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menyusun dokumen berkualitas baik</i>	Persen	100%	100%	1.422.112.500	100%	1.493.217.600	100%	1.567.878.500	100%	1.646.273.200	100%	1.728.586.500	100%	7.858.068.300		
Program Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase PERANGKAT DAERAH lingkup bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat</i>	Persen	80%	80%	1.231.389.600	85%	1.292.959.000	90%	1.331.387.000	95%	1.371.212.000	100%	1.412.493.000	100%	6.639.440.600		
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																	
Program Penelitian dan Pengembangan	<i>Persentase hasil penelitian yang dikembangkan yang menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah</i>	Persen	66%	66%	1.391.998.500	75%	1.461.598.500	80%	1.534.678.500	85%	1.611.413.000	90%	1.691.983.500	90%	7.691.672.000	Bappeda Litbang	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KEUANGAN</b>																
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	10,97	11	1.215.391.000	11,55	1.215.391.000	11,85	1.215.391.000	12	1.215.391.000	12,55	1.215.391.000	12,55	6.076.955.000	BPPKAD
Peningkatan Penerimaan PBB & BPHTB	Persentase Peningkatan PBB dan BPHTB	%	4,65	4,76	1.597.325.500	4,76	1.597.325.500	4,76	1.597.325.500	4,76	1.597.325.500	5	1.597.325.500	5	7.986.627.500	
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	%	84	85	2.259.825.500	90	2.259.825.500	92	2.259.825.500	94	2.259.825.500	97	2.259.825.500	97	11.299.127.500	
Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Yang Terkendali	%	75	77	1.445.500.000	81	1.477.500.000	86	1.490.500.000	89	1.505.000.000	93	1.525.000.000	93	7.443.500.000	
Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas	%	20	20	1.550.000.000	40	1.550.000.000	60	1.550.000.000	80	1.550.000.000	100	1.550.000.000	100	7.750.000.000	
Perencanaan Anggaran Daerah	Persentase Perencanaan Anggaran PERANGKAT DAERAH yang berkualitas	%	75	77	3.420.926.000	82	3.420.926.000	90	3.420.926.000	95	3.420.926.000	100	3.420.926.000	100	17.104.630.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>RUTIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>																	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	85%	90%	5.892.389.300	90%	6.426.750.000	95%	6.977.125.000	95%	7.575.627.500	95%	8.204.666.250	95%	35.076.558.050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	76,11%	100%	3.888.872.322	100%	4.481.323.364	100%	4.974.405.701	100%	5.523.346.271	100%	6.122.730.898	100%	24.990.678.555	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	80%	80%	6.984.419.328	80%	10.075.243.959	80%	11.082.768.354	80%	12.191.045.188	80%	13.411.249.705	80%	53.744.726.534	Dinas PUPR Perkim	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	93%	93%	5.882.758.057	93%	5.882.758.057	93%	3.631.821.000	93%	3.591.821.000	93%	3.651.821.000	93%	22.640.979.114	Satpol PP	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	80%	80%	1.605.000.000	80%	1.820.000.000	80%	2.035.000.000	80%	2.255.000.000	80%	2.420.000.000	80%	10.135.000.000	BPBD	
Program Peningkatan Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	%	92%	85%	2.154.156.000	85%	2.369.571.600	85%	2.606.528.760	85%	2.867.181.636	85%	3.153.899.800	92%	13.151.337.796	Dinsos P3A	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Program																
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	95%	100%	4.461.011.476	100%	4.998.111.476	100%	6.473.321.026	100%	5.392.511.476	100%	5.525.011.476	100%	26.849.966.930		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	100%	100%	3.026.800.000	100%	2.225.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.375.000.000	100%	2.450.000.000	100%	12.376.800.000		Dispendukcap il
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	80%	84%	2.905.000.000	88%	3.085.000.000	92%	3.535.000.000	96%	3.785.000.000	100%	4.055.000.000	100%	17.365.000.000		Dishub
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	93%	89%	2.170.358.000	89%	2.285.000.000	89%	2.400.000.000	89%	2.535.000.000	89%	2.640.000.000	89%	12.030.358.000		Diskominfo
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	80%	91%	3.411.200.000	82%	3.568.200.000	83%	3.725.200.000	84%	3.882.200.000	85%	4.039.200.000	85%	18.626.000.000		DKUPP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	95%	95%	5.367.577.000	95%	5.639.334.000	95%	5.934.269.000	95%	6.254.695.000	95%	6.613.165.000	95%	29.809.040.000	Disperta, KP dan Perikanan
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	80%	84%	3.225.217.600	85%	3.393.495.520	86%	3.408.932.997	87%	3.757.924.172	87%	3.959.153.019	87%	17.744.723.308	DLH
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	78%	80%	2.745.000.000	85%	3.017.000.000	85%	3.211.200.000	87%	3.529.820.000	88%	3.830.302.000	88%	16.333.322.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	90%	90%	1.592.000.000	90%	1.560.000.000	90%	1.675.000.000	90%	1.840.000.000	90%	2.020.000.000	90%	8.687.000.000	Disperussip
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100%	100%	10.320.512.452	100%	10.966.186.243	100%	11.514.495.555	100%	12.090.220.333	100%	12.694.731.350	100%	57.586.145.934	SEKRETARIA T DAERAH BAGIAN KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan	Persentase Capaian Kinerja Program	%		80%	4.301.340.750	80%	4.516.408.500	85%	4.742.229.500	85%	4.979.341.500	90%	5.228.308.500	90%	19.704.496.000	Bappeda Litbang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Aparatur Pemerintah	Minimal 80%																
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	87%	91%	1.223.284.846	93%	1.345.613.331	94%	1.464.735.064	96%	1.611.664.344	97.5	1.772.830.779	98%	7.418.128.363	Inspektorat	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program	%	78%	80%	18.350.000.000	81%	19.370.000.000	82%	20.490.000.000	83%	21.710.000.000	84%	22.930.000.000	84%	102.850.000.000	Sekretariat DPRD	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	77,78%	78%	2.785.239.700	80%	3.150.000.000	82%	3.475.000.000	83%	3.790.000.000	84%	4.110.000.000	84%	17.310.239.700	BKPSDM	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90%	100%	30.817.554.750	100%	30.842.554.750	100%	30.867.554.750	100%	30.892.554.750	100%	30.917.554.750	100%	160.810.250.000	BPPKAD	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90%	95%	1.312.011.000	100%	1.218.500.700	100%	1.279.387.600	100%	1.343.994.500	100%	1.411.234.500	100%	7.028.574.300	Bakesbangpol	
Program Peningkatan	Persentase Capaian	%	100%	100%	2.053.000.000	100%	2.258.000.000	100%	2.483.000.000	100%	2.731.000.000	100%	3.005.000.000	100%	12.530.000.000	Kecamatan Kademangan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	<i>Kinerja Program</i>																
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	<i>Persentase Capaian Kinerja Program</i>	%	98%	98%	1.924.231.916	98%	2.203.508.399	99%	2.523.740.523	99%	2.890.978.052	99%	3.312.168.856	99%	12.854.627.746	Kecamatan Kanigaran	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	<i>Persentase Capaian Kinerja Program</i>	%	99%	99%	1.363.597.550	100%	1.431.777.428	100%	1.503.366.299	100%	1.578.534.614	100%	1.657.461.345	100%	7.534.737.235	Kecamatan Kedopok	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	<i>Persentase Capaian Kinerja Program</i>	%	100%	100%	1.650.000.000	100%	1.725.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.875.000.000	100%	1.950.000.000	100%	9.000.000.000	Kecamatan Mayangan	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	<i>Persentase Capaian Kinerja Program</i>	%	99%	99%	1.485.090.129	100%	1.633.599.142	100%	1.796.959.056	100%	1.976.654.962	100%	2.174.320.458	100%	9.066.623.747	Kecamatan Wonoasih	
<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>																	
Program Pengelolaan Formasi, Informasi dan Mutasi	<i>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Ditempatkan sesuai dengan</i>	Persen	84.94	86	2.538.000.000	87	2.746.800.000	88	2.964.600.000	89	3.129.000.000	90	3.301.700.000	90	14.680.100.000	BKPSDM	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Pegawai	<i>Profil Jabatan</i>																
	<i>Persentase Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terpenuhi sesuai ketentuan</i>	Persen	89	90		91		92		93		94		94			
Program Pembinaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai	<i>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Lulus Pengembangan Kompetensi</i>	Persen	98,66	90		90		95		95		98		98			
	<i>Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara</i>	Persen	-20	10	4.207.078.000	10	4.426.900.000	10	4.744.400.000	10	4.540.650.000	10	4.550.000.000	10	22.469.028.000		
	<i>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Telah Memenuhi Target Kinerja</i>	Persen	0	90		93		95		97		100		100			
Penunjang Lain																	
Program Pengembangan Politik dalam Negeri dan	<i>Persentase lembaga politik dan organisasi</i>	Persen	80%	83%	638.400.000	85%	696.000.000	85%	763.000.000	87%	825.000.000	90%	885.000.000	90%	3.807.400.000	Bakesbangpol	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja dan Anggaran												PERANGKAT DAERAH	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Organisasi Masyarakat	<i>kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan</i>																
Program Peningkatan Kesatuan Bangsa	<i>Persentase potensi konflik sosial yang tidak menjadi konflik terbuka</i>	Persen	100%	100%	2.376.551.000	100%	2.614.206.100	100%	2.875.626.710	100%	3.163.189.381	100%	3.479.508.319	100%	14.509.081.510		
<b>FUNGSI Koordinasi</b>																	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	<i>Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan</i>	Persen	100%	100%	6.164.732.200	100%	6.662.399.420	100%	7.199.708.012	100%	7.781.071.886	100%	8.410.167.840	100%	36.218.079.358		Seluruh Kecamatan
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	<i>Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan</i>	Persen	100%	100%	5.747.895.460	100%	6.234.788.666	100%	6.759.000.776	100%	7.197.492.278	100%	7.933.018.753	100%	33.872.195.932		Seluruh Kecamatan

Berdasarkan Program Perangkat Daerah tahun 2020-2024 maka akan dibagi menjadi 3 prioritas yaitu Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Program Prioritas II merupakan program dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Walikota terpilih yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Prioritas III merupakan program ditingkat PERANGKAT DAERAH yang merupakan program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. berikut disajikan program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kota Probolinggo yang disajikan berdasarkan prioritas program:

**Tabel 7. 2. Pembagian Anggaran Program Berdasarkan Prioritas Pembangunan**

Uraian	Proyeksi				
	2020	2021	2022	2023	2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>799.292.703.862,50</b>	<b>849.477.578.845,33</b>	<b>901.924.465.685,73</b>	<b>977.804.205.437,17</b>	<b>1.040.713.083.285,02</b>
Prioritas I	567.194.147.418,50	597.557.601.691,55	631.365.244.767,43	687.509.998.921,32	729.134.044.268,03
Prioritas II	185.782.301.451,00	201.502.054.025,79	216.564.973.843,30	232.709.547.621,69	250.073.919.572,52
Prioritas III	46.316.254.993,00	50.417.923.128,00	53.994.247.075,00	57.584.658.894,16	61.505.119.444,47

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota pada periode akhir masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (*Impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya misi pembangunan daerah yang berarti juga misi dari Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatannya.

Sejajar dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 8. 1 Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Probolinggo**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,94	5,99	6,02	6,05	6,07	6,1	6,1
2	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,53	73,59	74,09	74,59	75,09	75,59	75,59
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	7,2	7,1	7,05	7	6,95	6,9	6,9
4	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	69,59	71,28	72,46	73,69	75,74	77,09	77,09
5	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,51	59,11	59,6	59,98	60,3	60,65	60,65
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,71	71	73	76	78	81	81

**Tabel 8. 2 Target Kinerja Indikator Kinerja Daerah Kota Probolinggo**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>A</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	%	10,06	10,46	10,86	11,26	11,66	12,06	12,06
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	%	7,74	8,04	8,34	8,64	8,94	9,24	9,24
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>A</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>								
	<b>Pendidikan</b>								
3	Indeks Pendidikan	Indeks	0,66	0,69	0,69	0,7	0,71	0,72	0,72
	<b>Kesehatan</b>								
4	Indeks Kesehatan	Indeks	0,77	0,77	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79
<b>B</b>	<b>Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>								
	<b>Pekerjaan Umum</b>								
5	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	%	69,21	70,45	71,38	72,59	75,04	75,78	75,78
6	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	%	69,96	72,1	73,55	74,8	76,45	78,4	78,4
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>								
7	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	%	2	2	2	2	2	2	10
<b>C</b>	<b>Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>								
	<b>Tenaga Kerja</b>								
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,64	3,47	3,3	3,13	2,96	2,79	2,79
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
9	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67,76	68,55	68,95	69,35	69,75	70,15	70,15
	<b>Sosial</b>								
10	Persentase PMKS	%	31,17%	31,03%	29,43%	27,79%	26,63%	24,85%	24,85%
	<b>Ketahanan Pangan</b>								
11	Skor Pola Harapan Pangan	Skor	90,15	91,1	91,4	91,7	92	92,3	92,3
	<b>Penanaman Modal</b>								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
12	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	-12	0,5	0,7	0,9	1	1,2	1,2
<b>Lingkungan Hidup</b>									
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	50,8	51	51,5	51,8	52	52
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,77	84,9	85	85,1	85,2	85,5	85,5
15	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	40,2	46	47	47,5	48	48,5	48,5
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	148	147	145	143	140	138	138
<b>D Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pendukung</b>									
17	Nilai Sakip	Skor	70,49	80	82	83	84	85	85
18	Nilai LPPD	Skor	N/A	3,25	3,25	3,26	3,26	3,27	3,27
19	Indeks SPBE	Indeks	2,53	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4
20	Opini BPK Terhadap LKPD	Peringkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	62	63	63,5	64	64,5	65	65
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,5	82	82,25	82,5	82,75	83	83

**Tabel 8. 3 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024**

NO	Indikator	Satuan	Definisi / Rumus
1	2	3	4
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$\frac{PDRB_{(t)} - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$ <p>Dimana:  <math>t</math> = tahun pengamatan (tahun ini)  <math>t-1</math> = satu tahun sebelumnya</p>
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	<p>Sebuah indikator kesejahteraan yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Rumus penghitungan IPM sebagai berikut.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	<p>Persentase umlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah total penduduk.</p> <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>a = 0</math></li> <li><math>z</math> = garis kemiskinan.</li> <li><math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1, 2, 3, \dots, q</math>), <math>y_i &lt; z</math></li> <li><math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</li> <li><math>n</math> = jumlah penduduk.</li> </ul>
4	Indeks Infrastruktur	Indeks	<p>Indeks Infrastruktur dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik dari 8 komponen indeks pembentuknya, yakni sebagai berikut:</p>

NO	Indikator	Satuan	Definisi / Rumus
			$\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{IJJ + IAU + IAB + IAL + IID + IKI + IFP + IIMB}{8}$ <p>           IJJ = Indeks Jaringan Jalan            IAU = Indeks Angkutan Umum            IAB = Indeks Air Bersih            IAL = Indeks Air Limbah            IID = Indeks Irigasi dan Drainase            IKI = Indeks Komunikasi dan Infromasi            IFP = Indeks Fasilitas Publik            IIMB = Indeks Ijin Mendirikan Bangunan         </p>
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$\text{Indeks kualitas lingkungan hidup} = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>Dimana            IPA = Indeks pencemaran air sungai            IPU = Indeks pencemaran udara            ITH = Indeks tutupan hutan</p>
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	<p>Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN &amp; RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Masing-masing komponen mempunyai nilai bobot. Adapun Komponen Pengungkit mencakup Area :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manajemen Perubahan (Bobot 5)</li> <li>Penataan Peraturan Peundang-undangan (Bobot 5)</li> <li>Penataan dan Penguatan Organisasi (Bobot 6)</li> <li>Penataan Tata Laksana (Bobot 5)</li> </ol>

NO	Indikator	Satuan	Definisi / Rumus
			e. Penataan Sistem Manajemen SDM (Bobot 15) f. Penguatan Akuntabilitas (Bobot 6) g. Penguatan Pengawasan (Bobot 12) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 6)  Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Probolinggo lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

#### **9.1 PEDOMAN TRANSISI**

Dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2019 hingga tahun 2024. Setelah berakhirnya RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, perlu disusun RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2024-2029 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024 akan mendasarkan pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2026-2046, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Selain itu, transisi RPJMD pada tahun 2024 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2024-2029.

Pada RPJMD tahun 2024, khususnya target capaian pada tahun 2024 masih menggunakan RPJMD Kots Probolinggo Tahun 2019-2024.

## **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Probolinggo serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Wali Kota Probolinggo berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;

- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini;
- f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap PERANGKAT DAERAH di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo.
- g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

### **9.3 PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2019-2024 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019-2024, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kota Probolinggo dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2019 serta bagi lembaga DPRD Kota Probolinggo dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Pemerintah Kota Probolinggo bersama dengan DPRD Kota Probolinggo bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kota Probolinggo ini dan RKPD Kota Probolinggo 2019-2024 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah (RPJMD)

**KOTA PROBOLINGGO**

Tahun 2019-2024